



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIC INDONESIA**

**RISALAH FIT AND PROPER TEST  
CALON ANGGOTA BPK RI**

Tahun Sidang	: 2019-2020
Masa Persidangan	: I
Rapat ke-	:
Jenis Rapat	: Fit and Proper Test
Dengan	: Calon Anggota BPK RI
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari, Tanggal	: Senin, 23 September 2019
Waktu	: 09.00 WIB s.d 22.25 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Komisi XI DPR RI Gedung Nusantara I
Ketua Rapat	: 1. Ir. H. Soepriyatno/F-GERINDRA 2. Juliari P Batubara/F-PDIP 3. Ir. H. Achmad Hafisz TOHIR/F-PAN 4. Ir. H. Marwan Cik Asan, M.M./F-PD
Sekretaris Rapat	: Drs. Urip Soedjarwono
Acara	: Fit and Proper Test Calon Anggota BPK RI
Hadir	: <b>Calon Anggota BPK RI</b> 1. PROF. DR. H. EDDY SURATMAN, S.E., M.A. 2. DENNY SURANDHI, S.E. 3. EDHI MULYONO, S.E., M.M., Akt. 4. Dr. DACHAMER MUNTE, S.H., M.H. 5. Dr. BLUCE WELINGTON RAJAGUKGUK, M.Sc., S.E., S.H., Ak. 6. Dr. SHOHIBUL IMAM, C.A., C.P.A. 7. WISNUNTORO 8. Drs. H. AKHMAD MUQOWAM 9. Dr. Ir. EDDY S. PRATAKUSUMA, B.E. 10. ARRI WIDIATMOKO, Ak., S.H., C.A. 11. Dr. SOEMARDJIJO, S.E., Ak., C.A. 12. Ir. YVES S. PALAMBANG 13. M. SOFIE ABDUL HASAN 14. Dr. MARALUS PENGGABEAN, S.E., S.H., M.Sc. 15. DEFA AULIA FARHAN, S.E., AK., C.A., C.P.A.):

## **JALANNYA RAPAT:**

### **KETUA RAPAT (Ir. H. SOEPRİYATNO/F. P. GERINDRA):**

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,*  
**Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua.**

**Yang terhormat saudara Prof. Dr. H. Eddy Suratman, S.E., M.A.**

Menurut catatan yang kami terima dari Sekretariat daftar hadir rapat telah ditandatangani oleh 6 Fraksi, sehingga berdasarkan Pasal 251, ijin kami membuak Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi XI DPR RI dengan Calon Anggota BPK RI dan dinyatakan terbuka untuk umum.

### **(RAPAT DIBUKA PUKUL 09.00 WIB)**

Mengawali Rapat Dengar Pendapat Umum ini, marilah kita bersama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena berkat rahmat, hidayah dan karunia-Nya pada hari ini kita dapat menyelenggarakan acara Rapat Dengar Pendapat Umum dalam keadaan sehat walafiat. Semoga hal-hal yang akan kita bicarakan pada hari ini dapat bermanfaat bagi bangsa dan negara.

Rapat Dengar Pendapat Umum kita pada hari ini adalah dalam rangka uji kepatutan dan uji kelayakan fit and propertest Calon Anggota BPK RI. Uji kepatutan dan uji kelayakan bagi Calon Anggota BPK RI merupakan bentuk pelaksanaan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan yang menyebutkan bahwa Anggota BPK RI dipilih oleh DPR RI dengan memperhatikan pertimbangan DPD, dimana ketentuan lebih lanjut diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPR RI.

Mekanisme uji kepatutan dan uji kelayakan Calon Anggota BPK RI akan dilaksanakan sebagai berikut:

1. Calon Anggota BPK RI menjalankan uji kepatutan dan uji kelayakan sendiri-sendiri, calon yang lain diharapkan menunggu di ruang ruangan.
2. Waktu yang diberikan maksimal 45 menit, terdiri atas 15 menit maksimal calon Anggota BPK RI mempresentasikan makalahnya dan 30 menit tanya jawab.

Untuk mempersingkat waktu kami persilakan kepada saudara Prof. Dr. H. Eddy Suratman, S.E., M.A. untuk menyampaikan paparannya.

Kami persilakan Prof.

### **CALON ANGGOTA BPK RI (PROF. DR. H. EDDY SURATMAN, S.E., M.A.):**

*Bismillahirrahmanirahim.*

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,*  
**Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua.**

### **Pimpinan dan Anggota Komisi XI DPR RI yang kami hormati.**

Saya mohon langsung ke slide nomor 2, kalau kita memperhatikan perkembangan dana transfer kita, saya ambil secara acak dari tahun 2011 sampai dengan 2019 ini saja itu peningkatannya sekitar 200% bahkan lebih dari 200% peningkatan dana transfer Indonesia. Artinya, jumlah uang yang dikelola oleh berbagai daerah di Indonesia itu dari APBN meningkat lebih dari 200% selama 2011 sampai 2019.

Slide berikutnya, tetapi hasilnya adalah pertumbuhan ekonomi kita sejak 2015 stagnan di sekitar angka 5% bahkan kalau kita lihat dari 2011 seperti tahun pengamatan tadi ada kecenderungan sebetulnya menurun pertumbuhan ekonomi kita tetapi sejak tahun 2015 ada perbaikan. Saya mengatakan tetap hanya ada di sekitar angka 5%.

Akibatnya di slide berikutnya, dampak yang kita terima untuk perbaikan kesejahteraan rakyat memang terasa ada penurunan akan tetapi penurunannya relative lambat. Dari 2011 ke 2018 angka kemiskinan kita hanya menurun sekitar 2,83% padahal pada periode yang sama dana transfer yang di kirim ke berbagai daerah itu meningkat lebih dari 200%.

Slide berikutnya, angka kemiskinan itu juga kelihatan lambat penurunannya di berbagai daerah. Kalau kita perhatikan di gambar ini wilayah di Indonesia yang angka kemiskinan masih di atas 14% itu masih dominan terutama di kawasan timur Indonesia, di barat masih ada di Aceh dan Bengkulu. Akan tetapi di berbagai daerah yang lain di Jawa sebetulnya angka kemiskinan masih sekitar 9% sampai 14%.

Slide berikutnya, yang saya mau jelaskan kepada kita semua tadi sebetulnya adalah ternyata dana transfer yang terus meningkat ke daerah itu dampaknya terhadap kesejahteraan rakyat masih relative lambat.

Slide berikutnya, padahal kalau kita lihat pemeriksaan BPK RI 2007 hanya 4 daerah yang opininya WTP, 2017 411 daerah opininya sudah WTP. Artinya, di 2007 itu tidak sampai 1% daerah di Indonesia yang memperoleh opini WTP. Tetapi sekarang WTP itu bukan sesuatu yang luar biasa, dia biasa-biasa saja karena sebagian besar daerah di Indonesia sebenarnya sudah memperoleh opini WTP. Angka yang saya dapatkan itu mendekati sekitar 80% daerah di Indonesia sudah WTP.

Pertanyaannya kemudian adalah mengapa sudah sedemikian banyak yang WTP tetapi dampak dari pengelolaan dana kita terhadap peningkatan kesejahteraan bukan tidak meningkat akan tetapi peningkatannya terasa lambat.

Lalu saya membuka tugas-tugas BPK RI itu sebetulnya apa? di Pasal 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Tanggungjawab Keuangan Negara, itu BPK diberikan mandate untuk melakukan 3

tugas, pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan untuk tugas-tugas dengan tujuan tertentu.

Saya ingin menyampaikan kepada kita semua bahwa pemeriksaan keuangan itu hasilnya adalah opini yang tadi sudah menghasilkan sebesar WTP. Saya ingin menawarkan dalam proses pencalonan ini, kalau saya diberikan kepercayaan saya ingin mendorong agar BPK itu memperkuat pemeriksaan kinerja. Mungkin sudah dilakukan hingga sekarang tapi menurut saya popularitas pekerjaan BPK ini lebih kepada opininya, apakah WTP, WDP, dan disclaimer. Tetapi pemeriksaan kinerja yang sebetulnya juga sama bobotnya dalam tugas BPK itu tidak terlalu kedengaran dampaknya.

Mengapa kita perlu mendorong pemeriksaan kinerja? Agar pengelolaan keuangan yang sudah semakin baik diiringi dengan kualitas belanja daerah yang juga semakin baik. Kualitas belanja daerah yang semakin baik kita yakin dia akan mendorong peningkatan kesejahteraan rakyat yang semakin baik.

Bagaimana kita melakukan revitalisasi untuk mendorong pemeriksaan kinerja di BPK itu. Saya memawarkan beberapa hal, pertama tidak saya jelaskan semua untuk membatasi waktu. Kapasitas SDM dan mekanisme perbaikan di BPK perlu menyesuaikan, kalau selama ini kita lebih banyak mengangkat auditor dan akuntan. Saya kira saatnya kalau pemeriksaan kinerja mau kita perkuat ahli sipil, ahli jalan, ahli listrik, ahli-ahli yang lain itu menjadi auditor yang kita percayakan untuk memperkuat BPK sehingga bobot pemeriksaan kinerjanya itu membantu memberikan rekomendasi kepada daerah-daerah untuk memperbaiki kualitas belanjanya. Termasuk sebetulnya pusat, tapi saya mengamati fokus saya adalah pada belanja daerah. Tentu hal yang sama juga berlaku untuk pusat.

Yang kedua, setelah melalui kajian patut kita pertimbangkan untuk menggeser pemeriksaan keuangannya justru kita bisa serahkan kepada akuntan publik, karena itu standarnya sudah sedemikian kuat sehingga bisa kita berikan kepercayaan kepada akuntan publik untuk melakukan pemeriksaan keuangan. Dan tentu untuk dan atas nama dari BPK kita.

Yang ketiga, kita harus memperkuat BPK dengan meningkatkan pemahaman mereka terhadap dokumen perencanaan nasional dan daerah. Karena kalau kita bicara kualitas belanja maka dasar utamanya adalah harus disiplin mewujudkan target-target yang tercantum pada dokumen perencanaan, baik nasional maupun daerah.

Berikutnya, BPK harus terus menyandingkan program daerah dengan program prioritas pembangunan nasional. Dengan demikian berarti, BPK akan diperkuat dengan pemahaman para auditornya terhadap dokumen perencanaan baik jangka panjang RPJPN, RPJPD di daerah maupun jangka menengah RPJMN dan RPJMD maupun perencanaan tahunan.

Efisiensi dan efektifitas belanja akan menjadi tema sentral dalam keseluruhan agenda pemeriksaan kinerja BPK dan BPK harus bisa kita dorong untuk meningkatkan disiplin dalam perubahan anggaran di daerah. Kalau kita melihat perubahan anggaran yang waktunya sedemikian sempit seringkali perubahan

anggaran tidak lagi disiplin terhadap dasar perencanaan, baik acuannya pada perencanaan nasional maupun perencanaan daerah.

Ada banyak lagi yang saya tawarkan akan tetapi untuk membatasi waktu saya kira itu beberapa hal yang saya sampaikan dalam forum rapat Komisi XI DPR RI yang terhormat ini.

Demikian yang bisa saya sampaikan Pimpinan dan Anggota Komisi XI DPR RI. Selanjutnya saya bersiap untuk menerima respon dan menjawab pertanyaan jika ada yang disampaikan kepada saya.

Terima kasih Pimpinan.

**Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua.**

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT:**

Demikian paparan dari Prof. Dr. H. Eddy Suratman, S.E., M.A. Selanjutnya untuk mempersingkat waktu kami persilakan melakukan pendalaman. Kita mulai dari sebelah kanan Bapak Achmad Hatari kami persilakan.

**F-P. NASDEM (Dr. ACHMAD HATARI, S.E., M.Si.):**

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

**Pimpinan dan Anggota Komisi XI DPR RI, Prof yang saya hormati.**

Prof pernah jadi Ketua DPRD Kalimantan Barat, siapa yang duluan Prof atau Sukiman. Kok sampai 6 tahun menjadi DPRD Kalimantan Barat.

**CALON ANGGOTA BPK RI (PROF. DR. H. EDDY SURATMAN, S.E., M.A.):**

Satu periode Pak.

**F-P. NASDEM (Dr. ACHMAD HATARI, S.E., M.Si.):**

Prof tadi menyebutkan predikat WTP loncatannya luar biasa dari berapa persen kesekian ratus persen. Ini sesuatu yang juga menjadi pertanyaan public, karena loncatannya luar biasa. padahal opini BPK itu ada 4 persyaratan yang harus dipenuhi oleh setiap entitas akuntansi. Satu adalah standar akuntansi, dua persoalan data dan yang ketiga adalah sistem pengendalian internal dan yang keempat adalah terkait dengan kepatuhan terhadap ketentuan Undang-Undang yang berlaku.

Sementara publik menganggap bahwa opini BPK ini seperti ini komoditas BPK, ini kalau Bapak jadi terpilih menurut Prof bagaimana ini. Ada tingkat

Pemerintahan yang bermasalah tata kelola, tetapi diberikan opini WTP. Dan bukan rahasia lagi Prof, terkait dengan pemberian opini ini tergantung. Jadi tergantung ini sangat abstrak. Dan ini kita bicara *take and give*, mau WTP, mau WDP mau disclaimer tergantung Pak, sehingga tadi Bapak presentasikan loncatannya luar biasa.

Kami 5 tahun disini sudah berapa puluh banyak menguji calon-calon Anggota BPK. Jadi 4 unsur itu harus dipenuhi, sementara daerah yang kacau balau tata kelola diberikan WTP itu orang di daerah pun menjadi heran. Internal di Pemerintah Daerah yang bersangkutan juga menjadi heran, “kok kita kacau balau diberikan WTP”. Mudahan-mudahan nanti Bapak terpilih ini juga menjadi PR bagi Bapak untuk memperbaikinya Bapak.

Sementara begitu Pimpinan.

Terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

#### **KETUA RAPAT:**

Lanjut, Bapak Amirul Tamim.

#### **F-PPP (Dr. H. MZ. AMIRUL TAMIM, M.Si.):**

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Saya langsung Bapak Eddy, memang pengalaman di daerah mungkin sebagai informasi Bapak Prof. Kenaikan itu lebih dari 200% sebenarnya, tapi peningkatannya rendah sekali kalau dibandingkan dengan sebelumnya. Ini kita mau cari tahu dulu apa penyebabnya, apa penyebabnya sampai capaian untuk mendongkrak pertumbuhan itu lambat sekali. Apa karena Pemda sekarang itu berorientasi WTP itu adalah tujuan atau ada pengaruh psikologi lain dari peran pengawasan yang dilakukan oleh lembaga lain.

Ini mungkin yang pertama ingin saya meminta kepada Prof pandangannya. Saya melihat transfer daerah ini karena kemungkinan pemeriksaan kinerja yang dilakukan BPK ini belum. Ada beberapa calon juga yang kami tanyakan khususnya dari internal BPK, itu kelihatannya karena alasan anggaran untuk pengawasan pemeriksaan kinerja itu belum bisa dilakukan.

Yang selanjutnya, saya ingin penjelasan kalau melakukan pemeriksaan kinerja itu keterlibatan BPK itu mulai dari mana. Dan kalau Pemda itukan sebelum melaksanakan Kepala Daerah terpilih itu memmbuat RPJMD. Memang kami lihat selama kami di DPR RI ini dalam pengawasan, kelihatannya RPJMD itu hanya formalitas dokumen, tetapi tidak menjadi acuan di dalam penentuan program maupun eksekusinya dalam proyek. Kalau kita lihat dari tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga yang direkomendasikan atau yang bagaimana dituangkan dalam RPJMD itu kelihatannya capaiannya jauh. Dan ada daerah ketika berakhir

masa jabatannya itu RPJMD dirubah menyesuaikan dengan angka-angka capaian dari program, proyek yang terlambat dilakukan.

Ini mohon pandangan Bapak Prof, untuk dua hal ini.

Saya kira itu saja Pimpinan.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Mohon kepada teman-teman pertanyaannya supaya langsung *to the point* saja karena waktunya hanya 30 menit, kasian nanti kalau jawabnya tidak ada waktu.

Kami persilakan kepada Bapak Hendrawan.

**F-PDIP (Prof. Dr. HENDRAWAN SUPRATIKNO):**

Terima kasih.

**Salam kebangsaan untuk kita semua.**

**Prof. Eddy Suratman yang saya hormati.**

Saya membaca dengan baik langkah-langkah yang Bapak usulkan untuk melakukan revitalisasi peran BPK. Saya hanya ingin pendalaman butir yang pertama, peningkatan kapasitas SDM dan perbaikan sistem. Jadi Bapak menggabungkan aktor dan struktur. Tapi kalau Bapak diminta untuk memilih karena Bapak jabatannya hanya 5 tahun, waktunya singkat. Itu Bapak mau menekankan lebih bagus pada perubahan yang dilakukan oleh aktor atau perbaikan struktur atau sistem.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Bapak Sudiro Asno.

**F-P (SUDIRO ASNO):**

Terima kasih Ketua Rapat.

**Pimpinan, Anggota Komisi XI DPR RI, Prof. Eddy yang saya hormati.**

Saya langsung saja Prof, judulnya adalah revitalisasi peran BPK RI kurang lebih dan seterusnya dalam mewujudkan kualitas belanja daerah. Tapi saya tidak melihat pertama adalah dari sistematisa ini, tadi Prof. Eddy tiba-tiba membahas transfer dana ke daerah. Saya tidak melihat apa sih sebetulnya yang mau dibahas, identifikasi masalahnya itu tidak jelas. Lalu dihubungkan dengan pertumbuhan

ekonomi yang katanya stagnan di angka 5% padahal transfer dananya meningkat cukup tajam dari 2007-2017 kurang lebih 200%. Bahkan dikaitkan dengan opini dari 2007 4 daerah sedangkan 2017 411 itu. Jadi kurang lebih tidak ada korelasinya.

Pertanyaan saya adalah inikan judulnya revitalisasi BPK RI, peran BPK RI, kira-kira apakah memang kalau Prof. Eddy terpilih itu bisa memberikan solusi hubungan antara tadi yang dibahas transfer dana ke daerah atau transfer dana desa ke daerah, lalu hubungannya dengan angka kemiskinan. Kira-kira nanti dimana peran BPK RI yang akan diciptakan Prof. Eddy kalau seandainya terpilih menjadi Anggota BPK RI.

Demikian, terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Lanjut, sebelah kanan Ibu Indah.

**F-PDIP (INDAH KURNIA):**

Terima kasih Pimpinan.

Prof. Eddy selamat saya mengapresiasi presentasinya tapi tadi pertanyaan saya sudah terwakili Ketua. Jadi saya tinggal menunggu jawaban.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Ibu Lilis Santika.

**F-P (LILIS SANTIKA):**

Terima kasih Pimpinan.

**Pimpinan dan teman-teman Anggota Komisi XI DPR RI, Prof. Eddy.**

Tadi yang telah Prof. Eddy sampaikan bahwa memang betul kalau kawasan timur itu selalu termaginalkan. Kalau nanti Allah takdirkan Prof terpilih, saya ingin dengar langsung apa yang akan Prof lakukan untuk dalam melaksanakan tugas-tugas Prof kedepannya, khususnya wilayah timur yang tertinggal sampai 14%.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Ya, Pak Johnny terakhir ya.



**F-P. NASDEM (JOHNNY G PLATE, S.E.):**

Terima kasih.

**Ketua, rekan-rekan Anggota Komisi XI DPR RI, Prof. Eddy Suratman yang saya hormati.**

Di halaman 5 ditulis naskah asli Undang-Undang Dasar dan seterusnya menugaskan BPK sebagai satu-satu editor yang melakukan pemeriksaan, pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara. Dalam *paper* Bapak ini, lebih banyak terkait dengan belanja negara, apalagi terkhusus transfer ke daerah. Kenapa semua orang, semua komponen termasuk Calon Anggota BPK hanya tertarik di belanja negara kok tidak ada yang tertarik dengan mengurus penerimaan negara, padahal keuangan negara terdiri dari unsur penerimaan dan belanja negara, mengapa Prof kok ada itu sangat sistematis seluruhnya ngomong belanja negara, tanpa bicara penerimaan negara. Memangnya negara ini bisa hidup tanpa penerimaan negara, kok BPK tidak mau ngurus penerimaan negara. Itu pertanyaannya kenapa.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Silakan Prof dijawab, waktu Profesor hanya 20 menit.

Terima kasih.

**CALON ANGGOTA BPK RI (PROF. DR. H. EDDY SURATMAN, S.E., M.A.):**

Terima kasih Pimpinan.

**Pimpinan dan Anggota Komisi XI DPR RI yang saya hormati.**

Saya menjawab satu per satu dari pertanyaan pertama. Opini WTP itu sudah semakin banyak tetapi ada semacam kesan bahwa untuk mendapatkan opini WTP tersebut tidak sepenuhnya didasarkan pada 4 syarat untuk mendapatkan opini itu, tetapi mungkin ada aspek lain yang mempengaruhi sehingga suatu daerah bisa mendapatkan opini BPK.

Saya tidak ingin membantah pernyataan dari Anggota yang terhormat, saya hanya ingin mengatakan bahwa pemeriksaan kinerja yang saya tawarkan ini justru untuk membuka area abu-abu yang diperkirakan banyak terjadi dalam memperoleh opini WTP dalam pemeriksaan keuangan BPK. Kalau kita mendorong bobot yang sama terhadap pemeriksaan kinerja, pemeriksaan kinerja berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 khususnya di Pasal 6, kalau pemeriksaan keuangan ujungnya adalah opini, maka pemeriksaan kinerja ujungnya adalah ada temuan, ada

kesimpulan dan ada rekomendasi. Berarti proses pengelolaan keuangan kita jauh lebih terukur dengan pemeriksaan kinerja.

Melengkapi pemeriksaan keuangan saya berharap kalau kita menempatkan bobot yang sama pada pemeriksaan kinerja, maka opini WTP, WDP dan seterusnya yang diperoleh oleh suatu daerah atau unit, atau lembaga atau kementerian itu menjadi bisa diterima secara luas oleh masyarakat dan karena tergambar secara jelas memang kinerjanya meningkat sejalan dengan opini yang mereka akan terima.

Itu point saya terhadap pertanyaan pertama.

Untuk Bapak Amirul Tamim, saya ingin menyampaikan jawaban sebagai berikut. Apakah dampak dari peningkatan dana transfer ke berbagai daerah yang sedemikian cepat itu hampir 200% dalam 8 tahun terakhir ini, itu lambat terhadap kesejahteraan, apakah karena Pemdanya sibuk untuk mendapatkan opini WTP. Barangkali juga iya, tetapi memang belum ada kajian saya terkait dengan itu. Saya melakukan pemeriksaan kinerja bersama dengan Bappenas di percayakan dalam beberapa tahun terakhir memang alokasi waktu untuk menyusun laporan-laporan memenuhi syarat untuk mendapatkan opini WTP menjadi bagian yang sangat serius dilakukan oleh Pemerintah Daerah kita.

Kadang-kadang saking seriusnya lupa bahwa proses pengelolaan keuangan itu sebetulnya dampaknya yang paling riil dirasakan oleh masyarakat adalah kalau belanja keuangan itu mampu mendorong peningkatan kesejahteraan mereka. Mungkin peningkatan WTP juga disebabkan oleh ada peran pengawasan dari lembaga-lembaga lain.

Saya kira saya juga sependapat dengan itu bahwa memang ada penguatan kehati-hatian di berbagai daerah juga mungkin di pusat dan kementerian dan lembaga untuk lebih berhati-hati dalam pengelolaan keuangan, karena pengawasan kalau di Orde Baru dulu Ratif agak kurang kuat akan tetapi sekarang semua orang sepertinya bisa melakukan pengawasan bahkan menjadi BPK dalam tanda kutip di tengah-tengah masyarakat.

Berikutnya dari Bapak Amirul adalah ada yang mengatakan bahwa anggaran kurang, sehingga kita hanya bisa memilih pemeriksaan keuangan hanya dominan dibandingkan pemeriksaan kinerja. Saya kira alasan itu saya tidak bisa terima karena sebenarnya proses pelaksanaan pemeriksaan keuangan dengan pemeriksaan kinerja bisa dilakukan secara sinergis dengan anggaran yang tidak terlalu bertambah untuk kita bisa menambah aktifitas dalam pemeriksaan kinerja tersebut.

Lalu dimana keterlibatan BPK dalam pemeriksaan kinerja ini, dalam *paper* ini saya mengatakan BPK mulai terlibat sejak perencanaan pembangunan disusun. Kalau kita bicara soal RPJMN dan RPJMD saat-saat hari-hari ini Bappenas sedang menyusun RPJMN sebetulnya BPK sudah bisa masuk disitu dan dia sudah bisa mengamati target-target yang akan dicapai pada setiap *item* dari kerangka makro ekonomi kita dan mungkin target-target disektoral pembangunan kita demikian juga di daerah. Dengan demikian, tidak mudah lagi orang menyesuaikan perubahan RPJMD dengan riil capaian yang bisa dia lakukan pada saat menjelang pemilihan diputaran berikutnya dalam agenda politik 5 tahun kedepan.

Bapak Hendrawan, terima kasih atas pertanyaannya. Maka yang lebih dulu peningkatkan kapasitas SDM atau perbaikan sistem karena mungkin keterbatasan kita keduanya agak sulit dilakukan dalam waktu yang bersamaan. Kalau betul-betul sulit dilakukan maka saya memberikan pilihan kepada penguatan kapasitas SDM. SDM itu menurut saya sistem bisa buruk, tapi kalau SDM-nya bagus hasil yang bagus pasti mungkin tercapai tetapi kalau SDM-nya buruk sebegus apapun sistemnya hasil yang bagus sulit untuk kita capai. Karena itu, pilihan saya pada peningkatan kapasitas SDM kalau waktunya dan kapasitas kita memang terbatas untuk melakukan kedua-duanya.

Pak Sudiro, tidak jelas di *paper* ini menurut Bapak, apa sih masalah utamanya. Masalah utamanya Bapak Sudiro, saya mengamati WTP itu melonjak tajam dari kurang 1% tahun 2007 hampir 80% daerah di tahun 2017. Logika yang ada di kepala saya mengatakan kalau WTP sudah sedemikian besar, berarti tata kelola uang kita ini sudah agak bagus. Kalau begitu hasilnya mestinya peningkatan kesejahteraan rakyat kita menjadi lebih baik, tetapi faktanya saya lihat di data-data yang ada penurunan angka kemiskinan di berbagai daerah memang turun tetapi berjalan relative lambat dibandingkan peningkatan dana yang dikelola oleh daerah-daerah di Indonesia. Itu kira-kira masalah utamanya.

Lalu kemudian untuk memperbaiki itu apa yang kita lakukan. Saya memawarkan kita perlu untuk merevitalisasi peran BPK. Bagaimana caranya? Kita perlu mengangkat bobot pemeriksaan kinerja yang sama dengan pemeriksaan keuangan, sehingga nanti opini WTP bermakna riil bagi kualitas yang diterima oleh rakyat di berbagai daerah bahwa memang secara nyata kesejahteraan mereka mengalami peningkatan. Itu kira-kira yang saya masalah utama dan bagaimana menyelesaikan masalah utama itu yang saya tawarkan.

Dimana peran BPK dalam konteks itu? Saya kira karena BPK mendapatkan tugas berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 untuk melakukan 3 pemeriksaan itu, maka BPK bisa mengambil peran yang luar biasa besarnya untuk mendorong agar kinerja pengelolaan keuangan kita menjadi lebih baik. Lebih baik ukurannya adalah belanjanya berkualitas, kalau belanjanya berkualitas kita berharap kesejahteraan rakyat di berbagai daerah di Indonesia juga akan semakin baik.

Ibu Lilis yang terhormat, wilayah Indonesia termaginalkan, apa yang akan dilakukan untuk KTI. Ibu saat ini saya sedang intensif terlibat dalam evaluasi dana Otsus di Papua dan Papua Barat. Saya bolak-balik ke Papua dan Papua Barat untuk melakukan evaluasi itu setelah 2 tahun lalu saya intensif terlibat dalam evaluasi dana Otsus Aceh. Sekarang saya banyak terlibat untuk mendorong proses pengelolaan keuangan yang lebih baik untuk kawasan timur Indonesia, bahkan kemarin pun sebelum acara hari ini saya sedang rapat untuk ikut membantu mempersiapkan Kemendagri dalam hal Perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001. Kira-kira bagian-bagian mana yang kami akademisi bisa memberikan sumbangan untuk perbaikan setelah Undang-Undang Nomor 21 20 tahun akan berakhir di tahun depan 2021 kita melihat hasilnya belum terlalu banyak. Pasal-pasal apa yang perlu kita lakukan perubahan. Yang saya mau sampaikan kepada Ibu, itu kerja-kerja yang saya lakukan. Jadi kalau saya ada di BPK saya kira bukan berarti

mengabaikan yang lain tetapi upaya untuk mendorong percepatan pembangunan di KTI terasa akan sangat kuat karena saya juga tinggal di KTI, saya adalah guru besar di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjung Pura di Kalimantan dan saya pernah menjadi Dekan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis.

Terakhir dari Bapak Johnny Plate, terima kasih banyak Bapak Johnny yang terhormat. Saya biasanya lihat Bapak di TV saja, termasuk Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang lain. Saya memang harus mengatakan betul yang Bapak sampaikan, kenapa orang asik pada belanja. Sebenarnya kalau Bapak tanyakan pilihan seperti tadi Bapak Hendrawan bertanya kepada saya, belanja atau penerimaan yang paling kritis menurut saya memang sekarang belanja, tetapi sisi penerimaan tidak boleh kita abaikan. Itu juga kualitasnya juga mesti kita perhatikan. Saya kebetulan mengajar pengelolaan keuangan negara, baik di Magister dan Doktor. Ini yang ingin saya sampaikan, saya tidak hanya menyampaikan topik kualitas belanja tetapi juga saya mengajarkan kualitas pendapatan. Kualitas penerimaan kita mesti kita perhatikan juga, termasuk di daerah-daerah dana bagi hasil juga sebagai sumber penerimaan dari Pemerintah Pusat, persen-persen pembagiannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 harus diperhatikan secara baik. Saya ingin menyampaikan kepada Bapak bahwa penerimaan boleh diabaikan tetapi yang kritis sekarang memang soal belanja.

Saya 10 tahun menjadi Anggota Tim Asistensi Menteri Keuangan Bidang Desentralisasi Fiskal yang membahas soal-soal penerimaan negara. Bagaimana penerimaan dari ...(suara tidak jelas).

**F-P. NASDEM (JOHNNY G PLATE, S.E.):**

Pimpinan, interupsi sebentar.

Kenapa saya tanya itu Pak, supaya Bapak tahu saja tahun ini kita punya kendala sortfall penerimaan negara. Bagaimana mau belanja negara kalau penerimaan saja kurang. Ini kalau diurus dengan benar belanja negara tidak bermasalah apabila penerimaannya dilakukan dengan betul.

Terima kasih.

**CALON ANGGOTA BPK RI (PROF. DR. H. EDDY SURATMAN, S.E., M.A.):**

Saya sependapat dengan apa yang Bapak sampaikan, karena DAU kita saja dasarnya adalah pendapatan. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 mengatakan DAU kita itu 26% minimal dari PDN Netto. Kalau pendapatannya rendah, maka DAU yang bisa dibagikan akan rendah akan terasa di semua daerah akan terjadi penurunan DAU. Tahun 2016 itu kita rasakan betul pemotongan-pemotongan dan akibatnya kita pernah melakukan DAU dinamis. DAU yang dinamis kalau pendapatan nasional kita turun, maka DAU yang dibagikan ke berbagai daerah juga akan lebih rendah.

Saya kira apa yang disampaikan Bapak Johnny sama saya punya pendapat yang sama juga yang saya tidak menawarkan dalam paper ini mungkin itu adalah sisi kelemahan dalam paper saya sekarang ini. Tapi kalau saya diberikan kepercayaan bukan berarti tugas-tugas penerimaan boleh diabaikan dalam pemeriksaan keuangan BPK. Karena keuangan negara itu memang di Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, bukan hanya sisi belanja akan tetapi juga sisi penerimaan.

Demikian Pimpinan dan Anggota Komisi XI DPR RI yang saya hormati.  
Terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,*  
**Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua.**

#### **KETUA RAPAT:**

Saya kira tepat waktu ini Prof.

Demikian jawaban dan tanggapan dari saudara Prof. Dr. Eddy Suratman terhadap pertanyaan Anggota Komisi XI DPR RI. selanjutnya kami persilakan Prof, meninggalkan tempat.

#### **(RAPAT DISKORS)**

Kita berikan kesempatan kepada saudara Denny Surandhi, S.E.

Teman-teman supaya efektif, mohon nanti pertanyaannya langsung *to the point* saja karena waktunya tanya jawab hanya 30 menit.

#### **WAKIL KETUA DPR RI (UTUT ARDIANTO):**

Tuhan Yang Maha Esa, yang membuat kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat wal'afiat.

Menurut laporan dari Kesekjenan saat ini rapat Komisi XI DPR RI telah dihadiri lebih dari separuh Fraksi. Oleh karena itu, kuorum telah terpenuhi dan dengan mengucapkan *Bismillahirrahmanirahim*, saya membuka rapat Komisi XI DPR RI ini dan rapat ini saya nyatakan terbuka untuk umum.

#### **(SKORS DICABUT)**

#### **Anggota Komisi XI DPR RI yang sangat saya hormati.**

Perlu kami beritahukan berdasarkan surat dari Pimpinan Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Nomor 126/F-PDIP/DPRRI/IX/2019 tanggal 19 September 2019, perihal perubahan penugasan Anggota Komisi XI DPR RI, perlu kami sampaikan bahwa terjadi perubahan susunan Pimpinan Komisi XI DPR RI dari unsur Fraksi PDI Perjuangan, yaitu Wakil Ketua Komisi XI DPR RI yang semula

Bapak Dr. Muhammad Prakosa diganti dengan Bapak Juliari Peter Batubara Nomor Anggota A-168.

Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 97 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 yang mengatur mengenai Pimpinan Komisi sesuai dengan prinsip musyawarah untuk mufakat saya akan menanyakan apakah pergantian Wakil Ketua Komisi XI DPR RI dari unsur Fraksi PDIP Perjuangan yang semula saudara Muhammad Prakosa digantikan saudara Juliari Peter Batubara. Apakah dapat disetujui?

### **(RAPAT: SETUJU)**

Terima kasih.

Dengan telah disetujuinya pergantian Ketua Komisi XI DPR RI, dari Fraksi PDI Perjuangan. Maka susunan Pimpinan Komisi XI DPR RI menjadi sebagai berikut:

1. Melchias Markus Mekeng Ketua dari Fraksi Partai Golkar.
2. Juliari Peter Batubara Wakil ketua dari Fraksi PDI Perjuangan.
3. Ir. H. Soepriyatno Wakil Ketua dari Fraksi Partai Gerindra.
4. Ir. Marwan Cik Asan Wakil ketua dari Fraksi Partai Demokrat.
5. Ir. Ahmad Hafizs Tohor Wakil Ketua dari Fraksi Partai Amanat Nasional.

Dengan telah selesainya penetapan Pimpinan Komisi XI DPR RI, maka selesailah tugas kami mengantar saudara Juliari Peter Batubara dalam acara penetapan Pimpinan Komisi XI DPR RI.

Kami atas nama pribadi maupun atas nama Pimpinan Dewan menyampaikan ucapan selamat kepada Bapak Juliari Peter Batubara yang dipercaya menjadi Wakil Ketua Komisi XI DPR RI. Semoga Tuhan Yang Maha Esa, selalu memberikan petunjuk dan bimbingan kepada kita sekalian khususnya para Pimpinan Komisi XI DPR RI dalam melaksanakan tugas bangsa dan negara dalam memperjuangkan aspirasi rakyat.

Untuk selanjutnya kami persilakan kepada Pimpinan Komisi XI DPR RI yang baru untuk meneruskan rapat Komisi XI DPR RI ini dan ijinilah kami meninggalkan rapat ini, karena masih ada macam-macam mulai dari Rapim, Bamus dan nanti dipanggil Presiden.

Terima kasih.

*Wabillahi Taufik Walhidayah,  
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

### **KETUA RAPAT:**

Dihadapan kita adalah saudara Denny Surandhi, S.E. saya ingin sampaikan langsung saja supaya waktunya efektif. Jadi mekanisme uji kepatutan dan kelayakan Calon Anggota BPK RI akan dilakukan sebagai berikut:

1. Calon Anggota BPK RI menjalankan uji kepatutan dan uji kelayakan sendiri-sendiri, calon yang lain diharapkan menunggu di ruang ruangan.
2. Waktu yang diberikan maksimal 45 menit, terdiri atas 15 menit maksimal calon Anggota BPK RI mempresentasikan makalahnya dan 30 menit tanya jawab.

Untuk mempersingkat waktu kami persilakan kepada saudara Denny Surandhi, S.E., untuk menyampaikan paparannya.

**CALON ANGGOTA BPK RI (DENNY SURANDHI, S.E.):**

Terima kasih.

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,*  
**Salam sejahtera bagi kita semua.**

**Yang terhormat Pimpinan dan Anggota Komisi XI DPR RI.**

Pertama-tama iijinkan saya memperkenalkan diri nama saya Denny Surandhi, saya adalah Sarjana Ekonomi dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia jurusan Akuntansi. Magister Managemen dari IPNI Bisnis School di Jakarta, dan M.B.A. dari monash business school Australia. Saya adalah akuntan magister negara dengan nomor registrasi D11357.

Pengalaman kerja saya adalah sebagai berikut, sejak tahun 2013 sampai saat ini saya adalah Direktur di perusahaan swasta, yaitu PT. Baramitra Energi yang bergerak dalam bidang pertambangan dan penjualan batubara. Selain itu, sejak tahun 2008 sampai saat ini saya juga menjadi dosen di Perguruan Tinggi Swasta STIE di Jakarta. Kemudian tahun 2008 sampai dengan 2013 saya bekerja di perusahaan asing sebagai investment manager untuk wilayah Indonesia dan juga sebagai financial controller di 27 perusahaan Nobel company di Indonesia. Sebelum di Nobel saya berkarir di ...(suara tidak jelas)

**KETUA RAPAT:**

Bapak Denny langsung saja menyampaikan paparannya, nanti waktu anda habis.

**CALON ANGGOTA BPK RI (DENNY SURANDHI, S.E.):**

Sebagaimana diamanatkan dalam undangan, berikut saya sampaikan makalah saya terkait dengan BPK RI, yaitu "audit BPK untuk proyek infrastruktur". Sebagaimana kita ketahui bersama pembangunan infrastruktur dalam 4 tahun terakhir berjalan cukup massif. Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat

menjelaskan bahwa dalam kurun waktu 4 tahun terakhir Pemerintah telah membangun jalan nasional sepanjang 3.432 kilo meter, jalan tol sepanjang 941 kilo meter, 65 bendungan baru, dan jaringan irigasi seluas 860 ribu hektar, belum juga termasuk jembatan, kereta api, bandar udara, pelabuhan dan lain-lain.

Pembangunan infrastruktur berpotensi memberikan manfaat langsung bagi kemajuan suatu daerah. Pembangunan infrastruktur membutuhkan banyak sumber daya sehingga akan membuka peluang usaha dan menciptakan lapangan kerja, membantu pemerataan pertumbuhan ekonomi, meratakan pembangunan dan membuka kesempatan kepada semua pihak untuk tumbuh dan berkembang.

Namun, pembangunan infrastruktur tidak boleh sekedar asal jadi, Pemerintah harus menjamin bahwa infrastruktur yang dibangun memiliki kualitas yang baik, efisien dalam biaya, aman digunakan dan memiliki faktor keselamatan yang tinggi termasuk daya tahan yang optimal terhadap bencana alam.

Oleh karena itu, perlu dilakukan pemeriksaan atas proyek-proyek infrastruktur khususnya yang menggunakan APBN atau hutang Pemerintah. Pemeriksaan atau audit akan memberikan kepastian atau stakeholder bahwa pembangunan infrastruktur telah dilaksanakan sesuai dengan rencana dan aturan yang ditetapkan, telah memenuhi ketaatan atas sistem dan prosedur, seluruh pertanggungjawaban keuangan telah dilaporkan secara baik dan benar, substantive dan memberikan keyakinan kepada masyarakat bahwa pembangunan infrastruktur telah dilakukan melalui tata kelola yang baik, secara efektif dan efisien untuk kepentingan masyarakat yang telah terhindar dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

BPK adalah auditor negara, BPK adalah lembaga tinggi dalam sistem ketata negaraan Indonesia yang memiliki wewenang memeriksa pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara. BPK memiliki tugas dan wewenang yang telah diatur oleh Undang-Undang.

Audit BPK terhadap suatu proyek infrastruktur diharapkan akan mendorong profesionalisme bagi Pemerintah, akan mengawasi pengelolaan keuangan negara agar dilakukan secara transparan, akuntable dan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dapat menjadi acuan bagi bahan perbaikan dan penyempurnaan pelaksanaan kegiatan atau proyek-proyek di tahun anggaran berikutnya. Dapat menjadi bahan informasi bagi masyarakat untuk melakukan penilaian terhadap kinerja Pemerintah. Dan menjadi bahan informasi bagi investor dan/atau calon investor untuk melakukan penilaian terhadap investasinya di Indonesia.

BPK memiliki nilai-nilai dasar dalam melaksanakan tugasnya, yakni integritas, independent, dan profesionalisme. Secara umum nilai-nilai dasar merupakan komitmen BPK untuk selalu meningkatkan kualitas kerja, memperbaiki diri dan meningkatkan kapasitas, menjaga kepercayaan *stake holder* melalui pencapaian kinerja yang maksimal dan selalu melaksanakan *good governance* yakni bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Lingkup pemeriksaan, BPK dalam audit infrastruktur akan mencakup sejak perencanaan hingga proyek diselesaikan. Berdasarkan hasil temuan dan bukti-bukti yang dikumpulkan BPK akan memberikan opini atas kinerja untuk proyek disetiap



tahapan termasuk aspek khusus yang berada diluar keahlian BPK, seperti menilai kualitas fisik bangunan atau infrastruktur. Sebagaimana Undang-Undang atas hal ini BPK dapat menugaskan pemeriksa atau tenaga ahli diluar BPK yang bekerja untuk dan atas nama BPK.

Dalam tahap perencanaan BPK akan melihat tingkat kematangan uji tuntas atau *do diligent* yang meliputi proses study dan analisa yang menjadi dasar keputusan untuk pengadaan barang dan jasa. Penetapan waktu pelaksanaan proyek dan pembiayaan proyek.

Tahap selanjutnya, yakni audit kinerja keuangan dalam tahap ini BPK akan memberikan opini terhadap efektifitas dan efisiensi keuangan proyek. Dan yang terakhir ada audit terhadap kualitas fisik proyek. Dalam hal ini BPK harus memperoleh keyakinan bahwa fisik proyek telah dibangun sesuai dengan spesifikasinya. Proyek tersebut memiliki kualitas yang tinggi, aman dan memiliki daya tahan yang optimal terhadap bencana alam. Dan BPK dapat mendatangkan juga kepada tenaga ahli khusus yang mumpuni dalam bidangnya untuk melaksanakan audit pada tahap ini.

Sebagai kesimpulan dapat kami sampaikan bahwa hasil audit BPK terhadap proyek-proyek infrastruktur diharapkan akan memberikan informasi yang transparan mengenai efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumber dan penggunaan dana atas proyek infrastruktur yang pada akhirnya akan menjadi acuan untuk menyimpulkan bahwa Pemerintah telah memberikan satu fasilitas yang berkualitas kepada masyarakat, tepat sasaran, akuntable, terbuka, berdaya guna dan berhasil guna. Hasil audit BPK terhadap proyek ini akan memberikan kontribusi positif bagi investor dan/atau calon investor untuk menanamkan investasinya di Indonesia.

Demikian makalah ini kami sampaikan.

*Wabillahi Taufik Walhidayah,  
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

#### **KETUA RAPAT:**

Demikian pemaparan dari saudara Denny Surandhi, S.E., M.M., M.B.A. selanjutnya kami persilakan kepada Anggota Komisi XI DPR RI untuk melakukan pendalaman. Langsung saja dari sebelah kanan Bapak Achmad Hatari.

Silakan.

#### **F-P. NASDEM (Dr. ACHMAD HATARI, S.E., M.Si.):**

Pada statement disini halaman yang tidak tahu tapi terkait dengan opini BPK yang menjadi temuan khususnya rekomendasi. Kondisi BPK terkini kurang lebih 45.280 temuan yang tidak ditindaklanjuti. Temuan sebanyak ini atau setara dengan berat ratusan triliun Rupiah. Kalau nanti Bapak Denny terpilih bagaimana konsentrasi Bapak Denny untuk meminimalis rekomendasi tindaklanjut yang tidak dikawal oleh BPK.

Itu saja pertanyaan saya dan ini sudah menjadi isu dan isu, kemarin kita memeriksa hasil ikhtisar hasil pemeriksaan semester juga masih tercantum. Dan semakin bertambah setiap tahun temuan yang tidak ditindaklanjuti oleh BPK hanya karena alasan kekurangan dana. Kalau nanti Bapak Denny terpilih adakah pemikiran terobosan terkait dengan memanimalisir rekomendasi yang tidak ditindaklanjuti.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Lanjut, sebelah kiri Ibu Amelia.

**F-P. NASDEM (AMELIA ANGRAINI):**

Terima kasih Pimpinan.

Bapak Denny Surandhi, terima kasih paparannya yang telah disampaikan. Saya langsung kepada pertanyaan, kita ketahui saat ini kita sedang memasuki era industry 4.0 yang memungkinkan masyarakat lebih mengetahui informasi-informasi ataupun data publik hasil BPK secara cepat, namun di sisi lain juga jika data itu dipublikasikan secara massif juga rentan disalah gunakan.

Nah, jika Bapak Denny terpilih menjadi salah satu Pimpinan BPK, bagaimana BPK memanfaatkan teknologi informasi ini untuk mempublikasikan hasil kinerja BPK, namun tetap aman dan tidak disalahgunakan.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Cukup ya.

Kami persilakan kepada Bapak Denny Surandhi untuk menjawab pertanyaan Anggota.

Kami persilakan Pak.

**CALON ANGGOTA BPK RI (DENNY SURANDHI, S.E.):**

Terima kasih Bapak.

Pertama-tama mengenai opini BPK, betul sekali kebetulan saya juga sedikit membaca dari internet. Mungkin kurang lebih 40%-50% temuan-temuan BPK itu tidak ditindaklanjuti. Padahal sudah jelas dalam Undang-Undang mengatakan bahwa laporan hasil pemeriksaan BPK wajib ditindaklanjuti oleh auditi. Ada sanksi administrative, ada sanksi hukum dalam hal ini apabila LHP dari BPK tidak ditindaklanjuti. Apalagi yang sudah menyangkut masalah pidana, itu sudah wajib ditindaklanjuti.

Jadi pertama-tama yang harus kita perhatikan disini adalah LHP, pertama kita melihat secara administrasi kita jalankan dulu prosesnya. Yang kedua, kita lihat disini secara hukumnya kita juga melihat Pak. Kalau kita lihat ini sudah terkait

dengan unsur pidana harus langsung ditindaklanjuti. Begitu Pak, kurang lebih yang dari kami Pak, mengenai tindaklanjut dari LHP.

Mengenai pertanyaan berikutnya, mengenai publikasi hasil pemeriksaan BPK agar aman. Kalau menurut saya, saya sebenarnya bukan ahli dalam sistem dan prosedur, sistem komputer khususnya. Jadi selama ini kita lihat bahwa hasil pemeriksaan BPK sudah ada dipublikasikan oleh BPK. Nah, memang disini kita lihat harusnya yang dipublikasikan itu tidak sampai hal-hal yang mendetail. Kalau kita bicara regular audit bisa kita publikasikan bentuknya dalam seperti laporan keuangan auditor yang sudah lazim dilaporkan. Kalau bentuknya special audit atau performance audit itu sebenarnya tujuannya hanya untuk di atas 50% itu adalah untuk kepentingan internal perusahaan. Jadi sebaiknya yang dipublikasikan lebih terbatas dibandingkan regular audit yang sudah ada tata cara pelaporannya.

Nah, untuk audit khusus atau special audit untuk bidang-bidang tertentu yang diaudit oleh BPK seperti misalnya audit infrastruktur dan sebagainya yang bisa dipublikasikan adalah hal-hal yang bersifat umum yang diketahui oleh masyarakat untuk detailnya itu bisa nanti langsung istilahnya melalui BPK, tidak bisa diperoleh dari publik.

Demikian yang bisa kami sampaikan.

#### **KETUA RAPAT:**

Cukup ya.

Kita kasih *applause* dulu kepada Bapak Denny Surandhy.

Terima kasih Pak, kami persilakan saudara untuk meninggalkan tempat.

Selanjutnya Bapak Adi Supanggyo.

Dihadapan kita telah hadir saudara Adi Supanggyo, B.A., S.Ag. selanjutnya kita langsung saja untuk menghemat waktu. Jadi saya sampaikan kepada saudara Adi Supanggyo mekanisme uji kepatutan dan uji kelayakan Calon Anggota BPK akan dilakukan sebagai berikut:

1. Calon Anggota BPK RI menjalankan uji kepatutan dan uji kelayakan sendiri-sendiri, calon yang lain diharapkan menunggu di ruang ruangan.
2. Waktu yang diberikan maksimal 45 menit, terdiri atas 15 menit maksimal calon Anggota BPK RI mempresentasikan makalahnya dan 30 menit tanya jawab.

Langsung saja kami persilakan kepada saudara Adi Supanggyo untuk menyampaikan paparannya.

#### **CALON ANGGOTA BPK RI (ADI SUPANGGYO, B.A., S.Ag.):**

**Yang kami hormati dan kami banggakan sahabat termasuk pejabat yang sungguh kami hormati dari DPR RI.**

Pada kesempatan yang baik dan sangat terhormat bagi kami, kami sampaikan salam sejahtera mudah-mudahan tugas-tugas yang diemban termasuk bagian daripada ibadah kita semua.

Pada kesempatan ini akan kami sampaikan bahwa akan kami perkenalkan saya adalah Adi Supanggyo, asal dari Temanggung. Kemudian kami pernah belajar di APDN Semarang, kemudian kami juga pernah jadi Camat selama beberapa tahun dan kami juga selama ini juga pernah mendapat Satya Lencana dari Presiden Republik Indonesia dari Bapak Soeharto dan kemudian dari Satya Lencana yang kedua Bapak Presiden SBY.

Kami disini bermaksud untuk memberikan hal-hal yang positif dalam rangka untuk menarik benang merah, karena kenapa? Karena kita ketahui bahwa negeri yang kita cintai ini dan kita bangga-banggakan ternyata di sosok yang lain itu penyakit yang selama ini menggerogoti negeri dari sebelah utara, selatan, timur, barat. Di sana kita saksikan bahwa upaya terobosan dalam rangka untuk mengenergikan disini misalnya saja kita masih melihat KKN, korupsi, kolusi, masih bisa kita jumpai di mana-mana. Itu satu penyakit yang sungguh luar biasa, penyakit ini adalah penyakit yang kalau notabene sejak jaman kita ada di jaman Majapahit itu juga masih sudah diberantas waktu itu Hayam Wuruk itu satu-satunya pemberantas korupsi.

Kemudian kita saksikan juga KKN di Papua, ternyata terbesar di Indonesia, kita bisa saksikan di Kompas 28 Juni 2000. Salah satunya negara kita sakit parah karena KKN di negeri ini. Kemudian masih kita saksikan Republik Indonesia terjadi korupsi terbesar di Asia, Suara Merdeka tanggal 15 Juli 2011, halaman 6. Kemudian kebocoran di Depkes juga luar biasa, yang mengobati itu ternyata juga doyan duit, Kompas 14 Juli 2006. Kemudian yang terakhir kita saksikan Kompas, KPK temukan penyimpangan 36 miliar disajikan di Kompas. Itulah gambaran penyakit yang bukan milik Bapak-bapak yang terhormat dari Senayan, tetapi seluruh masyarakat menjadi hal-hal yang harus kita perhatikan bersama.

Oleh karena itu, pada yang kesempatan ini karena waktunya maaf dikejar. Permasalahannya harus kita selesaikan secara tuntas bersama-sama. Kami persilakan untuk menyampaikan hal-hal yang telah kami sampaikan pada awal.

Silakan.

**F-P... (.....):**

Mohon ijin Bapak Pimpinan, untuk menyampaikan membacakan paparan yang akan disampaikan.

**KETUA RAPAT:**

Saya kira tidak perlu Pak, langsung sama beliau saja karena yang fit and propertest kan beliau.

Cukup ya Pak, kita langsung tanya jawab saja.

**CALON ANGGOTA BPK RI (ADI SUPANGGYO, B.A., S.Ag.):**

Sebentar, saya akan menyampaikan beberapa narasi.

**KETUA RAPAT:**

Masih ada, silakan Pak.

**CALON ANGGOTA BPK RI (ADI SUPANGGYO, B.A., S.Ag.):**

Karena paparan yang telah kami sampaikan itu seharusnya harus dibaca, karena waktunya tidak memenuhi sangat terbatas. Kemudian kami mohon agar hal-hal yang bersifat teknis kita bicarakan kemudian oleh tim khusus. Kemudian kami hanya akan menyampaikan bahwa hal-hal yang disampaikan dalam paparan yang tertulis, yang disampaikan pada yang terhormat Anggota DPR RI, untuk kita sepakati bersama dan pertanyaan-pertanyaan karena dalam rangka. Apa yang disampaikan oleh yang terhormat Anggota DPR RI itu sudah tertulis dan tinggal untuk kita implementasikan.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Tidak usah khawatir Pak, materi Bapak ini merupakan bagian satu kesatuan dari pemaparan Bapak.

Langsung saja kami persilakan untuk melakukan pendalaman, langsung dari sebelah kanan Ibu Tutik Kusuma Wardani.

**F-PD (TUTIK KUSUMA WARDANI, S.E., M.M.):**

Terima kasih Pimpinan atas waktunya.

**Bapak Adi Supanggyo yang saya hormati.**

Semangat Bapak tadi untuk membangun negeri ini sangat luar biasa dan sangat saya apresiasi. Sekarang sudah jaman industry 4.0 Pak, jadi tadi sebelumnya banyak sekali calon Anggota BPK yang mempresentasikan tentang pemanfaatan industry 4.0 di BPK. Saya ingin pendapat Bapak bagaimana pendapat Bapak sebenarnya.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Di sebelah kiri Ibu Lilis Santika.

**F-P (LILIS SANTIKA):**

Terima kasih Pimpinan.

Bapak Adi Supanggyo, saya tanya Bapak Adi Sarjana Agama jurusan apa?

**CALON ANGGOTA BPK RI (ADI SUPANGGYO, B.A., S.Ag.):**

Jurusan Syariah.

**F-P (LILIS SANTIKA):**

Dari Universitas mana Pak?

**CALON ANGGOTA BPK RI (ADI SUPANGGYO, B.A., S.Ag.):**

Dari Temanggung saja.

**F-P (DRA. HJ. LILIS SANTIKA):**

Maaf saya tanya karena Bapak itu dari sisi spriritual, dengan paparan yang Bapak sampaikan tadi begitu semangat Bapak menyampaikan tentang KKN di negeri kita ini, Masya Allah ya Pak. Jadi terobosan-terobosan yang akan Bapak Adi lakukan nanti untuk memberantas mental KKN ini dari sisi gelar kesarjanaan yang Bapak miliki, kira-kira akan bisa dilakukan oleh Bapak setelah Bapak nanti seandainya terpilih menjadi Anggota BPK. Itu yang ingin saya dengar langsung dari Bapak.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Lanjut Bapak Achmad Hatari.

**F-P. NASDEM (Dr. ACHMAD HATARI, S.E., M.Si.):**

Saya sedikit saja, ini paper inikan Bapak fotocopy semua ini, kenapa tidak bawa Kompas saja kesini, biar kita baca. Kompas, Merdeka, semuanya fotocopy, jadi berarti bukan Bapak Adi yang tulis.

Yang kedua, Papua itu kembali kepangkuan Republik Indonesia tahun 1963 Bapak sudah taruh disini 1961. Saya orang Papua Pak, jadi menjadi tanda heran yang lain begitu Pak. Bapak baca tidak ini, korupsi terbanyak di dunia Bapak taruh di Papua. Dan disini Pak, tahun 1961 sedangkan tahun 1961 belum kembali ke pangkuan Republik Indonesia. 1963 baru Papua itu kembali ke pangkuan Republik Indonesia.

Terima kasih Pimpinan.

**KETUA RAPAT:**

Lanjut, Ibu Indah.

**F-PDIP (INDAH KURNIA):**

Terima kasih Pimpinan.

Bapak Adi Supanggyo, terima kasih hadir disini. Bapak, ini sayang sekali tadi pemaparannya Bapak ini tidak dari Bapak sendiri, Bapak memanfaatkan waktunya dengan tidak efektif sayang sekali. Bapak lebih banyak pemaparkan klip-kliping koran dan kemudian tadi sempat meminta asisten untuk menyampaikan hal-hal yang penting yang harusnya Bapak paparkan kepada kami, untuk memastikan bahwa Bapak ini layak untuk kami pilih sebagai Anggota BPK. Sayang sekali, tetapi saya ingin menanyakan seandainya Tuhan mengizinkan Bapak terpilih sebagai Anggota BPK dengan posisi yang agak sedikit sulit Pak, sangat konsensi dan strategis fungsi BPK. Kemudian dengan anggaran yang terbatas, SDM yang terbatas, kira-kira Bapak Adi bisa melakukan apa di BPK nanti.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Cukup ya.

Kami persilakan Bapak Adi Supanggyo untuk menjawab pertanyaan Anggota.  
Kami persilakan Pak.

**CALON ANGGOTA BPK RI (ADI SUPANGGYO, B.A., S.Ag.):**

Industry yang dimaksud tadi adalah 4.0 implementasinya bagaimana, silakan untuk asisten sampaikan.

**KETUA RAPAT:**

Pak, tidak boleh asisten yang menjawab langsung Bapak, yang fit and propertest kan Bapak. Dilewati saja, mana yang bisa dijawab dan mana yang tidak. Silakan Pak.

**CALON ANGGOTA BPK RI (ADI SUPANGGYO, B.A., S.Ag.):**

Yang pertama pas ya, kemudian untuk yang terobosan-terobosan karena hal ini sudah kita sampaikan di dalam paparan. Terobosan-terobosan itu merupakan satu janji bareng-bareng dengan semuanya. Artinya, dalam pelaksanaan itu kita saksikan karena waktunya sangat mendesak, itu terobosan bisa kita saksikan dalam narasi pada Bab 2 itu, kalau dibaca satu per satu mohon maaf nanti waktunya. Bapak bisa membaca paparan kami otomatis sudah terjawab.

## **KETUA RAPAT:**

Terima kasih.

Kita kasih applause kepada Adi Supanggyo.

Ini bagian satu kesatuan dengan paparan Bapak, selanjutnya kami persilakan kepada saudara Adi Supanggyo untuk meninggalkan tempat.

Saudara-saudara sekalian, di hadapan kita sudah ada saudara Edhi Mulyono, S.E., M.M., Akt.

Ini ada aturan main yang harus saya sampaikan karena waktunya cukup singkat. Mekanisme uji kepatutan dan kelayakan Calon Anggota BPK RI akan dilaksanakan sebagai berikut:

1. Calon Anggota BPK RI menjalankan uji kepatutan dan uji kelayakan sendiri-sendiri, calon yang lain diharapkan menunggu di ruang ruangan.
2. Waktu yang diberikan maksimal 45 menit, terdiri atas 15 menit maksimal calon Anggota BPK RI mempresentasikan makalahnya dan 30 menit tanya jawab.

Untuk mempersingkat waktu kami persilakan kepada saudara Edhi Mulyono untuk menyampaikan paparannya.

## **CALON ANGGOTA BPK RI (EDHI MULYONO, S.E., M.M., Akt.):**

Baik, terima kasih.

*Bismillahirrahmanirahim.*

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,*

**Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua,**

**Salam kebajikan,**

*Om swasti astu,*

*Namo budaya.*

**Pimpinan Sidang yang kami hormati,**

**Dan seluruh Anggota Komisi XI DPR RI yang kami hormati.**

Kami berikan kesempatan untuk melakukan pemaparan sebagai Calon Anggota BPK periode 2019-2024. Mungkin paparan kami singkat saja, yang inti daripada konsep yang kami tawarkan.

Sebelumnya mohon ijin barangkali kami bisa memperkenalkan diri kami, nama kami tercantum di depan Edhi Mulyono, tanggal lahir 27 Mei 1962. Kebetulan hari ini kalau kita tarik pada hijriah, hari ini kebetulan ulang tahun di hijriah saya. Mudah-mudahan hari ini ada berkahnya dari Bapak dan Ibu semua yang kami hormati.

Saat ini kami masih bekerja di Inspektorat BNN sebagai Inspektur 3 sebagai perbantuan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Background



pendidikan saya dari Sekolah Tinggi Akuntansi Negara tamat 1984, kemudian akuntansi saya dapat dari Universitas Diponegoro di Semarang tahun 1995. Dan pertama tugas sebagai auditor sampai hari ini sebagai auditor di 35 tahun hampir 40 tahun praktisnya dari mulai Jambi, Semarang, hampir seluruh Jawa Tengah saya lakukan pemeriksaan dari seluruh Pemda. Kemudian ke pusat sekitar tahun 1999 setelah reformasi diperbantukan di Komisi Yudisial. Kemudian 2008 sampai sekarang ikut diperbantukan di BNN sebagai Inspektur 2 sampai hari ini. Dan tentunya dengan saya diperbantukan di BNN barangkali saya punya keunggulan dari yang lain bahwa saya anti narkoba terkait dengan saya sebagai personil dari BNN.

Paparan saya, konsep yang saya berikan adalah bahwa bagaimana mengoptimalkan atau meningkatkan peran BPK RI kedepan melalui audit kinerja. Secara konsep, secara teori audit itu hanya 3 macam, banyak dari istilah-istilah yang lain-lain sebenarnya ada pertama audit terkait dengan masalah ketaatan, kemudian ada operasional audit, kemudian juga dengan special audit atau audit dengan tujuan tertentu. Dan ketiga jenis audit ini sudah dilaksanakan oleh BPK dengan ruang lingkup yang sangat luas mulai dari Pemerintahan Pusat dan Daerah dan kemudian BUMN, BUMD, kemudian juga badan usaha lainnya, Pemerintah Daerah, Laporan Keuangan Daerah.

Saya ingin yang telah dilakukan oleh BPK selama ini, saya agak sangat menyayangkan bahwa lembaga sebesar ini sebesar BPK dengan dasar Undang-Undang, dengan orang-orang yang sangat kompeten, dengan ilmu yang sangat baik di bidang auditing selama ini hanya melakukan bahkan terstempel barangkali mpohon maaf, bahwa BPK hanya sebagai tukang pemberi opini terhadap laporan keuangan belaka. Nah, ini yang saya kurang setuju sebenarnya sehingga kedepan barangkali saya ingin bahwa lebih ditingkatkan lagi bukan hanya kepada *compliance* yang dalam general audit terkait hanya memberikan opini laporan keuangan belaka yang dampaknya pun ternyata sampai sekarang banyak negative, ada jual beli opini, ada jual beli macam-macam karena opini ini sangat membanggakan bagi kalangan masyarakat. Tetapi memang secara teori opini itu memberikan gambarnya yang seharusnya lembaga itu menjadi yang baik, tidak ada yang diragukan semua dapat dipercaya. Namun, nyatanya karena barangkali pelaksana auditnya yang kurang bagus atau banyak hal-hal yang lain yang tidak ini, sehingga terus saja seperti terjadi di beberapa kementerian adanya, walaupun sudah WTP yang mana opini itu adalah opini tertinggi dari seorang profesi akuntan masih juga terjadi korupsi, masih juga terjadi penyimpangan. Nah, inilah yang kurang ini karena juga jadi karena hal-hal auditnya yang tidak maksimal, yang tidak optimal yang barangkali banyak hal-hal yang tidak sesuai.

Dan saya ingin memfokuskan pada BPK lebih pada pemeriksaan yang bersifat operasional, pemeriksaan kepada kinerjanya yang muncul sebenarnya istilah performance audit ini sejak sekitar 2000-an kita terlalu evoria dengan itu. Banyak yang melaksanakan kinerja tapi hasil daripada pemeriksaannya sendiri menurut saya masih hanya mendekati hasil pemeriksaan keuangan belaka, hasilnya hampir sama saja. Mereka hanya menilai efektifitas, efisiensi dan ekonomi, belum memperbaiki kinerja dan belum melihat bahwa kinerja yang sebenarnya dari Satker

itu, dari organisasi itu sebenarnya apa. bahkan kalau kita melihat sampai sekarang barangkali BPK juga belum punya, belum memiliki kalau dilihat dari struktur organisasinya, belum memiliki data pantauan yang sangat rinci, yang terkait dengan bagaimana sih hasil Pemerintah selama ini terkait dengan tujuan bernegara. Mulai dari Renstra yang telah disusun selama 35 tahun bagaimana hasilnya 5 tahun dan bahkan hari ini hasilnya seperti apa, kita mungkin belum pasti kita ketahui.

Dan disanalah arah saya barangkali dengan pemeriksaan kinerja tadi, karena pemeriksaan kinerja itu meliputi dari kita harus menilai mengevaluasi sejak dari perencanaan, kemudian pelaksanaannya, proses pelaksanaannya, sampai akhirnya dan hasil dan harus dievaluasi serta dilandasi dengan sistem pengendalian intern yang baik terhadap ketaatan laporan keuangan yang baik. Jika sampai pada kinerja yang sebenarnya yang komprehensif barangkali saya yakin 90% bahwa dengan memperhatikan kinerja, dengan memperhatikan prosesnya dari perencanaan, pelaksanaan, dengan kualitas hasil outputnya yang kita nilai, apakah sesuai *outcome* yang diharapkan dengan yang direncanakan, maka saya yakin bahwa opini WTP pun otomatis bisa dapat dicapai tanpa harus melakukan pemeriksaan tersendiri dengan financial audit. Dan tentu kalau sekarang kita lihat secara fakta barangkali pemeriksaan kinerja yang dilakukan oleh BPK jauh lebih kecil daripada financial audit karena semua kita mengacu kepada financial audit sesuai dengan permintaan Kementerian Keuangan dan juga perundang-undangan juga, kemudian terkait dengan Kemenpan RB karena opini WTP itu sangat diperlukan dalam rangka penilaian reformasi birokrasi salah satu point yang harus di dapat oleh Kementerian/Lembaga, BUMN, BUMD, sehingga menggunakan point yang agak lebih tinggi sehingga bila mendapatkan opini WTP. Sehingga dengan berbagai cara, berbagai upaya mereka berusaha mendapatkan selebar kertas laporan itu untuk unqualified opinion. Namun sayangnya tanpa memperhatikan proses yang dipakai, sehingga ternyata di belakang ada hal-hal yang tidak diinginkan.

Nah, kedepan saya inginkan bahwa saya menawarkan bahwa konsep pemeriksaan kinerja yang jauh lebih baik, jauh lebih komprehensif sehingga BPK mampu menjadi auditor yang lebih professional, dapat menyediakan data yang lebih valid, yang lebih fakta dan actual sehingga disana barangkali saya mengharapkan data-data yang disajikan oleh BPK dapat dijadikan sebagai rujukan bagi DPR RI, bagi Pemerintah, bagi masyarakat untuk bisa mengetahui bagaimana kinerja, bagaimana capaian kinerja Pemerintah sesuai dengan tujuan bernegara yang telah dilakukan sejak awal bahkan sampai mungkin BPK harus dapat memperkirakan apa yang harus dilakukan negara untuk tahun-tahun berikutnya sesuai dengan kondisi yang terjadi secara global.

Saya kira demikian dari paparan yang singkat daripada ringkasan yang bisa saya berikan.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT:**

Terima kasih.

Demikian paparan dari saudara Edhi Mulyono, selanjutnya kita lakukan pendalaman. Kita mulai dari sebelah kanan dulu, Ibu Tutik Kusuma Wardani.

**F-PD (TUTIK KUSUMA WARDANI, S.E., M.M.):**

Terima kasih Pimpinan atas waktunya.

**Yang saya hormati Bapak Edhi Mulyono.**

Terima kasih tadi pemaparannya cukup bagus Pak, saya sangat apresiasi. Yang ingin saya tanyakan Pak, sebagaimana kita ketahui bahwa pemeriksaan laporan keuangan menghasilkan opini. Kemudian sedangkan pemeriksaan investigasi yaitu mendeteksi adanya kerugian negara. Nah, Bapak sebagai calon Anggota BPK RI bagaimana nanti Bapak dapat menyeleraskan antara temuan dan predikat dalam mengawal keuangan negara.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Lanjut, sebelah kiri Dr. Felicitas Tallulembang.

**F-P. GERINDRA (Dr. FELICITAS TALLULEMBANG):**

Terima kasih Ketua.

Bapak Edhi Mulyono, melihat pemaparan Bapak sebagai Calon Anggota BPK cukup saya memberikan apresiasi. Saya cuma ingin menanyakan tadi sudah Bapak menyampaikan tadi bahwa apabila dalam satu pemeriksaan ada WTP dan sekarang kita lihat di beberapa instansi daerah dan lain-lain bahwa beberapa WTP selembar kertas yang Bapak bilang tadi, tetapi akhirnya kemudian berapa tahun kemudian kita dapat lagi malah korupsi di tempat itu. Kira-kira dengan tadi Bapak memaparkan solusi keluar berbasis kinerja yang Bapak sampaikan tadi. Bagaimana akan meyakinkan kolega-kolega Bapak dengan basis kinerja yang Bapak sampaikan, seandainya Bapak terpilih. Mengimplementasikannya ke instansi-instansi yang akan diperiksa, karena BPK ini adalah salah satu badan yang menjadi andalan Pemerintah untuk menyelamatkan uang negara.

Terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT:**

Silakan Bapak Amirul Tamim.

**F-PPP (Dr. H. MZ. AMIRUL TAMIM, M.Si.):**

Singkat saja Bapak Edhi, Bapak di BNN sekarang, tadinya di BPKP. Jadi ingin masuk karena agak mungkin ingin melihat BPK maju ya. Saya cuma ingin tanya banyak orang mengatakan bahwa pemeriksaan kinerja itu belum banyak dilakukan oleh BPK. Saya ingin minta kira-kira kalau kriteria-kriteria apa itu yang bisa mungkin *output*-nya dari pemeriksaan kinerja itu, baik itu kualitatif maupun mungkin kuantitatif.

Saya kira demikian Pimpinan.

**KETUA RAPAT:**

Silakan Bapak Sudiro.

**F-P. HANURA (Drs. SUDIRO ASNO):**

Terima kasih Pimpinan.

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Langsung Bapak Edhi ya, judulnya ini optimalisasi peran BPK pada Pemerintah Pusat dan Daerah. Pertanyaan saya singkat, sejauh ini peran BPK terhadap Pemerintah Daerah sejauhmana sehingga perlu dioptimalisasi. Lalu kira-kira apa yang akan dilakukan oleh Bapak Edhi kalau seandainya Bapak terpilih, lalu apa yang akan dioptimalkan.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Cukup ya.

Demikian pertanyaan Anggota Komisi XI DPR RI, selanjutnya kami persilakan kepada saudara Edhi Mulyono untuk menjawab pertanyaan tersebut.

Kami persilakan Pak.

**CALON ANGGOTA BPK RI (EDHI MULYONO, S.E., M.M., Akt.):**

Baik, terima kasih.

**Bapak dan Ibu semua yang kami hormati.**

Pertanyaan pertama dari Ibu, mungkin sama financial statement dengan special audit. Sebenarnya ada kesamaan dan ada sekaligus perbedaan, financial statement memang tujuannya adalah memberikan pendapat, memberikan pernyataan bahwa laporan keuangan layak dan dapat dipercaya. Sehingga dasar daripada pemeriksaan tersebut adalah pertama sebagai professional harus memiliki dasar untuk menyatakan itu layak atau tidak. Yang pertama adalah apakah dalam proses pelaporan, dalam proses kegiatan organisasi memiliki satu sistem pengendalian yang memang baik dalam hal ini Pemerintah adalah apakah diterapkan ada sistem pengendalian intern Pemerintah yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008. Kemudian juga selain sistem yang ada yang harus sudah berjalan tentu juga apakah laporan keuangan tadi atau kegiatan tadi dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku, dalam hal prinsip-prinsip akuntansi Pemerintah.

Kemudian dasar berikutnya adalah apakah pelaksanaan kegiatan, apakah pelaksanaan penyusunan laporan keuangan ini sesuai dengan ketentuan, kebijakan dan aturan-aturan yang berlaku. Nah, dalam kaitan ini secara professional tentunya untuk memberikan pernyataan itu hanya satu saja sebenarnya. Setelah dilihat dari ketiga dasar tadi semuanya baik, semua tidak diragukan, sehingga barulah dapat dilakukan pemberian opini wajar tanpa pengecualian.

Kalau lihat barangkali sekarang ini kelihatannya laporan ini termodifikasi dengan sedemikian rupa. Sehingga walaupun ternyata ada kalau kita lihat laporan keuangan secara terpisah, opini yang menyatakan WTP namun ada dua laporan kembali yang diterbitkan oleh BPK terkait dengan sistem pengendalian internnya dengan ketaatan terhadap peraturan. Nah, disinilah barangkali yang agak mengganggu barangkali. Karena sebenarnya unqualified opinion itu adalah bahwa laporan keuangan itu tidak memiliki hal-hal yang dapat dipertanyakan, yang dapat dipermasalahkan terkait dengan tadi sistem maupun ketaatan terhadap peraturan.

Nah, kalau kita lihat sekarang ternyata dalam laporan SPI-nya kemudian laporan ketaatan terhadap peraturan, banyak catatan-catatan. Itulah sebenarnya yang seharusnya menjadi pengecualian daripada pendapat tadi. Nah, sekarang kita bisa berlogika masing-masing barangkali bagaimana itu bisa terjadi, sehingga akhirnya pun banyak terjadi hal-hal dibelakang seperti yang adanya penyelewengan dan lain sebagainya.

Nah, disinilah sebenarnya kalau memang kita ini yang terkait dengan special audit tadi. Bukan hanya terkait dengan laporan keuangan, dari laporan keuangan pun misalnya ada pengecualian tertentu kita bisa lakukan tindaklanjutnya kembali dengan untuk melakukan pembuktian lebih lanjut atas kecurigaan, atas temuan kita, atas pengecualian kita, atas pemeriksaan keuangan bisa ditindaklanjuti dengan special audit, dengan audit investigasi, ataupun kita punya tujuan sendiri berdasarkan hasil penilaian evaluasi sistem yang ada, metode yang ada, terdapat hal-hal yang kurang dapat diterima oleh kita, oleh profesi, sehingga perlu dilakukan audit investigasi, sehingga perlu dilakukan audit dengan tujuan untuk mengungkap apakah ketidakpercayaan kita tadi, apakah hal-hal yang kita curigai terjadi, memang benar terjadi atau tidak. Jadi dua-duanya bisa dilaksanakan dari laporan keuangan

muncul mungkin temuan-temuan, sehingga memberikan opininya barangkali tidak WTP itu barangkali boleh dilanjutkan dengan special audit atau bahkan kita hasil dari evakuasi dan sistem yang ada kecurigaan kita hal-hal tertentu terjadi dan kemudian kita bisa melakukan audit tersendiri yang bersifat special, yang bersifat khusus untuk membuktikan kecurigaan atau membuktikan hal-hal yang memang kita anggap kurang baik yang terjadi disana.

Nah, disitulah barangkali yang makanya walaupun ada WTP sehingga banyak masih terjadi, karena memang WTP ini kayaknya menjadi tren yang hanya target WTP secara formal. Kalau memang secara professional saya menyatakan bahwa WTP bukan tidak menjamin tidak ada korupsi, tetapi paling tidak sistem yang ada sudah ada sudah sedemikian baiknya, sudah sedemikian akurat dibuat, aturan juga dibuat dengan baik, sehingga paling tidak korupsi pun dapat diperkirakan sangat kecil terjadi. Nah, disini barangkali memang terbukti bahwa kasus-kasus terjadi jual beli temuan, jual beli WTP, bahkan barangkali bukan jadi rahasia barangkali. Bahkan keputusan untuk memberikan WTP pun dilakukan di lapangan golf, kemudian ditempat-tempat lain, sehingga harusnya tidak WTP jadi diberikan WTP karena dengan banyak catatan tadi yang dilakukan yang diberikan dalam laporan tersendiri. Itu menurut hemat saya sebenarnya tidak boleh terjadi, dalam WTP itu harusnya catatan atas SPI maupun ketaatan tadi harusnya boleh dibilang tidak sangat signifikan sehingga bisa kita jamin bahwa korupsi mungkin sangat kecil terjadi.

Nah, disini saya menawarkan dalam laporan kinerja kita tidak hanya melihat pada history event, karena financial audit itu hanya beerfokus kepada historical event pada kejadian yang telah lalu sehingga untuk kedepan pun kurang kalau tidak ditindaklanjuti dengan baik akan menjadi tetap tidak baik. Sehingga kami menawarkan tidak hanya financial audit tetapi kita lebih baik pada kegiatan kinerjanya, pada audit kinerjanya mulai dari perencanaannya seperti apa, proses perencanaannya seperti apa, kita samakan, kita nilai, kita evaluasi, perencanaannya ini sesuai tidak dengan tujuan awalnya, dengan tujuan pendirian organisasi, dengan tujuan bernegara. Bagaimana *break down*-nya perencanaannya, kemudian dari perencanaan bagaimana pelaksanaannya, bagaimana proses pelaksanaannya, apakah sistem dalam pelaksanaannya sudah dibangun sedemikian rupa, sudah dibangun sedemikian baik dan dilaksanakan oleh orang-orang yang berkompeten dan berkapabilitas untuk melaksanakan tersebut, sehingga sistemnya berjalan dengan baik.

Dan dari sini juga harus kita lihat *output*-nya dari hasil kerja itu sesuai tidak dengan perencanaannya itu, apa yang terjadi, apakah kualitas *output*-nya diperhatikan sehingga kualitas *output* yang didapatkan ini bisa memberpengaruh langsung pada dampak yang memang diinginkan dalam tujuan kita bernegara maupun dengan tujuan kita membuat organisasi tadi.

Memang saya pikir itu satu pekerjaan yang sangat luar biasa untuk melakukan pekerjaan ini, karena saya juga inginkan BPK itu mempunyai data-data sepanjang tahun sampai mungkin untuk dari awal sampai akhir dengan kinerja yang sudah dilakukan oleh Pemerintah, oleh organisasi sehingga mampu memberikan ini.

Nah, disitulah barangkali dengan keyakinan saya kinerja tadi dapat membantu bahwa kalau memang terjadi kinerja proses mulai perencanaan, pelaksanaan dan dilaksanakan dalam satu sistem yang baik, pasti dalam financial auditnya pun akan memperoleh opini tanpa harus dilakukan *deal-deal* yang tidak baik. Saya kira demikian untuk menjawab beberapa pertanyaan.

Dan untuk Pemda saya kira hampir sama kondisinya karena selama ini selalu financial audit bahkan kemarin berita ada beberapa Pemda yang nyatanya mereka merasa tidak diperiksa, namun diberikan pernyataan disclaimer atau tidak memberikan pendapat.

Nah, dalam hal ini sebagai profesi karena tadi semua berdasarkan data yang sudah pernah diaudit. Walaupun ada semacam itu barangkali tentunya itu satu kelemahan BPK. Barangkali kalau memang tidak ada audit secara professional kita tidak boleh juga memberikan disclaimer, lebih baik kita laporkan bahwa Pemda tersebut atau Satker tersebut tidak dilakukan audit. Jadi kita tidak harus memaksakan bahwa Pemda yang tidak kita periksa kita disclaimer karena kita tidak punya data. Mau tidak mau kita harus punya dasar bagaimana Pemda itu telah berjalan dan bagaimana Pemda itu telah berproses sehingga kita punya dasar untuk memberikan pendapat bahwa kita tidak menyatakan pendapat. Kalau tidak kita audit lebih baik kita katakan bahwa tidak dilakukan audit atas Satker atau atas Pemda tersebut, sehingga kita tidak bisa memberikan opini.

Saya kira demikian, mohon maaf barangkali ada hal-hal yang masih kurang jawaban kami.

Terima kasih.

#### **KETUA RAPAT:**

Demikian jawaban dan tanggapan saudara Edhi Mulyono, S.E., Ak., M.M., terhadap pertanyaan Anggota. Sebelum beliau meninggalkan tempat kita berikan *applause* dulu kepada beliau.

Terima kasih Pak, kami persilakan Bapak meninggalkan tempat.

Sekarang saudara Dachamer Munte.

#### **Anggota Komisi XI DPR RI yang terhormat.**

Dihadapan kita adalah Calon Anggota BPK RI saudara Dr. Dachamer Munte, S.H., M.H. untuk mempersingkat waktu saya sampaikan aturan main dalam fit and proptest ini.

Mekanisme uji kepatutan dan kelayakan Calon Anggota BPK RI akan dilaksanakan sebagai berikut:

1. Calon Anggota BPK RI menjalankan uji kepatutan dan uji kelayakan sendiri-sendiri, calon yang lain diharapkan menunggu di ruang ruangan.
2. Waktu yang diberikan maksimal 45 menit, terdiri atas 15 menit maksimal calon Anggota BPK RI mempresentasikan makalahnya dan 30 menit tanya jawab.

Untuk mempersingkat waktu kami persilakan kepada saudara Dr. Dachamer Munte untuk memaparkan.

**CALON ANGGOTA BPK RI (Dr. DACHAMER MUNTE, S.H., M.H.):**

Terima kasih Pimpinan.

**Pimpinan dan Anggota Komisi XI DPR RI yang saya hormati.**

Saya akan membacakan *highlight*-nya saja Pak, supaya bisa menghemat waktu. Intinya begini ya, kalau kita mengacu kepada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK dan juga Keuangan Negara. Tugas dan kewenangan BPK inikan sangat luas, sangat luar biasa. Dia melakukan pemeriksaan keuangan terhadap semua institusi negara, baik di pusat dan daerah. Berdasarkan data yang kita peroleh ada sekitar tahun 2019 itu ada sekitar 5 triliun APBN yang merupakan objek pemeriksaan BPK.

Dengan kewenangan yang luar biasa seperti ini, maka saya akan dorong seandainya terpilih nanti BPK ini akan kita optimalkan untuk mensejahterakan masyarakat dengan APBN yang begitu besar. Kita harapkan dapat digunakan untuk kesejahteraan masyarakat sebagai salah satu tujuan bernegara kita sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Intinya adalah BPK ini mempunyai hak-hak yang luar biasa, dia mempunyai hak untuk melakukan pemeriksaan keuangan, hak-hak untuk melakukan pemeriksaan kinerja, hak-hak untuk melakukan audit investigative. Dia mempunyai hak-hak untuk menyatakan pendapat, hak-hak untuk menyatakan pertimbangan terhadap kerugian keuangan negara, hak-hak untuk menentukan jumlah ganti rugi keuangan negara dalam rangka investigative dan banyak sekali kewenangan-kewenangan dan hak-hak BPK yang bisa kita dorong, bisa kita optimalkan untuk menjadi lebih optimal dalam rangka pencapaian tujuan bernegara, yaitu salah satunya adalah untuk memajukan kesejahteraan umum.

Yang saya mau tegaskan adalah dari 3 jenis pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK itu, ada satu point jenis pemeriksaan yang sangat-sangat substansi untuk mendorong peran BPK dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, yaitu pemeriksaan kinerja. Pemeriksaan keuangan yang mereka lakukan selama ini itu hanya menilai tingkat kewajaran laporan keuangan, jadi tidak substansif. Tetapi apabila kita dorong dia BPK ini melakukan pemeriksaan kinerja kedepan, ini akan sangat efektif, efisien dan ekonomis dalam melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan keuangan negara.

Yang kedua, pemeriksaan kinerja ini juga adalah salah satu rekomendasi dari model pemeriksaan yang dikeluarkan oleh Intosai. Intosai ini adalah salah satu badan perkumpulan BPK sedunia. Di sana disebutkan adalah tugas BPK antara lain adalah untuk meningkatkan ekonomis, efisiensi, dan efektifitas satu program dan kegiatan dalam satu entitas.



Selanjutnya audit kinerja ini juga sangat berperan bagi masyarakat kita, seperti yang kita ketahui saat ini yang lagi actual adalah kebakaran hutan. Ini BPK bisa kita dorong untuk melakukan kinerja, melalui audit lingkungan, sehingga kita mengetahui akar permasalahan dan solusi-solusi sesuai dengan rekomendasi nanti yang ditemukan. Jadi tidak hanya dia berkaitan dengan pengelolaan fungsi keuangan negara tetapi kondisi-kondisi actual yang terjadi di masyarakat juga dia bisa hadir disana untuk melakukan audit sesuai dengan kondisi yang dibutuhkan masyarakat yang sekarang ini kita lihat asap dimana-mana, kebakaran hutan baik di Riau dan Kalimantan. Ini audit lingkungan belum ada, BPK juga belum ada, padahal BPK punya peranan untuk itu. Sehingga setiap tahun kita lihat timbul masalah asap terus yang merepotkan kita semua.

Oleh karena itu, sangat penting dan sangat kita dorong agar BPK ini memprioritaskan dari 3 jenis pemeriksaan yang dia miliki kewenangan itu. Saya akan dorong pemeriksaan kinerja ini lebih dioptimalkan dibandingkan dengan pemeriksaan-pemeriksaan laporan keuangan.

Ada manfaat selain manfaat dari audit kinerja ini kita lihat yang pertama dia bisa menghilangkan akar permasalahan. Kita ketahui akar permasalahannya kemudian kita dapat menghilangkan itu. Kemudian hasil rekomendasi daripada pemeriksaan audit kinerja ini apabila ditindaklanjuti ini akan menyelesaikan masalah terhadap permasalahan yang timbul di tengah-tengah masyarakat.

Saya kira demikian Pimpinan, dan selain itu banyak lagi fungsi-fungsi lain yang tidak kalah pentingnya. Yang tidak pernah diperankan oleh BPK selama ini, dia berwenang untuk menyatakan pendapat untuk perbaikan kinerja terhadap institusi, lembaga tinggi negara, lembaga negara, kementerian dan lembaga negara maupun Pemerintah Daerah, Provinsi dan Pemerintah Daerah tingkat II sampai Pemerintahan Desa. Dalam rangka perbaikan-perbaikan yang menyangkut tentang pemeriksaan pengelolaan keuangan negara dan tanggungjawab keuangan negara.

Kemudian juga dia ada fungsi yang tidak pernah mereka mainkan selama ini, yaitu memberikan pertimbangan terhadap pengelolaan keuangan negara, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Itulah yang kira-kira pokok-pokok yang bisa saya sampaikan Pimpinan. Apa yang akan saya tuju seandainya saya terpilih menjadi Anggota BPK untuk mendorong BPK supaya lebih optimal dalam rangka penerapan pemeriksaan kinerja kedepan dan fungsi-fungsi lain sesuai dengan Undang-Undang yang mereka miliki, Undang-Undang BPK Nomor 15 Tahun 2006 kedepan.

Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan sementara, nanti kita mungkin akan bisa diskusi dalam rangka tanya jawab.

Terima kasih Pimpinan.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

## **KETUA RAPAT:**

Terima kasih Bapak Dachamer.

Selanjutnya kita akan melakukan pendalaman, sebelah kiri Bapak Marsiaman Saragih.

## **F-PDIP (MANSIAMAN SARAGIH):**

Terima kasih Pimpinan.

Kalau saya melihat curriculum vitae Bapak Dachamer ini latar belakangnya di Kejaksaan, berarti penyidik ya Pak. Biasanya yang dikeluarkan oleh BPK penilaian mereka itu adalah bersifat opini, bisa WTP, WDP, dan seterusnya. Tapi dilapangan opini yang telah dikeluarkan oleh BPK ini kadang juga diperkarakan oleh masyarakat atau Ormas. Berhubung mungkin ada data-data yang sesuai dengan mereka itu dilaporkan ke pihak petugas yang bersangkutan, biasanya ke Kepolisian atau Kejaksaan.

Nah, dalam proses penyidikan yang berlaku si penyidik bahkan membawa hasil opini BPK ini ke KAP atau Perguruan Tinggi setempat untuk dibuatkan pemeriksaan kembali. Jadi kalau menurut Bapak Dachamer itu bahwa tugas BPK itu dan kewenangan yang sangat luar biasa tapi kok diulang lagi dibawa ke KAP atau ke perguruan tinggi setempat. Karena dia ragu dia untuk membuat meneliti, menelusuri, penyidikan yang digunakan oleh si penyidik tadi. Nah, ini terjadi di beberapa daerah.

Dan akhirnya kita tahu sendiri biasanya hilang begitu saja. Nah, ini apa memang karena itu kebebasan orang berpendapat atau keadilan yang ditegakkan harus diperdalam lagi di bawah atau memang saling tidak mengerti. Si penyidiknya mungkin karena Bintang tidak terlalu pusing yang penting dia bisa menguatkan dirinya bahwa ini tidak terbukti atau terbukti. Jadi apakah karena sifat opini tadi itu yang membuat. Jadi pertanyaannya kenapa bisa seperti itu, apakah di penegak hukum itu juga hal-hal seperti itu dasarnya apa membuat si penyidik melakukan lagi pembuktian-pembuktian ke lembaga-lembaga yang lebih rendah malah dari BPK.

Saya pikir itu saja dan di CV Bapak ini ada pernah menjadi tenaga ahli di BPK.

## **CALON ANGGOTA BPK RI (Dr. DACHAMER MUNTE, S.H., M.H.):**

Sampai sekarang masih Pak, jadi saya purna 3 tahun yang lalu kemudian BPK meminta saya untuk menjadi tenaga ahli, *running* sampai sekarang 3 tahun saya menjalani sehingga saya mengetahui anatomi BPK.

## **F-PDIP (MANSIAMAN SARAGIH):**

Coba dikasih contoh apa saja yang selama ini agak tertutup yang tidak dikeluarkan ke publik yang publik juga ingin tahu. Terima kasih.

**WAKIL KETUA (JULIARI P BATUBARA):**

Terima kasih Bapak Marsiaman.  
Berikutnya Ibu Elviana.

**F-PPP (Dra. ELVIANA, M.Si.):**

Terima kasih Pimpinan.

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

**Bapak Pimpinan, Bapak dan Ibu Anggota Komisi XI DPR RI yang saya hormati, Bapak Dr. Dachamer Munte, S.H., M.H. yang juga saya hormati.**

Saya Elviana Pak, Fraksi PPP Dapil Jambi. Saya sudah membaca makalah Bapak dan memperhatikan paparan Bapak tadi. Di BPK Bapak kan akan mengaudit keuangan dan audit kepatuhan. Kalau melihat latar belakang Bapak, sebagai seorang Jaksa mungkin kemampuan mengaudit kepatuhan tidak diragukan lagi. Yang saya tanya pertama itu, dari sekian banyak pengalaman Bapak ini, pengalaman pendidika, pekerjaan, bagian mana yang akan Bapak andalkan atau yakinkan kepada kami Bapak mampu nanti sebagai auditor di bidang manajemen keuangan itu dan akuntansi. Yang kedua, Anggota BPK yang akan diganti tentu Bapak sudah punya incaran. Saya kira Anggota mana yang akan Bapak sasar dan apa alasannya.

Terima kasih Pimpinan.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT:**

Lanjut Bapak Amirul.

**F-PPP (Dr. H. MZ. AMIRUL TAMIM, M.Si.):**

Saya langsung saja Pak Dr. Dachamer Munte, kalau saya melihat riwayat hidup Bapak ini tidak diragukan lagi untuk di BPK kalau memang Bapak terpilih. Tadi ada calon yang lain sebelumnya memaparkan bahwa pada tahun 2007 khusus untuk di Pemerintah Daerah, 2007 itu yang WTP hanya 4, kemudian tahun 2017 itu 411 yang WTP. Sekarang saya ingin minta pandangan, apakah ini berbanding lurus dengan kinerja atau memang WTP ini perlu dikoreksi tidak berbanding lurus dengan kinerja. Saya kira itu Pimpinan.

Terima kasih.

**WAKIL KETUA (JULIARI P BATUBARA):**

Terima kasih, lanjut Bapak Achmad Hatari.

**F-P. NASDEM (Dr. ACHMAD HATARI, S.E., M.Si.):**

Terima kasih.

Pak Munte, optimalisasi peran BPK dalam mewujudkan tujuan negara, tapi dalam *paper* ini Bapak lebih banyak mengulas tentang pemeriksaan kinerja. Memang diakui bahwa BPK kita prosentase pemeriksaan kinerja masih paling terendah dan ini tidak memenuhi standar internasional. Padahal yang kita tahu mandat yang oleh negara diberikan oleh BPK adalah 3 Pak, audit financial, audit kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Saya lihat dua ini kurang diulas.

Berikut terkait dengan ikhtisar hasil pemeriksaan semester, Bapak tidak mencantumkan tahun berapa tetapi disini banyak sekali Bapak menyinggung tentang IHPS sehingga kita tidak bisa mengukur kualitas angka-angka di dalam *paper* ini.

Terima kasih Bapak Munte.

**WAKIL KETUA (JULIARI P BATUBARA):**

Terima kasih.

Berikutnya Ibu Dr. Felicitas silakan.

**F-P. GERINDRA (Dr. FELICITAS TALLULEMBANG):**

Terima kasih Ketua.

**Ketua dan teman-teman di Komisi XI DPR RI.**

Melihat kurikulum Bapak ini sama dengan teman-teman yang lain, Bapak ini dari Kejaksaan dan melihat lembaga BPK ini adalah lembaga yang mengawal dana negara yang begitu besar. Satu saja yang ingin saya tanya sama Bapak mengenai pertimbangan yang Bapak sampaikan tadi, bagaimana Bapak seandainya Bapak terpilih menjadi salah satu Anggota BPK kedepan mengimplementasikan fungsi pertimbangan ini kepada seluruh instansi Pemerintah di daerah dan pusat, supaya uang negara diminimumkan untuk kerugiannya, karena kan lebih baik kita mencegah daripada mengobati walaupun Jaksa tugasnya mengawasi.

Terima kasih.

**WAKIL KETUA (JULIARI P BATUBARA):**

Terima kasih.

Yang terakhir Bapak Sudiro, silakan.

**F-P. HANURA (Drs. SUDIRO ASNO):**

Terima kasih Bapak Ketua.

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Langsung saja Bapak Dachamer Munte, Bapak tadi mengatakan masih sebagai tenaga ahli di BPK. Dan di kaitkan dengan judul makalah Bapak, optimalisasi peran BPK dan seterusnya. Pertanyaan saya sebetulnya apa yang Bapak ketahui atau sejauhmana peran BPK RI di dalam melaksanakan perannya selama ini. Itu yang pertama.

Yang kedua, Bapak langsung membahas dan memperdalam tentang pemeriksaan kinerja. Pertama, kenapa ini langsung kepada pemeriksaan kinerja sedangkan yang selama ini banyak dikerjakan adalah pemeriksaan laporan keuangan kementerian/lembaga maupun Pemda atau Provinsi maupun Kabupaten Kota.

Lalu apa hubungannya kira-kira opini yang selama ini banyak WTP juga banyak disinggung juga oleh penanya sebelumnya Bapak Amirul kalau tidak salah 411 tetapi kenyataannya masih banyak katakanlah penyimpangan-penyimpangan atau penyelewengan keuangan di kementerian maupun lembaga yang BPK audit. Bagaimana kedepan supaya opini ini terutama WTP mencerminkan keadaan yang sesungguhnya bahwa lembaga itu memang dalam keadaan baik-baik saja.

Terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

**WAKIL KETUA (JULIARI P BATUBARA):**

Terima kasih Bapak Sudiro.

Silakan Bapak Dr. Munte dijawab atas 6 pertanyaanm singkat dan padat.

Silakan.

**CALON ANGGOTA BPK RI (Dr. DACHAMER MUNTE, S.H., M.H.):**

Baik, terima kasih.

Pertama-tama saya akan mencoba menjawab ada Bapak Marsiaman Saragih berkaitan dengan opini. Nah, ini yang saya bilang tadi opini ini adalah produk hasil daripada laporan pemeriksaan keuangan. Dan ini dipublish di website sehingga orang bisa melihat, jadi tidak bisa disembunyikan ini hasil daripada laporan keuangan yang dilakukan pemeriksaan oleh BPK.

Laporan keuangan yang ditemukan itu baik yang dipublish maupun yang dapat bocoran itu kadang-kadang disalahgunakan tanda kutib oleh oknum. Bisa nanti ini sampai juga di dalam tanda kutib dipermainkan oleh aparat penegak hukum, bisa Jaksa, bisa Polisi dan bisa official KPK. Padahal opini ini sebenarnya ini tidak

mencerminkan disitu belum bisa kita mencerminkan ada tidak kerugian negara yang pasti dan itu harus ada proses nanti audit investigative. Sehingga kalau nanti aparat penegak hukum menemukan atau mendapat laporan mengenai opini disuatu entitas, dia pasti akan meminta bantuan, minta perhitungan kerugian keuangan negara melalui BPK salah satu institusi yang dibenarkan oleh Undang-Undang melakukan pemeriksaan. BPKK sekarang tidak berwenang, dia hanya melakukan pendampingan. BPK ini kuat, dia kedudukannya sejajar dengan lembaga tinggi negara lainnya.

Oleh karena itu, jadi dampak dari opini memang tergantung orangnya memanfaatkan ini. Jadi bisa saja dipermainkan oleh aparat, saya tidak menutup kemungkinan itu sehingga kadang-kadang bisa diobjekkan gitu ya. Padahal sebenarnya opini itu masih mentah dalam menghitung kerugian negara disitu. Ada kerugian potensi, kerugian negara dan ada potensi penyimpangan. Dan ini harus dikaji sdalam penyidikan aparat penegak hukum baru bisa nanti bermuara kepada proses selanjutnya. Apakah nanti dilimpahkan di persidangan atau tidak. Nah, ranah ini yang ranah abu-abu yang sering dimainkan, diobjekkan oleh pihak-pihak yang mungkin tidak bertanggungjawab.

Memang kita tidak bisa pungkiri karena dia sudah dipublish ini bisa dimainkan. Tetapi kita tidak perlu ragu karena paramaternya nanti balik ke BPK ini, aparat penegak hukum tidak bisa membawa orang dalam kaitan korupsi tanpa ada konkritisasi berapa kerugian negara yang ditimbulkan dari akibat penyimpangan itu. Jadi ada penyimpangannya, ada kerugian negara, yang konkrit baru bisa dilimpahkan ke pengadilan.

Jadi ranah ini yang sering dimainkan oleh teman-teman kita di daerah melalui LSM kadang-kadang Pak. Saya 34 tahun Jaksa, jadi kadang-kadang diobjekkan, dia tidak bisa datang ke orang itu, dia pakai aparat penegak hukum untuk memanggil, untuk sesuatu tanda kutib untuk burgening segala macam. Jadi bagaimana kita membendung ini, jadi balik kepada kita lagi. Jadi yang jelas hasil opini itu masih mentah, dan dia harus ditindaklanjuti dengan perhitungan kerugian keuangan negara oleh BPK sebagai salah satu institusi yang diberikan kewenangan oleh negara dalam menentukan jumlah kerugian negara.

Nanti setelah itu jumlah kerugian yang ditentukan kemudian aparat penegak hukum nanti melihat kerugian negara ini penyimpangannya apa. Ada tidak niat jahatnya untuk melakukan korupsi, karena harus dikaji juga Pak, jadi tidak semana-mana orang dibawa langsung itu, di proses oleh Jaksa, oleh Polisi, oleh KPK. Penyimpangan pun yang ditimbulkan administrative pemeriksaannya, kemudian ada kerugian negara. Kalau dia kerugian negara mungkin bisa kita dorong untuk pengembalian negara. Tetapi kalau niat jahatnya sudah timbul itu harus bermuara kepada pengadilan. Itu parameter yang kita pakai selama ini Pak. Jadi tidak mudah juga membawa orang ke sidang, tapi kalau untuk macam-macam ini biasanya Pak.

Saya kira demikian Bapak Marsiaman yang bisa saya sampaikan tentang opini yang beredar di masyarakat. Dan ini memang tidak bisa kita pungkiri karena dia sudah dipublish, ada website dia tinggal klik muncul, pakai aparat penegak

hukum, dia datengin dulu orangnya, tidak mau orangnya pakai Polisi. Nah, ini bahaya memang.

Kemudian dari Ibu Elviana, ini Anggota mana yang nyasar. Ini bagaimana lupa saya tadi Ibu Elviana. Jadi yang bisa saya catat itu Ibu, jadi Anggota mana yang Bapak nyasar ini saya kira sudah terlalu jauh Ibu, itu internal nanti kalau terpilih nanti di BPK ada 9 Anggota. Itu yang nanti yang menentukan rapat termasuk Pimpinan dan Wakil Ketua dan mereka membagi sesuai dengan musyawarah mereka porsi mana, porsi KN I misalnya membidangi Kejaksaan.

**F-PPP (Dra. ELVIANA, M.Si.):**

Sebentar Pak, setidaknya Bapak tahu yang 5 itu, sepengetahuan saya ketika 5 diganti maka yang masuk akan mengisi yang 5 itu. Saya ingin tahu Bapak tahu tidak yang 5 itu bidang apa saja yang mau diganti.

**CALON ANGGOTA BPK RI (Dr. DACHAMER MUNTE, S.H., M.H.):**

Tahu Ibu, itu yang pertama itu Anggota VI itu membidangi wilayah timur, semua wilayah timur, Kalimantan, Sulawesi, Papua, Maluku di bawah pengendalian beliau. Yang kedua, Bapak Rizal Jalil ini membawahi Kementerian PU, Kementerian Pertanian, kemudian ada Kementerian apa lagi saya lupa, tapi yang menonjol PU dan Pertanian. Kemudian kalau Bapak Ketua, Bapak Ketua ini non porto folio dia hanya mengkordinir. Jadi dia tidak membawahi daerah atau kementerian. Jadi yang punya *touch* langsung di BPK itu Anggota sebenarnya bukan Ketua dan bukan Wakil Ketua. Ketua dan Wakil itu merupakan symbol, bisa mewakili institusi keluar dan kedalam dan juga mengatur tentang mutasi dan segala macam dan proyek-proyek yang ada di BPK. Itu fungsi BPK, Ketua dan Wakil Ketua.

Yang satu lagi Bapak Ahsanul itu masih *running* sampai sekarang, beliau membidangi ini paling urgent beliau di BUMN dan Kementerian lupa saya Ibu, tapi yang paling pokok dia di BUMN.

**KETUA RAPAT:**

Pak, waktu anda sedikit lagi.

**CALON ANGGOTA BPK RI (Dr. DACHAMER MUNTE, S.H., M.H.):**

Bapak Amir, ini WTP ini berbanding lurus dengan kinerja. Saya kira masih perlu kita pertanyakan, makanya saya dorong ini WTP kan produk daripada pemeriksaan laporan keuangan. Jadi disitu yang dinilai tingkat kewajaran laporan itu Pak, jadi tidak membicarakan program atau kegiatan dari sisi efisiensi, efektifitas, ekonomis. Jadi tidak bisa kita jamin, Pak mohon maaf dia yang mendapat WTP bahwa disitu sudah *well* semua. Termasuk misalnya ada tidak korupsi, masih banyak kita lihat dia dapat WTP, kemudian dia masih ada penyimpangan yang

dilakukan oleh mereka dalam implementasinya, apalagi berkaitan dengan OTT kan tidak ada kaitannya dengan WTP itu, karena OTT yang mereka lakukan oleh KPK biasanya dalam perijinan yang mereka mainkan rata-rata kepala daerah. Nah, inikan tidak masuk di hasil ini penilaiannya, tidak masuk di anggaran mereka. Jadi tidak bisa menggaransi WTP.

Saya mendorong dengan Pimpinan-Pimpinan yang 9 Anggota lainnya nanti, pemeriksaan kinerja, audit kinerja harus kita dorong supaya peran BPK ini bisa kita maksimalkan untuk mensejahterakan masyarakat dengan APBN yang demikian besar 5000 triliun lebih dari pusat sampai dengan daerah. Ini kalau tidak kita kontrol, tidak kita fungsikan BPK dalam mengelola ini supaya tepat sasaran. Nah, ini kita yang rugi semuanya. Saya dorong kita kedepan, BPK kedepan harus melakukan pemeriksaan kinerja untuk kedepan yang lebih optimal. Saya kira demikian Bapak Amir.

Kemudian soal pemeriksaan kinerja, Bapak Achmad Hatari yang saya jawab Pak. Mohon maaf kalau ada kekurangan-kekurangan, ini pemeriksaan kinerja memang saya tidak detail menyodorkan angka-angka, data-data saya kira. Tapi yang jelas niatan saya di forum ini adalah mendorong BPK ini kedepan dalam menggunakan kewenangannya dan menggunakan hak-haknya dalam pemeriksaan kinerja, seperti yang saya ceritakan tadi pemeriksaan kinerja itu banyak implikasinya yang bisa kita peroleh tidak hanya untuk entitas yang diperiksa akan tetapi untuk kesejahteraan masyarakat.

Angka-angka di HPL juga tidak saya cantumkan, ini juga banyak sebenarnya ini dari hasil pemeriksaan laporan keuangan semester I dan semester II. Mohon maaf saya tidak munculkan ini.

Kemudian Dr. Felicitas, fungsi pertimbangan ini luar biasa. Pertimbangan ini tidak pernah dimainkan oleh BPK juga, saya sudah hampir 3 tahun disana. Jadi mohon maaf ini, ini BPK y saya lihat saya hampir 3 tahun disana, mereka ini agak alergi memberikan pertimbangan, karena apa? karena dia bilang begini, ini *of the record* juga. Saya dengar-dengar dari Anggota-Anggota BPK, “kita jangan masuk terlalu dalam nanti kita terjebak oleh pendapat kita sendiri, jadi kalau ada apa-apa disitu”. Nah, inikan pemikiran dangkal sebenarnya, kita jangan gitu dong berpikinya, kita berikan pertimbangan kalau ada potensi kerugian negara, BPK sudah disitu sebenarnya, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, sehingga ini juga merupakan pencegahan oleh badan perkumpulan BPK sedunia. Itu salah satu basic pertama itu pembanding korupsi, itu ada dua yaitu pencegahan dan penindakan.

Jadi peran BPK disini pencegahan sudah harus muncul di awal, jadi jangan seperti Polisi. Padahal bisa dikasih rambu-rambu, ini saya dorong, jangan begitu. Kita lakukan pencegahan banyak instrument, kita di daerah-daerah punya kepala perwakilan, mereka punya auditor, ini di daerah-daerah kita aktifkan dan di pusat juga melalui Anggota sesuai dengan bidang-bidangnya, ini kita jempu bola bila perlu. Jadi jangan gengsi, BPK ini kadang-kadang gengsi, “saya kan badan pemeriksa, tidak usah biarkan mereka datang”, jangan begitu, kalau bisa kita aktif.



Jadi besar sekali Ibu Felicitas, fungsi pertimbangan ini yang mereka tidak mainkan ini. Sudah hampir 3 tahun saya di BPK tidak pernah mereka, ini hak dia tetapi tidak digunakan pertimbangan dalam penyelesaian Pasla 11 Undang-Undang BPK, tidak pernah dia gunakan, saya sudah 3 tahun disitu. Gengsi tadi Ibu Felicitas, karena mereka bilang “kita jangan terlalu banyak masuk kedalam, nanti kita terjebak”. Pola pikir seperti itukan tidak, kita kan kepentingan publik, kepentingan negara. Kalau kita bisa cegah kenapa tidak, jadi jangan tunggu di perapatan jalan baru disempit, baru masuk keperempatan jalan itu kita sudah wanti-wanti. Kira-kira demikian situasinya ya Bu.

Saya sudah singgung sedikit kepada Bapak Sudiro, jadi peran-peran BPK ini banyak yang tidak mereka fungsikan. Yang kita kenal hanya dengan 3 itu saja, khususnya pemeriksaan keuangan dan investigative yang mereka minta. Mereka diminta perhitungan keuangan negara, padahal banyak tersebar kewenangan-kewenangan lain BPK yang harus kita fungsikan, termasuk antara lain memberikan pendapat dalam perbaikan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara terhadap instansi Pemerintah Pusat dan Daerah. Ini juga mereka tidak gunakan, dia menunggu padahal kita bisa. Saya ingin katakan kalau saya dorong supaya pro aktif jangan menunggu, BPK harus pro aktif. Dia punya kewenangan sama kayak penyidik, memanggil orang, meminta keterangan, dia punya kewenangan yang diberikan Undang-Undang, panggil, periksa, kasih saran, sudah dikasih saran tidak dilakukan baru nanti lapor ke aparat penegak hukum untuk efek deterentnya, untuk pencegahannya.

Itu saya kira yang selama ini, ini *of the record* seolah-olah saya memburukan BPK, tidak. Tapi saya mau cerita sedikit, itulah kejadian di BPK yang saya alami. Jadi saya tidak mereka-reka, saya sudah 3 tahun running sampai sekarang masih disitu.

Saya kira demikian Pimpinan, yang bisa saya sampaikan mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang memuaskan atas pertanyaan jawaban saya atas pertanyaan Anggota Dewan yang terhormat yang mulia ini.

Terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

#### **KETUA RAPAT:**

Demikian tanggapan dan jawaban dari saudara Dr. Dachamer Munte, S.H., M.H. atas pertanyaan Anggota Komisi XI DPR RI. Sebelum beliau meninggalkan tempat kita kasih *applause* dulu kepada beliau.

Terima kasih Pak, atas kehadirannya kami persilakan saudara Dr. Dachamer Munte, S.H., M.H. untuk meninggalkan tempat.

Terima kasih.

Selanjutnya Dr. Bluce Welington Rajagukguk.

**Saudara-saudara sekalian.**

Dihadapan kita adalah Calon Anggota BPK RI Dr. Bluce Wellington Rajagukguk, M.Sc., S.E., S.H., Ak. Banyak sekali gelarnya luar biasa. Untuk mempersingkat waktu saya sampaikan aturan main.

Mekanisme uji kepatutan dan kelayakan Calon Anggota BPK RI akan dilaksanakan sebagai berikut:

1. Calon Anggota BPK RI menjalankan uji kepatutan dan uji kelayakan sendiri-sendiri, calon yang lain diharapkan menunggu di ruang ruangan.
2. Waktu yang diberikan maksimal 45 menit, terdiri atas 15 menit maksimal calon Anggota BPK RI mempresentasikan makalahnya dan 30 menit tanya jawab.

Untuk mempersingkat waktu kami persilakan kepada saudara Dr. Bluce Wellington Rajagukguk untuk menyampaikan paparannya.

**CALON ANGGOTA BPK RI (Dr. BLUCE WELINGTON RAJAGUKGUK, M.Sc., S.E., S.H., Ak.):**

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,*

*Shalom,*

**Salam sejahtera untuk kita semua,**

**Selamat siang,**

*Om Swasti Astu,*

*Namo budaya,*

**Salam kebajikan.**

**Yang terhormat Bapak Pimpinan Komisi XI DPR RI,**

**Yang saya hormati Ibu dan Bapak Anggota Komisi XI DPR RI.**

Pertama-tama terima kasih telah memberikan kesempatan untuk menjelaskan makalah ini bahwa visi yang saya ambil, ide gagasan adalah bagaimana peran BPK guna mencapai cita-cita dan tujuan nasional. Saya akan sedikit bicara latar belakang, landasan teori dan kemudian peran BPK serta hubungan antar lembaga negara guna mencapai tujuan nasional. Ada bentuk peran BPK berapa contoh, kemudian menterjemahkan cita-cita nasional dalam proses pemeriksaan BPK dan apa manfaat pemeriksaan BPK dalam konsep gagasan ini dan terakhir kesimpulan.

Filosofi saya menyampaikan ini adalah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, saya kira kita semua di bangsa ini setuju bahwa di alenia 2 Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ada cita-cita nasional di Undang-Undang Dasar 1945, yaitu menjadikan negara ini merdeka, Bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Dan kita sepakat bahwa tujuan nasional ada pada alenia 4, bagaimana kita melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah kita, bagaimana memajukan kesejahteraan umum, ikut mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Saya menggunakan landasan ideologis yang disampaikan oleh Proklamator tercinta kita Bung Karno, dalam dokumen beliau selalu menyatakan soal nasionalisme, bahwa ini adalah nyawa satu bangsa, artinya tanpa nasionalisme bangsa kita mati. Belum menjelaskan soal 4, persatuan Indonesia yang sebenarnya ada sila ketiga adalah hal yang paling utama pada saat lembaga-lembaga negara Pemerintah, DPR RI, BPK RI dan seluruh lembaga negara ini kompak saya kira akan bagus, artinya bahwa kita punya keyakinan bahwa bangsa kita bisa maju. Ini saya kira kita pernah menjadi bangsa besar, pada saat kita menjadi Majapahit dan Sriwijaya.

Kemudian tentunya kita harus membangun politik dengan bangsa lain bagaimana kerjasama kita, ini sebenarnya filosofi. Nah, kemudian diminta disini sebagai pemimpin BPK, saya mencoba melihat beberapa hal yang sebenarnya sangat relevan dengan apa yang disampaikan oleh Bung Karno, bahwa apapun kepemimpinan strategis atau kepemimpinan nasional disampaikan oleh Alan Cohen ada kesamaan teorinya, yaitu harus ada suasana yang harmonis antar pemimpin dengan yang dipimpin. Di sini harus muncul unsur keyakinan atau rasa percaya, sehingga memang para pemimpin ini harus memunculkan rasa percaya diri ini, memberikan keteladanan sehingga akan melahirkan satu kepercayaan yang tulus.

Sedikit saya sampaikan bahwa hal ini sama dengan .... Dalam bukunya dalam politic order, ini persis bahwa pada saat menyampaikan dimensi pembangunan negara ternyata jantungnya adalah legitimasi. Artinya apa? kepercayaan rakyat terhadap para pemimpinnya. Disini untuk menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi dan mobilitas sosial yang antara lain akan terpengaruh karena gini ratio, sangat terpengaruh terhadap kepercayaan rakyat terhadap para pemimpinnya, ini saya kira sangat penting untuk menunjukkan bahwa tertib politik sangat penting dalam pembangunan nasional.

Hal yang sama pada saat untuk menyampaikan disini mengenai 3 hubungan antara sistem politik, kebijakan publik dan masyarakat. Saya ingin menjelaskan di mana posisi BPK, hal yang sama pada saat 3 dimensi ini bergerak saling mempengaruhi ternyata BPK hanya mampu mempengaruhi pada kualitas kebijakan publik. Disinilah BPK bisa memberikan lewat rekomendasi yang berkualitas, pendapat yang bersifat prioritas nasional.

Saya masuk langsung posisi peran BPK dengan hubungan antar lembaga untuk mencapai tujuan nasional. Bapak Jokowi dalam tahun 2015 selaku Kepala Negara juga menyampaikan bahwa lembaga-lembaga negara harus membangun kekompakan. Bahasa kekompakan ini saya kira hampir sama, ini bahasa nasionalisme, ini bahasa persatuan, bahwa kita harus bersama-sama, baik eksekutif, legislative, yudikatif dan auditif, sama-sama kita memastikan pengelolaan keuangan negara dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Inilah landasan yang mau saya bangun di dalam makalah saya. Contoh sederhana dalam pada saat BPK melakukan pemeriksaan kinerja atas persoalan yang dihadapi para pelaku usaha yang kurang mendapat dukungan keuangan, kurang mendapat akses pemasaran. Kemudian juga ada perusahaan-perusahaan besar yang saat ini memberikan *corporate social responsibility* terus apa yang

terjadi, apakah pelaksanaannya sesuai dengan implementasi. BPK tentunya juga dapat memberikan pendapat terhadap proses pembangunan nasional.

Saya sedikit bagaimana menterjemahkan cita-cita nasional dalam proses pemeriksaan. Ini tadi saya sampaikan bahwa saya melihatnya cita-cita nasional pada saat kita bilang merdeka dan ujungnya makmur, tentunya memiliki urutan-urutan. Jadi saat kita merdeka baru harus Bersatu, setelah Bersatu baru mampu berdaulat, setekah berdaulat baru bisa adil, barulah sampai makmur. Jadi benang merah dari merdeka sampai kemakmuran. Jadi benang merah dari merdeka sampai kemakmuran ini agak panjang. Saya melihat harusnya ada prioritas yang harus kita sampaikan, sehingga BPK penting bagaimana peran BPK dalam pemeriksaan bisa meningkatkan persatuan bangsa. Bagaimana pendidikan dasar dan tinggi ini kalau masalah, contoh sekarang pendidikan dasar teman-teman kita masih kurang finansial sulit seperti kita, kita bisa masukkan SD-SD swasta, kita sanggup 6 tahun mereka sudah bisa masuk SD.

Bagaimana dengan rakyat yang tidak punya uang yang penghasilannya kurang, dia harus tunggu 7 tahun baru bisa masuk SD, berkali-kali dia TK karena tidak mampu masuk SD, karena SD negeri tunggu sampai 7 tahun. Ini antara lain bagaimana bisa meningkatkan persatuan jika antara lain satu sama lain tidak sama kesempatan untuk mendapatkan sekolah dasar. Demikian juga penguatan kedaulatan saya kira sangat penting kesejahteraan professionalism antara TNI, Polri, dibuat seimbang. Bagaimana persoalan sekarang data informasi pendidikan sekarang sudah masuk revolusi industry 4.0 tapi pola kita hampir semua pemeriksaan itu sebabnya kita data yang kurang valid, hampir seluruhnya data.

Saat ini kita sedang memasuki namanya sistem Pemerintahan berbasis elektronik. Saya kira selain yang sifatnya konkrit mengenai perbatasan, saya kira data dan informasi sangat penting dalam menguatkan kedaulatan negara. demikian juga dalam mewujudkan keadilan negara. Tentunya biaya-biaya yang kita perlukan untuk meningkatkan persatuan untuk menguatkan kedaulatan ini memerlukan penerimaan-penerimaan yang kuat. Bagaimana dengan produktifitas dan daya saing kita. Apakah saat ini mampu yang dulunya kita Pertamina ngajarin Petronas belajar, sekarang terbalik. Ini hal-hal saya kira bagaimana dengan baja kita, Krakatau Steel kita, ini saya kira yang penting bagaimana kita memiliki satu pengamanan produksi pangan, air, dan segala macam, inilah peran mewujudkan keadilan negara. Jadi menurut saya setelah merdeka masih banyak PR untuk sampai makmur kita, harus Bersatu ini persoalan, berdaulat ini persoalan dan keadilan.

Apa manfaatnya saya menggunakan brand BPK SKAK (Strategi dan Kolaborasi Audit Kinerja), karena menurut saya audit kinerja bagaimana bagusnya rekomendasi tanpa sinergi dan kolaborasi antar lembaga negara maka ini akan sia-sia, harus ada kekompakan saling lembaga negara memberikan masukan, dan punya tujuan yang pasti. Nah, kami dari BPK tentu yang dibutuhkan adalah profesi untuk kelanjutan. Saya kira kita harus banyak yang diperlukan untuk pengembangan sarana dan prasarana dan penguatan e-audit. E-audit ini adalah pola data base yang bisa diserap langsung oleh BPK, dan kemudian diolah sebelum kita memeriksa. Ini banyak sekali efisiensi yang dilakukan pada saat kita lakukan e-audit.

Tentunya yang diperbaiki bukan hanya tingkat kegiatan seperti yang ada sekarang. Saya membawa 3 leveling, bahwa yang diperbaiki ini bukan hanya kegiatan namun juga program bahkan *policy*, kebijakan bisa diperbaiki. Kemudian selain tata kelola dan pertanggungjawaban keuangan negara ataupun akuntabilitas keuangan negara yang selama ini hanya dicapai melalui audit laporan keuangan. Tapi yang terpenting adalah bagaimana pelaksanaan *policy* program dan kegiatan ini bisa diperbaiki sehingga cita-cita bangsa kita terwujud dan sandang, papan, kesehatan, pendidikan masyarakat ini bisa tercapai dan masyarakat Indonesia bisa makmur.

Kesimpulan dari keseluruhan ini bisa saya sebutkan modelnya bahwa BPK sendiri berdasarkan Undang-Undang saat ini bisa menghasilkan pendapat dan ini harusnya bersifat strategis. Yang kedua adalah rekomendasi yang mampu meningkatkan kualitas kebijakan publik. Dan hal ini hanya bisa dicapai jika para lembaga negara kompak, ada nasionalisme dalam diri kita semua, ada rasa cinta terhadap bangsa ini, sehingga bisa terwujud cita-cita dan tujuan nasional.

Demikian yang bisa saya sampaikan Pimpinan dan Anggota, lebih kurangnya saya mohon maaf.

Terima kasih.

#### **KETUA RAPAT:**

Terima kasih Pak.

Demikian paparan dari saudara Dr. Bluce Welington Rajagukguk. Kita langsung melakukan pendalaman, kita mulai dari sebelah kanan Ibu Tutik Kusuma Wardani.

#### **F-PD (TUTIK KUSUMA WARDANI, S.E., M.M.):**

Terima kasih Pimpinan atas waktunya.

#### **Bapak Bluce Welington Rajagukguk yang saya hormati.**

Tadi presentasi Bapak sungguh bagus sekali, yaitu peran BPK RI guna mencapai cita-cita dan tujuan nasional. Semangat Bapak, nasionalisme Bapak tidak diragukan lagi. Bapak masih sebagai auditor kan? Masih kan.

Yang ingin saya tanyakan Pak, di BPK itu dikenal dengan adanya metode pemeriksaan secara sampling. Sedangkan kita tidak tahu, tidak bisa dipungkiri lagi bahwa metode ini banyak sekali kelemahannya Pak. Alasannya sih banyak katanya terbentur auditor yang kurang, kemudian anggaran juga yang kurang. Nah, sekarang dengan kondisi seperti ini terobosan apa yang akan Bapak lakukan.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Lanjut sebelah kiri Ibu Amelia.

**F-P. NASDEM (AMELIA ANGRAINI):**

Terima kasih Pimpinan.

**Bapak Bluce Wellington Rajagukguk yang saya hormati.**

Saya tertarik dengan paparan Bapak di halaman 9 terkait dengan peran BPK dalam meningkatkan persatuan bangsa, di antaranya adalah pemeriksaan sistem JKN. Sebelum saya di Komisi XI DPR RI, saya di Komisi IX DPR RI yang bermitra dengan BPJS Kesehatan. Sebagaimana kita semua ketahui bahwa performa BPJS Kesehatan kurang baik dalam semua hal. Nah, pertanyaan saya adalah sebagai calon Anggota BPK RI apa gagasan Bapak untuk memperbaiki kinerja BPJS Kesehatan agar tidak terjadi lagi ketidak beresan pada lembaga tersebut.

Terima kasih Pimpinan.

**KETUA RAPAT:**

Pindah sebelah kanan Bapak Hatari.

**F-P. NASDEM (Dr. ACHMAD HATARI, S.E., M.Si.):**

Pimpinan, sebelumnya saya minta maaf. Saya minta waktu tapi tidak lebih dari 3 menit.

**Teman-teman Anggota Komisi XI DPR RI.**

Saya tidak bermaksud mendramatisasi tapi saya ingin menginformasikan kepada teman-teman bahwa kita sedang menguji seorang pakar, sangat pakar. Saya apresiasi terima kasih Bapak Bluce, beliau ini jadi Kepala Perwakilan BPK di sekian banyak provinsi dan terakhir memeriksa saya selama 4 tahun di Papua, luar biasa ini.

Saya ingin mendapatkan komentar dari Bapak Doktor, mudah-mudahan nanti terpilih. Suatu pemeriksaan dinyatakan belum selesai apabila rekomendasi tindaklanjut juga belum selesai. Pertanyaan adalah BPK kita terkini puluhan ribu rekomendasi tindak lanjut belum diselesaikan, bahkan tidak pernah dikawal dan jumlahnya ratusan triliun. Bahkan pemeriksaan dengan tujuan tertentu ada kurang lebih 105 oleh BPK dinyatakan tidak bisa ditindaklanjuti. Ini apa alasannya?

Sangat yakin Pak, saya pribadi mudah-mudahan nanti kalau Bapak Bluce terpilih pasti ini bisa akan dibenahi. BPK kita terus terang menomor duakan pemeriksaan kinerja, padahal kita dari BAKN melakukan beberapa study di Eropa

mereka disana balance antara pemeriksaan keuangan balance dengan pemeriksaan kinerja. Saya yakin kalau Bapak Bluce terpilih ini bisa dibenahi, sangat pakar ini bukan orang dari luar, orang dari internal BPK. Barangkali terakhir saya tidak lupa Kepala BPK Perwakilan DKI Jakarta baru masuk ke kantor pusat.

Terima kasih dari saya begitu, sekali lagi saya menghargai, saya senang dan saya apresiasi dengan paparan dari Bapak Bluce.

Terima kasih banyak.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT:**

Lanjut, Pak Amirul Tamim.

**F-PPP (Dr. H. MZ. AMIRUL TAMIM, M.Si.):**

Saya langsung saja Pak, ini terkait dengan menterjemahkan cita-cita nasional, khususnya peran BPK mewujudkan keadilan negara. Beberapa tahun selalu ada polemik khususnya terkait dengan pangan Pak. Pada saat petani mau panen raya ada impor dan ini terlihat di dalam media ada polemik-polemik ini impor yang tidak tepat. Tapi kalau penjelasan sesuai dengan data yang disampaikan memang harus impor. tetapi suara BPK kita tidak dengar, tidak pernah dengar apa memang sudah dilakukan audit apa perlu impor atau tidak perlu impor. Dan ini sampai sekarang ini tetap menjadi kekhawatiran dari petani.

Oleh sebab itu, saya ingin penjelasan lebih lanjut pandangan Bapak terkait dengan masalah ini. Apakah BPK harus melakukan audit dan mengumumkan kepada media, kepada massa, apa memang ini posisinya memang seperti apa adanya.

Saya kira itu Pimpinan.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Ada lagi?

Kalau cukup kami persilakan kepada saudara Bluce Wellington Rajagukguk untuk menjawab pertanyaan Anggota Komisi XI DPR RI.

Kami persilakan.

**CALON ANGGOTA BPK RI (Dr. BRUCE WELINGTON RAJAGUKGUK):**

Terima kasih Pimpinan.

Terhadap pertanyaan Ibu Tutik, mengenai metode pemeriksaan secara sampling memang harus ada terobosan. Jadi terobosan yang menurut saya selama puluhan tahun kita coba *try and eror*, maka terobosan melalui data base paling

penting yang kita kenakan lewat e-audit. Jadi saat kami di DKI 2011-2104 kami pernah melakukan itu, jadi kami sempat membuat semacam shadow-nya laporan keuangan. Jadi sebelum berakhir dan mereka menyampaikan laporan keuangan kami sudah minta dan kami bisa menggambarkan itu. Sehingga hal-hal yang namanya SPPD, kontrak-kontrak dan segala macam seluruhnya sudah kami lihat. Bisa kami lihat bahkan tanggalnya, berapa pertanggungjawabnya, bulan berapa yang belum dipertanggungjawabkan, siapa yang menang, di mana alamatnya. Jadi pemeriksaan secara sampling hanya nanti dilakukan pada saat pemeriksaan fisik. Namun, secara data base kita bisa lakukan populasi seluruh uang yang keluar bisa dilihat.

Jadi saya kira memang harus ada terobosan-terobosan seperti ini, ini yang saya katakan tadi memerlukan kekompakan semua pihak. Ini yang nanti saya kira saya sepakat Ibu, ini secara sampling ini hanya di laporan keuangan. Dan secara metodologi karena BPK mengenal 2 semesteran, di mana semesteran pertama harus melakukan pemeriksaan laporan keuangan yang dibatasi oleh waktu, maka sisa waktu di semester kedua bisa dilakukan untuk melengkapi seluruh kegiatan, jadi pemeriksaannya bisa dilakukan secara menyeluruh. Itupun bisa dilakukan terobosan seperti itu. Jadi ada dua hal bagaimana cara mengauditnya dan metodologinya Ibu.

Untuk Ibu Amelia, BPJS Kesehatan ini gagasannya apa. Jadi saya kembali saya pikir Ibu mungkin lebih ahli dalam hal ini, akan tetapi secara konsep audit kami selalu memahami untuk apa BPJS Kesehatan ini didirikan, apa tujuannya. Jika memang dia ditujukan untuk menjaga kesehatan publik ini makanya yang harus diatur. Sebagai contoh saya memikirkan apakah seluruh masyarakat yang mengalami persoalan kesehatan yang harus ditanggung semua. Bagaimana hitung-hitungannya, ini yang saya kira penting, jadi bukan hanya implementasinya. Saya kira perencanaan di depan sangat penting, perencanaan bagaimana mengelola dana kesehatan itu sendiri, berapa biaya kesehatan, apakah seluruh biaya kesehatan ditanggung termasuk kesehatannya pasien, artinya kesehatan-kesehatan yang disengaja. Misalnya yang bersangkutan sengaja merokok, atau sengaja melakukan kesalahan dan/atau lain sebagainya. Apakah hal-hal itu juga ditanggung oleh BPJS Kesehatan. Dan bagaimana uang pangkalnya itu, uang iurannya, bagaimana dengan total perhitungannya, bagaimana dengan uang yang terkumpul. Ini saya kira disisi perencanaan sangat penting sehingga pada saat implementasi tidak kebingungan jadinya.

Kalau di BPJS Kesehatan ini saya pikir menjadi persoalan sehingga akhirnya banyak defisitnya akhir-akhir ini. Ini menurut saya yang saya lihat. Jadi mengauditnya harus melihat seperti itu. Melihat tujuan awalnya dulu dan memastikan. Saya lebih senang audit kinerja untuk hal-hal yang bersifat tujuannya. Tapi untuk yang sifatnya kasus-kasus tertentu tentunya lebih baik kita gunakan audit dengan tujuan tertentu, sehingga lebih fokus.

Kemudian Bapak Hatari, pertanyaan beliau mengenai rekomendasi tindaklanjut yang belum selesai. Memang cukup tinggi rekomendasi tindaklanjut yang belum selesai, ini ada puluhan ribu. Nah, inilah saya usulkan bagaimana



menjalin kekompakan antar lembaga, karena itu saya pikir bukan hanya BPK yang bisa melaksanakan ini, namun juga dengan BAKN, DPR RI.

Nah, disini mungkin yang intensinya yang harus diperbanyak. Kebanyakan ada dua hal paling tidak masalah-masalah rekomendasi ini ada yang sifatnya kualitatif murni tanpa angka-angka, dan yang kedua yang sifatnya quantitative atau bahkan ada indikasi kerugian. Nah, ini mungkin yang harus dibagi dulu bagaimana kita mengidentifikasi dan membagi mengklasifikasikan persoalan-persoalan rekomendasi ini. Kemudian barulah dibuatkan tim-tim yang khusus, apakah yang tindaklanjut mengandung angka-angka atau kuantitatif ini perlu menggunakan aparat lain, misalkan Jaksa Pengacara Negara, Jaksa Perdata atau bahkan mungkin setelah dilihat ada masalah pidananya, karena yang menentukan tentunya penyidik atau memang sekedar pemulihan karena kita sendiri memang lebih setuju ada pemulihan, jadi kerugian itu tidak selalu berujung pidana, sehingga lebih penting adalah pemulihan kerugian itu sendiri dan pengembalian harta kepada negara, ini dari sisi audit.

Saya kira pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja saya setuju bahkan di *general accountability office* sekarang itu lebih banyak kinerjanya bahkan di jabatan audit negara Malaysia itu lebih banyak kinerjanya. Artinya, pemeriksaan kinerja yang betul-betul mencari solusi yang sesuai dengan kebutuhan rakyat, bahkan kebutuhan dari DPR RI. Ini penting, jadi kita bisa fokus karena pemeriksaan keuangan hanya transparansi akuntabilitas, tapi pada saat ingin apakah ini efisien, apakah ini efektif, maka harus masuk ke dalam pemeriksaan kinerja.

Untuk tadi pertanyaan Bapak Amir, polemik terhadap pangan apakah ada impor yang tidak tepat dan memang harus impor. Menurut saya cara mengauditnya Pak, ada persoalan memang pangan saya pernah ikut dalam pemeriksaan pendahuluan waktu itu, jadi memang ada masalah data, ada surat daya yang bersama antara data daerah dengan data BPS. Data BPS mengacu kepada daerah ini yang menjadi persoalan. Ada masalah data yang tidak sinkron, sehingga pada saat datanya tidak sinkron akhirnya jadi persoalan pada saat dihitung dikalkulasi.

Jadi memang penting sekali, saya berpikinya sederhana saja misalkan inikan harusnya bukan data-data yang diestimasi semua. Misalkan data pandangan mata katanya menghitung berapa besarnya pakai pandangan mata, padahal inikan harusnya bisa dihitung, lewat mana? Lewat penggilingan. Penggilingan-penggilingan inikan harusnya bisa menghitung riil berapa sebenarnya yang digiling. Kemudian masuk ke dalam gudang-gudang pasar, gudang-gudang swasta yang besar atau gudang-gudang Bulog yang besar. Ini mestinya harus ada data base yang bisa bersama digunakan. Sehingga kita betul-betul tahu sebenarnya berapa persediaan beras kita, berapa cadangan beras pangan kita, berapa yang dibutuhkan masyarakat, sederhana sekali yang harusnya bisa dihitung.

Dan saya kira saya sangat setuju Pak, janganlah kita pada saat panen malah ada impor. Nah, ini saya kira harus betul-betul dihitung, saya kira dengan model sistem sekarang kita sudah revolusi industry 4.0 tidak sulit lagi untuk mengetahui ini. Dan janganlah mengimpor satu produk yang sama masyarakat kita sedang panen.

Itu saya kira pendapat saya mengenai hal ini. Jadi auditnya memang harus menyeluruh dari awal perencanaan, perhitungan sampai dengan eksekusi impornya.

Saya kira demikian Pimpinan.

Terima kasih.

#### **KETUA RAPAT:**

Demikian jawaban dan tanggapan dari Dr. Bluce Welington Rajagukguk terhadap pertanyaan Anggota Komisi XI DPR RI. sebelum beliau meninggalkan ruangan kita berikan *applause* kepada beliau. Kami persilakan Pak, untuk meninggalkan tempat.

Terima kasih.

Kita sudah bisa selesaikan sesi pertama 7 orang Calon Anggota BPK RI jam 12.34 WIB. Saya sebagai Pimpinan mengucapkan terima kasih kepada Anggota atas kerjasamanya sehingga sesi pertama bisa selesai.

Selanjutnya kita skors sampai jam 13.30 WIB ya.

#### **(RAPAT DISKORS PUKUL 12.35 WIB)**

#### **KETUA RAPAT (Ir. H. ACHMAD HAFISZ TOHIR):**

**Skors kita cabut.**

#### **(SKORS DICABUT)**

*Bismillahirrahmanirahim.*

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

#### **Hadirin yang kami hormati.**

Menyambung rapat kita sesi kedua ini, Rapat Dengar Pendapat Umum kita dalam rangka uji kepatutan dan uji kelayakan atau fit and propertest Calon Anggota BPK RI.

Kami sampaikan bahwa mekanisme uji kepatutan dan kelayakan Calon Anggota BPK RI akan dilaksanakan sebagai berikut:

1. Calon Anggota BPK RI menjalankan uji kepatutan dan uji kelayakan sendiri-sendiri, calon yang lain diharapkan menunggu di ruang ruangan.
2. Waktu yang diberikan maksimal 45 menit, terdiri atas 15 menit maksimal calon Anggota BPK RI mempresentasikan makalahnya dan 30 menit tanya jawab.

Semakin cepat dan ringkas semakin baik tentu saja.

**Saudara-saudara sekalian.**

Kita telah kedatangan Bapak Dr. Shohibul Imam, C.A., C.P.A., maka untuk itu kami berikan waktu kepada Bapak untuk menyampaikan pokok-pokok pemikiran dan konsepnya jika Bapak terpilih nanti.

Untuk itu, waktu dan tempat kami persilakan.

**CALON ANGGOTA BPK RI (Dr. SHOHIBUL IMAM, C.A., C.P.A.):**

*Bismillahirrahmanirahim.*

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,*

**Salam sejahtera buat kita semua.**

Pada kesempatan ini saya menghaturkan banyak terima kasih kepada Pimpinan dan Anggota Komisi XI DPR RI, yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk dapat mengikuti proses fit and propertest dalam rangka pencalonan Anggota BPK RI. Tidak lupa saya sampaikan terima kasih kepada awak media dan semua pihak yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan ini.

**Pimpinan, Bapak dan Ibu Anggota Komisi XI DPR RI yang saya hormati.**

Intosai yang merupakan organisasi lembaga pemeriksa keuangan sedunia telah mengembangkan model tingkat kematangan organisasi lembaga pemeriksa dalam melaksanakan peran yang menjadi tanggungjawabnya. Peran tersebut terdiri dari 3 level, dari yang paling sederhana sampai yang paling kompleks. Pertama adalah *oversight* di mana lembaga pemeriksa sebatas memastikan apakah tata kelola keuangan telah dilaksanakan dengan baik dan patuh terhadap ketentuan perundangan. Yang kedua, *insight* di mana lembaga pemeriksa memberikan pendapat mengenai program-program kebijakan dan operasi yang kinerjanya bagus, menyarankan *best practices* untuk dijadikan acuan. Dan yang ketiga, yaitu peran sebagai *foresight* yang mana lembaga pemeriksa memberikan tinjauan masa depan dengan menyoroti implikasi jangka panjang atas kebijakan Pemerintah saat ini sebelum menjadi krisis.

Sejauh ini BPK berperan pada level belum berperan pada level *foresight* lebih banyak di level *oversight* dan baru sedikit di level *insight*. Ketika semua peran dapat dilakukan oleh BPK, maka keberadaan BPK akan jauh lebih bermanfaat bagi masyarakat. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan gagasan tentang mewujudkan BPK yang lebih bermanfaat bagi masyarakat melalui *capacity building*.

Sebelum saya lanjutkan, saya perkenalkan dulu nama saya Shohibul Imam, karena sering sekali salah informasi dikiranya Pimpinan salah satu partai politik. Ada beda nama kalau beliau itu Iman ujungnya kalau saya Imam, agak sedikit berbeda. Kemudian pendidikan saya banyak di bidang akuntansi, pekerjaan juga saya

sebagai praktisi dan akademisi. Praktisi di sektor private dan di sektor Pemerintahan.

Pada kesempatan ini setidaknya ada 5 hal yang ingin saya sampaikan, pertama tugas pemeriksaan atas pengelolaan tanggungjawab keuangan negara. Yang kedua adalah tantangan dan keterbatasan BPK. Yang ketiga adalah visi mewujudkan BPK yang lebih bermanfaat bagi masyarakat dan strategi yang diambil terkait dengan *capacity building* dan program pemeriksaan prioritas.

Sesuai dengan mandate konstitusi, setidaknya tugas BPK itu yang pertama adalah memeriksa pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara. melakukan pembahasan atas temuan pemeriksaan, menyerahkan hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara kepada lembaga perwakilan, Presiden, Gubernur, Bupati, Walikota untuk digunakan sesuai tugas dan kewenangannya. Menyerahkan hasil pemeriksaan secara tertulis kepada Presiden, Gubernur, Bupati, Walikota sesuai dengan kewenangan untuk keperluan tindaklanjut hasil pemeriksaan.

Kemudian sampai dengan saat ini, BPK paling tidak memiliki 12 *output* yang akan menjadi point penting menurut saya terkait dengan memberikan manfaat bagi masyarakat adalah pendapat BPK. Sesuai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006, BPK dapat memberikan pendapat kepada lembaga perwakilan, Pemerintah Pusat yang diperlukan karena sifat dan pekerjaannya. Sebagai informasi bahwa sejauh ini tiap tahun baru satu pendapat BPK yang disampaikan, yang dimaksud disini bukan pendapat atas laporan keuangan tapi maksudnya pendapat BPK bukan opini atas laporan keuangan. Kedepan saya kira ini harus dioptimalkan lagi.

Kemudian selain harapan-harapan yang begitu besar, BPK juga memiliki tantangan dan keterbatasannya. Yang pertama adalah tuntutan *stake holder* yang semakin meningkat, tidak hanya *oversight*, *insight* tetapi juga *foresight*. Kemudian cakupan pemeriksaan yang semakin luas. Yang ketiga, volume keuangan negara setiap tahun selalu meningkat. Yang keempat, peran APIP yang belum optimal dan yang kelima kegiatan pengelolaan keuangan negara yang semakin kompleks.

Keterbatasan yang dimiliki adalah kuantitas dan kualitas jumlah pemeriksa juga terbatas. Tidak dapat melakukan rekrutmen secara mandiri sesuai dengan kebutuhan. Yang ketiga, tidak dapat menentukan anggaran secara mandiri sesuai dengan kebutuhan. Kemudian proses bisnis di BPK belum sepenuhnya berbasis teknologi informasi. Yang kelima, pelaksanaan tindaklanjut hasil pemeriksaan juga belum optimal.

Yang ketiga, visi mewujudkan BPK yang lebih bermanfaat bagi masyarakat, ini merupakan komitmen untuk mewujudkan BPK yang lebih bermanfaat. Agar BPK yang lebih bermanfaat setidaknya ada 3 hal yang menjadi prasyarat, yaitu memperkuat transparansi dan akuntabilitas serta integritas entitas pengelola keuangan negara. Yang menunjukkan perhatian yang serius atas tuntutan *stake holder* dalam hal ini termasuk juga lembaga perwakilan, melalui respon yang cepat jika terdapat permasalahan yang memerlukan pemeriksaan. Menjadi contoh suatu organisasi atau *leading by example*.

Untuk mewujudkan visi yang telah disampaikan tadi saya mengusulkan strategi *capacity building* yang akan dilakukan. *Capacity building* itu bermakna pengembangan *skill knowledge*, struktur dan cara kerja yang membuat organisasi akan lebih efektif. *Capacity building* terdiri dari peningkatan kapasitas professional pemeriksa, peningkatan kapasitas organisasi, peningkatan kapasitas dalam merespon lingkungan eksternal.

Peningkatan kapasitas professional pemeriksa setidaknya ada 3 hal yang harus dilakukan. Yang pertama adalah pengembangan metode audit yang tepat. Yang kedua adalah peningkatan kapasitas pemeriksa sesuai dengan kompetensi intinya. Jadi pemeriksa laporan keuangan itu harus memiliki kompetensi inti di bidang pemeriksa keuangan. Pemeriksa kinerja harus memiliki kompetensi di bidang pemeriksaan kinerja. Dan pemeriksaan investigative harus memiliki kompetensi di bidang pemeriksaan investigative.

Kemudian pengembangan *quality assurance*, pengembangan *quality assurance* tidak hanya memastikan bahwa LHP yang diterbitkan sesuai dengan SPKN, tetapi memberikan rekomendasi untuk perbaikan standart, pedoman audit, serta pelatihan yang dibutuhkan oleh auditor. Dalam peningkatan kapasitas organisasi, dibutuhkan kepemimpinan dan manajemen yang kuat. Dalam lingkungan yang sangat dinamis maka dibutuhkan kepemimpinan yang kuat dan konsen dengan perubahan, karena BPK sudah merupakan organisasi yang termasuk *learning organization*.

Yang kedua adalah pengelolaan SDM, sistem rotasi pegawai yang lebih bijaksana dan kedepan diharapkan rotasi pegawai di BPK dilakukan secara sukarela. Yang ketiga adalah BPK harus menjadi *leading by example*, harus menjadi contoh transparansi dan akuntabilitas bagi entitas yang diperiksa.

Kemudian peningkatan kapasitas dalam merespon lingkungan eksternal setidaknya ada 3 hal yang harus menjadi perhatian, yaitu hubungan dengan lembaga perwakilan, membuat LHP yang jelas dan ringkas, merespon yang menjadi perhatian lembaga perwakilan, dan membantu secara khusus tindaklanjut hasil pemeriksaan. Terkait entitas pengelola keuangan negara, entitas harus dapat memahami harapan yang menjadi harapan pemeriksa. Kemudian *public awareness*, BPK juga harus bisa mempublikasikan atau menginformasikan yang menjadi *output* BPK.

Selain program-program tersebut, saya juga mengusulkan program pemeriksaan prioritas terkait dengan penguatan peran aparat pengawas internal Pemerintah. Kenapa hal itu dilakukan, *urgent* untuk dilakukan karena APIP di semua instansi itu pasti ada, dan itu merupakan mitra BPK untuk membantu dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya.

Pemberdayaan APIP untuk mendukung pelaksanaan tugas dan wewenang BPK diperlukan APIP yang kuat tercermin dari tingkat kapabilitasnya yang sebagaimana Pimpinan dan Anggota Dewan yang terhormat, bisa lihat di diagram yang saya sampaikan.

Saya kira cukup pemaparan dari saya Pimpinan.

Terima kasih.

## **KETUA RAPAT:**

Baik, terima kasih.

Demikian telah kita dengarkan pemaparan dari saudara Dr. Shohibul Imam, yang singkat, jelas, padat dan cukup bagus tadi. Selanjutnya kami persilakan kepada para Anggota Komisi XI DPR RI yang ingin memberikan tanggapan atau pendalaman terhadap pemaparan yang disampaikan.

Di meja kami sudah ada 4 penanya dari sebelah kiri Bapak Jon Erizal dan siap-siap dari sebelah kanan Ibu Elviana. Kami persilakan Bapak Jon.

## **F-PAN (H. JON ERIZAL, M.B.A.):**

Terima kasih Pimpinan.

### **Pimpinan dan Anggota Komisi XI DPR RI yang terhormat, Bapak Dr. Shohibul Imam yang saya hormati.**

Menarik apa yang disampaikan, cuma saya agak bingung saja Bapak lebih membahas soal visi, Bapak setahu saya ini calon pengganti dari yang 5. Kemudian kalau tidak salah 2016-2020 sudah ada visi BPK, jadi maksud Bapak begitu masuk mau mengganti visi dan misinya. Dan sampai sejauhmana Bapak bisa mempengaruhi Anggota BPK yang lain begitu Bapak menjadi Ketua katakanlah.

Kemudian hal lain juga sebenarnya kalau saya pribadi ingin mengetahui lebih jelas apa sih yang dinilai, karena banyak kalau tidak salah tadi saya baca *statement*-nya Bapak Mahfud, itu juga ditanya BPK itu hanya urusan WTP. Inikan *statement* yang menurut saya menjadi cambuk bagi kita semua yang ada dilingkungan ini. tapi tidak salah juga *statement*-nya beliau karena selama ini begitu dilakukan pemeriksaan dan keluar itu WTP setelah itu ada tangkap tangan. Sehingga image masyarakat kita kalau WTP artinya selesai semua. Artinya, ada satu proses sosialisasi terhadap apa yang dilakukan oleh BPK ini kurang maksimal, sehingga masyarakat bagi kita mungkin paham yang dilakukan itu kadang proses administrasinya. Mau disitu ada kecurangan atau tidak, ada korupsi atau tidak kan sepanjang bukti transaksinya mendukung mungkin BPK kan tetap bikin WTP. Ada satu proses ini yang belum sampai kepada masyarakat, bayangkan sampai kepada tingkat Mahfud saja masih seperti itu bagaimana kepada masyarakat yang jauh.

Yang ketiga, kita juga lihat selalu kita melihat project-project atau pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah itu berdasarkan serapan. Kalau dilihat 90% serapannya dianggap sudah bagus dari rencana kerja. Nah, kalau menurut saya *outcome* yang penting. Kita contohkan jembatan dibangun kiri dan kanan, mungkin tinggal nyambung 2 meter lagi, serapannya mungkin sudah 95% tapi *outcome*-nya itu belum bisa digunakan. Nah, ini banyak terjadi dan saya belum melihat temuan seperti ini menjadi temuan yang serius. Sebenarnya ini lebih bagus anggarannya dilangsungkan semua sehingga itu bisa cepat dimanfaatkan daripada

nunggu lagi anggaran berikutnya. Ini juga saya belum temukan di pemeriksaan-pemeriksaan yang dilakukan.

Jadi hal-hal seperti teknis seperti ini mungkin akan menjadi prioritas dalam seandainya Bapak duduk di sana nanti, karena kalau nanti hasilnya okelah *capacity building* dan lain-lain itu kan artinya supporting terhadap *outcome* yang kita harapkan. Nah, itu saja Pimpinan.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Terima kasih.

Baik, pindah ke sisi kanan silakan Ibu Elviana, siap-siap Ibu Amelia.

**F-PPP (Dra. ELVIANA, M.Si.):**

Terima kasih Pimpinan.

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

**Bapak Pimpinan, Bapak dan Ibu Anggota Komisi XI DPR RI yang saya hormati, Bapak Dr. Shohibul Imam, C.A., C.P.A., juga yang saya hormati.**

Pertama, saya memberikan apresiasi terhadap makalah Bapak yang dari tadi pagi baru ini makalahnya yang sekelas calon Anggota BPK dibandingkan dengan yang lain. Tadi saya melihat Bapak sungguh-sungguh mau maju sebagai Calon Anggota BPK ini. Materinya juga mudah dicerna, saya ingin Bapak mengulang kembali penegasannya, problem BPK saat ini benar volume keuangan semakin meningkat sementara jumlah auditor tidak bertambah, lembaga negara juga semakin bertambah. Artinya, sebaran APBN juga akan semakin bertambah.

Sebagai Calon Anggota BPK RI ringkasnya apa yang akan dilakukan terhadap kondisi BPK yang ada saat ini. beberapa auditor pernah tampil diruangan ini sebagai calon juga. Katanya dengan menyusupan anggaran APBN yang diterima oleh Setjen BPK itu terjadi penurunan jumlah lembaga yang diaudit. Jadi problem BPK ini memang sudah cukup menumpuk. Jadi ringkasnya seperti apa yang akan Bapak lakukan.

Terima kasih.

*Wasalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT:**

Baik, silakan Ibu Amelia, siap-siap Ibu Tutik.

**F-P. NASDEM (AMELIA ANGRAINI):**

Terima kasih Pimpinan.

**Pimpinan, Bapak dan Ibu Anggota Komisi XI DPR RI yang saya hormati,  
Bapak Dr. Shohibul Imam yang saya hormati.**

Saya ingin bertanya kepada Bapak kaitannya dengan WTP yang dikeluarkan oleh BPK. Ternyata ini tidak menjamin Kepala Daerah bersih dari korupsi, terbukti banyak Kepala Daerah terjerat korupsi dengan status daerahnya WTP dalam pemeriksaan BPK. Secara kelembagaan ini menurut Bapak bagaimana tanggungjawab BPK terhadap hal ini.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Baik, Ibu Tutik silakan, siap-siap Bapak Achmad Hatari.

**F-PD (TUTIK KUSUMA WARDANI, S.E., M.M.):**

Terima kasih Pimpinan atas waktunya.

**Bapak Dr. Shohibul Imam yang saya hormati.**

Bapak mempunyai pengalaman di bidang akuntansi dan audit. Dan judul presentasi Bapak ini sangat menarik sekali, mewujudkan BPK yang lebih bermanfaat bagi masyarakat melalui *capacity building*. Itu semua tidak lepas dari pengembangan knowledge dan skill sesuai dengan industry 4.0 maksudnya. Yang ingin saya tanyakan Pak, bagaimana nanti Bapak mampu seandainya nanti Bapak terpilih menjadi Anggota BPK, bagaimana Bapak mampu mengimplementasikan teknologi 4.0 dalam mengintegrasikan secara konkrit tugas dan kewenangannya mengingat kewenangan BPK bersifat kolektif kolegial. Jadi terobosan apa yang akan Bapak lakukan kedepan.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Baik, Bapak Hatari silakan.

**F-P. NASDEM (Dr. ACHMAD HATARI, S.E., M.Si.):**

Bapak Imam, kenapa pelaksanaan hasil pemeriksaan tindaklanjut kenapa tidak optimal. Jadi nanti kalau terjadi akumulasi tiap tahun bisa mencapai puluhan ribu. Yang kedua IHPS ini kenapa Bapak tidak sertakan dengan prognosis 6 bulan



kedepan. Bapak cuma menyinggung IHP saja sementara prognosinya tidak pernah disinggung.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Baik, 5 pertanyaan Pak Shohibul kami persilakan untuk menjawab secara komprehensif dan ringkas.

**CALON ANGGOTA BPK RI (Dr. SHOHIBUL IMAM, C.A., C.P.A.):**

Terima kasih Pimpinan.

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Ijin Pimpinan, saya mulai dari pertanyaan dari Bapak Jon Erizal, apakah saya mau mengganti visi BPK, padahal di dalam visi BPK 2016-2020 itu sudah ada. Sebetulnya visi BP 2016-2020 itu sudah mulai meningkat kualitas laporan keuangan dan manfaat bagi *stakeholder* Pak. Tapi saya ingin lebih jauh lagi bahwa BPK itu dapat bermanfaat bagi masyarakat lebih luas. Hal itu bisa dilakukan dengan cara peningkatan peran BPK tadi. Jadi BPK tidak semata-mata hanya *oversight, insight* tapi sudah mengarah ke *foresight* yang sampai dengan saat ini peran *foresight* itu belum bisa dilakukan. Saya yakin kedepan berkat dukungan dari lembaga perwakilan dalam hal ini DPR RI dan semua pihak, BPK akan bisa memainkan perannya di 3 level, tidak hanya *oversight, insight, foresight*.

Saya sampaikan juga banyak tadi pertanyaan terkait dengan kenapa masalah WTP tapi ternyata ada masih terjadi perbuatan melawan hukum dalam hal ini gratifikasi. Yaitu tadi menurut pandangan saya kita harus memperkuat BPK dalam melaksanakan 3 peran tadi. Karena kalau peran *oversight* baru sebatas yang dilakukan sekarang. Bagaimana BPK itu berperan untuk memastikan tata kelola keuangan itu berjalan baik, kemudian patuh terhadap ketentuan perundangan. Itupun kalau laporan keuangan itu sampele tidak bisa semuanya diperiksa, karena punya keterbatasan waktu dan punya keterbatasan biaya juga. Audit adalah sample tidak populasi.

Terus apakah ... (suara tidak jelas)

**F-PAN (H. JON ERIZAL, M.B.A.):**

Pimpinan, ijin interaksi.

Pak, Bapak belum menjawab pertanyaan saya. Pertanyaan saya itu kalau Bapak duduk bagaimana Bapak meyakinkan Anggota lain itu untuk bisa visi masuk sesuai dengan yang Bapak sampaikan. Kan Bapak akan berhadapan dengan Anggota lain yang ada nantinya, disamping 5 yang diganti sementara Bapak sudah

punya visi yang berbeda atau katakanlah complimentary terhadap visi yang sudah ada ini bagaimana upaya Bapak, apa yang akan Bapak lakukan itu.

**CALON ANGGOTA BPK RI (Dr. SHOHIBUL IMAM, C.A., C.P.A.):**

Ijin untuk saya ingin mencoba menjelaskan, kebetulan sumber saya ambil dari International Organization Supreme Institution Pak, Intosai. Jadi sebetulnya BPK 2019-2024 saya kira arahnya adalah mengikuti pola yang dilakukan oleh Intosai. Karena sebenarnya lembaga pemeriksa itu untuk pengembangan kelembagaan relative lebih mudah secara konsep, karena di dunia itu sudah ada organisasi lembaga pemeriksa sedunia yang selalu terus mengembangkan organisasi lembaga pemeriksa secara kelembagaan. Jadi sebenarnya kita bisa istilahnya *copy paste* secara konsepnya dari Intosai seperti itu.

Dan saya yakin sekarang BPK sedang menyusun visi dan misi yang baru Pak, setelah 2016-2020, 2020-2025 sedang menyusun dan saya yakin tidak akan bertabrakan dengan apa yang saya sampaikan, itu argumennya Pak. Saya yakin Pimpinan yang lain akan memiliki *meeting of main* terkait dengan hal tersebut. Itu Pak, yang bisa saya sampaikan.

Kemudian terkait dengan WTP dengan perbuatan melawan hukum dalam hal ini gratifikasi. Memang itu PR Pak, bagi lembaga pemeriksa untuk bisa menyampaikan secara perlahan dan komprehensif. Dan mungkin perlu dilakukan sosialisasi dalam bentuk BPK goes to campus mungkin ke kampus-kampus. Kemudian dapat juga dilakukan ke komunitas, profesi untuk menyampaikan bahwa WTP itu adalah *output* dari pemeriksaan atas laporan keuangan. Yang tujuannya adalah untuk menyatakan bahwa laporan keuangan tersebut dalam semua hal yang material itu tidak ada ketidak wajaran, tetapi terkait dengan perbuatan melawan hukum itu diluar lingkup prosedur pemeriksaan keuangan. Memang dalam praktiknya banyak sekali yang harus disampaikan sehingga perlu penjelasany cukup komprehensif dan butuh waktu yang cukup banyak. Terkait dengan serapan yang belum selesai Pak, mungkin ini direkomendasikan untuk dilakukan penganggaran secara multiyears Pak, terkait dengan *output*-nya

Kemudian lanjut pertanyaan dari Ibu Elviana, terkait keterbatasan yang dimiliki BPK, baik dari sisi anggaran maupun sumber daya manusia. Menurut pandangan saya dalam hal ini BPK secara kelembagaan termasuk didalamnya adalah fungsi Kesekjenan harus bisa meyakinkan dalam perencanaan kegiatannya, baik dari sisi anggaran, maupun dari sisi sumber daya manusia harus diperkuat lagi argumennya. Agar saya yakin para dalam hal ini lembaga perwakilan maupun Pemerintah jika melihat perencanaan yang masuk akal tentunya akan mendukung dari kegiatan BPK. Dari aspek perencanaan yang saya soroti itu mungkin harus diperkuat lagi.

Kemudian pertanyaan terkait dengan opini WTP tapi masih terjadi korupsi. Tadi sudah saya sampaikan bahwa proses untuk menghasilkan WTP, yaitu auditor melalui prosedur pemeriksaan keuangan, dia menyimpulkan bahwa dalam semua hal yang material. Jadi perlu saya sampaikan juga disitu ada aspek materialitas, jadi

kalau misalnya jumlahnya itu di bawah materialitas maka dianggap masih wajar seperti itu, ketidaksesuaian yang saya maksud bukan gratifikasi. Ketidaksesuaian misalkan ada ketidaksesuaian sesuai standart itu yang dibawah materialitas, maka itu opininya masih WTP. Tetapi memang pemeriksaan keuangan itu tidak bisa menangkap atau bisa mengidentifikasi adanya gratifikasi. Dan memang pemeriksaan keuangan tidak ditujukan untuk mendeteksi adanya gratifikasi, tapi pemeriksaan keuangan hanya sebatas melihat apakah laporan keuangan yang sajikan oleh entitas pengelola keuangan itu telah sesuai dengan standart akuntansi atau tidak. Dan sebetulnya BPK masih punya pemeriksaan lain, yaitu pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan investigative atau pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Di dalamnya ada pemeriksaan investigative dan pemeriksaan lainnya.

Kemudian pertanyaan yang keempat, terkait dengan bagaimana mengimplementasikan revolusi industry 4.0 secara kolektif dan kelembagaan. Pertanyaan Ibu sangat relevan sekali, karena dalam lingkungan yang berubah ini tentunya entitas pengelola keuangan negara pun berubah. Saya yakin hampir semua entitas pengelola keuangan negara sekarang sudah menggunakan teknologi informasi dalam mengelola transaksinya. Namun, yang belum terjadi adalah integrasinya, makanya BPK tadi saya sampaikan BPK harus menjadi *leading by example* ketika entitas pengelola keuangan negara sudah menggunakan teknologi informasi, BPK harus menjadi selangkah lebih maju dibandingkan dengan entitas pengelola keuangan negara. Karena tadi saya sampaikan, BPK harus menjadi *leading by example* terkait dengan transparansi dan akuntabilitas.

Sementara ijin Pimpinan, saya kira cukup.

Maaf, masih satu lagi Pak, dari Pak Hatari ijin menjawab. Terkait dengan tindaklanjut yang belum optimal, saya tidak dalam posisi mengomentari apa yang ada Pak, tapi saya ingin mengusulkan agar tindaklanjut ini bisa efektif, yaitu dilakukan forum tindaklanjut dengan entitas pengelola keuangan negara secara intensif dan terukur. Setelah itu dilaporkan kepada lembaga perwakilan, baik itu ditingkat pusat maupun di tingkat daerah. Itu yang bisa saya sampaikan. Saya akan melakukan forum tindaklanjut hasil pemeriksaan, karena sebetulnya setahu saya di BPK itu sekarang sudah ada namanya sistem informasi pemantauan tindaklanjut secara otomatis. Jadi ketika entitas pengelola keuangan negara akan menindaklanjuti tindaklanjut dia cukup tidak perlu ketemu dengan auditor, dia cukup memasukkan dalam aplikasi. Jadi aplikasi antara pemeriksa dengan entitas pengelola itu sudah terintegrasi.

Namun, masalahnya kadang kita ini masalah itu tidak bisa selesai hanya sebatas melalui surat menyurat. Tapi ada hal-hal yang harus dijelaskan, harus ketemu, dan yang jauh lebih penting adalah komitmen dari Pimpinan lembaga. Kadang-kadang tindaklanjut itu tersendat ketika ada pergantian Pimpinan lembaga, Pimpinan yang baru merasa bahwa itu bukan menjadi tanggungjawabnya. Makanya itu diperlukan antar Pimpinan melakukan forum tindaklanjut. Itu usulan dari saya.

Terima kasih.

## **KETUA RAPAT:**

Baik, saya kira cukup ya.

Demikian saudara-saudara sekalian, jawaban dan tanggapan dari saudara Dr. Shohibul Imam, C.A., C.P.A., terhadap pertanyaan Anggota Komisi XI DPR RI. selanjutnya kami persilakan kepada saudara Shohibul untuk menyampaikan *closing statement*-nya sebelum acara ini kita akhiri. Boleh sekaligus mengkampanyekan diri terkait dengan pemilihan Calon Anggota BPK RI ini.

Kami persilakan satu menit.

## **CALON ANGGOTA BPK RI (Dr. SHOHIBUL IMAM, C.A., C.P.A.):**

Terima kasih Pimpinan.

Intinya adalah bagaimana siapapun yang akan terpilih nantinya, intinya bagaimana kita mewujudkan BPK yang lebih bermanfaat bagi masyarakat melalui *capacity building* dan tentunya BPK yang lebih bermanfaat tidak akan bisa terjadi seandainya tidak mendapat dukungan dari lembaga perwakilan, Pemerintah dan semua pihak. Oleh karena itu, saya berharap bahwa BPK akan terus maju dan tentu BPK akan diisi oleh SDM-SDM yang unggul, berkualitas, karena menurut Presiden III Republik Indonesia Bapak Habibie Alm bahwa yang bisa menjawab tantangan dan bisa memecahkan masalah kedepan hanya orang-orang yang ahli dan produktif saja.

Terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

## **KETUA RAPAT:**

Baik, mari kita berikan *applause* kepada Bapak Dr. Shohibul Imam. Dengan demikian Rapat Dengar Pendapat Umum telah selesai dan kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Shohibul Imam dan waktu tepat 45 menit. Untuk itu, rapat kami skors dan kami persilakan Bapak meninggalkan ruang sidang.

## **(RAPAT DISKORS)**

### **Bapak dan Ibu sekalian.**

Bersama kita telah hadir Calon Anggota BPK RI, yaitu Bapak Wisnuntoro. Bapak Wisnuntoro sebelum kita mulai, kami sampaikan Tatibnya, yaitu dalam proses fit and propertest ini sesuai dengan Tatib yang telah kita sepakati bersama.

1. Calon Anggota BPK RI menjalankan uji kepatutan dan uji kelayakan sendiri-sendiri, calon yang lain diharapkan menunggu di ruang ruangan.

2. Waktu yang diberikan maksimal 45 menit, terdiri atas 15 menit maksimal calon Anggota BPK RI mempresentasikan makalahnya dan 30 menit tanya jawab.

Untuk itu, waktu dan tempat kami persilakan.

### **CALON ANGGOTA BPK RI (WISNUNTORO):**

Terima kasih.

*Bismillahirrahmanirahim.*

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,*  
**Salam sejahtera untuk kita semua.**

**Yang kami hormati Bapak Pimpinan Komisi XI DPR RI beserta seluruh Anggota Komisi XI DPR RI.**

Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih atas diberikannya kesempatan untuk bisa hadir di tengah forum yang terhormat ini untuk memaparkan konsep usulan kami mengenai BPK, sebagai salah satu syarat Calon Anggota BPK RI 2019-2024.

Disini kami mengangkat isu visi, bagaimana kita menguatkan strategis Badan Pemeriksa Keuangan dalam tata kelola dan peningkatan kinerja BUMN. Background saya adalah BUMN Pak, saya 32 tahun bekerja di Pertamina, tahun 2017 saya pensiun dan sekarang mengelola yayasan. Jadi terus terang bidang yang ingin saya pelajari dan saya kuasai adalah tentang BUMN.

Lanjut, jadi kita tahu bahwa di dalam manajemen fungsi pengawasan adalah merupakan salah satu hal yang krusial dan harus dilakukan di dalam rangka satu proses manajemen mulai dari perencanaan, pelaksanaan, eksekusi dan *checking* atau *plan do check atau organizing, starting, executing dan controlling*. Jadi saya kira pengawasan ini memang tetap harus dilakukan di dalam kegiatan apapun. Jadi kalau ada satu kegiatan, satu korporasi apalagi satu institusi yang tidak ingin adanya satu fungsi pengawasan dan pentingnya fungsi pengawasan mungkin perlu dipertanyakan.

Lanjut, pengawasan dan pengendalian pada hakekatnya perlu dilakukan adalah untuk memastikan bahwa apa yang telah dicapai satu organisasi itu memenuhi dengan target-target yang telah ditetapkan dalam perencanaan kerja di awal tahun atau tahun sebelumnya. Dan juga harus memenuhi prosedur yang ada di dalam organisasi atau institusi tersebut. Target bisa dicapai tetapi kalau prosedurnya tidak dilalui tentu dari sisi *governance* tidak tercapai dan tentu satu hal yang tidak bisa diterima dalam satu kegiatan manajemen.

Kemudian pengawasan dan pengendalian juga diperlukan sebagai *feedback* masukan-masukan untuk perbaikan-perbaikan kedepan, karena diharapkan satu kegiatan organisasi atau institusi itu akan bekerja terus sampai dalam waktu jangka

panjang. Kemudian juga pengawasan dan pengendalian diperlukan sebagai bagian dari sisi akuntabilitas satu kegiatan, pembinaan SDM-nya, mitigasi resiko, assessment efektifitas, dan efisiensi programnya.

Lanjut, disini kita melihat peran kunci dari badan pengawas keuangan Republik Indonesia dengan dasar hukum yang sangat kuat, ada 4 Undang-Undang yang mendukung adanya lembaga ini. kemudian juga Tap MPR Nomor 6 Tahun 2002 yang menegaskan bahwa satu-satu lembaga auditor eksternal adalah BPK RI.

Lanjut, tugasnya adalah melakukan pemeriksaan, pengelolaan, dan tanggungjawab keuangan antara lain pada BUMN termasuk pemeriksaan kinerja itu menyangkut seberapa efisien dan efektifnya satu kegiatan ekonomi. Kemudian audit keuangan menyangkut pemberian opini, apakah disclaimer atau WTP dan lain sebagainya. Dan juga audit atau pemeriksaan dengan tujuan tertentu, di mana hal ini mengarah kepada audit investigative.

Kemudian peran kunci lainnya adalah menentukan objek, waktu, metode, dan melaksanakan pemeriksaan dimana hasil tersebut dapat dihasilkan sebagai pendapat kepada DPR RI, DPD, atau lembaga negara lain dan di dalam penyelesaian masalah kerugian negara.

Lanjut, BPK juga lebih dari sekedar menilai akuntabilitas satu lembaga ataupun mendukung penyelesaian kerugian negara dan menentukan pihak yang bertanggungjawab apabila terjadi kerugian tersebut. Kemudian peran kunci lainnya adalah mengukur capaian kinerja, menilai ketaatan atas berbagai regulasi yang berlaku dan memberikan informasi kinerja keuangan yang audity. Jadi dengan menguasai dan berpedoman kepada regulasi, tidak mengatur ataupun mengakali agar bisa tidak menyalahi regulasi. Dengan demikian BPK tidak hanya berorientasi kepada apa yang seharusnya terjadi, namun juga apa yang akan terjadi. Perbaikan-perbaikan yang harus dilakukan oleh satu organisasi setelah dilakukannya suatu audit.

Lanjut, BUMN sebagai penggerak perekonomian. Dengan kontribusi BUMN yang hampir 22% dari APBN, peran BUMN sangatlah penting di dalam penggerak perekonomian suatu negara Republik Indonesia. Peran BUMN sebagai agen pembangunan dan agen penciptaan nilai. Dalam lingkup sebagai agen pembangunan, perannya yang pertama melaksanakan program Pemerintah untuk menciptakan multiplier efek ekonomi nasional, misalnya contohnya di BUMN Pertamina dengan 16 ribu karyawan, 5 ribu lebih pompa bensin, ada 6 kilang pabrik minyak, 150 depo dan ratusan kapal-kapal tanker ini akan memberikan multiplier efek pergerakan perekonomian nasional yang sangat besar.

Kemudian yang kedua, menyediakan barang dan jasa untuk kebutuhan hajat hidup orang. Yang ketiga, merintis kegiatan usaha yang belum mampu dilakukan oleh swasta ataupun koperasi. Kalau kita lihat ada beberapa kegiatan yang masih diperlukan subsidi misalnya seperti listrik, kemudian LPG3 Kg, pelayaran Pelni dan sebagainya, di mana kegiatan-kegiatan ini dibutuhkan oleh masyarakat tetapi sektor swasta belum mampu melakukannya, karena masih belum bisa memberikan keuntungan.

Kemudian selain itu juga BUMN turut aktif membantu pengusaha golongan ekonomi lemah. Di BUMN ada program-program GSR atau program PKBL itu melakukan pembinaan pada mitra-mitra binaan, pengusaha-pengusaha kecil baik di dalam permodalan, produksi maupun juga pemasaran produksi mereka.

Dalam hal nilai BUMN harus dapat menjaga kelangsungan usaha untuk terus tumbuh berdaya saing lokal maupun global. Seperti Pertamina yang sudah memiliki lapangan produksi di beberapa negara seperti Irak, Al-zajair, Tanzania, dan lain sebagainya. Juga kalau kita lihat Waskita Karya yang sudah bisa beroperasi di Timur Tengah, maupun Inka pabrik kereta api yang sudah mengekspor juga di Banglades maupun Nyanmar dan bank-bank Himbara, bank-bank Pemerintah yang beroperasi di beberapa negara di luar negeri.

Lanjut, terjadi beberapa perubahan-perubahan BUMN status hukumnya yang intinya untuk meningkatkan keuntungan BUMN yang bersangkutan. Lanjut, kontribusi BUMN selain pajak juga ada deviden dan juga penerimaan negara bukan pajak. Ratio pembayaran deviden semakin meningkat dengan rata-rata sekitar 3% dari setiap keuntungan BUMN. Kemudian kontribusinya juga kalau kita lihat 422 pada tahun 2018 sekitar 22% dari APBN kita tahun 2018 yang sekitar 1800 triliun lebih.

Lanjut, kita lihat juga grafiknya meningkat baik dari sisi kepemilikan aset yang 8 triliun lebih maupun. Lanjut, total laba juga meningkat terus, artinya bahwa memang BUMN ini memberikan kontribusi yang terus meningkat terhadap penerimaan negara.

Lanjut, melihat peranan yang dominan dan cukup menonjol di BUMN. Kita perlu memberikan perhatian lebih kepada BUMN. Di mana kalau kita melihat peran BUMN membawa implikasi pengelolaan aset dan wewenang yang sangat besar. BUMN memiliki posisi yang sangat strategis karena menjadi salah satu sarana pelaksanaan atau eksekusi program nasional yang merupakan hasil proses politik antar lembaga tinggi negara.

Lanjut, kalau kita melihat tabel ini dari kajian ICW bahwa dari angka perkiraan nilai kerugian negara 5,6 triliun ternyata 3,1 triliun kontribusi dari BUMN jadi 55% kontribusinya BUMN. Artinya, kalau kita bisa menertibkan sektor ini pengaruhnya kepada penekanan kerugian negara secara nasional akan berdampak besar.

Lanjut, korupsi masih menjadi masalah pembangunan konsisten dengan survey dari internasional bahwa indeks korupsi Indonesia sebesar 38 dari skala 100, skors telah menaik dari 37 pada tahun 2017 maupun tahun 2012 yang hanya 32. skors. Transparansi internasional juga masih banyak kejadian korupsi di sektor telekomunikasi, transportasi, energi minyak dan lain sebagainya. Korupsi masih merupakan permasalahan indemik di Indonesia yang menjadi kendala terbesar dalam peningkatan kapasitas tata kelola lembaga Pemerintahan.

Lanjut, untuk itu kami mengusulkan di dalam topik ini adalah ada dua agenda yang perlu kita lakukan untuk peningkatan BPK dalam kaitan audit kepada BUMN. Yang pertama, eksternal penguatan tata kelola BUMN. BPK bisa mendorong pengelolaan keuangan negara termasuk BUMN dengan pemeriksaan yang berkualitas dan bermanfaat. Kemudian harus mendorong bahwa BUMN tidak hanya

mengejar opini WTP akan tetapi juga memastikan bahwa program-program Pemerintah termasuk melalui BUMN dapat berjalan efektif dan efisien. Ada hemat, kemudian tepat dan kita lakukan pembelanjaan yang mempunyai dampak positif terhadap masyarakat banyak.

Kemudian BPK mendukung peningkatan kualitas dan kapan maupun akuntabilitas BUMN. Kemudian orientasi pemeriksaan tidak hanya kepada proses pengelolaan keuangan agar dilakukan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku. Tetapi juga harus pada penilaian aspek ekonomi, efisiensi, maupun efektifitas program atau audit kinerja.

Selain itu, agenda internal yang perlu dilakukan adalah penguatan kapabilitas dan integritas sumber daya manusia. Pelaksanaan peran BPK di atas memerlukan peningkatan transparansi dan akuntabilitas BPK secara kelembagaan, peningkatan profesionalisme maupun integritas para pegawainya.

Lanjut, kesimpulan kami yang pertama bahwa sebagai pemeriksa keuangan negara dan satu-satunya pemeriksa keuangan negara yang termasuk keuangan negara yang diinvestigasikan di BUMN meskipun masih ada pro dan kontra bahwa apakah aset yang di BUMN termasuk kekayaan negara atau tidak. Tetapi pada prinsipnya dipisahkannya adalah untuk memudahkan BUMN agar bisa bergerak lebih fleksible.

Sebagai pemeriksa keuangan BPK telah memiliki dasar hukum yang sangat kuat di dalam menjalankan fungsi pengawasan. Kita lihat tadi ada 5 Undang-Undang ...(suara tidak jelas)

#### **KETUA RAPAT:**

Tinggal 1 menit lagi Pak.

#### **CALON ANGGOTA BPK RI (WISNUNTORO):**

Dan 1 TAP MPR yang mendukung kekuasaan BPK ini.

yang kedua, peran BPK tidak sekedar mengidentifikasi dan menemukan kekeliruan tetapi juga ikut berperan dalam meningkatkan akuntabilitas BUMN. BPK juga perlu memperkuat kapabilitas dan integritas sumber daya manusia internal sehingga hasil pemeriksaan dapat digunakan untuk memperbaiki praktek tata kelola BUMN dan efektifitas program pembangunan. Dengan berprinsip kepada 3 spending tadi, yang pertama spending less, yaitu membelanjakan secara lebih hemat, spending well membelanjakan secara efisien dan membelanjakan yang memberikan manfaat sebanyak-banyaknya kepada masyarakat.

demikian paparan kami.

Terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*



## **KETUA RAPAT:**

Baik, paparan telah disampaikan oleh Bapak Wisnuntoro dan kita telah mendengarkan. Dengan demikian kita masuk ke sesi kedua, yaitu pendalaman hasil paparan tersebut. Di meja kami sudah ada beberapa penanya, kita mulai dari sisi sebelah kiri silakan Bapak Nizar Zahro, siap-siap Ibu Felicitas Tallulembang.

Silakan Bapak Nizar.

## **F-P. GERINDRA (H. MOH. NIZAR ZAHRO, S.H.):**

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

**Pimpinan, Bapak dan Ibu Anggota Komisi XI DPR RI yang sangat saya hormati,  
Bapak dan Ibu Anggota Komisi XI DPR RI yang sangat saya hormati.**

Saya ingin memperdalam apa yang disampaikan oleh Bapak Winuntoro, pertama di halaman 6. Bapak secara detail menjelaskan bagaimana table korupsi berdasarkan lembaga sehingga total ratenya itu ada 5,6 triliun. Yang menarik disini kita akan kupas yang dua, Pemerintahan Desa jumlah kasus 104, kemudian 1,2 triliun. Selama 5 tahun Pemerintah memberikan dana desa itu hampir 250 triliun lebih. Kita tahu entitas Pemerintah Desa itu melebihi 15 ribu Pemerintah Desa. Pemerintah Kabupaten itu sekitar 514 kabupaten, 34 provinsi. Berbicara dana desa itu entitasnya bukan hanya di Pemerintah Desa akan tetapi mereka melekat di Pemerintah Kabupaten.

Saya ingin memberikan dan bertanya secara mendalam sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK, kalau Bapak misalkan mendapatkan amanah untuk menjadi Anggota BPK. Menjadi PR terberat sekarang adalah entitas Pemerintah Desa yang diberikan dana desa menjadi sebuah masalah, sehingga banyak aparatur desa, kepala desa dan kemudian menjalani proses hukum. Bagaimana Bapak mengoptimalkan itu untuk mencegah misalkan atau memberikan penilaian karena apapun ini akan menjadi beban berat bagi BPK.

Yang kedua, di halaman 4 begitu gamblangnya Bapak Wisnu tadi menjelaskan bagaimana kondisi BUMN kita dengan pendapatan margin sekitar 23% sekitar Rp422 triliun yang terdiri dari pendapatan negara bukan pajak, beserta pajak dan juga deviden. Selama 2014 sampai dengan 2018 deviden yang dihasilkan oleh BUMN yang disetorkan ke negara tidak pernah beranjak dari angka 44 triliun. Tahun 2018 Bapak hanya memberikan 44 triliun, tahun 2017 sebesar 43 triliun. Apa peran Bapak misalkan kalau menjadi Anggota BPK kemudian ditugasi di BUMN itu untuk menggenjot pendapatan negara tidak hanya stag di 43 sampai 44 triliun, mendapatkan lompatan misalkan 44 triliun.

Demikian Pak Ketua.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Luar biasa Bapak Nizar, semakin siang semakin panas.  
Lanjut, Ibu Felicitas.

**F-P. GERINDRA (Dr. FELICITAS TALLULEMBANG):**

Terima kasih Pimpinan.

**Pimpinan dan teman-teman Komisi XI DPR RI,  
Bapak Wisnuntoro.**

Saya melihat di makalah di depan saya ini Bapak lebih khusus membawa makalah Bapak ke dalam BUMN. Pertanyaan saya hanya satu apabila Bapak terpilih jadi satu Pimpinan BPK, apa kira-kira yang Bapak bisa lakukan untuk BUMN yang sekarang lagi dalam sorotannya tentang pendapatan BUMN yang kurang bagus dinilai oleh masyarakat dan peran BPK di dalam menggenjot seperti yang disampaikan tadi Bapak Nizar pendapatan BUMN kedepan, karena kita tahu bersama bahwa BUMN itu adalah salah satu penunjang daripada pendapatan negara ini. Dan BPK merupakan satu badan yang menjaga APBN di dalam pemeriksaannya.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Baik, Bapak Faisol Riza kami persilakan, siap-siap Ibu Amelia.

**F-PKB (FAISOL RIZA):**

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Terima kasih Pimpinan.

**Pimpinan dan seluruh Anggota Komisi XI DPR RI,  
Bapak Wisnuntoro.**

Menarik karena selama ini terutama beberapa tahun terakhir kita menyaksikan ada banyak kasus di BUMN termasuk yang dianggap paling besar dan selama ini tersembunyi justru di mana tempat Bapak Wisnuntoro pernah bekerja. Pertamina yang selama ini seolah-olah menjadi kasus yang sulit untuk dibuka.

Kita melihat ada dua lembaga, lembaga BPK yang melakukan pemeriksaan keuangan, ada lembaga yang melakukan penindakan misalnya dalam kasus korupsi ada KPK. Tetapi kita tidak melihat upaya yang selama ini yang dilakukan oleh BPK

dalam kasus seperti Petral dan kasus-kasus yang lain bisa diungkap lebih jauh oleh BPK.

Dari pengalaman Bapak Wisnuntoro sendiri saya yakin selama ini pasti tahu persis apa yang terjadi khususnya di Pertamina misalnya kalau kita sebutkan Mercusuar BUMN dan kasus-kasus di BUMN yang lainnya. Nah, untuk pengalaman itu saya kira mungkin kalau Bapak Wisnuntoro ditunjuk terpilih menjadi Anggota BPK apa yang harus dilakukan agar bisa menjadi lembaga yang sangat efektif, efisien, bisa mengungkap temuan-temuan persoalan keuangan dan manajemen keuangan, sehingga apa yang disebut oleh Bapak Wusnuntor di halaman 6 tentang korupsi BUMN itu tidak terjadi seperti sekarang ini.

Saya kira itu pertanyaannya Pimpinan.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT:**

Silakan Ibu Amelia, siap-siap Bapak Purnamasidi.

**F-P. NASDEM (AMELIA ANGRAINI):**

Terima kasih Pimpinan.

**Pimpinan dan rekan-rekan Anggota Komisi XI DPR RI yang saya hormati,  
Bapak Wisnuntoro yang saya hormati.**

Saya ingin bertanya dari judul makalah yang Bapak bikin ini, apa yang melatar belakanginya Bapak, membuat makalah dengan judul menguatkan peran strategis BPK dalam tata kelola dan peningkatan kinerja BUMN. Apakah Bapak yakin jika terpilih menjadi salah satu Pimpinan BPK nanti akan ditempatkan di Anggota 7 yang tugasnya membidangi salah satunya ada Kementerian BUMN.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Baik, selanjutnya Mas Purnamasidi.

**F-PG (H.M. NUR PURNAMASIDI):**

Terima kasih Pimpinan.

**Yang saya hormati Bapak Wisnuntoro.**

Jadi saya ini agak susah juga Pak, sebagian besar orang itu sudah berkeinginan untuk mengurangi peran BUMN. Jadi ada arus besar bahwa negara

sudah harus mulai mengurangi sedikit demi sedikit terkait dengan pengelolaan ekonomi dan lebih konsen untuk bagaimana memberikan pelayanan yang terbaik buat masyarakat.

Nah, disini Bapak Wisnuntoro dengan judul makalah ini saya punya kesimpulan bahwa Bapak ini ingin mendorong BUMN menjadi lebih besar. Kalau sekarang misalnya kontribusinya butuh berapa besar dari APBN mungkin berapa tahun kemudian ingin menjadikan BUMN sebagai motor dari seluruh atau sebagian besar dari bernegara.

Faktanya Pak, seperti Bapak ketahui bahwa BUMN termasuk kami di Komisi XI DPR RI selalu dalam kesimpulan lebih banyak uang negara yang dikeluarkan untuk mengurus BUMN daripada BUMN memberikan ke negara. Jadi saya pikir saya perlu klarifikasi kira-kira maksud dan tujuannya kemana ini Pak, padahal sisi yang lain ingin mengurangi peran-peran BUMN kita ganti kepada sektor swasta dan negara lebih fokus untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat.

Saya pikir itu terima kasih.

#### **KETUA RAPAT:**

Baik, Bapak Wisnuntoro demikian 5 pertanyaan dari Anggota Komisi XI DPR RI. Selanjutnya kami persilakan Bapak memberikan tanggapan terhadap pertanyaan-pertanyaan dari 5 penanya tersebut.

Kami persilakan.

#### **CALON ANGGOTA BPK RI (WISNUNTORO):**

Baik, terima kasih.

#### **Bapak dan Ibu Anggota Komisi XI DPR RI yang kami hormati.**

Pertanyaan pertama dari Bapak Nizar tadi mengenai dana desa sekitar 200 triliun tersalurkan di 15 ribu desa, tapi banyak Kepala Desa yang kena permasalahan hukum. Tentu untuk hal ini BPK sesuai dengan keberagaman Anggota dan bidang ditangani akan lebih intensif juga untuk menangani penyaluran dana ke sektor pedesaan. Mungkin nanti di dalam kita akan lebih mengefektifkan peran-peran perwakilan BPK di daerah-daerah supaya lebih banyak menugaskan petugas BPK untuk melakukan lebih sering melakukan sosialisasi pendidikan maupun penjelasan aturan ketentuan kepada perangkat desa.

Itulah tadi kenapa di dalam usulan proposal kami bahwa pembenahan internal adalah peningkatan SDM, baik dari sisi kualitas maupun jumlah. Dulu pada tahun 2000-an saya ingat di BPK ada program kelas khusus S2 di magister manajemen UGM kalau tidak salah sampai 4-5 angkatan. Kebetulan pada waktu itu Pertamina juga memiliki kelas khusus, jadi ada sekitar 30-40 orang dalam satu kelas dilakukan pendidikan oleh UGM pada waktu itu.

Dengan ditekankannya bidang SDM apalagi salah satu visi Pemerintah periode kedua ini adalah pembinaan dan peningkatan bidang SDM. Saya kira kemampuan untuk lebih mengawasi dan mensupervisi maupun membimbing hal-hal seperti ini akan lebih mudah untuk dilakukan.

Kemudian yang kedua untuk membenahan BUMN apa yang dipilih kalau dilakukan membenahan BUMN sekarang ini. Itu juga terkait dengan pertanyaan Bapak Purnamasidi barusan, bahwa kenapa saya mengambil topik ini. Yang pertama adalah sesuai dengan kompetensi yang dimiliki. Yang kedua, saya melihat di BPK ada Anggota yang membidangi masalah ini meskipun bukan berarti kalau toh nanti terpilih kami harus duduk disitu, tetapi paling tidak adalah kontribusi kami. Setahu saya di dalam rapat-rapat pertemuan antar Anggota pasti ada diskusi semacam sidang pleno, sehingga sedikit banyak pemahaman dan pengalaman kami di BUMN ini bisa memberikan kontribusi kepada siapa pun Anggota yang nanti membawahi BUMN.

Kami melihat bahwa dengan perhitungan tadi bahwa ternyata 55% itu kontribusi kerugian negara dihasilkan dari sektor BUMN, artinya kalau kita bisa dalam tahap awal kita bisa membenahi hal ini tentu dalam 3 tahun pertama akan terjadi penurunan yang cukup signifikan terhadap kerugian yang terjadi kepada negara.

Kemudian pertanyaan selanjutnya, dari Bapak Faisal Riza mengenai kasus BUMN contohnya kasus Petral. Memang kita lihat Petral ini dari tahun 2014, 2015 baru sekarang ternyata ditemukan kalau kita lihat di media adanya dugaan aliran dana dari mantan Dirutnya yang ditemukan di salah satu negara yang bebas pajak.

Saya kira dengan kerja sama dan kordinasi yang baik dan kompak antara dua lembaga yang Bapak sampaikan tadi, BPK dari sisi kerugian negara maupun KPK dari sisi pelanggaran hukum ini akan bisa menjadikan kejadian-kejadian seperti Petral akan banyak berkurang. Terutama yang saya rasakan di internal Pertamina sejak kejadian tahun 2014 kebetulan saya masih aktif sampai 2017, ini memang kelihatan bahwa shock terapi kasus ini membuat kawan-kawan sangat hati-hati dan cenderung untuk takut melangkah. Tetapi kalau kita melihat sampai sekarang *alhamdulillah* kinerja Pertamina secara keseluruhan relative masih baik, bertahan di sekitar angka 2,56 bilion US Dolar tahun 2018.

Dengan pengalaman Pertamina 4-5 kali dipimpin orang luar ternyata masih bisa bertahan. Jadi kesimpulannya memang selain bergantung kepada Pimpinan juga adanya sistem di perusahaan yang kuat saya kira juga akan menjaga perusahaan itu untuk bisa berkinerja lebih baik siapa pun pemimpinnya.

Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Ibu Amelia, kenapa saya memilih latar belakang judul ini apakah yakin nanti akan ditempatkan disitu. Seperti sudah saya jelaskan tadi bahwa saya lihat juga dari tahun-tahun sebelumnya jarang dari unsur BUMN yang mendaftar di lembaga ini, padahal disitu ditempatkan khusus satu Anggota yang khusus menangani BUMN. Artinya, sebenarnya cukup menjadi perhatian yang besar buat lembaga itu. Karena kompetensi yang saya miliki disitu, maka kontribusi itulah yang saya tawarkan meskipun tidak berarti nanti saya akan duduk disitu. Toh, nanti dalam sidang-sidang gelar perkara dan sebagainya

barangkali pengalaman kompetensi saya bisa saya sharing dalam forum itu sehingga bisa memberikan masukan kepada Anggota siapapun yang membawahi bidang BUMN.

Tadi yang terakhir Bapak Purnamasidi mengenai bagaimana kita membesarkan BUMN, kenapa tidak juga diberikan swasta. Memang ada kritik bahwa BUMN ini terlalu banyak mengambil porsi pekerjaan yang kecil-kecil. Jadi nanti kita harus luruskan itu apalagi dengan rencana holdingnisasi barangkali nanti untuk pekerjaan-pekerjaan yang kecil tetap akan kita berikan kepada swasta, sedangkan BUMN menangani hal-hal yang sifatnya strategis, komoditas dan perlu sinergi dari beberapa bidang yang dibutuhkan masyarakat. Saya kira semuanya bisa berjalan secara sinergis untuk memberikan kontribusi yang lebih baik buat negara.

Saya kira demikian Bapak Ketua dan para Anggota yang terhormat.

Terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

**F-P. NASDEM (Dr. ACHMAD HATARI, S.E., M.Si.):**

Pak Wisnuntoro, ini data diambil dari mana soal desa tadi.

**CALON ANGGOTA BPK RI (WISNUNTORO):**

Ijin ini disitu tertulis.

**F-P. NASDEM (Dr. ACHMAD HATARI, S.E., M.Si.):**

Ini datanya 104 kasus atau setara dengan 1,2 triliun, Bapak Wisnuntoro ambil data dari mana, diabstraksikan atau memang ini valid. Soal deviden saya juga ragu Pak, Bapak ambil angka deviden dari mana ini, tercantum 425 triliun saya hitung hanya 225 saja. Jadi menurut saya ini data Bapak abstraksikan saja ini bukan data yang valid.

**CALON ANGGOTA BPK RI (WISNUNTORO):**

Baik, terima kasih Bapak.

Yang pertama, mengenai data korupsi saya ambil dari publishnya ICW tahun 2018. Nanti kita bisa kalau memang ada data lain kita bisa bandingkan.

**F-P. NASDEM (Dr. ACHMAD HATARI, S.E., M.Si.):**

Bapak diuji untuk menjadi Calon Anggota BPK RI, tetapi kalau angka-angka di *paper* ini saja Bapak sudah abstraksikan bukan satu data yang valid inikan bagaimana.

**CALON ANGGOTA BPK RI (WISNUNTORO):**

Memang ini data sekunder, jadi saya menggunakan data sudah dipublikasikan satu lembaga. Yang kedua, juga mengenai deviden dan sebagainya ini dari websitenya Kementerian BUMN yang saya kutib.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Baik, saya kira sudah cukup ya, kita tidak perlu mengadili orang, tapi saya kira kita sudah paham nanti.

Demikian Bapak Wisnuntoro saya berikan waktu 1 menit untuk Bapak menyampaikan *closing statement*-nya sebelum kita akhiri.

**CALON ANGGOTA BPK RI (WISNUNTORO):**

Baik Pak, pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas kesempatan pada siang hari ini. Dan kami menegaskan bahwa di dalam BPK andaikata kami bisa terpilih kita ingin mempunyai visi bagaimana memperkuat ekstensi dan peran BPK sebagai satu-satunya eksternal audit keuangan negara yang independent, professional, salah satunya adalah mengaudit BUMN.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Berikan applause Bapak dan Ibu sekalian.

**Bapak dan Ibu hadirin sekalian.**

Dengan demikian kita telah mengakhiri paparan kedua dari Bapak Wisnuntoro. Dan kepada Bapak Wisnuntoro kami persilakan dengan hormat meninggalkan ruang rapat dan berjabat tangan kami persilakan.

Rapat kami skors 1 menit.

**(RAPAT DISKORS)**

**Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati.**

Saat ini kita telah kedatangan Bapak Drs. H. Akhmad Muqowam rasanya kita sudah tidak aneh lagi Bapak ini, memang penghuni Senayan sejak jaman dulu.

**Bapak Muqowam yang kami hormati.**

Kami punya Tatib kami sampaikan.

1. Calon Anggota BPK RI menjalankan uji kepatutan dan uji kelayakan sendiri-sendiri, calon yang lain diharapkan menunggu di ruang ruangan.
2. Waktu yang diberikan maksimal 45 menit, terdiri atas 15 menit maksimal calon Anggota BPK RI mempresentasikan makalahnya dan 30 menit tanya jawab.

Manfaatkan waktunya dengan baik dan kami persilakan Bapak untuk menyampaikan visi dan misi ataupun paparan yang akan Bapak berikan kepada kami.

Waktu dan tempat kami persilakan.

**CALON ANGGOTA BPK RI (Drs. H. AKHMAD MUQOWAM):**

Terima kasih.

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,*  
**Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua.**

**Yang saya hormati segenap Pimpinan dan Anggota Komisi XI DPR RI.**

Pertama-tama saya terima kasih untuk bisa hadir kembali di sini untuk mengikuti prosedur yang ada di Komisi XI DPR RI dalam rangka pencalonan Anggota BPK RI.

Bapak Ketua, kami ucapkan terima kasih atas apresiasi Komisi XI DPR RI yang dimana pada waktu pertama saya memang kebetulan tidak bisa hadir dan secara resmi kami mengirimkan surat tertulis pada waktu itu. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya akan memanfaatkan sebaik mungkin untuk menyampaikan apa yang perlu saya sampaikan di dalam proses pencalonan saya sebagai Anggota BPK RI.

**Ibu dan Bapak sekalian.**

Salah satu hasil reformasi adalah lahirnya beberapa lembaga negara sebagai tambahan reformasi 98, KY, kemudian MK, kemudian DPD, yang dimana secara keseluruhan melengkapi apa yang sudah ada MPR, DPR RI, kemudian Presiden, kemudian BPK, kemudian MA. Ini yang saya kira menjadi bagian di reformasi yang lalu.

Nah, BPK sebagai salah satu di lembaga negara yang bertugas melakukan pemeriksaan, pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara secara bebas dan mandiri. Mandat tersebut memang ada di dalam Pasal 23 E, F, dan G Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian juga ada di dalam Undang-Undang Nomor 17 Bab 8 tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN dan APBD yang mengatur mengenai pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara yang secara kelembagaan juga diatur di dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 dengan



BPK. Saya kira ini merupakan turunan dari ada di dalam Bab 3 pasal 6 sampai 9 tentang wewenang dan tanggungjawab BPK.

Dalam rangka mendorong pengelolaan keuangan negara yang mencapai tujuan negara serta dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya, BPK menyusun rencana strategi. Saya sampaikan Bapak dan Ibu sekalian, karena saya adalah calon oleh karena itu harus komit pada apa yang sudah berjalan selama ini di BPK. Di dalam Renstra pertama tahun 2006-2011, kemudian 2011-2015, 2016, 2020. Yang dasarnya adalah pertama adanya analisis pendekatan swatch yang mencakup beberapa hal yang *output*-nya adalah:

1. Peningkatan kualitas pemeriksaan yang luas dari waktu ke waktu dan menjadi upaya baik dari internal BPK ataupun dari pihak lain yang menggunakan output dari proses yang ada di BPK.
2. Tindaklanjut dan manfaat dari hasil pemeriksaan.
3. Peningkatan relevansi pemeriksaan sesuai dengan harapan pemangku kepentingan.
4. Penyempurnaan pada proses bisnis dan tata kelola organisasi BPK dengan penggunaan sistem dan teknologi informasi.
5. Peningkatan kompetensi dan kapabilitas BPK yang dari waktu ke waktu sesuai dengan dinamika ditingkatkan.

Renstra memuat strategi kebijakan program pemeriksaan yang dapat mendorong pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan negara sebagaimana tertuang di dalam alenia keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Renstra di 2016-2020 yang saya kira ini menjadi relevan untuk disampaikan di antara sekian banyak calon Anggota BPK yang akan masuk di di 2019-2020 adalah yang disusun satu landasan berpikir kondisi saat ini sebagai dasar perkembangan lingkungan strategis BPK dan kondisi yang diharapkan dalam 5 tahun kedepan.

Kemudian visi dan misi BPK, menjadi pendorong pengelolaan keuangan negara dan tujuan negara melalui pemeriksaan yang berkualitas dan bermanfaat. Tujuan negara telah disampaikan pada alenis 4 melindungi segenap bangsa Indonesia dan seterusnya. Kemudian misinya adalah memeriksa pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara secara bebas dan mandiri. Kemudian melaksanakan tata kelola organisasi yang terintegritas, independent dan professional sebagaimana diharapkan oleh semua pihak termasuk adalah DPR RI.

Kemudian dalam hal ini ada dua, yaitu meningkatkan manfaat hasil dan meningkatkan pedesaan yang berkualitas. Kemudian modalitas BPK, terutama SDM, yang kedua adalah modalitas informasi yang dari waktu ke waktu selalu disesuaikan. Kemudian yang ketiga modalitas organisasi perlu ditingkatkan dalam hal, pertama pengembangan organisasi modern, kemudian yang kedua pengelolaan atas pengetahuan organisasi untuk mengkapitalisasi pengetahuan, best practice termasuk adalah BPK atau organisasi di berbagai negara.

### **Ibu dan Bapak sekalian.**

Di DPR RI dan juga DPD RI, serta pihak lain lembaga perwakilan, manfaat hasil BPK bagi kepentingan. Pertama, laporan pemeriksaan sampai juga ke DPR RI dan DPD RI, kemudian pemeriksaan semester DPR RI dan DPD RI. kemudian yang lain ini saya kira menjadi bagian tugas, fungsi yang digunakan oleh pihak lembaga lain, misalnya adalah hasil pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan. Kemudian hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara. Kemudian hasil pemantauan penyelesaian temuan pemeriksaan yang mengandung unsur pidana. Kemudian hasil penghitungan kerugian negara, kemudian pendapat, kemudian keterangan ahli, kemudian pertimbangan, kerugian negara dan daerah, kemudian pertimbangan lewat standart akuntansi Pemerintahan, kemudian konsultasi dengan sistem pengendalian intern Pemerintah, kemudian hasil evaluasi BPK atas pelaksanaan .... Akuntan publik, sehingga ini menjadi sekian banyak menjadi *output* dari BPK dalam proses melakukan pemeriksaan terhadap keuangan negara.

Nah, dalam memberikan manfaat atas hasil BPK menggunakan standart dan pedoman. Standart pemeriksaan keuangan negara, kemudian kode etik, kemudian panduan manajemen pemeriksaan, kemudian panduan manajemen dan pemeriksaan, kemudian pedoman pemeriksaan serta sistem pengendalian mutu yang semuanya dibangun di atas dasar BPK selama ini adalah nilai integritas, nilai independensi dan nilai profesionalitas.

### **Ibu dan Bapak sekalian.**

Ada 3 model dan peran BPK, yang pertama adalah *foresight*, *insight*, dan *oversight* yang secara keseluruhan secara singkat *foresight* untuk membantu masyarakat dan pengambil kebijakan atau keputusan untuk memilih alternative masa depan. Kemudian yang *insight* adalah mendalami kebijakan .... Publik, baik dari kerangka keuangan, pelaku kebijakan. Kemudian yang *oversight* adalah meningkatkan ekonomi, efisiensi, erika, nilai keadilan dan keefektifan. Kemudian menjamin terlaksananya akuntabilitas, kemudian meningkatkan pengawasan, kemudian mendorong upaya perlunya dan meningkatkan pengawasan.

Secara umum peran *oversight* memastikan Pemerintah melakukan tata kelola keuangan yang baik serta patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian BPK diharapkan memberikan pedoman mengenai program kebijakan dan operasi kinerja baik. Menyarankan profil terbaik untuk dijadikan acuan, menyarankan upaya lembaga dalam meningkatkan hubungan lintas sektor dalam Pemerintahan serta dalam meningkatkan kesesuaian Pemerintahan dan mitra non Pemerintah yang lebih baik dan sesuai untuk mencapai hasil penting bagi negara dan masyarakat.

Nah, peran *foresight* ini yang saya kira menjadi masih idealistik, memberikan tinjauan masa depan dengan menyoroti implikasi jangka panjang dari keputusan kebijakan Pemerintah saat ini dan mengidentifikasi tren kunci dan tantangan yang dihadapi negara dan masyarakat sebelum hal tersebut muncul menjadi krisis. Hari

ini peran *foresight* masih menjadi sangat minimal di BPK, karena fungsi-fungsi eksternalitas misalnya belum ada output yang diberikan BPK kepada masyarakat dan pengambil keputusan yang berguna untuk membantu dalam pemilihan alternative kebijakan masa depan.

Karena itu kedepan, memerlukan pembenahan dan peningkatan fungsi. Dan karenanya Ibu dan Bapak sekalian, visi saya sebagai calon Anggota BPK adalah menjadi pengawas keuangan negara yang demokratis, akuntabel dan transparan sesuai spirit uang dari rakyat, oleh negara dan untuk rakyat.

Secara lebih terjabarkan, dalam menciptakan kriteria predikat laporan keuangan secara otentik dan bermakna. Ini yang saya kira Ibu dan Bapak sekalian, secara objektif bahwa otensifikasi dan memberikan makna kepada hasil, memberikan kriteria predikat laporan keuangan tidak hanya formalism akan tetapi bagaimana secara lebih dalam lagi menjadi ruh di dalam proses pelaksanaan dan pertanggungjawaban penggunaan uang negara. Kemudian menciptakan kematangan kelembagaan dan pendekatan pemeriksaan BPK dari *oversight* menuju *insight* dan *foresight* yang secara selintas tadi sudah saya sampaikan. kemudian mendorong sistem keuangan yang lebih sederhana tanpa menghilangkan akuntabilitas. Saya kira kasus ini kalau bicara Pemerintah hari ini misalnya adalah saya ambil contoh Siskudes yang masih tidak karu-karuan, padahal Presiden sudah sampaikan “cukup dua lembar, dua lembar, dua lembar”. Nah, ini saya kira salah satu yang harus kita dorong yang lebih sederhana tanpa menghilangkan pertanggungjawaban dan akuntabilitas.

Kemudian menerapkan mosi utama kepercayaan rakyat dalam pemeriksaan keuangan negara. Memang partisipasi masyarakat dibuka diberbagai tempat, tetapi bahwa pendidikan masyarakat dalam hal pemeriksaan juga harus didorong hingga rel yang benar dalam memberikan apresiasi, evaluasi dan masukan dalam rangka pertanggungjawaban keuangan negara.

Kemudian menciptakan kelembagaan BPK sebagai penjaga negara yang responsive, berintegritas, dan professional sebagai tindaklanjut dari yang selama ini sudah ada. kemudian yang keenam adalah cara pandangan dan pendekatan *policy* dalam pemeriksaan. Jadi sebagai landasan atau mengiringi program-program daerah sehingga pendekatan *policy* dalam pemeriksaan menjadi penting. Kemudian mencerdaskan pengetahuan para pemangku kepentingan dan visi baru keuangan negara yang berpihak kepada rakyat melalui edukasi berkelanjutan. Kemudian mengembangkan kapasitas dan kompetensi serta responsibilitas SDM BPK, baik dari sisi akuntansi dan legal formal sekaligus dari sisi sosiologis, ekonomi, politik dan Pemerintahan yang ini menjadi ruang besar dari BPK di dalam konteks Negara kesatuan Republik Indonesia ini.

### **Ibu dan Bapak sekalian.**

Saya mencoba untuk memberikan satu *appeal* kepada kita semua tentang Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Yang saya sadari bahwa Undang-Undang Nomor 6 ini menjadi tonggak paradigma baru dan membawa perubahan besar

dalam keberpihakan pembangunan desa di Indonesia. *Inline* dengan apa yang hari ini disampaikan oleh awal Presiden Bapak Jokowi menyampaikan bahwa salah satu Nawacitanya adalah membangun dari pinggiran, *inline* dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.

Nah, dalam 5 tahun terakhir saya kira dana yang bersumber dari APBN untuk desa banyak sekali 267 triliun. Tapi mohon maaf Ibu dan Bapak sekalian, kalau kemudian saya tengok sedikit pada waktu Bapak SBY dengan 89 atau 86 triliun, 8 tahun Bapak SBY memberikan dana melalui dana PNPM saya kira hari ini berbagai mainstone masih ada di masyarakat. Pembangunan yang sangat efisien, bahkan APBN bisa meningkat di masyarakat dalam implementasinya yang lebih dari 250%. Kemudian misalnya lagi kita menemukan UPK (Unit Pelaksana Kegiatan), itu 25% dari cost APBN hari ini masih berada di masyarakat. Jadi hari ini UPK se-Indonesia memelihara uang kurang lebih ada 13 triliun.

Saya kira Bapak Ketua, di Jawa Tengah itu ada sekitar 3-4 triliun yang beredar di 573 kecamatan yang bisa meningkatkan peran serta masyarakat terutama masyarakat yang memerlukan bantuan yang dikelola secara sosial. Ini yang saya kira menarik salah satu perbandingan apa yang hari ini kebijakan Presiden Jokowi dari sisi efisien dan efektifitas yang perlu ditingkatkan. 267 triliun saya kira tidak sembarangan.

Kemudian pentingnya pembinaan dan pengawasan pembangunan desa sesuai dengan aturan dan APBD tepat sasaran. Saya agak kecewa ketika agak kemudian apa yang terjadi dalam konteks pembinaan tidak mengalir dari pusat, provinsi, dan kabupaten, misalnya adalah yang berkaitan regulasi yang harus diciptakan di kabupaten. Hari ini tidak ada regulasi yang secara massif dilakukan di kabupaten, sehingga dalam konteks pembinaan itu relative masih ada ruang kosong yang sama-sama kita tahu. Kemudian dalam konteks pengawasan saya juga agak kecewa ketika misalnya adalah adanya sebuah institusi yang diluar kementerian, dalam hal ini misalnya ada Satgas Dana Desa diluar Kementerian Desa. Kemudian ada lagi T4D yang hari ini mohon maaf kasus Pemilu 2019 memastikan bahwa T4D belum objektif melakukan fungsi-fungsinya dan masih cenderung pemberlakuannya secara sporadis sesuai dengan kepentingan politik di lingkungan masing-masing.

Kemudian yang terakhir adalah alat penegak hukum yang lain, karena itu penguatan Pemerintah dan Pemerintah Daerah melalui fungsi inspektorat dengan BPK sebagai quality insurance pemeriksaan laporan keuangan khususnya pembangunan desa masih harus menjadi perhatian kita. Nah, temuan yang lain dalam pembinaan dan pengawasan itu pertama adalah pembinaan pembangunan desa, khususnya pengelolaan dana desa dan alokasi dana desa hari ini masih banyak yang tidak paham apa bedanya DD dan ADD, bahkan saya dulu kritik seorang Wakil Ketua DPD dia tidak bisa membedakan akantara DD dan ADD.

3 hal regulasi dan kebijakan, kemudian perencanaan dan pembinaan, pelaksanaan pembinaan, karena itu peran ini saya kira bisa dioptimasi dengan quality insurance dari BPK.

**KETUA RAPAT:**

Tinggal 1 menit lagi Pak Muqowam.

**CALON ANGGOTA BPK RI (Drs. H. AKHMAD MUQOWAM):**

Baik Pak, kemudian pengawasan dana desa, alokasi dana desa. Oleh karena itu, temuan dalam pembinaan pembangunan ada 3 hal, pertama regulasi dan kebijakan, kemudian perencanaan dan pembinaan, kemudian pelaksanaan pembinaan, kemudian temuan dalam pengawasan, belum ada perencanaan dan pengawasan dalam pengelolaan DD dan ADD. Kemudian fungsi pengawasan inspektorat dan sejenisnya belum berjalan dengan baik, salah satunya adalah kurangnya perhatian Pemerintah di atas desa terhadap fungsi pengawasan. Kemudian hasil pengawasan yang ada masih terbatas, bahkan di tingkat lapangan kalah eksklusifnya dengan aparat penegak hukum yang lain.

Jadi Ibu dan Bapak sekalian, jadi saya mempropose bahwa dana desa hari ini sebagai contoh saja, ini luar biasa. Bahkan ada sahabat saya mantan Ketua Komisi V DPR RI banyak yang displace misalnya adalah desa itu mestinya menjadi urusan Komisi II DPR RI, bukan Komisi V DPR RI. Karena SKP3 Menteri yang memastikan di awal antara Kemendagri, Keuangan, dan Kementerian Desa dan kebetulan Menterinya adalah Mantan Komisi V DPR RI sehingga dia tidak mengenal dengan baik apa yang terjadi di Komisi II DPR RI. Saya kira Bapak Mujidin juga mohon maaf saya secara pribadi harus bertanggungjawab ini waktu masih menjadi Komisi V DPR RI. Kembalikan kepada Komisi II DPR RI karena ruhnya ada disitu saya kira.

Itu saja Ketua, terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT:**

Baik, kita telah mendengarkan paparan dari Bapak Akhmad Muqowam yang tadi disampaikan juga terkait beberapa hal yang sedang terjadi di negara ini. Di meja kami sudah ada daftar penanya untuk memberikan pendalaman materi tadi. Dari sisi sebelah kiri ada Bapak Sudiro Asno kami persilakan dan siap-siap Ibu Tutik Kusuma Wardani.

**F-P. HANURA (Drs. SUDIRO ASNO):**

Terima kasih Ketua.

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

**Pimpinan dan Anggota Komisi XI DPR RI, Bapak Akhmad Muqowam yang saya hormati.**

Pak Muqowam, langsung saja saya dan ini mungkin bersifat sedikit klarifikasi. Pertama, saya terima makalah atau paper, saya cari-cari judulnya, judulnya yang mana ini papernya, mungkin judulnya ini ya Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.

Kedua, yang disampaikan disini saya lihat lebih banyak daripada apa yang ada di BPK. Dulu Bapak Muqowam tulis dan dilaporkan kepada tim uji kelayakan ini. Lalu saya belum melihat secara tajam apa dari yang ada di paparan Bapak yang terjadi di BPK ini kira-kira solusi-solusi apa yang ditawarkan kalau seandainya Bapak Muqowam terpilih menjadi Anggota BPK.

Tadi Bapak Muqowam juga menyebutkan bahwa masih kurangnya foresight, masih banyak di insight dan oversight bahkan. Tapi yang foresight-nya belum banyak. Lalu solusinya itu disini memerlukan pembenahan dan peningkatan fungsi kedepannya. Tapi pembenahan dan fungsi peningkatan yang bagaimana yang mungkin perlu kami tanyakan.

Lalu kedua halaman terakhir mungkin, temuan itu belum adanya perencanaan pengawasan dan pengelolaan DD dan ADD dan selanjutnya dan seterusnya, fungsi pengawasan inspektorat, hasil pengawasan yang masih terbatas tetapi tidak ada tawaran solusi atau ide dari Bapak Muqowam pribadi murni kalau seandainya Bapak Muqowam itu terpilih menjadi Anggota BPK. Misalnya tadi foresight pembenahannya bagaimana, peningkatan fungsinya bagaimana, lalu belum adanya perencanaan, pengawasan pengelolaan dana, pengelolaan DD dan ADD, itu juga belum ada. Jadi ini hanya melaporkan saja apa yang terjadi di BPK lalu ditulis, lalu disajikan.

Saya rasa itu komentar dan klarifikasi saya.

Terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

#### **KETUA RAPAT:**

Baik, silakan Ibu Tutik, siap-siap Bapak Nizar.

#### **F-PD (TUTIK KUSUMA WARDANI, S.E., M.M.):**

Terima kasih Pimpinan atas waktunya.

#### **Bapak Akhmad Muqowam yang saya hormati.**

Banyak dari calon Anggota BPK yang baru-baru ini menjalani fit and propertest ini Pak, telah mempresentasikan masalah e-audit. Jadi sebagai efisiensi dan efektifitas atas kondisi dari BPK saat ini dalam melaksanakan tugasnya yang ditawarkan itu adalah e-audit. Dan ini tentu sangat relevan dengan kondisi saat ini, yaitu di era industry 4.0.

Yang ingin saya tanyakan Pak, apakah nantinya implementasikan teknologi 4.0 ini kualitas dari pemeriksaan BPK atas opini dan pemeriksaan secara sampling dapat menjamin bahwa kerugian negara yang selama ini diketemukan oleh BPK bisa ditekan. Mohon penjelasan dari Bapak.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Terima kasih.

Silakan Bapak Nizar, siap-siap Bapak Purnamasidi.

**F-P. GERINDRA (H. MOH. NIZAR ZAHRO, S.H.):**

Terima kasih.

**Pimpinan dan rekan-rekan yang saya hormati,  
Bapak Muqowam yang saya hormati.**

Saya membaca dari laporan ikhtisar BPK tahun 2018 ini mungkin minta pandangan dari Bapak, salah satu mahkota BPK itu bilamana ada temuan. Temuan di tahun 2018 ikhtisar semester I itu 15.773 equivalen dengan nilai 11,55 triliun. Bagaimana Bapak seumpama Bapak diberikan amanah untuk menjadi Anggota BPK, sudah barang tentu yang diurus entitasnya bukan hanya Pemerintah Desa yang terdiri dari dua komponen, dana desa dan alokasi dana desa. Tapi ini banyak entitas-entitas yang menjadi tugas Bapak. Dari 15.773 itu ada 11,55 triliun sudah barang tentu itu dibagi menjadi dua, ada yang harus ditindaklanjuti pidana, baik itu Kejaksaan, KPK, Kepolisian dan lain sebagainya. Ada yang harus diselamatkan oleh BPK dari nilai 11,55 triliun seumpama diselamatkan di 4 triliun, maka anggaran BPK equivalen dari anggaran penyelamatan itu.

Bagaimana Bapak memberikan pandangan dan memberikan kepercayaan kepada saya, satu meminimalisir ikhtisar penemuan dan memperbanyak penyelamatan uang negara. Yang kedua, saya ingin mengkritisi Pak, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ini adalah Undang-Undang positif dana desanya, negative karena banyak Pemerintah Kabupaten berbondong-bondong membentuk desa. Desa kita 84 ribu dari 73 ribu sehingga kita minta waktu di Badan Anggaran moratorium tidak boleh membuat desa baru, karena banyak diluar Jawa mohon maaf itu berbondong-bondong untuk membuat desa baru alasannya untuk mendapatkan dana desa. 267 triliun itu dana besar Pak, belum dari alokasi dana desa yang merupakan kewajiban dari Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Provinsi.

Seumpama Bapak menjadi Anggota BPK bagaimana langkah Bapak untuk dana desa yang 267 triliun itu tepat terserap, karena menurut SKB Menteri itu harus masuk Januari. Kenyataannya Pak, di Jawa Tengah dan Jawa Timur dana desa itu bisa diambil bulan Maret bahkan bulan Juni. Alasannya apa? karena didepositokan

oleh Pemerintah Kabupaten agar itu mendapatkan uang depositnya untuk bisa menadi PAD. Ini permasalahan Pak, karena saya pernah menjadi Kepala Desa jadi tahu betul.

Terima kasih Pak Ketua.

**KETUA RAPAT:**

Kayaknya mantan Komisi V DPR RI ini.

Silakan Pak Nur Purnamasidi, siap-siap Bapak Michael Jeno.

**F-PG (H.M. NUR PURNAMASIDI):**

Terima kasih Pimpinan.

**Pimpinan dan Anggota Komisi XI DPR RI yang saya hormati.**

Terima kasih atas paparannya, saya melihat di makalah Bapak ini di halaman terkait dengan misi ada 8 misi yang akan dilakukan ketika nanti terpilih menjadi Pimpinan BPK. Tentu 8 ini tidak bisa kita lakukan secara bersama-sama, kenapa? Karena memang sekarang saja anggaran BPK baru 0,2% dari total APBN kita. Dan itupun berdasarkan laporan rapat kami terakhir dengan BPK masih kurang 900 miliar untuk mencapai tujuan yang mendekati ideal di BPK. Nah, pertanyaan saya jika Bapak Akhmad Muqowam terpilih menjadi salah satu Anggota BPK, kira-kira dari 8 ini mana yang paling pertama kali dilakukan.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Baik, silakan Bapak Michael Jeno.

**F-PDIP (Ir. G. MICHAEL JENO, M.M.):**

Terima kasih Pimpinan.

**Pimpinan dan rekan-rekan Anggota Komisi XI DPR RI yang saya banggakan,  
Bapak Akhmad Muqowam yang saya hormati.**

Apresiasi untuk paparannya, ada hal yang ingin saya sampaikan Bapak Muqowam. Kita di Komisi XI DPR RI ini selama fit and proper BPK dari periode sebelumnya selalu salah satu isu yang disampaikan oleh kandidat adalah keinginan untuk tidak hanya audit keuangan akan tetapi audit kinerja. Saya baru scanning secara cepat bahan presentasinya Bapak, tapi dari yang Bapak sampaikan tadi salah satu yang Bapak banyak kupas adalah mengenai dana desa, itu tentu audit



kinerja kan Pak. Kebijakan dana desa kita ingin lihat efektifitasnya dan kalau kita lihat efektifitasnya itu audit kinerja katakanlah, seperti itu.

Dan audit kinerja inikan selalu menjadi tantangan buat di BPK, misalnya dana desa saya pribadi lebih gampang diquantifikasi Pak. Banyak kebijakan-kebijakan Pemerintah lain yang harusnya BPK itu melakukan audit kinerjanya. Pembangunan infrastruktur yang sudah sekian triliun *performance*-nya itu oke atau sudah memuaskan, itu kan tidak pernah diaudit dari *performance*. Kalau dari panjang jalan dan segala macam itu satu yang teknis, gampang sekali, relatif gampang. Lalu lintasnya berapa itu bisa dihitung, tapi apakah anggaran triliunan kebijakan pembangunan infrastruktur kemudian meningkatkan dampak ekonominya berapa, katakanlah seperti itu, mengurangi pengangguran berapa, menambah lapangan kerja berapa. Balik lagi juga misalnya dana desa kan tidak pernah juga diukur. Peningkatan ekonomi desa berapa dengan dana desa, harusnya inikan menjadi tantangan harusnya kalau BPK ingin menjadi auditor kinerja *policy* inikan harusnya bisa dan itu bukan sesuatu yang susah Pak, ada ilmunya Pak, bukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan untuk mengkalkulasi itu.

Nah, pertanyaannya adalah Bapak Muqowam sudah *mapping* kondisi *current condition* atau kondisi saat ini di BPK dari *resources*-nya, SDM-nya siap tidak untuk melakukan audit kinerja. Kita ambil yang Bapak sampaikanlah ada tidak orang BPK, teman-teman di BPK yang bisa mengaudit kinerja dari dana desa, kan Bapak sampaikan dana desa sebagai contoh ini. Ada tidak? Kalau belum ada terus bagaimana untuk menaikkan itu dari aspek SDM-nya maupun dari organisasinya. Apalagi tadi teman saya Mas Pur cerita, kita bicara kemudian anggaran dan segala macam, itu dana desa yang lebih kuantif. Secara kinerja itu lebih gampang di quantifikasi.

Bapak ambil contoh kebijakan Pemerintah yang lain misalnya perijinan sumber daya alam itu tidak pernah diaudit juga Pak. Sekarang misalnya ini kita kebakaran hutan, pernah diaudit tidak ijin-ijin untuk kehutanan, dampaknya seperti apa, dan segala macam.

Kemudian pertanyaan berikutnya, BPK siap tidak, orangnya itu siap tidak. Kalau orangnya latar belakangnya *accounting* diketawain, “kamu orang *accounting* ngapain ngomongin ijin pertambangan”, kan pernah itu Anggota BPK presentasi ke kita mengenai kerugian karena Freeport, pelaku usaha tanya ini kamu mau audit Freeport orang tambangnya berapa, dilibatkan tidak asosiasi pertambangan Indonesia, ada tidak orang yang ngerti pertambangan. Kalau orang BPK tidak ada orang yang *industry* spesialis tidak akan dipakai. Kira-kira seperti itu. Nah, pertanyaannya balik lagi seberapa siap BPK, SDM-nya, organisasinya, dan kalau butun backup regulasi ya tentu harus ke DPR RI untuk support.

Terima kasih Pak Pimpinan.

## **KETUA RAPAT:**

Baik, demikian Bapak Muqowam ada 5 pertanyaan yang saya kira semua berat ya. Waktu Bapak hanya 10 menit saya persilakan.

## **CALON ANGGOTA BPK RI (Drs. H. AKHMAD MUQOWAM):**

Terima kasih.

Contoh yang saya sampaikan memang desa, kebetulan saya paham sehingga case ini yang saya sampaikan adalah desa karena saya paham. Ketika di DPR RI pun saya Ketua Pansus, sehingga kalau hari ini ditanya soal desa mohon maaf Bapak Juliari ruhnya pun sudah mulai hilang. Ini yang saya kira saya ada tanggungjawab moral disitu bahwa Undang-Undang Desa saya sebagai Ketua Pansus kok begini jadinya.

Saya kira Bapak Nizar, jadi memang misalnya dana-dana yang kemudian di tengah jalan kemudian dipotong. Saya longkap dulu ya, pertama soal BPK ada beberapa temuan. Pertanyaannya adalah apakah itu kemudian temuan 15.733 kemudian uangnya ada 11,55 terkait dengan pertanyaan Ibu Tutik, e-audit atau kemudian sampling. Saya sih berharap bahwa apa yang menjadi ruang dari BPK adalah tidak sekedar sampling, apalagi kalau sudah ada e-audit. IT saya kira menjadi bagian yang harus didorong sehingga apapun mengenai pelaksanaan anggaran negara itu semua secara transparan melalui sebuah proses yang namanya e-audit atau menggunakan teknologi informasi. Saya sepakat dengan itu tidak merupakan sampling semata.

Kemudian pandangan meminimalisasi, jadi begini Pak Nizar, hari ini Pemerintah saya kira saya mengapresiasi Kemendagri agak bersikap tidak sembarangan membuak desa baru. Saya kira kasus-kasus Pemilu 2014 ketika di Sukabumi itu ada menurut KPU ada 17 desa baru ternyata begitu dikonfirmasi tidak ada nama desa disitu. Sehingga hari ini kalau Pemerintah 74974, 84 itu termasuk adalah kelurahan. Karena memang nomor induk itu ada di Kemendagri, sedangkan pengusulan dari kabupaten. Saya kira termasuk moratorium di antara sekian moratorium desa tidak terlalu banyak yang muncul menjadi desa baru.

Kemudian soal penyerapan, sekali lagi Pemerintah Pusat dalam hal ini Keuangan masih mengatur dengan cara tidak percaya pada desa. Sehingga tahap I, tahap II, tahap III padahal Undang-Undang APBN atau Undang-Undang Keuangan Negara memastikan bahwa skali keluar uang negara itu tidak lagi pakai bertahap, sedangkan desa masih tahap I, tahap II, dan tahap III. Tahap III selesai kalau tahap II selesai, tahap II boleh diajukan kalau tahap I selesai. Saya kira tidak adil memperlakukan desa itu kemudian tidak sama dengan DPR RI, tidak sama dengan DPD dalam hal keuangan. Saya kira hari ini masih serapan itu yang menjadi problem desa.

Bahkan yang kedua adalah kalau toh dalam satu kabupaten misalnya kabupaten Bapak ....(suara tidak jelas)... Batubara, 268 kabupaten Semarang, kalau toh masih ada satu desa tidak boleh itu lanjut ke tahap selanjutnya. Ini yang saya kira problem regulasi pada Pemerintahan sendiri bukan pada desa, desa korban daripada regulasi yang tidak memahami bagaimana desa.

Pak Pur, saya kira ada beberapa visi saya yang kalau saya kepilih kemudian bagaimana diantara 8 itu. Menciptakan kriteria saya kira ini, menciptakan kematangan kelembagaan, kemudian melakukan mengarusutamakan kepentingan

rakyat guna menciptakan pembangunan BPK, kemudian mencerdaskan pengetahuan masyarakat, kemudian saya kira yang ketujuh ini menjadi isu utama terkait dengan yang terakhir mengembangkan kapasitas kompetensi dan responsibilitas SDM BPK, baik dari sisi akuntansi dan lain-lain.

Jadi dalam hal asumsi pada sumberdaya manusia sebagaimana juga Bapak Michael Jeno sampaikan mohon maaf Bapak Michael, saya belum jadi Anggota masih calon. Saya belum tahu bagaimana profiling disana, bagaimana auditor, bagaimana Sekretariat Jenderal, saya mohon maaf saya tidak bisa jawab karena memang setelah masuk kemudian kita mapping, kita profiling seperti apa SDM yang diperlukan kedepan. Walaupun di dalam pemikiran saya salah satu indikasi misalnya adalah e-audit, kemudian penggunaan IT, kemudian *culture*, korporasi juga harus terjadi, best practice juga harus dilakukan. Ini saya kira menjadi pertanyaan kedua Bapak Michael Jeno saya tidak bisa menjawab.

Kemudian isu pemeriksaan kinerja, efektifitas sebagai inti kinerja. Sepakat, jadi dalam sistem saya kira *output*, *outcome* harus diukur, harus pada akhirnya adalah kemanfaatan, harus itu. Ada satu yang menarik Bapak dan Ibu sekalian, saya kira Undang-Undang Jasa Konstruksi. Ada 3 sendi yang kena disitu, tapi perencana, pelaksana, pengawas itu menjadi alternative. Sebuah jembatan misalnya di Cipularang KM 101 itu perencanaannya salah atau tidak, kalau dia salah maka dia yang kena. Kemudian kalau dia tidak kena maka kemudian dia pelaksana, pelaksana tidak kena dia pengawas. Tapi mohon maaf, yang kena kemudian Jasa Marga harus bayar misalnya ...(suara tidak jelas)... Jadi Bohirnya yang kena bukan kemudian fungsi-fungsi dalam rangka membangun konstruksi tersebut. Ini case yang terjadi di Cipularang beberapa tahun yang lalu. Jadi bohirnya malah kemudian yang kena denda, bukan kemudian perencana, pengawas dan pelaksana, tapi bohirnya yang harus bayar, kalau tidak akan diselesaikan di meja hukum.

Jadi Pak Michael, saya kira saya sangat setuju kalau kemudian secara sistemik tidak sekedar *output*, tidak sekedar *outcome* juga, bahkan keumudian benefitnya selanjutnya juga harus menjadi acuan kita. Saya mohon maaf, saya ini sekomisi dengan Bapak Muhidin, salah satu implikasi pengawasan saya dulu di Sultan Hasanudin kita datang kesana kemudian implikasinya perbaikan-perbaikan dan perbaikan sampai 90 miliar. Ketika dibangun kita lihat ini kurang-kurang tapi menghadirkan proyek baru. Jadi Hasanuddin yang lama itu waktu mau diresmikan sudah penambahan anggaran kepada APBN lewat Angkasa Pura itu 90 miliar. Ini hasil pemeriksaan seperti itu. 90 miliar tambahan APBN untuk pembenahan Sultan Hasanudin yang pada waktu itu Bapak JK sebagai Wakil Presiden Pak SBY pada waktu itu.

Pak Diro ini yang ...(suara tidak jelas)... karena memang saya tidak berani kemudian menjuduli apa yang akan saya lakukan Pak. Karena visi dan misi, saya kira Bapak Jokowi itu adalah koridor Nawacita itu dan dia menjadi pintu masuk. Kalau kemudian ada GBHN maka ya mau tidak mau infall interent disitu. BPK punya visi dan misi, kalau saya Ketua Umum Partai misalnya itu visi dan misi pribadi boleh. Ini lembaga yang sudah sedemikian rupa, jadi mungkin saya salah menjawab tapi

bahwa saya tidak berani memberikan judul hanya memaparkan bahwa ini yang saya lakukan *watch*.

Dan kemudian kalau jadi macam apa, karena bukan pribadi sekali lagi itu adalah sistem yang sudah berjalan dan tidak bisa dilakukan secara pribadi. Saya mohon maaf, kalau tidak memuaskan jawaban ini. Ditanya itu judulnya apa, repot ini paparan judulnya Pak. Sekali lagi atas nama pribadi kemudian mengklaim bahwa saya paling hebat, tidak mungkin itu.

Saya jujur katakan bahwa saya memang belajar dari pertama dari dokumen, yang kedua dari informasi-informasi, lalu yang ketiga dari praktek yang sudah teman-teman lakukan di BPK. Oleh karena itu, tulisan-tulisan yang saya sampaikan ini memang dia berada dalam satu titik yang hari ini dan kedepannya seperti apa.

Kemudian tawaran perencanaan pengawasan, Ibu dan Bapak sekalian, memang saya ingat persis Ki Hajar Dewantara ....(suara tidak jelas)... Menjadi penting *ing madyo mangun karso, tut wuri handayani*, hari ini yang depan adalah *ing ngarso sung usung, ing madyo bangun wismo, tut wuri geronggoti*. Saya berkesimpulan sekalian, Republik ini kaya akan tetapi begitu pelaksanaannya apa yang disampaikan oleh Bapak Prof. Bowo kok tidak pernah berkurang. Bapak Mitro tahun 70-80 katakan sudah 30%. Ibu Kota negara pindah pikiran saya 50% itu pasti habis sudah.

Jadi Pak Jokowi sampaikan 80 triliun, artinya apa? 240 itu mesti menjadi sesuatu yang *wish*, ya memang regulasi seperti itu. Bapak sebagai pengusaha, maka disitu adalah satu ada indeks, semen harganya indeksnya 58 padahal dilapangan 40. Dari indeks saja negara sudah dirugikan 18.000, potensi keuntungan 10%, itu resmi.

Jadi mohon maaf Bapak dan Ibu Komisi XI DPR RI sekalian, saya kira masih banyak yang harus kita lakukan terutama dari inner kita masing-masing bahwa *ing ngarso sing telodo* itu menjadi penting bagi saya.

Saya mencoba untuk tidak banyak bicara Pak, apalagi Bapak datang ini rusak semua forumnya ini. Jadi karena Bapak Johnny saya *closing statement* saja ya, jadi sudah 10 menit saya penuh dan karena itu saya ingin kerja sama dengan kita semua saja. Dan saya kira itulah yang ada di dalam diri saya, saya kalau DPD sekarang ini karena memang oleh Bapak Harry saya ditugaskan di DPD kemarin itu, sekarang mau ikut Bapak Harry tidak boleh ya sudah saya ke BPK.

Ibu dan Bapak sekalian, mohon maaf jika ada yang kurang, mungkin ada yang *celelean* tapi semua saya ingin bahwa saya bagian dari kita semua.

Terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

## **KETUA RAPAT:**

Tepat 45 menit luar biasa keliatan dari pengalamannya, walaupun kesana kemari kembali ke 45 menit. Kami mengucapkan terima kasih Bapak Akhmad Muqowam, yang telah menyampaikan paparannya. Dan kita telah sampai akhir

acara, kami dengan hormat mempersilakan Bapak untuk meninggalkan ruangan dan silakan bersalaman kepada kawan-kawan Anggota Komisi XI DPR RI.

Rapat kita skors.

### **(RAPAT DISKORS)**

#### **Para Anggota Komisi XI DPR RI yang saya hormati.**

Kita telah kedatangan Calon Angg BPK RI yang bernama Bapak Dr. Ir. Eddy Saya Pratakusuma, B.E. M.U., M.Sc. master urgent planning. Jadi lebih ke audit lingkungan ini Pak.

#### **Bapak dan Ibu sekalian.**

Seperti biasanya kami menyampaikan bahwa fit and propertest ini dilaksanakan dalam 45 maksimal Pak, dan Bapak bisa menyampaikan 15 menit pokok-pokok pemikiran dan paparannya. Nanti di-*challenge* sama Anggota sekitar 30 menit. Upayakan tidak lewat dari 45 menit waktu tersebut.

Kami persilakan Bapak Eddy untuk menyampaikan pemikirannya.

#### **CALON ANGGOTA BPK RI (Dr. Ir. EDDY S. PRATAKUSUMA, B.E.):**

Terima kasih Bapak Ketua.

#### **Pimpinan dan Anggota Komisi XI DPR RI yang terhormat.**

Terima kasih atas undangan untuk menyampaikan paparan mengenai saya namakan peran BPK RI dalam mewujudkan Pemerintah yang baik dan bersih. Selanjutnya ini saya kira dasar hukum yang mendasari keberadaan BPK pada saat ini. Yang pertama adalah memang tertuang dalam konstitusi Pasal 23 E, F, G, kemudian Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara.

Kemudian berikutnya hakekatnya para Anggota BPK dari sisi Anggota dipilih oleh DPR RI dengan memperhatikan pertimbangan DPD dan diresmikan oleh Presiden. Kedudukannya bebas dan mandiri, terlepas dari kekuasaan Pemerintah, namun sejajar untuk Pemerintah dan tugasnya memeriksa tanggungjawab keuangan negara. Dilaporkan kepada DPR RI, DPD, DPRD dan ditindaklanjuti sesuai dengan kewenangannya. Wewenangnya meminta keterangan dan wajib diberikan oleh setiap orang, badan atau instansi Pemerintah, swasta sesuai dengan Undang-Undang.

Selanjutnya, kita lihat dari berbagai dasar peraturan perundangan tersebut, maka pada intinya objek pemeriksaan dari BPK atau yang dilakukan oleh BPK dapat dikategorikan sebagai dua hal. Yang pertama adalah kinerja, kemudian yang kedua

keuangan walaupun judulnya Badan Pemeriksa Keuangan namun ada ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang menugasi BPK untuk juga memeriksa kinerja dari instansi Pemerintah.

Dasar hukum yang paling utama adalah Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 mengenai Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah yang pada dasarnya merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Di mana Undang-Undang Nomor 1 dan Undang-Undang Nomor 17 merupakan hasil dari reformasi di bidang keuangan pada saat itu. Selanjutnya, mengenai kinerja ada Perpres Nomor 29 mengenai ....(suara tidak jelas).... Kemudian Permenpan dan seterusnya.

Ketentuan mengenai objek pemeriksaan kinerja dan keuangan ini diperkuat lagi dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK. Di mana Undang-Undang BPK pun merupakan juga perintah dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara. Dari berbagai peraturan perundangan ini, maka kalau kita katagorikan bahwa BPK akan menerima laporan dan kemudian melakukan pemeriksaan berdasarkan laporan yang sudah diberikan oleh instansi Pemerintah tersebut.

Selanjutnya, kalau kita menyimak secara internasional untuk Badan Pemeriksa Keuangan seperti ini, maka ada 3 hal yang perlu dijadikan objek. Yang pertama adalah keuangan atau financial, yang kedua ketaatan untuk *compliance*, dan yang ketiga adalah kinerja atau *performance*. Nah, dari ketiga objek tersebut ini adalah berlaku secara internasional, maka apabila sebuah instansi telah melakukan atau telah melaporkan keuangannya dengan baik sesuai dengan ketaatan terhadap peraturan perundangan maka bisa dikatakan bahwa instansi tersebut telah melakukan efisiensi. Kemudian apabila instansi tersebut sesuai dengan peraturan perundangan dan menghasilkan kinerja atau *outcome* yang telah direncanakan, maka dapat dikatagorikan itu adalah telah melakukan efektifitas.

Nah, dari kedua objek yang diperintahkan oleh peraturan perundangan dan secara internasional, maka saat ini yang diberikan opininya oleh BPK hanya mengenai keuangan. Di mana kita tahu yang namanya WTP, WDP, tidak wajar dan tidak memberikan pendapat dan juga didalamnya juga ada temuan dan temuan itu pada dasarnya berupa penyimpangan mengenai keuangan yang telah dikeluarkan oleh instansi tersebut.

Namun saya melihat bahwa untuk ketaatan dan kinerja belum ada klasifikasi opini. Nah, inilah yang ingin saya bangun kelak apabila terpilih sebagai Anggota BPK. Selanjutnya, saya akan mengusulkan bahwa untuk kinerja pun sejogyanya kita memberikan opini. Saya mengusulkan ada 3 klasifikasi, yang pertama efektif manakala kinerja menghasilkan *outcome* maka manfaat sesuai dengan rencana. Kemudian kurang efektif, manakala kinerja menghasilkan *outcome* atau manfaat namun tidak sepenuhnya tidak sesuai dengan rencana. Kemudian tidak efektif, manakala kinerja instansi tidak menghasilkan *outcome* atau manfaat sesuai dengan rencana.

Nah, ini saya kira penting sekali Bapak dan Ibu sekalian, sebagai ilustrasi misalnya sekarang banyak kita temukan berbagai proyek yang sudah selesai berarti output sudah terjadi, bahkan sudah WTP barangkali akan tetapi bangunan tersebut tidak bisa dimanfaatkan. Misalkan pada SD tidak ada murid, ada sawah tetapi tidak ada irigasi, ini berarti kinerja tidak efektif. Maka kalau BPK sesuai dengan perintah Undang-Undang tersebut mengeluarkan opini untuk kinerja saya kira akan lebih baik lagi dan tidak akan terjadi kemubajiran dari penggunaan keuangan negara.

Berikutnya, dengan demikian dapat saya sampaikan bahwa BPK sejauh ini telah berperan dalam menegakkan prinsip *rule of law* dan transparansi pada pengelolaan keuangan negara. Namun, belum secara sistematis menegakkan prinsip akuntabilitas pada pengelolaan keuangan negara. Karenanya, harus segera dibangun sistem pemeriksaan laporan kinerja atas pengelolaan keuangan negara tersebut. Dengan terbangunnya sistem penegakkan kinerja tersebut, maka BPK akan mampu menjaga dan mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang efektif dan efisien.

Berikutnya, ini komitmen saya pribadi ingin menjadikan BPK sebagai sebuah institusi yang akuntabel, bersih dan terpercaya. Dan yang kedua, membangun sistem untuk menghasilkan opini atas laporan keuangan. Yang berikutnya, kami bangun laporan atau opini terhadap laporan kinerja.

Demikianlah yang ingin saya sampaikan. Terima kasih Bapak Ketua.  
Kami kembalikan.

#### **KETUA RAPAT:**

Baik, terima kasih.

Bapak Eddy telah menyampaikan tadi beberapa paparan dan pemikirannya. Kita sampai pada sesi kedua, yaitu pendalaman materi. Di Meja kami sudah ada beberapa penanya, kita mulai dari sisi sebelah kiri Ibu Lilis Santika, kami persilakan untuk memberikan pertanyaan dan siap-siap Bapak Faisol Riza.

#### **F-PKB (DRA. HJ. LILIS SANTIKA):**

Terima kasih Bapak Pimpinan.

#### **Pimpinan dan rekan-rekan Komisi XI DPR RI yang saya hormati.**

Terima kasih juga kepada Bapak Dr. Ir. Eddy Supriyadi Pratakusuma. Sebetulnya sebelum tadi Bapak sampaikan itu juga saya punya pikiran bahwa sering terjadi pembangunan-pembangunan yang memang Pemerintah laksanakan dengan milyaran uang yang dikucurkan dari Pemerintah, seperti di Dapil saya saja ini ada sebuah bangunan yang sudah 5 tahun yang lalu dibangun sebuah sekolah untuk SMP itu dengan anggaran yang karena waktu itu dipampang sekitar 1,5 miliar sampai 2 miliar kesininya SMK itu samai 2,5 miliar itu ada bangunan yang sudah 5 tahun memang tidak fungsi, siswanya tidak ada, betul seperti yang Bapak

sampaikan tidak ada siswanya atau mungkin tadi Bapak sampaikan, ada sawah tetapi tidak ada irigasinya. Apalagi kita banyak lahan yang karena proyek jadi gede, jadi irigasinya sudah bangun sawahnya sudah direndam.

Nah, sejauhmana nanti kalau Bapak ditakdirkan oleh Allah SWT untuk menjadi nanti seseorang di lingkungan BPK untuk mengatasi hal seperti itu. Keuangan yang begitu mubazir milyaran, coba ini sangat dibutuhkan sekali kepekaan BPK untuk betul-betul menyelamatkan uang yang sudah dikucurkan itu sudah menjadi bangunan. Dan kira-kira tindakan Bapak seperti apa bangunan-bangunan yang tidak fungsi itu dikembalikan atau disilakan digunakan untuk kepentingan Pemda setempat atau masyarakat setempat atau seperti apa yang nanti Bapak akan lakukan.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Baik, silakan Bapak Faisol, siap-siap Bapak Muhidin Mohammad.

**F-PKB (FAISOL RIZA):**

Terima kasih Pimpinan.

**Yang saya hormati Anggota Komisi XI DPR RI,  
Yang saya hormati Bapak Eddy.**

Saya hanya mendalami satu statement dari Bapak Eddy dan menurut saya agak serius dan mungkin perlu penjelasan agak lebih dalam, terutama dalam penutup itu. Ada satu pernyataan bahwa kira-kira bahwa BPK belum secara sistematis menegakkan prinsip akuntabilitas pada pengelola keuangan negara. Mungkin Bapak Eddy bisa menjelaskan apa yang dimaksud dengan belum sistematis itu, karena ini tentu juga satu kritik terhadap BPK sekarang dalam menegakkan prinsip akuntabilitas pada pengelola keuangan negara.

Saya kira begitu Pimpinan.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Baik, silakan Bapak Muhidin Mohammad.

**F-PG (H. MUHIDIN MOHAMMAD SAID, S.E., M.B.A.):**

Terima kasih Pimpinan.

**Pimpinan yang saya hormati,  
Rekan-rekan Anggota Komisi XI DPR RI yang saya hormati,**



**Bapak Dr. Ir. Eddy Supriyadi Pratakusuma, B.E., M.U., M.Sc.**

Saya kalau Bapak punya riwayat hidup ini luar biasa sekali. Ini sempurna sekali, pengalamannya cukup bagus, dan kalau saya lihat ini komitmen Bapak menjadikan BPK sebuah institusi yang akuntable, bersih dan terpercaya. Kemudian yang kedua, berkomitmen membangun sistem untuk menghasilkan opini atas laporan keuangan dan laporan kinerja.

Kira-kira menurut pandangan Bapak bagaimana pandangan Bapak tentang kinerja daripada BPK yang ada sekarang. Karena ini Bapak masih punya komitmen, menjadikan sebuah institusi yang akuntable, bersih dan terpercaya. Artinya, tentu ada kelemahan-kelemahan disana, kira-kira bagaimana Bapak bisa memperbaiki caranya, karena ini luar biasa komitmennya.

Kemudian yang kedua Pak, saya selama ini banyak berkecimpung di bidang infrastruktur. Saya biasa disampaikan mitra saya itu hasil pemeriksaan BPK terkait dengan kinerja atau laporan keuangan, kemudian penetapan sekian miliar kerugian negara. Di satu sisi saya tidak melihat bahwa tim karena inikan auditor keuangan, tapi bisa menetapkan kerugian negara. Nah, kira-kira bagaimana cara Bapak nanti seandainya Bapak terpilih menjadi salah satu Anggota BPK untuk memperbaiki kinerja yang seperti ini, sehingga komitmen Bapak ini menjadikan institusi ini yang bersih dan terpercaya dan hasilnya akuntable. Nah, ini yang harus kita karena ini sering terjadi perdebatan.

Di satu sisi tentu kementerian teknis ini selalu berdebat sesuai dengan kemampuan teknisnya. Di satu sisi karena kewenangan BPK ini selalu menetapkan hal-hal yang sifatnya sangat teknis. Kira-kira kalau Bapak terpilih apakah Bapak mampu untuk memperbaiki kinerja ini.

Saya kira itu Pimpinan saya punya pertanyaan.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Baik, terima kasih.

Ada 3 pertanyaan tadi ...(suara tidak jelas)

**F-PDIP (Ir. G. MICHAEL JENO, M.M.):**

Daftar Pimpinan.

**KETUA RAPAT:**

Silakan Bapak Michael Jenno menambahkan satu lagi pertanyaan.

**F-PDIP (Ir. G. MICHAEL JENO, M.M.):**

Terima kasih Pimpinan.

## **Pimpinan dan rekan-rekan Anggota Komisi XI DPR RI yang saya banggakan.**

Bapak Eddy, kalau saya lihat sepintas ini Bapak ini lama di Bappenas ya. Dan saya apresiasi karena paling tidak, tidak semua fit and propertest saya ikuti tetapi ada beberapa yang saya ikuti. Memang tidak ada yang secara tegas menekankan untuk membuat terobosan untuk kinerja, karena kan isunya selalu begitu. BPK kita ini lebih berat penilaian keuangan, penilaian kinerjanya lemah, semuanya ngomong begitu. Hanya saja yang secara tegas memberikan opini bahwa perlu penekanan pada audit kinerja bahkan Bapak sudah membuatkan organisasi efektif, less efektif, in efektif, kan mimpinya Bapak ini nanti satu daerah WTP efektif, WTP less efektif, WTP in efektif, kira-kira gitulah. Ini sih saya pikir idenya saya apresiasi sekali, cuma mungkin Bapak bisa berikan ilustrasi secara cepat kondisi dari ini, BPK seperti apa khususnya di audit kinerja ini Pak.

Terus kemudian secara gampang *bancmark*-nya seperti apa Bapak lihat apakah supreme auditornya di negara-negara lain berapa mereka yang di audit keuangan, berapa porsi mereka audit kinerja dan itu seberapa katakanlah efektif untuk melakukan audit terhadap kebijakan Pemerintah. Jadi *bancmark*-nya itu negara mana yang supreme auditornya BPK-nya bisa melakukan porsi terhadap audit kinerja yang jauh lebih baik daripada BPK kita.

Terima kasih Pimpinan.

## **KETUA RAPAT:**

Baik, Bapak Eddy ada 4 pertanyaan.

Bapak punya waktu 15 menit untuk menjawab pertanyaan.

Kami persilakan.

## **CALON ANGGOTA BPK RI (Dr. Ir. EDDY S. PRATAKUSUMA, B.E.):**

Terima kasih.

Yang pertama kepada Ibu Lilis tadi, jadi memang yang ingin kita atau yang ingin saya bangun tadi sebagaimana disampaikan terakhir bahwa yang belum terjadi di BPK itu betul mengenai audit kinerja, bukan belum terjadi akan tetapi belum ada katakanlah opini yang dibangun atau disampaikan oleh BPK mengenai audit kinerja ini.

Saya kira akan saya gabungkan saja mungkin pertanyaan yang terkait. Nah, *bancmark* yang baik untuk ini dan pernah kami pelajari atau yang terjadi, ini yang saya lihat dan pernah saya baca di Amerika, terutama ketika jaman ... (suara tidak jelas) Sebagai wakil Presiden waktu itu. Jadi beliau dan memang pada saat itulah kita mengenal yang namanya kinerja, artinya ada definisi tertentu untuk mengukur akuntabilitas. Akuntabilitas dikatakan baik apabila terjadi efektifitas dari penggunaan sumber daya yang tersedia pada suatu negara.

Selama ini di berbagai negara kebanyakan hanya mengukur financial auditing. Dalam hal financial saya kira yang lebih ditonjolkan mengenai efisiensi,

dengan harga yang murah mendapatkan barang yang banyak. Namun ini pengalaman yang ada apabila hanya dilihat dari keuangan belum tentu barang tersebut berguna. Itulah yang harus kita audit dengan kinerja tadi yang baru sebetulnya muncul ketika ada paradigma *reinventing government*. Di sanalah bahwasanya kita tidak hanya semata-mata mengukur *output* tetapi harus mengukur *outcome*. *Outcome* artinya, manfaat terhadap masyarakat. Kalaupun tadi Ibu Lis katakan ada SMP tetapi tidak ada muridnya, ada irigasi malah tidak ada sawahnya itu berarti belum ada manfaat untuk masyarakat, tetapi secara *output* sudah ada, bahkan mungkin sangat efisien barangkali karena ditunjuk rekanan yang paling murah. Nah, ini yang selama ini muncul bahkan ada kemungkinan kerugian negara dan sebagainya. Itu hanya dilihat dari efisiensi penggunaan dana.

Kerugian negara bisa saja harganya yang istilahnya ... (suara tidak jelas) atau kualitasnya yang kurang diturunkan atau spesifikasi teknis yang bahkan tidak sesuai dengan. Ini yang menjadi temuan BPK yang saat ini, tetapi saya pelajari bahwasanya pemeriksaan kinerja belum ada sistematis yang terukur. Ini yang ingin saya bangun apalagi latar belakang dari perencanaan mungkin mudah-mudah bisa menyumbangkan sesuatu yang tidak hanya financial tetapi mari kita bangun audit kinerja tersebut.

Saat ini yang menangkap perintah dari Peraturan Pemerintah mengenai laporan kinerja adalah Kantor Menpan dan RB. Apa yang mereka lakukan karena tidak berhak untuk memberikan penilaian dari *outcome* tersebut, yang dinilai adalah apabila sudah ada rencana strategis maka nilainya sekian dan sebagainya. Ini baru rencana Pak, kita ingin *outcome* yang belum diperiksa atau diaudit yang sebetulnya. Nah, ini yang ingin saya bangun andaikata bisa terpilih menjadi Anggota BPK.

Pertanyaan Bapak Faisol, akuntabilitas tadi saya sampaikan ini baru muncul ketika ada *reinventing government* yang selama ini atau sebelumnya yang kita ukur hanya *output*. Nah, sekarang menurut saya di BPK ini juga mainset ini belum berubah banyak. Dan ini yang ingin kita, terutama saya ingin membangun saat ini *outcome* yang harus kita titik beratnya harus di-*outcome* tersebut. Karena bisa saja tadi apabila hanya *output* bahkan yang diperiksa apakah sesuai dengan Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP) itu adalah laporan yang baiknya sudah pasti WTP, karena laporannya telah wajar dan sebagainya. Tapi kewajaran itu belum tentu mendatangkan manfaat bagi masyarakat.

Sebagai tambahan akuntabilitas juga merupakan alat ukur keberhasilan suatu rezim. Walaupun sanksinya adalah tidak terpilih kembali pada saat Pemilu yang akan datang, jadi tidak ada sanksi pidana disana. Tapi atas dasar akuntabilitas itulah kita bisa melihat rezim ini bermanfaat atau tidak ini yang harus kita bangun. Kita sedang membenahi demokrasi yang baik dan benar, maka alatnya pun harus baik dan benar untuk suatu rezim tersebut, saat ini baru mengenai keuangan.

Kemudian bagaimana caranya atau apa penilai saya terhadap BPK saat ini, memang sebagian besar telah melakukan pemeriksaan dengan baik dan benar. Tetapi saya masih mendengar ada yang juga belum baik dan belum benar. Nah, ini yang harus kita perbaiki bahkan sudah ada semacam sindiran atau apapun namanya bahwa WTP singkatan dari wajar tanpa pemeriksaan. Ini yang harus kita

jaga jangan sampai sindiran seperti itu muncul kembali. Ini benar-benar oknum yang melakukan ini, namun kalau kita perbaiki sistemnya oknum pun tidak akan bisa melakukan. Jadi saya percaya bahwa perbaikan sistem akan membawa kebaikan kepada instansi dan pegawai dan petugasnya serta para pejabatnya.

Saya kira sementara seperti itu Bapak Pimpinan.

**KETUA RAPAT:**

Baik, Bapak Hatari masih ada dua menit.

**F-P. NASDEM (Dr. ACHMAD HATARI, S.E., M.Si.):**

Sedikit saja Bapak Eddy, saya ingin *sharing* di halaman 10 saya seperti berbeda sekali dengan Bapak Eddy. Saya baca terdapat pula laporan keuangan yang sudah mendapatkan opini WTP, namun asas manfaatnya tidak ada. Pak Eddy dengan mengambil contoh pembangunan Gedung SD yang sudah jadi tetapi muridnya tidak ada. Yang kedua, irigasi yang sudah terbangun akan tetapi sawahnya tidak ada. Padahal opini yang diberikan BPK itu hanyalah sebuah tata kelola yang memenuhi unsur standar akuntansi pengungkapan data sistem pengendalian internal atau SPI dan yang keempat adalah kepatuhan. Keempat unsur ini memenuhi satu pemberian predikat daripada BPK. Jadi karena itu, publik selalu mempertanyakan kok WTP tapi tidak ada korelasi dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. WTP itu hanyalah sebuah tata kelola.

Terima kasih.

**CALON ANGGOTA BPK RI (Dr. Ir. EDDY S. PRATAKUSUMA, B.E.):**

Justru itu Pak, karena ingin merubah mindset masyarakat, sejogyanya WTP harus didampingi dengan opini terhadap kinerja. Nah, kalau tadi disampaikan WTP dan efektif berarti sudah WTP bangunannya pun atau apa yang dibangun itu bermanfaat. Sekarang saya ambil contoh seperti ini, saya tidak menjelaskan WTP itu yang periksa apa, yang tadi Bapak sampaikan sangat betul seperti itu.

Nah, ini menurut saya kelemahan yang harus kita karena selama ini ujung dari atau yang paling netral menurut saya pemeriksaan terhadap asas efisiensi dan efektifitas menurut saya ada di BPK, jadi yang lain itu ada di dalam, apalagi yang namanya inspektorat itu sebetulnya alat manajemen atau alat dari Pimpinan untuk mengendalikan bukan pengawasan dan bukan pula pemeriksaan. Ini yang agak berbeda barangkali.

Terima kasih.

**F-P. NASDEM (Dr. ACHMAD HATARI, S.E., M.Si.):**

Bapak Eddy, di dalam ketentuan tidak ada tetapi BPK mengatakan bahwa opini BPK adalah suatu pernyataan professional yang tidak bisa dirundingkan.

**KETUA RAPAT:**

Saya kira sudah cukup ya Bapak Eddy.  
Silakan memberikan *closing statement* sebelum kita akhiri.

**CALON ANGGOTA BPK RI (Dr. Ir. EDDY S. PRATAKUSUMA, B.E.):**

Saya ingin menyampaikan bahwa komitmen yang ingin saya buat adalah terutama untuk membuat opini terhadap laporan kinerja.

Itu saja Pak, terima kasih kepada para Anggota Komisi XI DPR RI yang terhormat yang telah memberikan kesempatan bagi saya untuk menyampaikan apa yang ada di pemikiran saya.

*Wabillahi Taufiq Walhidayah,  
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT:**

Kita berikan *applause* kepada Bapak Eddy. Dengan demikian kita telah menyelesaikan sesi keempat dan kami dengan hormat mempersilakan Bapak Eddy untuk meninggalkan ruangan sidang dan silakan untuk berjabat tangan.

Rapat kita skors.

**(RAPAT DISKORS)**

**Hadirin dan hadirat yang kami muliakan.**

Kita telah kedatangan calon Anggota BPK RI yaitu Bapak Arri Widiatmoko, Ak., S.H., C.A. Sebelum acara ini kita mulai kami sampaikan ada mekanisme yang harus dilewati, yaitu:

1. Calon Anggota BPK RI menjalankan uji kepatutan dan uji kelayakan sendiri-sendiri, calon yang lain diharapkan menunggu di ruang ruangan.
2. Waktu yang diberikan maksimal 45 menit, terdiri atas 15 menit maksimal calon Anggota BPK RI mempresentasikan makalahnya dan 30 menit tanya jawab.

Untuk mempersingkat waktu kami persilakan kepada saudara Arri Widiatmoko untuk menyampaikan paparannya.

Waktu dan tempat kami persilakan.

**CALON ANGGOTA BPK RI (ARRI WIDIATMOKO, Ak., S.H., C.A.):**

Terima kasih Pimpinan.

**Pimpinan dan Wakil Pimpinan Komisi XI DPR RI yang kami hormati,  
Serta para Anggota Komisi XI DPR RI yang kami hormati.**

Pada kesempatan kali ini ijin kami untuk menyampaikan apa yang menjadi bahan pemikiran kami dalam rangka untuk seleksi menjadi Anggota BPK.

Jadi sebenarnya apa yang menjadi cita-cita saya untuk ikut mengikuti seleksi ini adalah bagaimana BPK itu bisa punya peran terutama dalam pencegahan *froud*. Jadi kalau bisa no *froud* dalam pengelolaan keuangan negara itu. Itu adalah ide awalnya berangkat dari beberapa peraturan yang nanti mungkin akan kami sampaikan.

BPK RI adalah lembaga auditor yang mendapatkan amanat Undang-Undang Dasar 1945, di Pasal 23. Tugasnya memeriksa dan bertanggungjawab atas pengelolaan keuangan negara mulai dari perencanaan sampai dengan ujungnya penggunaan, pertanggungjawaban dan sebagainya. Hal itu diwujudkan dalam visi dan misinya yaitu menjadi pendorong pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan negara melalui pemeriksaan yang berkualitas. Nah, disini adalah tujuan bernegara ujungnya adalah menciptakan masyarakat adil dan makmur. Untuk mewujudkan visi ini BPK mempunyai tugas melakukan audit keuangan, audit kinerja, dan audit dengan tujuan tertentu. Di mana adalah termasuk melakukan audit investigasi untuk membantu aparat penegak hukum. Kemudian misinya adalah untuk memeriksa pengelolaan dan tanggungjawab secara bebas dan mandiri dan kemudian melakukan tata kelola secara integritas, independent dan professional.

Kalau kita berbicara mengenai tugas dan kewenangan BPK RI, di dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 menurut saya adalah BPK mempunyai kewenangan yang sangat luar biasa. Jadi bisa masuk ke dalam institusi apapun sepanjang ada uang negara disitu. Jadi menurut saya sangat luar biasa kewenangannya itu. Tapi selama ini masyarakat di negara kita hanya tahu BPK itu kerjanya mengaudit ujungnya apa, "oh, sudah ada WTP, sudah ada disclaimer dan ada itu", hanya sekedar itu padahal tugasnya kan bukan hanya itu. Tadi ada audit keuangan, ada audit kinerja, dan audit dengan tujuan tertentu.

Mungkin dalam beberapa *case* kita pernah mendengarkan BPK melakukan investigasi untuk membantu penegak hukum, entah KPK, entah Kejaksaan, entah Kepolisian, itu juga beberapa kita bisa tahu tetapi yang paling masyarakat begitu BPK adalah opini, opini adalah audit keuangan melihat bagaimana angka-angka di dalam laporan keuangan itu sesuai tidak dengan standart akuntansi yang sudah lazim. Sementara dalam filosofi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 adalah bagaimana pengelolaan keuangan negara itu bisa 3E (ekonomis, efisien dan efektif). Jadi ada 3 itu yang menjadi tujuan akhir dari kenapa audit, tapi kalau hanya sekedar opini menurut saya itu sangat belum optimal. Jadi hanya fokus kepada audit keuangan, mungkin belum bisa mewujudkan apa yang menjadi latar belakang kenapa Undang-Undang tentang pemeriksaan oleh BPK ini dibuat.

Jadi kalau kita melihat tugas dan kewenangan di bahan paparan saya sampaikan ada beberapa hal yang kemudian saya sangat tertarik dengan apa yang saya *bold*. BPK bertugas bla-bla kemudian audit keuangan, kinerja dan pemeriksaan

dengan tujuan tertentu. Kemudian dalam kewenangannya juga banyak itu ada A sampai J, beberapa hal saya *bold* itu adalah hal yang menjadi keinginan saya, ini ada punya kewenangan kayak begini kenapa kita tidak bisa berperan. Kalau kita hanya berfokus kepada audit keuangan ya mungkin hanya itu saja. fakta yang ada sekarang kan banyak mungkin hampir sekitar 70%-80% audit itu mendapat predikat wajar tanpa pengecualian. Apakah cukup hanya disitu, mungkin tidak menurut saya.

Kita melihat kondisi masih banyak korupsi terjadi dimana-mana, sementara aparat pengawasan di Republik ini sangat luar biasa jumlahnya Pak. Menurut Undang-Undang Dasar ada BPK, ada di kementerian ada Inspektorat Jenderal, di BUMN ada satuan pengawasan internal, di provinsi ada Inspektorat Provinsi, di kabupaten ada Inspektorat Kabupaten, ada BPKP, tambah lagi sekarang di DPR RI ada BAKN di hidupkan kembali yang tugasnya mengevaluasi BPK juga.

Nah, kenapa korupsi masih terjadi di mana-mana, kadang malah suatu Pemerintah atau kementerian baru diserahkan laporannya mendapat predikat WTP besoknya Pimpinannya kena OTT KPK, entah mungkin oleh penegak hukum lain, ada kasusnya masalah mungkin pengadaan, perijinan, perdagangan jabatan dan sebagainya itu akhir-akhir ini kita sering mendengar. Jadi loh ini kenapa dengan lembaga pengawas yang berlapis-lapis dari dari luar Pemerintah ada BPK, di Kementerian ada, di Provinsi, di Kabupaten, ada BPKP juga, kenapa ini masih terjadi.

Kalau mengaca dari tugas dan kewenangan tadi, salah satu kewenangan BPK adalah membina jabatan fungsional Pemerintah atau audit, kenapa ini tidak dimanfaatkan. Selama ini menurut saya BPK lebih banyak fokus kepada audit keuangan, kalau ditanya kenapa tidak melakukan audit kinerja, kami kekurangan orang, kami kekurangan anggaran. Menurut saya dengan anggaran yang saya *bold* tadi membina jabatan fungsional pemeriksa, kemudian memberikan pertimbangan itu bisa kita manfaatkan. Jadi bagaimana BPK bisa menjadi triger untuk aparat pengawasan di luar BPK, bagaimana bisa melakukan kegiatan supaya *froud* itu tidak terjadi.

Jadi kalau ini tidak bisa menjadi tugas BPK sendiri jadi suatu lembaga menurut saya tidak bisa bekerja sendiri tanpa bekerjasama dengan lembaga yang lain. Jadi kalau kita berbicara tujuan yang ingin dicapai oleh Negara kita, ya kita harus bergotong royong bersama antara BPK, BPKP, aparat pengawasan yang lainnya serta lembaga-lembaga lainnya. Jadi kita harus lebih hanya jangan menjalankan kewajiban, sekedar menjalankan audit keuangan.

Kemudian Pak, fakta yang lain selain tadi masih banyak korupsi di mana-mana, intinya kalau kita bisa mengefektifkan pengawasan dengan kewenangan tadi membina jabatan fungsional pemeriksa, kemudian melakukan evaluasi terhadap pengendalian internal yang disusun oleh Pemerintah. Menurut saya beberapa masalah bisa diselesaikan dengan itu. Kita harus memperkuat APIP atau aparat pengawasan internal Pemerintah maupun BAKN di parlemen. Dalam rangka apa kita harus sering berkoordinasi? Agar apa yang diwujudkan oleh Pemerintah Republik ini bisa tercapai. Bagaimana caranya? Ya kita harus meningkatkan kompetensi dan sebagainya untuk APIP dan parlemen. jadi alasan yang sering disampaikan oleh

BPK bahwa kami kekurangan tenaga dan kekurangan anggaran itu bisa dilakukan melalui aparat pengawasan yang lainnya seperti di Kementerian ada Inspektorat Jenderal dan lain-lain itu sementara BPK-nya hanya bertindak sebagai quality insurance Pak. Jadi kita yang mengevaluasi apakah mereka sudah bekerja dengan baik sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan oleh BPK, sehingga tujuan akhirnya bisa kita capai bersama-sama.

Kemudian dalam melakukan audit selalu diawali dengan evaluasi pengendalian internal audity, Di situ juga penting menurut saya bagaimana BPK bisa memetakan apa sih titik-titik yang rawan *froud* dan terus bagaimana untuk memitigasi *froud* itu. Nah, itu bisa dituangkan dalam satu *froud control plan* dan itu nanti akan diserahkan kepada masing-masing pengawas di satuan kerja masing-masing untuk memantau, paling tidak untuk menambah wawasan sekalian meningkatkan kompetensi dari APIP yang lain tadi Pak, diluar sebagai kontrol adalah BAKN itu adalah sebagai mitra bagaimana BPK bekerja kan salah satu tugasnya adalah memberikan masukan juga terhadap perencanaan, audit, dan sebagainya tugas BAKN Pak.

Kemudian dalam perencanaan menurut saya yang harus ditingkatkan adalah BPK harus berfokus kepada apa yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah. Jadi 5 tahun kedepan Pemerintah mau apa, itu yang harusnya menjadi fokus untuk dilakukan audit kinerja bukan audit keuangan yang bisa dilaksanakan sendiri, fokus itu dilaksanakan oleh BPK. Sementara yang lain mungkin bisa disebarkan ke APIP yang lain. sebagai contoh mungkin dana desa itu sudah tersebar segitu banyak ratusan triliun di desa-desa, itu harusnya BPK masuk kesana. Bagaimana dana desa itu apakah sudah sesuai dengan harapan Pemerintah, apakah masyarakat desa kita jadi terbantu, apakah meningkatkan ekonomi. Itu harusnya menjadi prioritas misalnya dana desa, kemudian infrastruktur, proyek-proyek dimana-mana itu harus dievaluasi. BUMN karya itu harus diaudit kinerja menurut saya, Kementerian PUPR juga. Nah, itu yang harus menjadi fokus di perencanaan audit Pak. Jadi yang menjadi prioritas Pemerintah mungkin bisa dilakukan oleh BPK sendiri, kemudian audit-audit yang lain bisa disebarkan ke aparat pengawasan fungsional lainnya.

Kemudian juga harus merubah paradigma di internal seara continue, jadi harus dilakukan revolusi mental mungkin kalau program Pemerintah, mungkin di BPK juga perlu, mental bukan mental. Jadi mentalnya harus dibina jangan menjadi *watchdog* sudah bukan jamannya auditor itu hanya jadi *watchdog* dapat temuan diperdagangkan. Kita sering mendengarkan aparat BPK di tangkap juga oleh penegak hukum, ada jual beli opini, itu marak terjadi. Itu yang harus mulai diperbaiki mulai sekarang dengan revolusi mental tadi perbaiki internal secara continue. Jadi selain memberikan opini kita juga melakukan audit kinerja untuk menilai 3E tadi, sehingga kita bisa memberikan saran. Kita BPK masuk biasanya kan kejadiannya sudah lewat, kita kan masa lalu, dokumen yang berbicara kejadian di masa lalu. Bagaimana kita memberikan saran kedepan aka nada begini, jangan hanya "masa lalu lo tidak benar ini salah", bukan hanya itu tapi program kedepannya ada resiko ini. Itu yang harus dijadikan saran Pak, kalau kita melihat banyak temuan yang tidak ditindaklanjuti itu juga harus segera diputuskan. Tidak bisa ditindaklanjuti kenapa



jangan-jangan kita rekomendasinya salah, memang tidak bisa ditindaklanjuti ya sudah kita harus berani menjustifikasi, kumpulkan dievaluasi, yang ini sudah *clear* kita mulai dari start awal lagi untuk kedepan BPK yang lebih baik dalam mencegah *froud*.

Mungkin itu Pak, ide-ide yang bisa kami sampaikan. Jadi tadi sudah disampaikan beberapa action plan apabila BPK bisa lebih meningkatkan perannya terhadap pencegahan *froud*

Mungkin itu Pak, terima kasih.

#### **KETUA RAPAT:**

Baik, sudah dipaparkan tadi oleh Bapak Arri Widiatmoko. Sekarang kita masuk kesesi kedua, jika ada pertanyaan atau pun tanggapan dari paparan tersebut, Di meja kami sudah ada beberapa penanya, kita mula dari sisi kanan Pak Prof. hendrawan kami persilkan untuk memulai pertanyaan pertama, kemudian dilanjutkan nanti oleh Bapak Bobby Rizaldi.

#### **F-PDIP (Prof. Dr. HENDRAWAN SUPRATIKNO):**

Terima kasih Pimpinan.

**Pimpinan dan rekan-rekan Anggota Komisi XI DPR RI yang terhormat,  
Bapak Arri Widiatmoko yang saya hormati.**

**Salam kebangsaan untuk kita semua.**

Tolong simak baik-baik apa yang akan saya tanyakan, yang pertama adalah pandangan yang menyatakan bahwa semakin banyak pengawasan semakin besar kecoboran. Mohon Bapak memberikan komentar terhadap fenomena tersebut.

Terus yang kedua, Bapak menyatakan bahwa korupsi ada dimana-mana, OTT ada dimana-mana. Kalau korupsi memprasyaratkan dua hal, yang pertama ada orang berniat korupsi, jadi aktornya dan ada kesempatan untuk berkorupsi strukturnya. Menurut Bapak yang terjadi sekarang apakah aktornya banyak, kesempatannya sedikit, aktornya sedikit kesempatannya banyak atau apa. Teori seperti apa ini, karena Bapak tadi selalu mengulang-ngulang OTT dan korupsi ada dimana-mana. Saya kira saya ingin mendapatkan pandangan Bapak.

Terima kasih.

#### **KETUA RAPAT:**

Pasti mudah nanti dijawab oleh Bapak Arri.  
Silakan Adinda Bobby.

**F-PG (BOBBY ADHITYO RIZALDI, SE., MBA., CFE):**

Terima kasih Pimpinan Bapak Hafisz dan Bapak Harry.

Ini Bapak Arri Widiatmoko, kalau saya yang diberikan pulpen untuk memilih semua yang BPK ini harus CFE, karena yang ada CFE tidak banyak termasuk saya juga sama berarti dengan Bapak. Jadi utamanya saya ingin memastikan karena Bapak tadi selalu *froud* apalagi Bapak ini deputinya pernah di KPK juga. Utamanya Pak, dalam mendefinisikan kerugian negara Pak, kerugian negara sesuai dengan Pasal 1 Ayat (2) kerugian negara ini kalau Bapak nanti terpilih secara kelembagaan apakah Bapak setuju BPK, misalnya ada revisi Undang-Undang BPK, bahwa BPK adalah satu-satunya lembaga negara yang bisa menghitung kerugian negara.

Seperti contoh di Jawa Timur yang ada contoh Bapak Dahlan Iskan, itu menetapkan kerugian negara di Kejaksaan itu adalah BPKP bukan BPK, BPK-nya tidak. Nah, dari Kejaksaan Agung kan waktu itu tidak mengindahkan hal tersebut. Nah, kiranya secara kelembagaan kalau Bapak sudah di BPK, Bapak setuju hal itu atau tidak.

Yang kedua, juga secara kelembagaan saya ingin memastikan karena BPK sayangnya bukan harus akuntan, bukan harus CFE Pak. Jadi banyak perspektif yang mungkin ini harus dan mungkin beda. Jadi kalau di dalam BPK nanti Bapak bergabung apakah Bapak setuju bahwa BUMN itu adalah kekayaan negara yang dipisahkan, karena Undang-Undang itu belum ada, tidak jadi. Nah, hal ini karena sekarang BUMN ini jadi takut bergerak. Kesalahan atas suatu keputusan aksi korporasi itu dianggap kerugian negara yang bisa menjerat direksi dan komisaris. Bilamana Bapak nanti bisa bergabung dengan BPK apakah pandangan Bapak, karena ini memang tetap saja ada subjektifitas. Kami tahu BPK itu dibatasi oleh SPSP tetapi dalam pandangan kerugian negara ini selalu berbeda-beda dimensinya. Apakah Bapak setuju bahwa BUMN itu adalah kekayaan negara yang dipisahkan dan keputusan korporasi itu adalah resiko bisnis yang tidak bisa diganggu gugat atau memang seperti yang ada sekarang ini perlu dievaluasi menyeluruh kinerja BUMN berdasarkan Undang-Undang yang ada.

Terima kasih Pimpinan.

**KETUA RAPAT:**

Bobby kayak sudah lama saja di Komisi XI DPR RI.

Baik, kita pindah kesisi kanan.

Silakan Ibu Tutik, siap-siap Bapak Didik Mukrianto.

**F-PD (TUTIK KUSUMA WARDANI, S.E., M.M.):**

Terima kasih Pimpinan atas waktunya.

**Yang saya hormati Bapak Arri Widiatmoko.**

Disini judul presentasi Bapak sangat sesuai juga dengan pengalaman Bapak, yaitu peran BPK dalam pencegahan *froud* Bapak pernah menjadi auditor di BPKP sampai 2005. Nah, saya ingin bertanya seandainya nanti Bapak terpilih sebagai Anggota BPK, tadi Bapak menyampaikan bahwa Bapak akan fokus dalam perencanaan audit yang mengadopsi program prioritas Pemerintah. Bagaimana nanti Bapak meningkatkan kerja sama antara BPKP sebagai pengawasan keuangan Pemerintah dan BPK RI kedepan.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Baik, terima kasih.  
Bapak Didik silakan.

**F-PD (DIDI MUKRIANTO, SH., MH):**

Baik, terima kasih Pimpinan.

**Pimpinan dan kawan-kawan Anggota Komisi XI DPR RI,  
Yang terhormat saudara narasumber Bapak Arri Widiatmoko.**

Saya ingin pandangan saudara mengenai kita melihat belakangan ini persoalan impor di negeri ini menjadi satu masalah. Di sini saya kira kedepan peranan BPK ini harus berperan lebih dalam hal ini. Bagaimana mungkin Kementerian Perdagangan, lalu Bulog itu bisa beda, Kementerian Pertanian berbeda-beda menyikapi hal ini.

Inikan lucu di dalam satu institusi negara berbeda-beda, tetapi dilapangan banyak petani mengatakan bahwa ini penyimpangan beras di gudang-gudang beras surplus, di satu sisi Menteri Perdagangan menyatakan defisit. Ini kedepan saya kira tidak boleh terjadi lagi. Ini bagaimana kira-kira pandangan Bapak kedepan di dalam mengatasi persoalan ini, karena ini tidak bisa menjadi persoalan berlarut-larut. Kedepan saya kira pandangan dan pemikiran BPK dalam hal ini saya ingin mendengar dari Bapak.

Mungkin itu Pimpinan sementara.  
Terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Baik, Bapak Hatari kami persilakan.

**F-P. NASDEM (Ir. H. ACHMAD HATARI, S.E., M.Si.):**

**Bapak Arri yang terhormat.**

Saya membaca Bapak Arri punya kurikulum vitae Bapak Arri dengan tulisan yang sederhana ini. Menurut saya sangat berkualitas fenomena actual yang terjadi saat ini seperti yang Bapak paparkan disini. Mudah-mudahan Bapak Arri nanti terpilih bisa melakukan kembali kondolidasi terhadap kondisi BPK kekinian, termasuk ribuan rekomendasi tindaklanjut yang tidak dikawal.

Terakhir soal BAKN ini, saya apresiasi juga kebetulan Bapak Arri kami ada beberapa di Komisi XI DPR RI ini sebagai Anggota daripada BAKN. Hanya tadi di halaman 6 ini Bapak Arri ada satu pasal lagi yang lupa dicantumkan, apabila pada saat BAKN melakukan telaahan atas pemeriksaan BPK terindikasi pidana harus segera diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Barangkali itu *sharing* dari saya, tapi sekali lagi saya apresiasi tulisan sederhana tapi inilah realitas BPK saat ini.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Baik, silakan Bapak Sudiro.

**F-P. HANURA (DRS. SUDIRO ASNO):**

Terima kasih Pimpinan.

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

**Pimpinan dan Anggota Komisi XI DPR RI yang saya hormati,  
Bapak Arri yang sangat saya hormati.**

Langsung saja Bapak Arri, saya klarifikasi saja ini. Pertanyaan Bapak Prof. Hendrawan sebetulnya apa hubungan opini WTP dengan keadaan yang sesungguhnya audity kementerian atau lembaga, Komisi WTP akan tetapi penyimpangan masih banyak, OTT masih banyak. Jadi menurut perspektif atau pandangan Bapak Arri apa artinya WTP bagi Bapak ini.

Yang kedua, sebetulnya agar BPK itu dinilai oleh masyarakat atau oleh orang lain dalam hal ini institusi atau yang berhak menilai, kira-kira kriteria apa yang dikatakan BPK itu berhasil. Apakah WTP-nya banyak atau *froud*-nya rendah atau penyimpangannya itu mengecil. Kira-kira menurut Bapak Arri itu bagaimana kedepannya, apa lebih fokus ke WTP atau lebih fokus kepada pencegahan-pencegahan.

Terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT:**

Ada 6 pertanyaan Bapak Arri Widiatmoko untuk Bapak menjawab. Kami persilakan kepada Bapak, masih ada waktu 15 menit.

**CALON ANGGOTA BPK RI (ARRI WIDIATMOKO, Ak., S.H., C.A.):**

Terima kasih Pimpinan.

Jadi yang pertama tadi dari Bapak Prof. Hendrawan, pertanyaannya memang sangat mendasar. Yang pertama, katanya semakin banyak pengawasan semakin banyak bocor. Saya sangat tidak sepakat, pengawasannya seperti apa dulu. Kalau pengawasannya oke mau banyak atau sedikit tidak masalah menurut saya. Tapi pengawasan banyak kalau disitu kekuasaannya digunakan untuk korupsi ya percuma saja. Jadi tergantung kepada kualitas pengawasannya seperti apa, bukan banyak atau sedikit pengawasan, itu menurut saya.

Kemudian yang kedua tadi mengenai korupsi dimana-mana, aktor dan kesempatan. Ini berdasarkan pembelajaran saya 10 tahun di sana Pak, jadi memang bisa karena ada kesempatan atau apa. Dulu kami sempat membuat satu kajian Pak, kadang orang baik begitu masuk ke politis loh kok bisa jadi jahat. Kadang-kadang Pak, ini kajian kami. Jadi kita jangan hanya jadi dokter, sakit kasih paracetamol atau apa, sakitnya kenapa? Bisa karena jantung, bisa karena pusing, kalau itu tidak menyelesaikan masalah. Jadi kenapa korupsi ini terjadi, kami pernah bikin kajian menurut saya di pengadaan itu sarana untuk mengambil uangnya, bukan disitu sebenarnya akar permasalahannya.

Nah, ini mohon maaf saja, saya dulu bikin kajian sama teman-teman walaupun belum sempat terpublish karena Pimpinan banyak bertanya-tanya. Jadi kalau menurut saya dan tim dulu, ini karena biaya politik dan sebagainya di kita itu mahal Pak, itulah ujungnya bisa mengambil di pengadaan dikasih, di perijinan, di apa. Sebenarnya sekarang jadi lurah saja miliaran duitnya, itu untuk lurah Pak, cuma dapat tanah bengkok kalau dulu berapa harganya. Dimana untuk menduduki jabatan tertentu harus bayar segini, kapan balik modalnya PNS gajinya berapa misalnya, mau dia kumpul sampai pensiun kalau dia jujur tidak bisa balik modal. Kalau sponsornya yang ngasih nanti balik modalnya "pak, kasih proyek, pengadaan ini ambil". Itu kami bikin kajian, jadi bukan masalah di pengadaan apa yang harus dibenerin, itu hanya sarana. Menurut saya sudah cukup bagus sekarang ada e-proc, tapi masih bisa ditembus Pak, adminnya disogok biar supaya jangan bisa masuk yang lain. Kalau secara sistem sebenarnya sudah cukup bagus menurut itikad baik.

Bapak Jokowi begitu awal-awal revolusi mental menurut saya itu harus jadi diyudikatif, legislative, eksekutif kalau bisa duduk bersama ayolah kita kemana 5 tahun kedepan. Menurut saya hal-hal yang seperti Bapak Hendrawan sampaikan bisa diatasi dengan mudah, kalau kemauannya sama antara eksekutif, yudikatif, legislative, ayolah kita duduk bersama untuk kemajuan bangsa. Jangan disini apa,

disini apa, ya tidak bakal selesai Pak. Seperti kemarin revisi Undang-Undang sampai sekarang masih panjang ceritanya menurut saya.

Jadi intinya kita bisa duduk bersama 3 elemen itu, itu banyak bisa menyelesaikan masalah menurut saya. Kalau intinya menurut kajian kami ya itu, sistem politik kita yang membutuhkan biaya mahal. Itu menurut kami, mohon maaf Bapak Prof. Hendrawan.

Kemudian Bapak Bobby mengenai kerugian negara apakah harus diperhitungkan kerugiannya, harus BPK. Saya sih kurang sependapat Pak, banyak kan lembaga lain yang bisa. Untuk kasus-kasus ringan bahkan penegak hukum bisa menghitung sendiri tidak perlu perhitungan dari auditor atau apapun namanya. Saya dulu pernah memakai Inspektorat Kementerian untuk menjadikan ahli untuk menghitung kerugian negara, tidak masalah juga kan, waktu itu Kemenlu kalau tidak salah, karena BPK sedang sibuk, BPKP sedang sibuk, ya sudah kita pakai Kemenlu untuk kasus-kasus sederhana mereka bisa menghitung sendiri, tidak perlu menghadirkan ahli.

Kemudian untuk tadi mengenai BUMN, kalau sepanjang masih 50% sahamnya masih dimiliki oleh negara saya sih sepakat itu masih masuk dalam lingkup keuangan negara. Tapi bahwa auditnya nanti tidak harus BPK, bisa oleh akuntan publik tapi kan hasilnya nanti akan selalu diserahkan kepada BPK, karena juga keterbatasan kita untuk memeriksa seluruh BUMN dan BUMD.

Kemudian dari Ibu, bagaimana meningkatkan peran BPK. Jadi mungkin BPK perlu melakukan evaluasi, entah itu dengan Litbang untuk bergabung dengan APIP apa sih masalahnya gitu. Dulu sempat ada ide untuk menyatukan aparat pengawasan internal dalam satu badan BPIP kalau tidak salah. Jadi secara struktur kedudukannya di Jakarta. Jadi kalau sekarang aparat pengawasan internal Pemerintah itu sangat tidak independent karena ya mereka bertanggungjawab dengan kepala sukunya di daerah masing-masing dengan otonomi, bagaimana saya bisa menyatakan bos saya salah kalau saya diangkat oleh dia. Jadi dulu sempat ada wacana ditarik ke pusat semua dengan *leader*-nya BPKP. Itu menurut saya ide bagus itu kalau bisa diwujudkan sekarang. Jadi di internal hanya satu kordinatornya untuk BPKP, sementara diluar ada BPK ini nanti bersinergi untuk menciptakan pengelolaan keuangan negara yang luar biasa yang lebih baik lagi Ibu.

Kemudian tadi Bapak Didik Irawadi, itu menjadi keprihatinan kita juga Pak, Kepala Bulog ngomong apa, Menteri Pertanian ngomong apa. Seperti yang saya maspaikan kepada Prof. Hendrawan inikan harusnya sama-sama pembantu Presiden harusnya sama, perintahnya Presiden kan sama. Kenapa bisa keluarnya beda-beda ini ada apa, menurut saya harusnya tidak boleh terjadi antara bermitra itu kita harus saling support, jangan saling mempermalukan, jangan saling membuka aib masing-masing, kita harus bersinergi bagaimana itu bisa dicapai. Itu memang membingungkan masyarakat, dulu Bulognya ngomong apa, Menteri Pertanian kok tidak, Menteri Perdagangan juga tidak, masalah impor beras dan sebagainya.

Dan untuk kedepan mungkin peran BPK, kita kan mengaudit Kementerian Pertanian dan Bulog, itu disinergikan. Kita harus bisa fokus apa yang menjadi program Pemerintah yang lintas sektoral itu harus disinergikan supaya tidak terjadi

lagi seperti yang Bapak sampaikan tadi. Jadi kita sinergikan, kita duduk bersama untuk menyelesaikan masalah itu.

Kemudian dari Bapak Hatari terima kasih tadi masukannya. Jadi selama saya bergabung penegak hukum kordinasi juga dengan BPK cukup bagus, dengan DPR RI juga cukup. Jadi kalau ada unsur pidana biasanya mereka segera investigasi hasilnya diserahkan kepada kami untuk kami tindaklanjuti yang menjadi kewenangan di kita, kalau tidak kita serahkan ke aparat penegak hukum yang lain.

Kemudian terakhir tadi mengenai hubungan opini dan penyimpangan. Apa arti WTP, jadi opini WTP itu adalah penyajian laporan keuangan yang sesuai dengan standar Pak. Bagaimana standar-standar akuntansinya mengatur ini sudah sesuai, bahwa selama ini kalau ada kasus terkait, BPK selalu mengatakan sebenarnya tidak ada hubungannya antara WTP dengan kejadian kasus yang melawan hukum itu. Kalau saya sih agak kurang sependapat, harusnya kan bisa dipetakan, waktu kita mengevaluasi itukan kita bisa memetakan. Nah, kita harus punya peran jadi kalau nanti ada kasus kita sudah mengingatkan waktu kita mengevaluasi. Disinilah titik lemahnya, disinilah titik lemahnya, harus diperkuat jangan sampai terjadi. Jadi bukan hanya kalau WTP hanya apa kesesuaian dengan standar dan sebagainya, kalau ada temuan kemudian terus yang terjadi selama ini. Jadi kalau saya sih berpendapat masih ada kaitannya sebenarnya, kan bagaimana pun kita keuangan kan kita bisa memotret apa yang kita audit itu kita potret gambaran besarnya kan kita tahu paling tidak kan. Nah, itu harusnya yang disampaikan pada saat kita mengevaluasi struktur pengendalian internal Pemerintah yang kita audit.

Kemudian BPK kriteria keberhasilannya seperti apa, apakah WTP atau kinerja. Menurut saya keberhasilannya adalah tidak banyak kasus untuk terhadap kegiatan pengelolaan keuangan negara. tujuan yang ingin dicapai seperti tadi tujuan akhirnya masyarakat adil dan makmur tercapai, itulah keberhasilan bukan hanya BPK sebenarnya, itukah keberhasilan lembaga-lembaga yang ada di Republik ini untuk mewujudkan Indonesia yang menciptakan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur. Itu Pak, menurut saya keberhasilan BPK. Masalah opini itu hanya sekedar opini, tapi itulah keberhasilannya. Latar belakang Undang-Undang BPK itu ada itu yang harus bisa diwujudkan.

Mungkin itu penjelasan dari kami Pak, kurang lebihnya mohon maaf.

#### **KETUA RAPAT:**

Cukup Bapak Hatari?

Baik, kalau begitu sudah selesai pertanyaan tanya jawab, kepada Bapak Arri Widiatmoko kami persilakan untuk memberikan *closing statement* dan bisa juga dimanfaatkan sebagai ajang kampanye.

Silakan.

**CALON ANGGOTA BPK RI (ARRI WIDIATMOKO, Ak., S.H., C.A.):**

Terima kasih Pimpinan.

Jadi kalau *closing statement* tadi seperti yang saya sampaikan, bahwa saya ingin BPK itu lebih punya peran dipencegahan. Jadi represif bahwa itu selama ini sudah berlangsung oke, kalau memang ada case, ada unsur pidana ya sudah kita investigasi, kita serahkan, tapi jangan mencari-cari gitu loh, bahwa audit itu bukan untuk mencari-cari kesalahan kemudian bisa dinegokan. Selama inikan sering beberapa case, kita harus punya peran lebih, BPK harus bisa memberikan nilai tambah bahwa inilah yang BPK bisa berikan untuk mencapai tujuan Negara Republik Indonesia yang kita cintai ini.

Mungkin itu yang bisa kami sampaikan.

Terima kasih Pak.

**KETUA RAPAT:**

Baik, mari berikan *applause*.

**Bapak dan Ibu hadirin sekalian yang saya hormati.**

Kita telah sampai pada akhir dan kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Arri Widiatmo, atas paparan seluruh rangkaiannya sampai selesainya acara pada sesi kedua pada hari ini.

Dan sekaligus kami melakukan skors rapat ini sampai pukul 19.00 WIB kita lanjutkan kembali. Dan kepada Bapak Arri Widiatmoko kami persilakan dengan hormat untuk meninggalkan ruangan sidang dan berjabat tangan dengan para Anggota Komisi XI DPR RI.

**(RAPAT DISKORS)**

**KETUA RAPAT (Ir. H. MARWAN CIK ASAN, M.M./F-PD):**

**Rekan-rekan Anggota Komisi XI DPR RI saya hormati,  
Saudara Dr. Soemardjjo, S.E., Ak., C.A. yang saya hormati.**

Kita melakukan fit and propertest calon Anggota BPK RI periode 2019-2024 pada malam hari ini. Sekarang jam 19.20 WIB kalau melihat jam di depan itu. Waktunya sama, Bapak punya waktu 45 menit yang akan diisi dengan paparan dan diskusi.

Kita mulai dari sekarang, saya persilakan.



## **CALON ANGGOTA BPK RI (Dr. SOEMARDJIJO, S.E., Ak., C.A.):**

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Terima kasih.

Pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada Anggota DPR RI yang mulia khususnya Komisi XI DPR RI, yang memberikan kesempatan dan waktu kepada saya untuk melakukan presentasi dalam rangka pemilihan Calon Anggota BPK 2019-2024.

Makalah yang kami sampaikan adalah peran dan kinerja BPK RI sebagai lembaga negara dalam upaya menegakkan korupsi di Indonesia. Sesuai mandatori Undang-Undang republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, Tanggungjawab Keuangan Negara serta Peraturan BPK RI Nomor 1 Tahun 2017.

Visi, berkomitmen menjadikan BPK RI menjadi lembaga auditor negara, independen, integritas, profesional, kredible, bebas, mandiri, disegani, berperan aktif mendorong terwujudnya tata kelola keuangan daerah yang akuntabel, transparan, efektif, efisien, ekonomis, bebas dari tindak pidana korupsi.

Misi, meningkatkan peran BPK sebagai auditor negara dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan negara oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD, melalui *good government* dan *good governance*.

Nilai dasar, BPK RI sebagai auditor negara menjunjung tinggi independensi, bijak dan mandiri memeriksa pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara, daerah bersifat netral, objektif, independent, bebas dari pengaruh kepentingan politik, baik lembaga eksekutif, legislative, yudikatif, dan lembaga negara lainnya untuk menghindari benturan kepentingan.

Integritas Anggota dan auditor BPK RI wajib menjaga integritas, etika dan moral, bersifat jujur, objektif, tegas dalam menerapkan profesionalisme, menjunjung tinggi kepercayaan publik, pejabat dan auditor BPK. Dilarang mentransaksikan atau menjual opini WTP pada audity walaupun ada intervensi guna menjaga integritas professionalism, objektivitas dan independensi seluruh auditor BPK RI. BPK dalam melaksanakan tugas pemeriksaan pengelolaan keuangan negara, BUMN, BUMD, bekerja secara professional, independent, menjunjung tinggi integritas. Berpedoman kepada Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang BPK, dan Undang-Undang tentang Pemeriksaan Keuangan Negara, serta Peraturan BPK Nomor 1 tThun 2017 agar diperoleh hasil pemeriksaan tepat waktu, akurat, bermanfaat bagi pemangku kepentingan dan audity.

Objektivitas, auditor BPK dalam melaksanakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara, daerah, BUMN, BUMD, bersifat objektif, bebas dari segala bentuk kepentingan, menjalankan profesionalisme, independensi, integritas, berperilaku jujur, serta intelektual dan professional. Setiap hasil pemeriksaan khususnya audit investigative dikomunikasikan kepada audity. Culture budaya BPK, BPK RI diharapkan menjadi lembaga pemeriksaan keuangan yang

disegani, terhormat dan berkualitas dunia dengan budaya organisasi yang efektif, efisien agar dapat memenuhi harapan pemangku kepentingan di bidang pemeriksaan, pengelolaan keuangan negara.

Tujuan dan sasaran strategis tahun 2019-2024. BPK RI sebagai auditor negara merefleksikan Pemerintah Pusat, Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD, melaksanakan *good government*, dan *governance* secara konsisten agar segera terwujud pengelolaan keuangan negara, daerah secara transparan, akuntabel, efektif, dan efisien untuk mencegah tindak pidana korupsi, penyalahgunaan keuangan negara, daerah, BUMN, BUMD, agar hasil temuan laporan ikhtisar HPS pertama tahun 2019 BPK terdapat 14.965 permasalahan dengan potensi kerugian hampir 10,35 triliun. Menjaga marwah BPK sebagai auditor negara di pimpin dan dikelola dan dilakukan oleh auditor yang terintegritas, memiliki pengalaman, kredible, kompeten, mandiri, independen. BPK tidak boleh menjadi alat kekuasaan kepentingan politik.

Program kerja pertama *insya allah* terpilih menjadi Anggota BPK RI merekomendasikan kepada Ketua BPK dan Anggota BPK menjaga marwah, yaitu mencegah agar tidak terjadi abuse of power dan konflik kepentingan antara pejabat BPK, pejabat struktur BPK, bernegosiasi melakukan transaksi dengan audity tentang pemberian opini WTP untuk tujuan materi serta praktek seperti ini bisa merusak marwah BPK sebagai lembaga negara. Dua, melaksanakan peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2017 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara SPKN, PSP 100 dan PSP 200 secara professional, benar, konsisten dalam audit pemeriksaan dengan tujuan tertentu khususnya audit investigative, auditor BPK wajib klarifikasi dan konfirmasi kepada audity dan PSE perangkat 4A auditor wajib menyajikan laporan hasil pemeriksaan secara seimbang dan tidak memihak, agar apabila BPK merugikan perhitungan kerugian negara tidak dipermasalahkan oleh HPH, ahli hukum dan penegak hukum di Pengadilan Tipikor.

BPK melakukan audit utang Pemerintah, BUMN, BUMD yang posisinya sampai akhir Juli utang Pemerintah mencapai 5,34 triliun sedangkan utang BUMN mencapai 5,34 triliun serta banyak utang Pemerintah, BUMN apakah ada korelasi lurus dengan kesejahteraan rakyat. Audit utang diperlukan agar kebijakan utang Pemerintah tidak terus membebani rakyat. Empat, meningkatkan kuantitas dan kualitas pemeriksaan dengan tujuan tertentu termasuk audit investigative untuk mencegah kerugian keuangan negara termasuk perhitungan kerugian negara dalam rangka *recovery* aset. Termasuk merespon dengan cepat permintaan aparat penegak hukum, melakukan audit investigative apabila diduga ada kerugian keuangan negara, agar proses penegakkan hukum berjalan dengan cepat dan murah untuk kepastian hukum dan *recovery* aset batas negara.

Jangka panjang, audit APBN Kementerian/Lembaga tentang perencanaan penetapan DIPA APBN, pelaksana dan pelaporan serapan kegiatan program kerja target yang disusun apakah terjadi markup atau termasuk pekerjaan fisik suatu proyek sistem dan prosedur anggaran harus dihabiskan pada akhir tahun anggaran. Harus dievaluasi kembali seakan-akan anggaran adalah target pencapaian program secara fisik bukan nilai Rupiahnya. Nilai Rupiah tidak harus terserap 100% tetapi

target fisik kegiatan harus tercapai 100%, supaya APBN lebih efisien, efektif tidak dibikin setiap tahun ada penambahan utang negara.

Kedua, membantu Pemerintah Pusat, Daerah membuat sistem penyalahgunaan keuangan negara agar tindak pidana korupsi terhadap APBN, APBD, BUMN yang justru setiap tahun antara Pemerintah dan DPR RI untuk kesejahteraan rakyat Indonesia sesuai amanat konstitusi. Maksudnya nilai Rupiah yang disusun dalam APBN dan APBD harus lebih memprioritaskan kesejahteraan rakyat, apakah artinya opini WTP kalau di instansi tersebut masih terjadi pemborosan dan penyalahgunaan keuangan negara.

Pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara menjadi tanggungjawab Presiden sebagai kepala negara, kepala Pemerintahan, memegang kekuasaan keuangan negara, bagian dari kekuasaan Pemerintah .... Melalui Kementerian Keuangan sebagai bendahara negara beserta aparatur negara lainnya dari pusat dan daerah bertanggungjawab mengelola keuangan negara sesuai dengan Pemerintah 3 paket keuangan negara. Bahwa keuangan daerah secara tertib, transparan, akuntabel, efisien, efektif untuk mencegah korupsi. Jadi tidak terlalu banyak institusi pemberantasan korupsi yang hanya menghabiskan uang negara sesuai dengan bunyi Undang-Undang Keuangan Negara dan hukum keuangan negara serta hukum tata negara yang bertanggungjawab mencegah penyalahgunaan keuangan negara dan korupsi adalah Pemerintah Pusat atau daerah melalui pengguna anggaran jadi bukan aparat penegak hukum. terminologinya jangan bolak balik sehingga bikin pola pikir tentang pemberantas tindak pidana korupsi.

Jadi intinya bahwa yang melakukan pencegahan itu adalah Pemerintah. Kedua, keinginan saya mengikuti fit and propertest Anggota BPK sekarang yang keenam kali Pak, mulai 2009 saya bareng dengan Bapak Hadi Purnomo. Walaupun saya tidak terpilih saya ingin negara ini baik, sebagai pengabdian saya kepada bangsa dan negara melalui BPK dan berkomitmen menjaga marwah BPK sesuai ilmu dan pengalaman saya sebagai auditor akuntan, akademisi, praktisi, di bidang akuntansi dan ahli keuangan negara. Saya kebetulan bertugas di Kejaksaan Agung Pak, di Jampidsus saya menangani korupsi Pak. Memiliki keinginan yang kuat dengan ijin Allah agar BPK bisa menjadi auditor negara yang disegani, mumpuni, integritas, independent dan kebanggaan bangsa Indonesia.

Terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

#### **KETUA RAPAT:**

Baik, terima kasih kepada Dr. Soemardijo yang sudah menyampaikan paparannya. Waktu kita masih cukup banyak hampir 30 menit lagi saya persilakan dari sayab kanan Ibu Indah Kurnia.

**F-PDIP (INDAH KURNIA):**

Terima kasih Pimpinan.

**Pimpinan, Bapak dan Ibu Anggota Komisi XI DPR RI.**

Kandidat kami yang pertama untuk putaran yang ketiga Pak, hari ini yaitu Bapak Dr. Soemardjijo. Pemaparan Bapak sangat bagus kami apresiasi dan saya langsung saja. Tujuan Bapak sangat mulia kan ya, sekarang ini adalah kali keenam Bapak mengikuti fit and propertest sebagai Calon Anggota BPK RI. Kemudian harapan Bapak tentu ingin agar BPK bisa menjadi auditor negara yang disegani, mumpuni, integritas, independent dan professional. Seandainya Bapak Soemardjijo terpilih atas izin Allah SWT, dan kemudian kami mayoritas memilih Bapak. Untuk point yang independent Pak, itu bagaimana Bapak bisa mewujudkan mengingat sata ini tantangan yang dihadapi BPK adalah terbatasnya anggaran, terbatasnya jumlah auditor. Beitu luasnya dan banyaknya audity yang harus diperiksa. Dan tentu saja diharapkan adilnya selain professional bisa menjadi acuan agar tidak ada korelasi erat antara WTP dan tetap ada OTT.

Itu dari saya Pak, terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Terima kasih Ibu Indah.

Selanjutnya silakan Bapak Sudiro Asno.

**F-P. HANURA (Drs. SUDIRO ASNO):**

Terima kasih Pimpinan.

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

**Pimpinan dan Anggota Komisi XI DPR RI yang saya hormati,  
Bapak Dr. Soemardjijo yang sangat saya hormati juga.**

Langsung saja Pak, ini saya dengan permintaan maaf saya belum melihat gagasan-gagasan yang tertuang dalam pemaparan Bapak ini, tapi baru sekedar apa yang ada di Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 maupun 2006 di jiplak saja, tapi belum melihat ide-ide apa yang sejogyanya ditampilkan atau ditawarkan kepada kami kalau seandainya Bapak itu terpilih menjadi salah seorang Anggota BPK. Itu yang pertama, jadi komentar tentang secara umum, jadi saya belum melihat.

Yang kedua, saya pribadi sangat prihatin tentang bahwa Bapak Sormadjijo menyatakan dan mungkin ini memang barangkali kenyataan bahwa opini laporan keuangan Pemerintah Pusat maupun Daerah itu khususnya yang WTP itu ada korelasinya dengan ada atau tidaknya penyimpangan-penyimpangan di lembaga itu,

ini sangat memprihatinkan sekali. Harusnya kan BPK selalu auditor mengetahui ada indikasi penyimpangan, tentu dilihat dari penilaian atau audit atau penilaian sedikit pengendalian internnya. Tentu indikasi itu sudah kelihatan, kalau itu sekiranya signifikan indikatornya dan itu penyimpangan makanya itu harusnya opininya tidak bisa WTP, mungkin WDP-pun harusnya no opinion menolak memberikan pendapat, paling tidak wajar dengan pengecualian lah, tapi tidak mungkin WTP. Jadi akhirnya inikan kita dan masyarakat itu tidak terpesona lagi kepada opini WTP. Tetapi tidak membuktikan bahwa si lembaga audit itu bagus, bebas dari terutama yang tadi signifikan *froud* atau *material weakness* kelemahan yang cukup material.

Itu harusnya auditor bisa membedakan mana WTP, mana WDP, mana no opinion, mana disclaimer, harusnya kan begitu. Ini sayangnya Bapak memaparkan hanya menceritakan kata-kata teks book yang ada di Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 dan 2004 dan kondisi yang ada, tetapi tidak menawarkan solusi. Inikan sekarang tidak ada hubungan, kalau sekarang bagaimana supaya ada hubungan antara opini WTP dengan supaya bahwa lembaga itu benar-benar kredibel kata-kata bebas dari *froud* atau dalam waktu tertentu tidak ada *froud*. Ini baru diumumkan WTP tapi lalu kena OTT. Ini harusnya apa kira-kira usulan-usulan yang bisa Bapak tawarkan supaya Bapak tidak yang ketujuh mengikuti fir and proptest, ini harusnya kan ada begitu Pak.

Jadi saya ingin melihat dan mendengar tawaran atau usulan Bapak tentang hubungan tadi itu. Jadi ini supaya tidak seperti WTP itu murahan, jadi opini yang benar-benar bergengsi. Itu saya pikir yang ingin saya mendengar atau melihat.

Terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT:**

Silakan Bapak Michael Jeno.

**F-PDIP (Ir. G. MICHAEL JENO, M.M.):**

Terima kasih Pimpinan.

**Rekan-rekan Komisi XI DPR RI yang saya banggakan,  
Bapak Dr. Soemarjito ini pengalaman juga sampai 6 kali.**

Tentu yang dari yang kesatu dan kedua ada pengalaman, yang ketiga dan keempat harusnya ada pengalaman untuk Bapak ikut fit and proptest ini. Baik, pertanyaan saya sederhana, sama dengan saya tanya dengan kandidat yang sebelumnya. Salah satu yang biasanya disampaikan terkait dengan performance BPK saat ini adalah audit keuangan. Bapak inikan latar belakangnya akuntan, audit keuangan itu kan sesuatu yang sudah *past*, sudah lewat. Saya ingin sebenarnya BPK ini porsi audit kinerjanya jauh lebih besar daripada posisi saat ini. Itu saya tidak

lihat Bapak singgung secara cukup detail di presentasi Bapak, disamping itu yang saya tanyakan bagaimana Bapak menyikapi bahwa kita juga harus apalagi Pemerintah saat ini banyak sekali kebijakan-kebijakan efektifitas dana desa seperti apa. Nah, itu mungkin Bapak bisa sampaikan karena saya lihat yang tadi disampaikan belum sempat diilustrasikan secara detail.

Terima kasih Pimpinan.

**KETUA RAPAT:**

Terima kasih.

Silakan selanjutnya Bapak Nizar Zahro.

**F-P. GERINDRA (H. MOH. NIZAR ZAHRO, S.H.):**

Terima kasih Pimpinan.

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

**Pimpinan dan Anggota Komisi XI DPR RI yang sangat saya hormati,  
Bapak Soemardjijo.**

Saya singkat saja Pak, langsung ke halaman 18 Bapak disitu menyampaikan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 Pasal 1, 2, 3, 4 sampai dengan Pasal 10 tentang BPK. Dan juga dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara. Dalam Pasal 13, Pasal 14 Ayat (1) dan Ayat (2) sangat tegas sekali mewajibkan kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, bilamana ada temuan dari BPK agar ditindaklanjuti penyelidikan, penuntutan dan aparat penegak hukum. Saya tanya kepada Bapak Soemardjijo, menurut Bapak selama BPK berdiri hampir 72 tahun efektif tidak pasal ini, Pasal 1, Pasal 14 Ayat (1) dan Ayat (2), Pasal 13, bilamana ada temuan dari BPK aparat penegak hukum yang kami maksud adalah Kepolisian, Kejaksaan apakah sudah sesuai dengan perintah Undang-Undang ini. Karena dari beberapa temuan BPK, ada juga temuan-temuan yang tidak ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum. Bagaimana langkah dan strategi Bapak bilamana nanti dipercaya sebagai Anggota BPK untuk menegakkan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 ini.

Terima kasih Pimpinan.

**KETUA RAPAT:**

Baik, terima kasih.

Silakan Bapak Sormardjijo, sudah 4 pertanyaan.

Silakan Pak.

## **CALON ANGGOTA BPK RI (Dr. SOEMARDJIJO, S.E., Ak., C.A.):**

Terima kasih.

Pertama ingin menanggapi pendapat Ibu Indah Kurnia. Mengenai point independent, sebetulnya di dalam Undang-Undang itu sudah jelas kriteria untuk menjadi Anggota BPK dan auditor itu memang harus independent. Di samping kompetensi memiliki latar belakang tentang akuntansi keuangan negara dan audit, itu sudah prinsip. Kalau tidak dimiliki berarti tidak akan independent itu. saya yakin itu.

Nah, bagaimana supaya BPK independent karena Undang-Undang itu sudah mengatur secara jelas ini menyangkut masalah moral dan etika. Moral dan etika itu yang mengakibatkan kita tidak independent. Kepentingan-kepentingan individu ini yang menyebabkan mereka tidak independent karena kepentingan-kepentingan diluar tugas intinya, sehingga mereka tidak independent, sehingga disitulah terjadi akhirnya antara hasil audit dengan pendapat dengan pihak audity akhirnya tidak independent. Sehingga temuannya yang sebetulnya disampaikan akhirnya disitu direduksi Ibu. Jadi faktornya adalah individu, kalau sistem, prosedur, Undang-Undang aturan sudah jelas mereka harus independent, tidak boleh melanggar kode etik. Ini menyangkut masalah individu pribadi ini Ibu.

Kemudian masalah Bapak Sudiro, gagasan-gagasan tentang ide BPK. Ya saya tentunya kalau saya nanti bisa terpilih tentunya saya akan memperbaiki tentang, satu masalah audit investigative. Contohnya begini, menurut Undang-Undang Pemeriksaan Keuangan Negara, itu bahwa Pasal 1 tugas BPK itu menilik kebenaran Pak, bukan kewajaran. Jadi tugas BPK itu melihat tentang kebenaran bukan kewajaran. Kalau akuntan publik memeriksa perusahaan mereka kewajaran tapi BPK kebenaran. Sehingga apabila BPK sudah menerbitkan opini yang dibuat oleh lembaga institusi dari asersi yang dibuat disitu sudah dengan opini WTP mestinya tidak terjadi penyimpangan, karena BPK tentang kebenaran bukan kewajaran.

Jadi kalau disitu terjadi penyimpangan berarti salah pada pihak penyelenggara negara, karena asersi yang dibuat oleh lembaga negara itu mencerminkan dia akan diperiksa oleh pihak ketiga dalam rangka kebenaran. Berarti kalau disitu terjadi WTP kemudian terjadi OTT berarti laporan keuangan yang dibuat tersebut melanggar Undang-Undang, tidak benar. Karena disitu ada penyimpangan tapi diberikan informasi kepada BPK sehingga BPK salah menilai sehingga dimunculkan opini WTP, karena BPK menggunakan konsep kewajaran bukan kebenaran. Kemudian tanggungjawab saya nanti akan meneruskan kepada mereka bahwa kita harus yakin bahwa setiap opini WTP yang kita berikan tidak akan terjadi penyimpangan. Bahwa laporan keuangan yang dibuat oleh pihak lembaga negara yang namanya asersi harus betul-betul kita yakini benar bukan wajar.

Kemudian tentang kenapa sudah diberikan opini WTP terjadi penyimpangan. Ya seperti yang saya bilang tadi Pak, karena BPK menggunakan metodologi kewajaran laporan keuangan, seperti Kantor Akuntan Publik padahal Undang-Undang Pasal 1 itu mengatakan kebenaran, berarti laporan yang dibuat oleh Pemerintah atau lembaga negara tidak benar, karena terjadi penyimpangan.

**F-PDIP (Ir. G. MICHAEL JENO, M.M.):**

Ijin Pimpinan, sedikit karena menarik ini.

Kriteria Bapak menilai bahwa itu benar atau yang tadi, kalau kewajaran kan kita standar akuntansi. Kalau kebenaran bagaimana menilainya Pak.

**CALON ANGGOTA BPK RI (Dr. SOEMARDJIJO, S.E., Ak., C.A.):**

Jadi kebenaran berarti mereka BPK itu harus benar-benar yakin mengaudit seluruh asersi yang dibuat transaksi itu yakin, maka di dalam Undang-Undang Keuangan Negara kan namanya pengelolaan keuangan negara. Mestinya BPK itu mengaudit mulai dari perencanaan ini Pak, pengelolaan itu mulai dari rencana Pak. Jadi BPK bisa masuk pra audit, mulai dari pengelolaan sampai eksekusi dia akan ikuti terus sampai nanti membuat laporan yang sifatnya historis tadi Pak. Harus yakin bahwa dokumen-dokumen yang didapatkan tadi begitu kita sandingkan dengan audit tadi sudah sesuai. Termasuk nilainya, fisiknya sudah sesuai, itu yang namanya kebenaran Pak.

Kemudian tadi Bapak Jeno minta terhadap kinerja. Tentunya di dalam Undang-Undang BPK harus melakukan audit tentang laporan keuangan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, termasuk BUMN. Dua melakukan audit kinerja, ketiga melakukan audit tujuan tertentu. Nah, disini rupanya BPK lebih fokus terhadap audit keuangan. Dia lebih suka mengaudit kertas, laporan yang bersifat historis, yang itu bisa direkayasa.

Maka tadi sependapat seandainya BPK ini dipimpin oleh semuanya memiliki background tentang keuangan negara, pasti dia akan melakukan audit secara seimbang tentang keuangan akan dibentuk direktorat tertentu, audit kinerja sendiri, audit investigatif sendiri. Sehingga mereka masing-masing akan bekerja sesuai dengan kompetensinya, sehingga nanti bersamaan nanti begitu dihasilkan hasil audit tidak ada lagi tentang penyimpangan, tidak ada lagi tentang fisik yang tidak tercapai, semua akan seirama Pak.

Kami akan meningkatkan tentang audit kinerja termasuk tentang audit tujuan tertentu. Hanya ini permasalahannya Pak, kenapa kok hasil pemeriksaan BPK tidak dilanjutkan. Pengalaman kami di Kejaksaan Agung temuan tentang penyimpangan atau diduga kerugian negara itu banyak Pak. pertama, hasil audit BPK melalui audit investigative. Kedua, dari aparat penegak hukum melalui laporan masyarakat, proses penyelidikan sampai penyidikan. Disitulah ditentukan ada bukti kerugian kita ekspose dengan BPK.

Ternyata pada saat kita ekspose, BPK tanya niatnya karena bukan wewenangnya. Dia tanya ....(suara tidak jelas)... Kepada kita aparat hukum, jadi disinilah biasanya terjadi benturan Pak, sehingga hasil laporan tadi tidak bisa langsung ditemui, ini pengalaman kami. Jadi BPK masuk ranah hukum, dia langsung merasakan apa permintaan aparat penegak hukum. Maka itu, saya minta mungkin pada suatu saat memanggil kepada Anggota BPK sebaiknya diinformasikan bahwa BPK tidak masuk masalah hukum, tapi dia tugasnya adalah



mengaudit. Begitu ada data dari APH mesinya dia langsung audit. Disini terjadi perdebatan Pak, akhirnya tidak diaudit itu. Itu mungkin Bapak yang bisa menterjenahkan itu.

Kemudian Pasal 13 tadi Pak, tentunya memang setiap hasil temuan BPK itu kita tindaklanjuti melalui proses penyelidikan, penyidikan dan penuntutan, karena hasil audit BPK itu masih diduga kerugian negara. Walaupun sudah ada surat penetapan kerugian negara tetapi ini masih diduga, kita lakukan proses penyelidikan. Disitulah setelah kita lakukan penyelidikan kita lakukan analisa, kita buat anatomi hukum, konstruksi hukum, baru ketahuan disitu ada unsur kerugian keuangan negara, disitu baru kita lakukan proses penyidikan menjadi tersangka. Hanya permasalahannya disini timbul masalah BPK ini melanggar Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2017 Pak, melanggar BPK ini tolong disampaikan kepada BPK. Disana diatur bahwa setiap kita melakukan audit investigative, auditor BPK wajib konfirmasi kepada audity, ini tidak dilakukan ini. Tidak ada konfirmasi, tidak ada interaksi, sehingga alasannya kerahasiaan negara. Sehingga orang yang merasa diduga ini tidak ditanya kenapa, jadi hanya sepihak. Nah, disini permasalahannya kita bawa ke pengadilan disitulah kelemahan kita ketahuan.

Saya rasa sekian Pak, terima kasih.

#### **KETUA RAPAT:**

Tepuk tangan untuk Dr. Soemardjijo.

#### **F-P. HANURA (ERIK ADTRAD RITONGA):**

Sedikit Pimpinan.

Tanya sedikit saja ini, Dr. Soemardjijo tadi paparannya sangat menarik. Saya pikir banyak hal yang terjadi sekarang bahwasanya apabila sudah diaudit BPK tetapi masih juga aparat penegak hukum memeriksa kembali. Bagaimana pendapat Bapak seandainya nanti Bapak terpilih, yang sudah diaudit BPK itu tidak ada tercantum kerugian negara, tetapi aparat penegak hukum tetap melanjutkan pemeriksaan untuk ada kerugian negara.

Terima kasih.

#### **CALON ANGGOTA BPK RI (Dr. SOEMARDJIJO, S.E., Ak., C.A.):**

Terima kasih Pak.

Ini pengalaman kami di Kejaksaan Agung Pak, tetapi saya tidak akan sampaikan kasusnya. Disitu sudah diaudit kemudian BPK memberikan opini WTP, satu BUMN ini. Begitu ada pengaduan masyarakat ada laporan, ada namanya whistleblower, ada peniup terompet. Kemuaian APH terjun kelapangan kita sikat dokumen, kita periksa-periksa, ternyata disitu ada *froud*, tetapi BPK tidak menemukan, karena mereka sampling Pak, walaupun investigative mereka

sampling. Dan kadang-kadang antara audity dengan pihak BPK kadang-kadang juga main mata Pak, mana dokumen yang mesti dikasih ini Pak.

Kemudian pada saat kita memeriksa kita sita dokumen Pak, pada saat kita sita kita temukan ternyata ada *froud*. Nah, kita lakukan proses penyidikan kita ekspose kepada BPK, BPK audit investigative, ternyata betul ternyata ada kerugian negara. Jadi tidak semua hasil BPK ini ada kerugian negara, tapi bisa jadi aparat penegak hukum masuk ada kerugian negara Pak.

**F-P. HANURA (ERIK ADTRAD RITONGA):**

Yang saya tanyakan tadi bukan sampling, BPK sudah masuk tidak ada disitu kerugian negara akan tetapi aparat hukum tetapi masuk, bagaimana itu Pak.

**CALON ANGGOTA BPK RI (Dr. SOEMARDJIJO, S.E., Ak., C.A.):**

Iya Pak, saya katakan tadi pada saat pertama melakukan audit laporan keuangan, kemudian diduga ada *froud*. Kemudian sepakat diterbitkan surat audit investigative, khusus ini Pak. BPK membentuk auditor untuk melakukan audit investigative, diaudit ternyata BPK tidak menemukan Pak, karena disitu ada dokumen-dokumen yang tidak diinformasikan kepada BPK kerugian ini Pak. Transaksi-transaksinya tidak disampaikan, ternyata begitu aparat penegak hukum masuk disita, seluruhnya kita sita dan kita baca ternyata ada transaksi disitu yang BPK tidak temukan. Disitu Pak, permasalahannya Pak.

**KETUA RAPAT:**

Cukup paham ya Pak Erik, nanti dilanjutkan diskusinya sendiri berdua.  
Baik, sekali lagi terima kasih kepada Dr. Soemardjijo.  
Kami persilakan Bapak untuk meninggalkan tempat, rapat saya skors 3 menit.

**(RAPAT DISKORS)**

**Para Anggota Komisi XI DPR RI yang saya hormati,  
Saudara Ir. Yves S. Palambang yang saya hormati.**

Anda mengikuti fit and propertest Calon BPK RI tahun periode 2019-2024, kami akan berikan waktu yang sama 45 menit. Sekarang jam di ruangan ini menunjukkan jam 19.55 WIB jadi waktu Bapak adalah 45 menit dari sekarang.  
Saya persilakan.

## **CALON ANGGOTA BPK RI (Ir. YVES S. PALAMBANG):**

Terima kasih Bapak Ketua.

### **Bapak Ketua dan Anggota Komisi XI DPR RI yang saya hormati.**

Terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk fit and propertest pada kami.

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Puji dan syukur kepada kita semua, perkenankanlah kami ingin memaparkan mengenai presentasi materi makalah kami secara singkat, yaitu bisa ditampilkan di dalam slide itu kita lihat bahwa kenapa saya mengambil dari gambar ini karena BPK sebagai badan lembaga tinggi negara khususnya di BPK harus bergerak cepat. Inilah gambar yang saya tampilkan.

Selanjutnya slide berikutnya, ini peranan BPK dalam mendorong tercapainya tujuan negara terkait pemeriksaan dan pengelolaan keuangan negara. Ini adalah judul dari makalah saya. Selanjutnya, disini visi dan misi BPK dan tujuan negara, itu didasarkan dari amanat Undang-Undang Dasar 1945 bahwa disini BPK ditugaskan memeriksa pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara. Ini didasarkan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 mengenai Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 mengenai Perbendaharaan Negara, serta didukung oleh Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Tanggungjawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

Visi daripada BPK adalah menjadi lembaga keuangan negara yang kredible, menjunjung tinggi nilai-nilai dasar, berperan aktif mendorong terwujudnya tata kelola keuangan negara, akuntable dan transparan. Diharapkan dengan itu didapatkan tema dan fokus pemeriksaan sehingga tercapai misinya, yaitu memeriksa, mengolah keuangan negara, memberikan pendapat, mutu pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara serta berperan aktif menemukan dan mencegah penyalagunaan keuangan negara. Hal ini untuk mencapai sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu mencapai tujuan negara yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang menjalankan Pemerintahan yang terpilih sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945, sehingga tercapailah tujuan Nawacita negara kita yang diharapkan, yaitu prioritas jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik serta mandiri dalam bidang ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan.

Rencana ini supaya mendukung daripada rencana pembangunan jangka menengah 2019-2024 untuk Pemerintah terpilih yang sekarang ini. Disini kita lihat ada korelasi pemeriksaan BPK dengan upaya pencapaian tujuan negara melalui implementasi program laporan Pemerintah. 3 program wajib yaitu pendidikan, SDM yang didukung dengan kesehatan, penanggulangan kemiskinan. 4 program prioritas

lainnya, yaitu ketahanan pangan yang saat ini kita mengalami kekeringan, saya yakin dengan Pemerintah yang sekarang akan memberikan fokus kepada ketahanan pangan. Ketahanan energi yang sekarang perlu penambahan energi karena energi investasi masuk ke dalam Indonesia ini akan diperiode 2019-2024 akan menjadi lebih besar, sehingga perlu pada penambahan energi terutama energi baru dan terbarukan. Kayak di Amerika itu ada pengembangan energi tenaga angin dan tenaga surya, kita agak kekurangan disitu. Kemudian adalah kemaritiman dan kelautan, dan didukung dengan infrastruktur.

Satu dukungan program yang terakhir adalah reformasi birokrasi. Dari ini slide selanjutnya, kita bisa lihat bahwa visi BPK menjadi badan pemeriksa keuangan negara yang kredible dengan menjunjung tinggi nilai-nilai dasar untuk berperan aktif dalam mendorong terwujudnya tata kelola keuangan negara, akuntable, dan transparan. Hal ini bisa dicapai dengan dukungan misi, yaitu memeriksa pengelolaan, tanggungjawab keuangan negara. Dua, memberikan pendapat untuk meningkatkan mutu pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara dan berperan aktif dalam menemukan dan mencegah segala bentuk penyalagunaan dan penyelewengan keuangan negara.

Hal ini juga didukung supaya tercapainya misi ini, tujuan strategis satu, dua dan tiga. Tujuan strategis satu mendorong terwujudnya pengelolaan keuangan negara dengan tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, ekonomi, efisien, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Tujuan strategis dua, mewujudkan pemeriksaan yang bermutu untuk menghasilkan laporan hasil pemeriksaan yang bermanfaat sesuai dengan kebutuhan pemangku kepentingan. Tujuan strategis tiga, mewujudkan birokrasi yang modern di BPK.

Hal ini bisa dicapai karena di dalam pencapaian itu selalu mengalami tantangan dalam pencapaian tujuan negara, yaitu tantangan dalam implementasi program-program Pemerintah, kordinasi antara kementerian atau lembaga lemah yang harus kita tangani, basis data nasional belum lengkap, perencanaan lemah dan komitmen tata kelola rendah.

Tantangan prioritas ini terdiri dari pendidikan, sarana dan prasarana, akses belum sempurna, jaminan kesehatan, data peserta, jaminan sosial defisit, kemandirian ekonomi, impor selalu lebih besar daripada ekspor, beban subsidi dihapuskan terutama subsidi di bidang yang dibutuhkan oleh masyarakat rendah yang membutuhkan itu dihapuskan, sehingga ada ketimpangan pergerakan ekonomi, ketahanan energi, belum dikembangkannya pembangkit listrik tenaga surya dan pembangkit listrik tenaga angin seperti Amerika dan Eropa sebagai pengembangan energi terbarukan.

Dana desa, penyimpangan, pengelolaan, dan pertanggungjawabannya belum transparan. BUMN belum dikelola optimal sehingga holding masih belum diperbanyak sesuai dengan kebutuhan. Penerimaan pajak target tidak tercapai, tax ratio juga belum mencapai terlalu rendah. Tata kelola pemerintahan lemah, persoalan hukum, pejabat publik, permasalahan *cost recovery* dan *lifting*.

Selanjutnya, jadi untuk mencapai tujuan visi dan misi BPK bisa kita lihat dari model maturities organisasi bahwa untuk mencapai target-target itu kita harus memiliki 3 *landasan oversight, insight, foresight*. Untuk *oversight* itu mendorong upaya pemberantasan korupsi, kemudian naik ke atas meningkatkan transparansi, kemudian naik lagi menjamin tertata laksananya akuntabilitas pemeriksaan, pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara, meningkatkan ekonomi, efisien, etika, nilai keadilan dan ketertiban dalam pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara.

Disisi *insight*, target yang harus dilaksanakan yaitu mendalami kebijakan dan masalah publik dalam pemeriksaan, pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara. Disisi *foresight* yang harus dilaksanakan oleh BPK adalah membantu masyarakat dan pengambil keputusan untuk memilih alternative masa depan.

Selanjutnya, BPK berperan sebagai pendorong pencapaian tujuan negara, akses ke Kementerian dan Lembaga, Pemda harus tetap dilaksanakan, BUMN dan badan-badan lain untuk terjadinya transparan dan sinergi dan lintas sectoral. Hal ini dilakukan karena sesuai dengan mandat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 serta Undang-Undang pendukung dari BPK dan didukung oleh peraturan BPK itu sendiri. Data base lengkap terkait dengan tugas dan fungsi Pemerintah hasil pemeriksaan, sehingga keempat bagian itu akan mendukung menimbulkan masalah lintas sectoral.

Berikutnya, mengenai perekonomian dan keuangan negara, lintas dimensi, pembangunan ekonomi makro difokuskan kepada pendidikan, kesehatan, kependudukan, keluarga berencana, mental karakter. Terutama mental dan karakter kita harus ditingkatkan, karena itu korelasi daripada Badan Pemeriksa Keuangan dengan KPK. Kemudian ketersediaan pangan perlu ditingkatkan karena kita untuk ketahanan negara kita perlu adanya ketersediaan pangan sehingga ketahanan pangan kita harus ditingkatkan. Ketersediaan energi terutama ketenagalistrikan perlu ditingkatkan karena investasi untuk menyambut investasi yang masuk.

Kemaritiman dan kelautan harus digalakkan, ditingkatkan dalam regulasinya, terutama kepada pihak-pihak asing yang mengambil kekayaan alam kita di laut. Didukung dengan hukum dan Undang-Undang yang berlaku untuk penegakan hukum. Kemudian pembangunan kewilayahan perlu diperjelas sehingga wilayah kita tetap kuat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang didasarkan oleh Pancasila dan Kebhinekaan Tunggal Ika. Kemudian pemerataan pembangunan, pemerataan pembangunan harus dilaksanakan dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote.

Slide selanjutnya, BPK kedepan yang dilakukan adalah pemeriksaan internal, peningkatan pengelolaan strategi pemeriksaan, pemeriksaan tugas dan fungsi, pemeriksaan *on call*, tema dan fokus pemeriksaan selaras RPJMN, rencana pembangunan jangka menengah nasional 2019 terutama sampai 2024, peningkatan kualitas penugasan pemeriksaan, quality control, quality insurance, pengembangan kapasitas pemeriksa, insentif LHP dan berkualitas, kemudian pemeriksaan kualitas kelembagaan, reformasi dan birokrasi, penyusunan produk hukum, dan pemanfaatan teknologi informasi, mainset, proses bisnis, analisis big data.

Kemudian dari situ semua akan dilakukan pemeriksaan berkualitas dan bermanfaat untuk pencapaian tujuan negara dan tujuan nasional, yaitu masyarakat Indonesia yang adil dan makmur sesuai berdasarkan Pancasila.

Hal itu bisa tercapai pemeriksaan berkualitas dan manfaat dengan pembenahan eksternal. Pembenahan eksternal yaitu dengan pelatihan training auditor kepada setiap Anggota BPK terpilih. Jadi untuk meningkatkan kualitas keahliannya, meningkatkan hubungan eksternal dengan DPR RI dan DPD RI, masyarakat termasuk organisasi, profesi, media, APH dan negara lain.

Sekian dan terima kasih presentasi kami.

**KETUA RAPAT:**

Baik, terima kasih Bapak Yves Palambang sudah menyampaikan paparannya. Silakan dari sayab kiri dulu Bapak Purnamasidi.

**F-PG (H.M. NUR PURNAMASIDI):**

Terima kasih Pimpinan.

**Pimpinan dan Anggota Komisi XI DPR RI yang saya hormati,  
Bapak Ir. Yves S Palambang yang saya hormati.**

Terima kasih atas paparannya, singkat saja Pak, menurut Bapak kalau diskors 1 sampai 10 sekarang sebenarnya posisi kinerja BPK itu diangka berapa Pak. kira-kira faktor yang paling lemah hari ini di BPK itu apa, terus kemudian langkah awal ketika nanti Bapak terpilih jadi Anggota BPK, langkah awal yang mau dilakukan itu kira-kira apa.

Saya pikir itu saja Pimpinan.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Terima kasih Pak Purnamasidi.

Selanjutnya silakan sayab kanan Dr. Achmad Hatari.

**F-P. NASDEM (Dr. ACHMAD HATRAI, S.E., M.Si.):**

Terima kasih Pimpinan.

Pak Lambang, prosentase tindak lanjut Bapak mengatakan angka sudah 5 tahun yang lalu tidak relevan lagi atau pada tahun 2014 dengan skors 50-60% dari tindaklanjut. 5 tahun terakhir angka ini sudah meroket, jadi Bapak pakai datanya sudah terlalu lama sudah tidak relevan lagi. Bapak lihat di halaman 15 ini ya, skoringnya beda terlalu jauh.

Itu saja Pak.

**KETUA RAPAT:**

Terima kasih.

Selanjutnya silakan Dr. Felicitas Tallulembang.

**F-P. GERINDRA (Dr. FELICITAS TALLULEMBANG):**

Terima kasih Ketua.

**Teman-teman dari Komisi XI DPR RI, Bapak Ir. Yves S Pallambang.**

Kalau saya melihat pemaparan Bapak banyak berbicara tentang fisik dan sebagainya, kerugian negara dan sebagainya. Saya Cuma ingin bertanya satu hal saja kepada Bapak, seandainya Bapak terpilih sebagai di BPK ini kira-kira fungsi Bapak pada posisi sebagai insinyur dan saya lihat Bapak berkecukupan banyak dalam fisik. Kira-kira apa yang akan Bapak perbaiki untuk BPK kedepan di dalam komitmen Bapak kepada masyarakat.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Terima kasih Ibu.

Silakan selanjutnya Bapak Sudiro.

**F-P. HANURA (Drs. SUDIRO ASNO):**

Terima kasih Pimpinan.

**Yang saya hormati Pimpinan dan teman-teman Anggota Komisi XI DPR RI.**

Maaf, sebelum lanjut Bapak dipanggilnya Yves atau apa? Yves ya supaya tidak salah panggil ya.

Pertama, saya ingin menanyakan ini judul paparan atau judul makalahnya adalah peranan BPK dalam mendorong tercapainya tujuan bernegara terkait dengan pemeriksaan dan pengelolaan keuangan negara. Menurut saudara apakah BPK sudah berperan untuk mencapai tujuan negara dalam pemeriksaan dan pengelolaan keuangan negara, kalau belum kira-kira bagaimana supaya BPK ini berperan. Itu pertanyaan saya, karena judulnya itu ya dan karena saya tidak melihat di halaman terakhir kesimpulan itu, nyampe tidak tujuannya itu.

Kedua, saudara juga memaparkan panjang lebar tentang Renstra BPK RI yang ada sekarang ini. Ini menurut saudara sudah oke belum Renstra-nya ini, karena saya tidak melihat penilaian saudara tentang Renstra BPK yang ada. Jadi saudara hanya menyampaikan saja, jadi saudara seperti jadi kayak juru bicaranya BPK untuk menyampaikan Renstra kepada Anggota Komisi XI DPR RI. Apakah

sudah oke, kalau belum bagaimana supaya Renstra ini efektif sehingga menuju atau mendorong atau mendukung judul makalah yang saudara paparkan, yaitu mencapai tujuan negara terkait dengan pemeriksaan dan keuangan negara tadi. Ketiga, sebetulnya apa sih motivasi anda ingin menjadi Anggota BPK RI.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Terima kasih Pak Sudiro.  
Silakan Ibu Indah Kurnia.

**F-PDIP (INDAH KURNIA):**

Terima kasih Pimpinan.

**Pimpinan, Bapak dan Ibu Anggota Komisi XI DPR RI yang saya hormati,  
Bapak Yves Pallambang yang saya hormati.**

Saya tergerak untuk ikut mengajukan pertanyaan kepada Bapak setelah membaca CV Bapak adalah kader PDI Perjuangan. Kali ini saya ingin menanyakan kepada Bapak Yves, jika Tuhan mengijinkan dan mayoritas dari kami memilih anda untuk menjadi salah satu Anggota BPK. Di pemaparan Bapak tentang yang untuk mengukur pengembangan kapasitas BPK, Intosai mengembangkan satu model maturity organisasi tentang akuntability, ada *oversight*, *insight*, *foresight*. Menurut kami saat ini BPK kan di-*oversight* saja baru mungkin sampai ketahapan yang ketiga, yaitu menjamin terlaksananya akuntability. Jika Bapak terpilih nanti apa yang Bapak bisa lakukan untuk bisa membawa BPK ke posisi paling tidak target minimal ke *oversight* yang paling maksimal, yaitu meningkatkan ekonomi, efisiensi, etika, nilai keadilan dan keefektifan.

Terima kasih Pimpinan.

**KETUA RAPAT:**

Terima kasih Ibu Indah.  
Silakan Bapak Yves Pallambang untuk merespon dari 5 pertanyaan yang sudah disampaikan.

**CALON ANGGOTA BPK RI (Ir. YVES S. PALAMBANG):**

Terima kasih yang mulia Ketua.



**Para Anggota Komisi XI DPR RI yang saya hormati.**

Saya mencoba menanggapi pertanyaan yang pertama, boleh diulang dari Bapak Purnamasidi.

**F-PG (H.M. NUR PURNAMASIDI):**

Antara 1 sampai 10 hari ini sebenarnya posisi BPK itu kinerjanya di angka berapa Pak. Yang menyebabkan seperti itu apa dan kalau Bapak terpilih kira-kira langkah pertama yang mau dilakukan itu apa.

Terima kasih.

**CALON ANGGOTA BPK RI (Ir. YVES S. PALAMBANG):**

Terima kasih Bapak Purnamasidi, saya akan mencoba menanggapi pertanyaan Bapak. Posisi BPK sekarang ini BPK diangka berapa posisinya terkait dengan pemeriksaan dan pengelolaan negara, termasuk keuangan negara, itu di posisi antara 80-90. Karena kondisi sekarang sudah cukup bagus tinggal diperbaiki lagi untuk tahapan pemeriksaan dan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara. Langkah-langkah apa yang dipilih untuk melakukan itu, itu untuk meningkatkan sistem audit, internal, eskternal dan transparansi, akuntabilitas, dan credible dan perlu ada komunikasi lintas sectoral, koordinasi lintas sectoral dalam hal pemeriksaan dan pengelolaan keuangan negara termasuk perbendaharaan keuangan negara.

Dan langkah pertama yang saya lakukan jika saya diberikan kesempatan jadi Anggota BPK, ya sesuai dengan langkah-langkahnya yaitu pertama saya mendorong upaya dari *oversight* itu mendorong yang sudah, mendorong upaya pemberantasan korupsi, jadi kordinasi dengan pihak lembaga negara yang lain. Karena di dalam Undang-Undang BPK, hasil pemeriksaan audit BPK harus dikordinasikan dengan pihak lembaga negara seperti KPK. Kemudian dari hal itu saya akan tingkatkan transparansi dalam hal pemeriksaan, pengelolaan, kordinasi dan termasuk audit.

Kemudian dari itu yang sudah dicapai mencapai terlaksananya akuntabilitas, sehingga kalau bisa kita mencapai meningkatkan ekonomi, efisiensi, etika, nilai keadilan, dan keefektifan. Nah, itu yang saya ini dan sekali lagi kalau saya diberikan kesempatan menjadi Anggota BPK saya akan mencapai *insight*, yaitu mendalami kebijakan dan masalah publik dengan arif dan bijak sesuai dengan regulasi Undang-Undang yang berlaku melalui pengawasan-pengawasan internal BPK maupun internal Pemerintahan. Jadi keputusn itu dengan kebijaksana, karena pengambilan keputusan kadang-kadang banyak yang dirugikan. Nah, saya tidak mau seperti itu, saya ingin memberikan kesempatan yang seadil-adilnya karena setiap manusia mempunyai kebenaran yang harus kita bela, jadi tidak semua harus dipersalahkan.

Pertanyaan kedua dari Ibu Felicitas, seandainya terpilih jadi Anggota BPK RI apa yang harus diperbaiki di BPK. Sistem yang harus diperbaiki di BPK sebenarnya

banyak ya, yaitu mengenai pemeriksaan internal pun harus kita tingkatkan. Kemudian peningkatan kualitas, penugasan pemeriksaan pun harus kita tingkatkan pemeriksaan kualitas kelembagaan, kordinasi antara kelembagaan, kordinasi antara kelembagaan yang terkait di bidang keuangan pun harus ditingkatkan dan harus transparansi, dijalin kerja sama dalam bentuk transparansi akuntabilitas dan audit yang sempurna antar dan dilaporkan secara terbuka kepada masyarakat dan Pemerintah.

Kemudian pemeriksaan harus dilakukan berkualitas dan bermanfaat dengan mempertimbangkan asas transparansi dan akuntabilitas dari hasil pemeriksaan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada Pemerintah. Meningkatkan hubungan eksternal dengan pihak DPR RI dan juga DPD RI, masyarakat termasuk kordinasi profesi, supaya ada peningkatan kerja sama dan nilai tambah daripada kualitas dan kerja sama dalam bidang audit.

Dan kalau saya terpilih jadi Anggota BPK, apa yang sudah baik dicapai oleh BPK jadi saya akan tetap melaksanakan dan tinggal melakukan penambahan *improvement* sehingga BPK bisa sebagai lembaga yang terintegrasi dengan lembaga lain dan transparan dan independent tidak berat sebelah, tidak cenderung untuk memihak pada satu lembaga tertentu. Itu yang akan saya lakukan.

Untuk Bapak Sudiro, pertanyaannya dan Bapak Achmad Hatari tentang halaman 15 ada data yang sudah lama. Maaf Pak, terima kasih atas koreksinya Pak, ini data lama ini sudah naik ini, sudah sekitar 70%-80%. Terima kasih atas masukannya Pak.

Dari Bapak Sudiro, apakah BPK sudah berperan dalam pencapaian tujuan negara dalam Renstra BPK RI oke atau belum, bagaimana cara memotivasi atau memperbaikinya. Apakah BPK sudah berperan dalam pencapaian tujuan negara. Iya, sampai saat ini sudah mencapai dalam usaha pencapaian sudah memenuhi untuk mencapai pencapaian tujuan negara akan tetapi perlu ditingkatkan, jadi perlu diperbaiki, perlu ditambah, di-*improvement* dan perlu ditingkatkan, itu yang saya kira dengan kondisi yang ada kita perlu segala kekuatan BPK harus kita dorong dari segi audit internal, eksternal, pelatihan, training dan kerjasama antara lembaga, kordinasi antar pemeriksa, kordinasi penugasan, dan kordinasi kelembagaan dan segala macam.

Penilaian Renstra BPK RI, apa sudah oke atau belum dan bagaimana caranya ini. Untuk Renstra BPK RI ini saya kira sudah hampir memenuhi standarnya sehingga hanya perlu ditingkatkan sesuai fakta dilapangan selama pelaksanaan pembangunan jangka menengah nasional 2014-2019 perlu digali lagi, sehingga nanti penerapannya diimplementasikan ke RPJMN 2019-2024 sehingga mendukung program strategis Pemerintah yang terpilih sekarang ini tidak lagi diluar *track* daripada BPK jadi berkaitan, sehingga BPK memberikan masukan kepada Presiden sehingga Pemerintah bisa mengambil langkah-langkah apa yang kurang yang sebelumnya di RPJMN 2014-2019, sehingga apa yang lalu bisa diperbaiki secepatnya sehingga Indonesia bisa tinggal landas sesuai dengan tujuan nasional kita mencapai masyarakat Indonesia yang adil dan makmur di seluruh bidang, termasuk pendidikan dan kesehatan.

Apa motivasi saya untuk menjadi Anggota BPK, motivasi saya ingin menjadi Anggota BPK jika saya diberikan kesempatan dengan rendah hati saya ingin memperbaiki BPK, ingin memajukan BPK dan berperan aktif dalam kelembagaan negara supaya lembaga negara bisa menjadi kordinasi dengan baik antara BPK dengan DPR RI, DPD, Presiden dan lembaga negara yang lain. Sehingga tugas-tugas yang lain supaya bisa diselesaikan dengan baik, dengan bijak dan transparan.

Pertanyaan yang keempat kepada Ibu Indah, untuk mengukur model maturity oversight menjamin tercapainya.

**F-PDIP (INDAH KURNIA):**

Sudah terjawab tadi Pak, pada saat Bapak menjawab Bapak Michael Jenotadi Bapak sudah sampaikan bahwa Bapak ingin mencapai BPK pada posisi *insight*.

**KETUA RAPAT:**

Cukup?

**CALON ANGGOTA BPK RI (Ir. YVES S. PALAMBANG):**

Terima kasih Pak.

**KETUA RAPAT:**

**Bapak dan Ibu yang terhormat.**

Demikianlah tadi jawaban dari saudara Yves S Palambang. Sebelum meninggalkan tempat ini saya persilakan kepada Bapak untuk berkampanye setengah menit saja. Kenapa Komisi XI DPR RI harus memilih saudara.

**CALON ANGGOTA BPK RI (Ir. YVES S. PALAMBANG):**

Terima kasih Bapak Ketua.

**Pimpinan dan Anggota Komisi XI DPR RI yang saya hormati.**

Kenapa Komisi XI DPR RI harus memilih saya, karena saya orangnya kerja keras, loyalitas, mengabdikan, dan mempunyai motivasi, kebijakan, dan mempunyai naluri kebijakan yang transparan dan mementingkan kebijakan-kebijakan yang lebih bijaksana dan pandangan dari kasus-kasus daripada yang akan kita tangani harus lebih bijaksana. Jadi tidak semua harus kita lakukan dan kita sesuaikan tetapi kita harus tetap menyesuaikan secara hati-hati.

Terima kasih.

## **KETUA RAPAT:**

Kita berikan applause untuk Bapak Palambang, terima kasih Bapak bisa meninggalkan tempat dan rapat saya skors 3 menit.

### **(RAPAT DISKORS)**

#### **Yang terhormat saudara Mohammad Sofie Abdul Hasan.**

Kandidat calon Anggota BPK RI periode 2019-2024 yang akan mengikuti uji kelayakan dan kepatutan pada malam hari ini. Waktu Bapak sama 45 menit dari sekarang untuk menyampaikan paparan dan juga pendalaman oleh Anggota Komisi XI DPR RI. Sekarang jam diruangan ini menunjukkan pukul 20.35 WIB, waktu Bapak adalah 45 menit dari sekarang.

Saya persilakan.

#### **CALON ANGGOTA BPK RI (M. SOFIE ABDUL HASAN):**

Terima kasih Bapak Pimpinan.

#### **Pimpinan, Bapak dan Ibu Anggota Komisi XI DPR RI yang terhormat.**

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,*

**Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua.**

Pertama-tama saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu, nama saya Mohammad Sofie Abdul Hasan. Saat ini saya dari swasta, namun memiliki pengalaman di BUMN dan selama 28 tahun yang terakhir saya sebagai Direktur di Bio Farma maupun perusahaan pembiayaan maritime. Dan pada tahun 2002 sampai 2005 saya dipercaya oleh Pemerintah untuk mewakili Pemerintah di Asean Development Bank sebagai Project Direktur untuk small medium interprice export development project yang pada saat itu di Manila.

#### **Bapak dan Ibu sekalian.**

Perkenalkan saya ingin menyampaikan presentasi pada malam hari ini dengan judul peningkatan fungsi dan peran BPK dalam audit keuangan negara. Visi saya dalam peningkatan fungsi ini adalah menjadikan BPK sebagai badan pemeriksa bertaraf internasional. Misinya melakukan proses pemeriksaan yang efektif dan efisien yang bebas dan mandiri sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang. Kemudian juga melakukan proses pemeriksaan sesuai dengan standar pemeriksaan yang bertaraf dunia.

## **Bapak dan Ibu sekalian.**

Sebagaimana makalah yang sudah kami sampaikan kepada Bapak dan Ibu sekalian, kami menyampaikan bahwa kondisi saat ini ada tuntutan masyarakat dimana tuntutan masyarakat itu menginginkan adanya transparansi di dalam pengelolaan keuangan negara. Oleh karena itu, proses *check and balances* juga diharapkan dapat dilaksanakan secara transparan.

Kemudian tinjauan umum, pemeriksaan BPK sendiri telah melakukan proses pemeriksaan sebagaimana mestinya. Ini saya singkat saja, bahwa terdapat laporan hasil pemeriksaan dari BPK kita tahu banyak sekali yang sudah dilakukan oleh BPK. Namun, khusus untuk hasil pemeriksaan yang terkait dengan tindak pidana atau ada indikasi tindak pidana itu yang disampaikan oleh BPK belum sepenuhnya ditindaklanjuti sebagaimana yang diharapkan.

Selanjutnya, tinjauan khusus. Rekomendasi yang disampaikan oleh BPK yang masih banyak ditindaklanjuti oleh pejabat yang wajib menindaklanjuti. Maksudnya ini adalah bukan yang dari Kepolisian maupun Kejaksaan akan tetapi dari pejabat yang diperiksa dari auditnya. Dari sini saya mengambil sedikit mengenai angka-angka mana yang ditindaklanjuti, mana yang belum ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi daripada BPK. Dari angka-angka yang disampaikan disitu dapat disimpulkan bahwa terdapat keuangan negara yang berpotensi yang menimbulkan kerugian yang masih belum ditindaklanjuti oleh audit yang nilainya cukup signifikan.

Dari apa yang kami sampaikan tadi kami menyampaikan konsep pemeriksaan pengelolaan data dan tanggungjawab keuangan negara. Yang pertama, konsep yang kami sampaikan kepada Bapak dan Ibu sekalian adalah, satu memperkuat peran BPK dengan kewenangan penyidikan, maksud saya tadi di awal saya sampaikan bahwa terdapat pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK, baik itu pemeriksaan untuk laporan keuangan, kinerja serta pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Adakalanya terdapat unsur-unsur pidana. Oleh karena itu, karena masih belum ditindaklanjuti oleh lembaga yang berwenang dalam hal ini lembaga hukum, kami mengusulkan untuk mendapatkan kewenangan jika dimungkinkan menambah kewenangan BPK untuk tindak penyidikan. Di mana ini sesungguhnya juga bukanlah sesuatu yang baru.

## **Bapak dan Ibu sekalian.**

Sesuai dengan Undang-Undang OJK juga memberikan kewenangan kepada OJK untuk melakukan penyidikan sesuai dengan aturan. Oleh karena itu, kami juga mengusulkan kiranya BPK karena dapat diberikan kewenangan itu.

Selanjutnya adalah meningkatkan lingkup pemeriksaan BPK, kita mengetahui bahwa pemeriksaan keuangan, kinerja, dan pemeriksaan tujuan tertentu sudah dilakukan oleh BPK. Khusus untuk pemeriksaan kinerja kita juga sudah tahu pula apa yang sudah dihasilkan oleh BPK. Namun, satu hal yang kami inginkan atau kami usulkan adalah pemeriksaan itu juga meliputi proses bisnis. Jadi supaya ketahuan

titik-titik dimana dari awal sampai akhir daripada satu proses itu pengelolaan keuangan negara dapat diketahui khususnya pada perusahaan BUMN dan BUMD.

Selanjutnya, meningkatkan kualitas pemeriksaan dengan menambah tenaga ahli. Kita mengetahui bahwa perkembangan bisnis khususnya pengelolaan keuangan negara juga itu semakin pesat dan banyak hal-hal yang baru. Oleh karena itu, kami usulkan disini di mana di dalam Undang-Undang BPK juga mempunyai kewenangan untuk mendapatkan tenaga ahli agar bisa memeriksa atas nama BOK, tapi ini kita perlu menambahkan supaya BPK tidak ketinggalan dalam melakukan pemeriksaan sesuai dengan perkembangan jaman.

Selanjutnya adalah mengenai kearifan professional dan kearifan nasional. Ini sebenarnya terkait dengan masalah integritas kami menginginkan juga ini kembali lagi bahwa ada komitmen professional yang harus selalu ditingkatkan bagi para auditor termasuk auditor utama. Kemudian selanjutnya adalah kearifan nasional di mana disini untuk kepentingan nasional merupakan segala-galanya untuk dimunculkan tanpa harus mengorbankan aspek yang terkait dengan tugas dan fungsi BPK.

Itu yang kira-kira yang kami sampaikan, adapun untuk komitmen kami pada saat nanti sekiranya dapat dipilih dari Anggota BPK, yaitu akan meningkatkan fungsi BPK sebagai pemeriksa bebas dan mandiri dan professional. Kemudian meningkatkan pelaksanaan fungsi BPK yang efektif, ekonomis dan efisien. Dan jika saya terpilih tentu saya akan melaksanakan sumpah yang sudah diatur di dalam pasal 16 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006.

Sedikit saya tambahkan proses bisnis kebetulan ini di Komisi XI DPR RI. Saya menginginkan bahwa sebagaimana saya sampaikan di dalam makalah, bahwa proses bisnis ini harus dilakukan dari awal sampai akhir khususnya disini saya ambilkan salah satu contoh adalah pemeriksaan terhadap BUMN yang mana kita tahu bahwa proses di BUMN itu kalau kita melihat diperbankan khususnya itu sebenarnya ada proses yang barangkali masih belum dilakukan pemeriksaan secara efektif dan efisien, termasuk mengenai pengelolaan kredit. Kita tahu bahwa Bapak-bapak juga mungkin sudah mengetahui secara seksama bahwa kita ada 3 bank Pemerintah yang sudah dihapus bukuan bukan kredit macetnya Pak, kredit yang sudah dihapus bukuan itu kurang lebih dalam 5 tahun hampir 100 triliun yang ini kita tidak tahu *recovery rate*-nya berapa sehingga tentu ini akan sangat berpotensi untuk ruginya keuangan negara itu. termasuk di lembaga yang saat ini juga dibawah pengawasan Bapak dan Ibu sekalian, yaitu Lembaga Pembiayaan Ekspor yang ruginya cukup besar, kredit macetnya cukup besar. Kebetulan saya adalah Anggota tim Pendiri Bank Ekspor Indonesia dulu Pak, ketika berubah menjadi LPEI yang Bapak sahkan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 saya sudah pergi menjadi Direktur di Bio Farma.

Barangkali itu yang ingin kami sampaikan kepada Bapak dan Ibu sekalian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Namun, jika ada yang diklarifikasi dan lain sebagainya kami persilakan.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Terima kasih Bapak Mohammad Sofie Abdul Hasan.

Selanjutnya kita lakukan pendalaman, dari sayab kanan silakan Ibu Tutik Kusuma Wardani.

**F-PD (TUTIK KUSUMA WARDANI, S.E., M.M.):**

Terima kasih Pimpinan atas waktunya.

**Bapak Mohammad Sofie Abdul Hasan yang saya hormati.**

Di dalam visi Bapak menyatakan menjadikan BPK sebagai badan pemeriksa bertaraf internasional. Kalau berbicara tentang penghitungan kerugian negara, bahwa hal ini sering menjadi polemik di dalam sidang perkara korupsi. Permasalahan yang kerap muncul lembaga mana sebenarnya paling berwenang menyatakan ada atau tidaknya kerugian negara. Padahal BPK dituntut untuk memberikan *outcome* yang sesuai dengan harapan kita bersama.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Terima kasih Ibu Tutik.

Silakan selanjutnya dari sayab kiri Bapak Sudiro Asno.

**F-P. HANURA (Drs. SUDIRO ASNO):**

Terima kasih Pimpinan.

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

**Pimpinan dan Anggota Komisi XI DPR RI yang saya hormati,  
Bapak Mohammad Sofie Abdul Hasan yang juga saya hormati.**

Mungkin dua pertanyaan saya Pak Sofie, pertama disini Bapak memaparkan ada katagori-katagori temuan yang saya pertanyakan mungkin yang 3 terakhir mungkin, tindaklanjut atau temuan yang belum sesuai dengan tindaklanjutnya belum sesuai dengan rekomendasi sebesar 94,81 triliun. Halaman 3 Pak, rekomendasi yang belum ditindaklanjuti sebesar 19,9 triliun. Rekomendasi yang tidak dapat ditindaklanjuti sebesar 16,91 triliun. Pertanyaan saya adalah inikan di 2015 sampai 2018 periodenya, kira-kira apa yang akan Bapak lakukan seandainya Bapak terpilih menjadi salah satu seorang BPK terhadap hal-hal ini, terutama yang butir B, C, D lebih khusus lagi yang butir D.

Yang kedua, Bapak menyatakan disini dan ini saya rasa sah-sah saja pada halaman 5 butir 4.1 memperkuat peran BPK dengan kewenangan penyidikan. Apa yang melatar belakangi Bapak sehingga BPK kemungkinan kewenangannya ditambah sampai kepada penyidikan. Apakah karena Bapak berpikir atau berpendapat bahwa lembaga-lembaga penegak hukum yang ada sekarang seperti Kepolisian, Kejaksaan dan KPK kurang cukup sehingga BPK pun perlu diberikan peluru atau senjata penyidikan. Apakah ini malah tidak tumpang tindih nantinya.

Itu Pimpinan pertanyaan saya dua saja.

Terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT:**

Terima kasih Bapak Sudiro.

Selanjutnya silakan Bapak Achmad Hatari.

**F-P. NASDEM (Dr. ACHMAD HATARI, S.E., M.Si.):**

Terima kasih Pimpinan.

**Bapak Mohammad Sofie Abdul Hasan.**

Kenapa LHP yang mengandung unsur pidana tidak diserahkan kepada aparat penegak hukum. Nanti kalau Bapak jadi Anggota BPK kondisi seperti ini sudah terpelihara bagaimana jadi ini BPK. Di halaman 4 itu, tidak diserahkan kepada aparat penegak hukum kalau itu ada unsur pidana.

Yang berikutnya di buku ini Pak, ini juga kita baru baca di Bapak punya ini ada hapus buku 3 bank BUMN. Komisi ini juga bermitra dengan OJK, Bapak mengatakan disini bahwa OJK sudah menyetujui hapus buku dengan nilai kurang lebih 90,6 triliun cukup besar. Kami bermitra dengan OJK dan sering melakukan FDG untuk kami nanti menanyakan kepada OJK, apa benar sajian Bapak di fit and propertest ini.

Kemudian yang terakhir dari saya Bapak Sofie, yang namana berpotensi belum tentu kerugian. Yang namanya berpotensi itu belum tentu kerugian secara definitive. Kita ambil contoh Rumah Sakit Sumber Waras, BPK bilang itu berpotensi tetapi KPK mengatakan itu sifatnya administrative. Dan persoalan itu sampai hari ini tidak berujung. Menurut Bapak bagaimana Pak, Bapak jelaskan dulu berpotensi dengan kerugian.

**KETUA RAPAT:**

Terima kasih Bapak Achmad Hatari.

Yang terakhir Bapak Michael Jenro.



**F-PDIP (Ir. G. MICHAEL JENO, M.M.):**

Terima kasih Pimpinan.

**Pimpinan dan rekan-rekan Anggota Komisi XI DPR RI yang saya banggakan.**

Bapak Sofie, kalau saya lihat sepintas ini Bapak ini lumayan pengalaman di BUMN. Pernah di Indo Farma, kemudian tadi di Bank LPEI, jadi saya mau tanya ke arah sana. Siapa tahu kalau Bapak terpilih ini bisa memperkaya di pemeriksaan untuk BUMN.

Di sini Bapak sampaikan pertama BPK itu kita semua tahu bahwa audit kinerja itu kan minimal, lebih banyak audit keuangan. Di sini Bapak mau menambahkan lagi katakanlah pemeriksaan terhadap proses bisnis. Bapak bisa detailkan lagi tidak Pak?

Nah, kemudian terkait dengan BUMN kita semua tahu bahwa sekarang terjadi BUMN nisasi, semua anggaran negara terutama yang karya-karya banyaklah. Ekonomi kita itu salah satu motor yang sekarang adalah BUMN, kemudian Bapak pernah di Bio Farma, Bio Farma hari ini juga menjadi holding dari industry farmasi, katakanlah seperti Kimiai Farma naik holdingnya di Bio Farma, sayang Bapak sudah tidak disana. Nah, pertanyaannya adalah dengan bahwa BUMN itu menjadi semakin dominan perannya untuk ekonomi kita dan kemudian ada holdingnisasi itu mencakup dana yang sedemikian besar, sementara kita tahu Undang-Undang BUMN kalau sudah lari ke cucuk sudah tidak bisa di-tresing itu Pak, Undang-Undang BUMN yang sekarang.

Nah, bagaimana itu kalau Bapak sudah di BPK sebagai auditor di BPK Bapak mensiasati praktek-praktek seperti ini seperti apa Pak, karena inikan menyangkut dana yang banyak, uang yang banyak.

Terima kasih Pimpinan.

**KETUA RAPAT:**

Terima kasih.

Silakan Pak Mohammad Sofie direspon.

**CALON ANGGOTA BPK RI (M. SOFIE ABDUL HASAN):**

Terima kasih.

Yang pertama, saya jawab pertanyaan daripada Ibu Tutik mengenai lembaga mana yang berwenang untuk menghitung kerugian negara. Dari yang selama ini kita lihat bahwa memang ada perbedaan pendapat dan lain sebagainya tapi menurut pendapat saya bahwa pemeriksa itu adalah untuk memeriksa termasuk mengenai kerugian negara adalah tetap di BPK. Kalau ada yang bilang bahwa ini di BPKP tetapi saya berpendapat mestinya untuk kerugian negara ini adalah tetap di BPK.

Kemudian yang kedua pertanyaan daripada Bapak Sudiro terkait dengan tadi mengenai status yang belum sesuai dengan rekomendasi, rekomendasi yang belum ditindaklanjuti dan rekomendasi yang tidak dapat ditindaklanjuti. Memang dari sini semua kan juga sudah ada aturannya Pak, bahwa auditi itu diberikan waktu 60 hari untuk memberikan tanggapan atas hasil pemeriksaan daripada BPK itu. Nah, sekiranya kami akan mendapatkan itu apa amanah atau Bapak pilih menjadi Anggota BPK, tentu akan kami ikuti sesuai dengan apa yang sudah ada selama ini.

Oleh karena itu, misalnya disini ya kita ingatkan, kita tegur misalkan tidak bisa kita kembalikan lagi atau kita laporkan kepada pihak yang berwenang. Nah, kemudian ini berkaitan juga dengan pertanyaan Bapak tadi bagaimana apakah tidak tumpang tindih jika nanti terkait dengan kewenangan yang diusulkan itu, kewenangan penyidikan yang butir 4.1 ini kepada BPK. Saya pikir tidak juga Pak, kenapa? Karena OJK sesuai dengan Undang-Undang juga Bapak berikan kewenangan untuk itu juga, bahwa OJK juga memiliki kewenangan untuk penyidikan, demikian pula pajak maupun polisi kehutanan. Masalah inikan nantinya masalah koordinasi saja Pak, tetapi apa latar belakang yang Bapak sebutkan mungkin iya betul, saya memiliki latar belakang barangkali hanya sini saja off the record. Bahwa ada temuan daripada BPK yang konkrit, yang sesuai dengan prosedur pemeriksaan yang baik kemudian sudah mengidentifikasi kerugian negara, kemudian siapa yang harus bertanggungjawab dan lain sebagainya tetapi ini kemudian dilaporkan kepada pihak berwajib dan hanya mungkin 10%, 15% saja yang ditindaklanjuti.

Saya nanti kalau mungkin saya akan bisa menunjukkan secara betul bahwa itu adalah kejadian yang real yang ada datanya, yang sampai sekarang juga tidak ditindaklanjuti sampai dengan tuntas. Hanya barangkali 10%-15% saja. nNnti pas keluar barangkali akan saya sampaikan kepada Bapak kasusnya apa. Kemudian kalau tadi tadi kembali lagi barangkali ini koordinasi barangkali tidak bisa tumpang tindih karena Polisi dengan KPK juga tidak tumpang tindih, juga ada bagian-bagian yang menjadi lingkup kewenangan masing-masing.

Kemudian kepada Bapak Hatari, yang tadi Bapak sampaikan ini saya tidak menyampaikan tidak diserahkan kepada pihak hukum, tidak Pak. Selama ini memang berlakunya sudah demikian, cuma saya mengusulkan diberikan kewenangan penyidikan kepada BPK supaya lebih efektif apa yang ditemukan oleh BPK itu bisa ditindaklanjuti dalam hal terjadi penyimpangan yang terkait dengan pidana, bukan tidak diserahkan Pak. Kami usulkan adalah ini proses penyidikan.

Kemudian apa benar tadi terkait dengan kredit yang dihapus bukukan, itu dari beberapa dari yang saya kumpulkan itu nilainya kurang lebih seperti itu Pak. Nanti barangkali Bapak juga bisa kroscek diluar daripada 2018, karena saya ambil dari yang lama-lama. Silakan Bapak cek ulang dari 3 bank BUMN yang besar diluar daripada BPN itu nilainya yang dihapus bukukan seperti itu.

**F-P. NASDEM (Dr. ACHMAD HATARI, S.E., M.Si.):**

Bapak Mohammad, saya tidak mempersoalkan angka, saya hanya mau tanya Bapak yang namana berpotensi dengan kerugian itu hal yang berbeda, sebab berpotensi belum tentu rugi secara definitive. Itu yang perlu Bapak menjawab itu.

**CALON ANGGOTA BPK RI (M. SOFIE ABDUL HASAN):**

Baru dua yang saya jawab, yang selanjutnya Bapak menyatakan yang namanya potensi itu belum tentu kerugian. Saya sangat setuju, namanya itu adalah potensi kerugian, tapi bagaimana pun juga itu adalah potensi yang pada saatnya barangkali bisa rugi dan bisa tidak juga. Tetapi yang saya sampaikan disini kita memang harus kembali melihat makanya tadi saya sampaikan untuk melihat proses bisnisnya. Ini sebenarnya bisa ditarik atau tidak atau hanya dibiarkan mengambang seperti itu saja.

Dalam konteks disini tadi saya ingin menyampaikan bahwa ini adalah proses kredit yang dihapus bukukan. Memang ini berpotensi sekali memang harus dilihat berapa *recovery*-nya. Saya melihat itu sangat kecil Pak, termasuk juga nanti Bapak juga bisa melihat kerugian-kerugian di lembaga lain termasuk yang tadi saya sebutkan di LPEI. Saya sangat sependapat dengan Bapak, setuju bahwa yang namanya potensi itu belum tentu rugi, betul Pak, tetapi namanya potensi.

Kemudian....

**F-PDIP (Ir. G. MICHAEL JENO, M.M.):**

Ijin Pimpinan, yang ini 100 triliun.

**CALON ANGGOTA BPK RI (M. SOFIE ABDUL HASAN):**

Yang ini tadi saya sampaikan sampai dengan 2017 Pak. Ini ya memang potensi Pak, yang sudah dihapus bukukan sehingga barangkali nanti pada saat karena itu juga di bawah lingkup pengawasan Bapak, Bapak juga bisa cek apakah saya benar atau tidak nanti itu yang sudah dihapuskan. Nah, berapa *recovery rate*-nya itu tugas Bapak barangkali karena Bapak memiliki fungsi pengawasan tadi itu Pak.

Selanjutnya, dari Bapak Michael tadi mengenai proses bisnis. Ini konkritnya bagaimana ini. Supaya kita tidak hanya melihat hanya kalau Bapak lihat apa yang selama ini saya alami juga di beberapa itu yang dilakukan itu adalah kinerja. Kinerja itu adalah pendekatannya adalah efisiensi dan efektifitas. Tetapi dari ujung ke ujung apa yang tersembunyi itu, itukan tidak nampak.

Nah, itulah yang saya usulkan tadi yang tadi Bapak tanyakan apa ini proses bisnis. Yang dari awal sampai dengan akhir sampai selesai, dari kita menciptakan barang dari awal sampai barang jadi dipersediaanna bagaimana ada tidak persediaan ini yang kemudian itu sudah kadaluarsa kemudian dibakar atau dan lain

sebagainya atau kemudian pada saat menjadi barang jadi tepat waktu, pengirimannya dan seterusnya. Kemudian juga sampai kepada proses penagihan ada tidak yang macet proses penagihan itu tadi di luar negeri, sehingga sampai *cash to cash* itu berjalan dengan baik. Itu Pak, yang saya maksudkan.

Selanjutnya ...(suara tidak jelas)

**F-PDIP (Ir. G. MICHAEL JENO, M.M.):**

Sedikit Pimpinan, 1 menit saja.

Itukan kondisi yang bagus sekali ideal, cuma Bapak sudah maju kesini sebagai Anggota BPK pasti Bapak sudah scanning paling tidak kondisi BPK hari ini. Karena untuk melakukan yang tadi Bapak sampaikan di proses bisnis itu Bapak harus punya industry expert yang ngerti logistic, yang ngerti ini. Nah, di BPK tadi ilustrasi Bapak yang saya pakai, *supply change*-nya Bapak harus punya orang yang ngerti mengenai logistic misalnya. Nah, itu di BPK-nya ada tidak *resources*-nya.

Terima kasih.

**CALON ANGGOTA BPK RI (M. SOFIE ABDUL HASAN):**

Baik, Bapak Michael terima kasih Bapak.

Tadi di awal bukan masalah ini Pak, terkait dengan di depan tadi saya mengusulkan karena BPK itu memiliki kewenangan untuk menunjuk tenaga-tenaga ahli tadi saya sampaikan di presentasi, tenaga ahli yang bertindak atas nama BPK. Nah, itulah yang saya maksudnya saya usulkan tadi karena perkembangan bisnis, perkembangan itu sedemikian cepat supaya tidak ketinggalan ambillah yang dari sana untuk kesana tadi. Itu Pak, yang tadi saya usulkan.

Kemudian selanjutnya pertanyaan Bapak Michael mengenai bahwa memang betul sekarang BUMN merupakan tulang punggung ekonomi di Indonesia juga Pak, mengenai dominasi BUMN kemudian terkait dengan pembangunan BUMN dan bagaimana mensiasatinya.

Kalau Bapak sampaikan sekarang ini BPK sudah berwenang untuk memeriksa sampai ke anak perusahaan, karena sesuai dengan Mahkamah Konstitusi bahwa itu adalah bagian daripada keuangan negara yang dipisahkan dan merupakan keuangan negara. Jadi seluruhnya itu sudah boleh diperiksa oleh BPK. Yang menjadi masalah adalah pengawasan oleh DPR RI nya itukan tidak sampai kepada anak perusahaan dan cucu perusahaan tadi yang Bapak sebutkan. Oleh karena itu, sekarang sudah digodok dan barangkali dalam saya dapat informasi segera disahkan Undang-Undang BUMN yang baru termasuk kewenangan pengawasan DPR RI untuk melakukan pengawasan kepada anak perusahaan maupun cucunya tadi Pak.

Tapi kalau BPK sendiri sudah berwenang Pak, karena sudah ada dulu yang Bapak masih ingat orang hukum di Kementerian BUMN Pak Handra itu mengajukan yudisila review mengenai bahwa ini tidak bisa diperiksa dan lain sebagainya. Kemudian Mahkamah Konstitusi sudah memutuskan bahwa BPK berwenang

memeriksa terhadap keuangan negara yang dipisahkan. Dan itu adalah merupakan keuangan negara termasuk juga di dalam Undang-Undang Keuangan Negara, itu dalam bentuk apapun itu bagian daripada keuangan negara. Sehingga tadi yang Bapak sampaikan mungkin sekarang sudah bisa diperiksa untuk ini, cuma memang kadang-kadang karena keterbatasan sehingga yang diperiksa kalau BUMN saja hanya 5 tahun sekali diperiksa, kecuali kalau ada pemeriksaan dengan tujuan tertentu, tetapi 5 tahun sekali oleh BPK, tetapi oleh akuntan publik tiap tahun yang harus nanti dilaporkan kepada BPK. Mungkin demikian Bapak Michael.

Mungkin begitu Bapak Pimpinan.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Baik, terima kasih Bapak Muhammad Sofie Abdul Hasan yang telah memberikan respon atas berbagai pertanyaan yang disampaikan. Kami berikan waktu Bapak setengah menit untuk berkampanye sebelum meninggalkan tempat.

Silakan.

**CALON ANGGOTA BPK RI (M. SOFIE ABDUL HASAN):**

Terima kasih Bapak dan Ibu sekalian.

Saya tidak biasa kampanye, saya mohon dukungan Bapak dan Ibu sekalian barangkali melihat apakah saya pantas atau tidak, kalau pantas mohon dipilih kalau tidak pantas tidak apa-apa.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Baik, berikan *applause* untuk Bapak Mohammad Sofie Abdul Hasan.

Rapat saya skors 3 menit.

**(RAPAT DISKORS)**

**Anggota Komisi XI DPR RI yang terhormat,  
Yang terhormat saudara Dr. Maralus Penggabean, S.E., S.H., M.Sc.**

Kandidat calon Anggota BPK RI periode 2019-2024. Sama seperti kandidat yang lain dalam uji kepatutan dan kelayakan ini kami memberikan waktu 45 menit untuk saudara menyampaikan paparan sekaligus pendalaman. Sekarang jam diruangan ini jam 21.07 WIB saudara punya waktu 45 kedepan dari sekarang.

Saya persilakan.

## **CALON ANGGOTA BPK RI (Dr. MARALUS PENGGABEAN, S.E., S.H., M.Sc.):**

Terima kasih Pimpinan Sidang.

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,*

**Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua.**

Pertama-tama saya memperkenalkan diri, nama saya Maralus Penggabean, lahir di Ponorogo sampai SMA disana. Jadi mohon maaf kalau ngomong saya ngomong Jawa setiap hari. Dan saya lebih dari 30 tahun bekerja di bidang audit di Inspektorat Jenderal Kemendikbud. Pengalaman di structural sebagai Inspektur 2 periode kemudian yang terakhir ini sebagai auditor ahli utama. Karena pekerjaan tidak pernah pindah di Inspektorat Jenderal terus jadi mengawal laporan keuangan Kemendikbud sampai 5 kali WTP. Jadi pekerjaan mengawal, mereview laporan keuangan ternyata lebih sulit daripada mengaudit laporan keuangan itu sendiri, karena harus benar-benar teliti sehingga dinilai oleh BPK sebagai laporan yang WTP.

Kemudian pendidikan saya Sarjana sampai 3 dri UI semua, jadi kebetulan pertama sejarah, kedua ekonomi dan hukum dan S2 dari North Western University di USA, kemudian S3 ilmu administrasi dari UI, kemudian untuk pendidikan profesi certified auditor sehingga mempunyai kompetensi untuk menghitung kerugian negara dan audit forensik.

Kemudian lanjut, sistematika makalah yang pertama memang awalnya saya makalah semacam artikel dan sekarang sudah saya perbaiki. Makanya dikualifikasi waktu kemarin tidak masuk yang 32 karena memang sangat jelek sekali dan yang ini sudah kami perbaiki. Terima kasih Komisi XI DPR RI memberikan kesempatan kepada saya hari ini untuk memperbaiki.

Nah, di dalam makalah ini merupakan sistisa sari disertasi saya dan disertasi auditor BPK yang bergerak di bidang pengawasan dimana di dalam pendahuluan kami sebutkan latar belakang masalah indentifikasi masalah dan signifikansi penelitian. Kemudian tinjauan literatur ini kami mencoba untuk melihatnya dari perspektif akademik tentang audit kinerja, audit keuangan, audit tujuan tertentu, akuntabilitas publik dan keuangan negara. Kemudian arah BPK masa depan, kami mencoba untuk melihat apa tantangan, hambatan dan peluang supaya BPK lebih maju lagi, kemudian simpulan besaran dan rekomendasi.

Nah, untuk selanjutnya adalah eksistensi BPK saat ini kami menganalisis dari berbagai literatur termasuk Renstra BPK bahwa lingkungan strategis BPK sangat luar biasa, banyak dukungan terhadap BPK setelah reformasi. Namun, ada beberapa hal yang masih perlu dibenahi. Kekuatannya adalah terletak pada sumber daya manusia yang ada di BPK, menurut data 87% adalah orang-orang muda yang mempunyai pengetahuan yang tinggi, kemudian mereka menciptakan suatu aturan-aturan peraturan yang bagus itu adalah kekuatan daripada BPK saat ini. Namun, kelemahannya ternyata banyak laporan-laporan BPK ini yang dinilai masih belum bermanfaat bagi pemangku kepentingan, masyarakat masih menilainya rendah

kualitasnya. Kemudian peluangnya kedepan sangat tinggi, karena saat ini memang BPK mempunyai suatu kekuatan sebagai supreme audit institusi mempunyai peluang yang sangat besar untuk berkembang. Sedangkan hambatannya adalah masih banyak karena menurut indeks korupsi masih tinggi peluang untuk bisnis masih juga rendah, kemudian juga banyak tata kelola Pemerintahan yang kurang baik akibat pemeriksaannya kurang bermanfaat. Ini yang kami analisis dari lingkungan strategis di BPK saat ini.

Nah, kemudian visi BPK yang ini adalah dari Renstra BPK 2021-2025 ini masih akan dirumuskan kemudian. Sekarang baru 2016-2020 yang Pemerintahan yang akan datang tentu akan berubah. Nah, visi BPK ini tentu diturunkan dalam bentuk misinya seperti ini, memeriksa, mengelola dan tanggunjawab, kemudian melaksanakan tata kelola administrasi dan seterusnya.

Kemudian saya mencoba untuk menyampaikan apa kira-kira visi saya karena dalam uji kelayakan ini yang ditanya menurut ketentuan adalah visi saudara apa, misi saudara apa, sehingga kok berani-beraninya menjadi calon Anggota BPK. Nah, saya berupaya untuk merumuskan apa tujuan saya kedepan jika dipercaya menjadi Anggota BPK, yaitu menjadi katalisator terwujudnya lembaga pemeriksa keuangan negara yang mampu memberikan nilai tambah. Jadi saya ingin mendedikasikan diri saya mewarnai BPK ini supaya bisa menjadi institusi yang mempunyai nilai tambah, ada edit value terhadap tata kelola keuangan negara yang akuntable dan transparan. Itu adalah cita-cita saya dan misi saya tentu berkaitan dengan misi dan visi tadi, yaitu supaya BPK ini memberikan manfaat, memberikan benefit apa kira-kira *outcome* yang diberikan kepada masyarakat tidak sekedar laporan opini WTP atau audit kinerja yang sampai hari ini remendasinya masih banyak yang belum ditindaklanjuti, maka saya ingin bahwa hasil pemeriksaan BPK baik itu hasil laporan pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan tujuan tertentu.

Kemudian yang kedua, misi saya adalah mencoba agar institusi BPK ini bisa memberikan *early warning system*, artinya lebih mengutamakan pencegahan dibandingkan penindakan, karena memang institusi BPK bukan aparat penegak hukum akan tetapi lebih kepada bagaimana tata kelola lebih baik memberikan peringatan dini.

Yang ketiga, tentu peningkatan profesionalisme, independensi, integritas, bagaimana BPK lakukan saat ini. Namun, yang lebih penting adalah sinergi pemeriksaan supaya pengawasan internal dan eksternal ada kolaborasi, ada team work yang baik. Selama ini kita lihat masing-masing bekerja sendiri, tidak ada team work yang baik, kita ini lemahnya disitu seperti pemain bola kalau semuanya ingin memasukkan bola ke gawang tentu tidak akan mungkin terjadi. Jadi harus ada pembagian siapa yang jaga gawang, siapa yang mengumpan bola, siapa memasukkan ke gawang dan seterusnya.

Berikutnya kebijakan strategis ini yang kami usulkan Pimpinan, adalah seperti ini. Pertama, kebijakan strategis ini adalah turunan dari visi, misi dan kemudian kebijakan, yaitu mengevaluasi pelaksanaan pemeriksaan keuangan, kinerja dan PDDT secara proporsional. Berdasarkan data dilaporan BPK, kami lihat paling banyak adalah audit tujuan tertentu itu frekuensinya sangat tinggi, sedangkan audit

kinerja hanya sepertiganya, yang dua per tiga itu audit laporan keuangan. Nah, inilah yang kami ingin mencoba secara proporsional. Bukan seperti yang disarankan oleh beberapa orang audit kinerja ditingkatkan, kalau audit kinerja ditingkatkan itu akan ada trade off artinya memang tugasnya tiga, ada yang dikurangi, ada yang ditambah, akhirnya mengorbankan yang lain. Nah, kita ingin ini lebih proporsional antara keuangan, kinerja dan PDTT.

Kemudian yang kedua adalah menyeimbangan orientasi pemeriksaan. Tidak hanya pada saat pengelolaan keuangan dan pertanggungjawaban. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 itu tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara. Nah, di dalam pengelolaan itu sebetulnya termasuk perencanaan tetapi prakteknya sampai hari ini itu hanya pada saat pelaksanaan. Nah, kami ingin bahwa pemeriksaan itu dimulai sejak perencanaan, artinya ketika Anggota Dewan yang terhormat membahas anggaran dari Kementerian Keuangan memberikan pagu indikatif itu BPK sudah bisa membantu DPR RI dalam rangka tata kelolanya supaya tidak salah. Selama ini masih banyak kesalahan di dalam RKAKL, di dalam DIPA itu ada yang salah memasukkan belanja modal, belanja barang, kemudian belanja pegawai itu tumpang tindih sehingga pertanggungjawabannya sulit menurut aturan standar akuntansi Pemerintahan. Nah, inilah yang perlu dibenahi BPK harus mengawal sejak dini, sejak perencanaan.

Yang ketiga adalah merancang pemeriksaan yang efektif, efisien dan ekonomis melalui koordinasi dan sinkronisasi, eksternal dan internal. Kami di Inspektorat Jenderal itu merasa warga negara kelas 3 karena yang pertama itu yang supreme audit institusi itu adalah BPK, kemudian BPKP, Inspektorat Jenderal itu kelas teri lah. Nah, saya merasa sedih kalau profesionalisme Inspektorat Jenderal itu dipandang seperti itu dan kami ingin membaktikan diri untuk yang lebih baik supaya ada koordinasi.

Kemudian menyusun mekanisme penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan. Berdasarkan data dari temuan BPK sejumlah 1,3 triliun itu hanya bisa ditindaklanjuti sepertiganya hingga saat ini. Ini tentu wisting money dan wisting time juga pemborosan luar biasa Pak, karena temuan-temuan itu ternyata mandek sampai lebih dari 10 tahun akhirnya dihapus bukukan. Ini bisa merugikan semua pihak, pemborosan yang luar biasa. Kami teman-teman di Inspektorat Jenderal itu senang kalau temuan BPK itu tidak kunjung selesai karena dimonitor dapat perjalanan dinas. Ternyata biaya untuk menindaklanjuti itu lebih tinggi dari temuan itu sendiri, apalagi ketika sudah sekian tahun, orangnya mungkin sudah meninggal, sudah pensiun, pindah tempat, dan seterusnya akhirnya menjadi tidak bisa ditindaklanjuti.

Temuan yang sekian banyak, *resources* yang sudah kita keluarkan mubajir sia-sia karena tidak bisa ditindaklanjuti. Oleh karena itu, jika dipercaya oleh Anggota Komisi XI DPR RI ini saya ingin meningkatkan efektifitas tindak lanjut itu mulai sinergi dengan aparat penegak hukum supaya Undang-Undang yang menyatakan 60 hari harus ditindaklanjuti itu benar-benar efektif.



Kemudian yang berikutnya adalah menyiapkan institusi yang menghasilkan sumber daya pemeriksa yang memiliki keahlian dan keterampilan dalam bidang pemeriksaan keuangan negara. Saya di tahun 2005 kebetulan terlibat di dalam state audit reform project, Anggotanya adalah beberapa kementerian di sana kami mencoba menyusun silabus dan kurikulum akuntansi Pemerintahan. Dan pada saat itu sudah diterapkan di 36 perguruan tinggi negeri dan swasta dan sudah menghasilkan auditor pendidikan S2 sebanyak 667 orang kuliah S2 dalam bidang akuntansi Pemerintahan. Dan proyek ini sekarang dilanjutkan oleh BPKP, ada star pro namanya. Itu yang menginisiasi adalah kami, maka saya punya keinginan cita-cita untuk membuat atau mendirikan Sekolah Tinggi Pemeriksaan Keuangan Negara, karena selama ini sumber daya dari BPK itu adalah dari berbagai disiplin ilmu akan tetapi tidak customize. Nah, ini sejalan dengan Pemerintah yang sekarang, pembangunan yang sekarang adalah pembangunan sumber daya manusia.

Nah, jika BPK mempunyai Sekolah Tinggi Pemeriksaan Keuangan Negara itu efisiensinya akan lebih tinggi, profesionalismenya juga akan semakin bagus, karena seperti STAN atau sekolah lain yang Akademi Kepolisian, Akademi Militer itu benar-benar ditangani dengan serius. Nah, ini yang ingin kita harapkan bisa terjadi di republik ini.

Kemudian yang berikutnya mereview Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006. Undang-Undang ini sama nomornya, sama-sama 15 yang satunya 2004 dan satunya lagi 2006, tapi dua-duanya sebetulnya hanya untuk BPK. Mohon maaf ini, kami terlibat intens waktu perumusan Undang-Undang ini pada awal reformasi tahun 2000-an sudah dimulai dibahas ini ternyata memang waktu itu terjadi ....(suara tidak jelas)... yang luar biasa. BPKP yang begitu mempunyai pamor yang tinggi langsung turun, BPK baik, Inspektorat Jenderal di tengah-tengah hanya sebagai mediator. Pertarungan ini luar biasa, maka disini disebutkan pemeriksaan tentang pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara. BPKP itu tidak punya kewenangan disitu, diskusinya adalah karena BPKP itu adalah singkatan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, ini adalah Undang-Undang tentang pemeriksaan yang berhak memeriksa adalah BPK. Jadi dibuat dikotomi antara namanya pemeriksaan dan pengawasan. Nah, Inspektorat Jenderal di tengah-tengah kami auditor, padahal disitu Undang-Undang ini seharusnya bisa menaungi seluruh aparat pengawasan, baik itu yang namanya eksternal, internal, APIP, termasuk satuan pengawas intern di lingkungan BUMN, SPI, bahkan termasuk Kantor Akuntan Publik. Inilah payung hukum dari pengawasan nasional kita, inilah yang perlu dibuat.

BPKP tidak punya aturan sampai terbit tahun 2008 namanya Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 sistem pengendalian intern Pemerintah, terkatung-katung sampai seperti itu. Nah, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006, 2 tahun berikutnya itu terbit tetapi sebetulnya itu adalah mengakomodasi untuk komisioner KPK yang 9 orang ini. Jadi inilah yang perlu ditata kembali, yang pertama Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 harus menaungi seluruh auditor internal dan eksternal sedangkan yang Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 harus direvisi

ulang supaya lebih komprehensif dipadukan dengan Undang-Undang Nomor 15. Ini usulan yang menurut saya paling baik.

Kemudian yang berikutnya yang tentu level maturitas BPK seperti di Renstra juga disampaikan oleh para calon lain memang itu penting, karena kita hidup dalam pergaulan internasional, kita direview oleh semua internasional, sehingga jika lemah BPK-nya tentu akan menjadi sorotan negara lain. Ini yang menurut kami perlu ditata ulang karena levelnya itu baru level paling pertama di antara 5 piramida itu. Luar biasa, letak kita masih di bawah sehingga paling tidak harus maturitasnya meningkat ke level 3 itu keinginan kami seperti itu.

Kemudian program prioritas, dari program strategis kami turunkan dalam bentuk program prioritas, mana yang harus dilaksanakan kami kelompokkan dalam 4 aspek, yaitu tugas dan fungsi, keuangan anggaran, sumber daya manusia dan sarana dan prasarana. Mengenai tugas dan fungsi kami melihat tugas dan fungsi BPK inilah yang perlu ditata ulang supaya bisa menjadi namanya supreme audit institution. Jadi yang namana paling tinggi itu harus bisa memberikan supervisi kepada BPKP sebagai auditor Pemerintah, kepada Inspektorat Jenderal sebagai auditor Kementerian, kepada Bawasda itu juga tidak pernah diberikan bimbingan, diberikan arahan oleh bapaknya, jadi akhirnya jalan sendiri-sendiri terjadinya in efisiensi yang luar biasa. Nah, tugas dan fungsi ini harus ditata kembali termasuk menata regulasinya tadi.

Kemudian tentang anggaran, banyak orang mengatakan anggarannya harus ditingkatkan. Secara teoritis anggaran itu adalah sumber daya yang terbatas, berapa pun kita dikasih uang kalau kita tidak baik mengelolanya ya tidak bermanfaat. Menurut saya kita jangan hanya mencari supaya disenangi orang, meningkatkan anggaran begini-begini wah itu dipilih karena meningkatkan anggaran, ternyata itu tidak baik. Yang paling baik adalah bagaimana kita menajamkan skala prioritas kegiatan kita.

Kemudian tentu di dalam keuangan ini kita harus menggunakan teknologi informasi yang lebih efisien. Sekarang ini kantor BPK diseluruh provinsi ada perwakilan, sementara di kantor pusat auditornya juga banyak. Pegawai BPK itu seluruh Indonesia ada sekitar 6000 orang, 6000 itu kalau di negara maju itu sudah satu pasukan luar biasa besarnya tetapi terlalu banyak sumber daya manusia akhirnya tidak menghasilkan signifikan. Nah, ini yang perlu ditata dengan menggunakan informasi yang sekarang sudah era revolusi industry 4.0 dan 5G generasi kelima itu harus benar-benar digunakan.

#### **KETUA RAPAT:**

Mohon dipersingkat Pak, karena waktu kita terbatas.

**CALON ANGGOTA BPK RI (Dr. MARALUS PENGGABEAN, S.E., S.H., M.Sc.):**

Baik, sumber daya manusia dan sarana dan prasarana harus ditingkatkan untuk menunjang kegiatan ini. Demikian Pimpinan, kami sampaikan mudah-mudahan ini bisa terlaksana.

Yang terakhir ada yang namanya *three line of defense model*, ini harus dikembangkan karena setiap organisasi harus mengembangkan 3 lini pertahanan, supaya BPK efektif maka Pimpinan manajemen harus sudah melakukan peninjauan kembali kegiatannya, tata kelolanya baik dan kemudian unit manajemen resiko yang lapis ketiga adalah internal audit yang kuat. Nah, kalau itu dilakukan maka BPK akan semakin kuat karena semuanya berdasarkan audit berbasis resiko.

Nah, saya rasa demikian, mudah-mudahan ini masih ada nanti dalam pertanyaan akan kami buka kembali ini. demikian saya rasa dan sumber daya manusia kami mungkin usulan saya adalah membuat Sekolah Tinggi Pemeriksa Keuangan Negara, mudah-mudahan bisa terwujud.

Sekian Pimpinan, terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT:**

Terima kasih saudara Dr. Maralus Penggabean yang sudah menyampaikan paparannya. Kita masuk dalam sesi tanya jawab pendalaman, karena waktu kita terbatas saya mohon Anggota Komisi XI DPR RI yang terhormat dapat singkat langsung pada pokok permasalahan.

Silakan yang pertama Bapak Marsiaman Saragih.

**F-PDIP (MARSIAMAN SARAGIH):**

Terima kasih Pimpinan.

**Pimpinan dan rekan-rekan Anggota Komisi XI DPR RI.**

Kalau saya masih ketara Bataknya kalau berbahasa Indonesia, kalau Bapak Maralus ini sudah tidak ketara Bataknya. Tapi kalau melihat paparannya Bapak ini saya pikir baguslah, sudah cocok jadi Anggota BPK, kalau menurut saya. Jadi begini Pak, tentu kalau melihat pengalaman Bapak di Inspektorat itu, berapa tahun Pak?

**CALON ANGGOTA BPK RI (Dr. MARALUS PENGGABEAN, S.E., S.H., M.Sc.):**

32 tahun.

**F-PDIP (MARSIAMAN SARAGIH):**

Mulai pakai apa itu?

**CALON ANGGOTA BPK RI (Dr. MARALUS PENGGABEAN, S.E., S.H., M.Sc.):**

Mesin ketik, laptop, sekarang sudah pakai WA.

**F-PDIP (MARSIAMAN SARAGIH):**

Jadi begini Pak, Bapak kan lihat juga bagaimana hasil auditnya BPK terhadap BUMN ini yang nakal-nakal kan jarang ini terungkap. Saya kira Bapak punya kiat tidak bisa membongkar itu, kecurangan-kecurangan yang terjadi di sana, karena inikan menyangkut kehidupan orang banyak ini Pak. Jadi dia bekerja untungnya tidak ada pernah dinikmati oleh rakyat.

Itu saja pertanyaan saya Pak, terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Terima kasih Bapak Marsiaman.

Silakan selanjutnya Bapak Didi Irawadi.

**F-PD (DIDI IRAWADI):**

Terima kasih.

Saya langsung saja, saudara peserta fit and propertest Bapak Maralus Penggabean. Saya tertarik pengalaman Bapak di Kemendikbud menjadi auditor berapa lama itu Pak?

**CALON ANGGOTA BPK RI (Dr. MARALUS PENGGABEAN, S.E., S.H., M.Sc.):**

sejak lama.

**F-PD (DIDI IRAWADI SYAMSUDIN, SH., LLM):**

Pokoknya lama ya.

**CALON ANGGOTA BPK RI (Dr. MARALUS PENGGABEAN, S.E., S.H., M.Sc.):**

Saya bekerja disitu sudah 32 tahun.

**F-PD (DIDI IRAWADI SYAMSUDIN, SH., LLM):**

Sebagaimana kita ketahui anggaran APBN pendidikan ini luar biasa besar, Bapak tahun 20% dari APBN. Dan beberapa kali WTP tadi saya dengar, tetapi kenyataannya kalau kita lihat ini kok tidak berbanding lurus WTP lalu dengan kenyataan dunia pendidikan kita. Kalau kita lihat mungkin di sekolah-sekolah di kota besar mungkin cukup bagus, tetapi kenyataannya dunia pendidikan ini ketinggalan, anggarannya luar biasa besar 20%. Nah, ini kira-kira apa yang terjadi Pak, inikan jadi tidak seiring sejalan dengan besarnya dunia pendidikan dengan *output* yang dihasilkan. Nah, saya bertanya sesuai dengan kompetensi Bapak ini, jadi kok bisa WTP tetapi kenyataan *output* yang terjadi sebenarnya 20% tidak main-main. Saya ingin pandangan Bapak bagaimana, apa yang terjadi, lalu kedepan harus bagaimana dengan referensi pengalaman Bapak tadi.

Lalu yang kedua, Bapak mengatakan temuan BPK itu yang ditindaklanjuti hanya 30% bahkan narasumber sebelumnya tadi hanya 10%-15% ini kurang lebih banyak yang tidak lanjut. Nah, ini kira-kira apa sebabnya saya ingin kedepan calon yang bisa melakukan perubahan karena ini tugas yang mulai dan luar biasa BPK, ini jabatan yang luar biasa tidak main-main. Nah, pertama-tama saya ingin tahu itu kenapa tidak ditindaklanjuti apakah karena politiskah, atautkah dari sisi penegak hukum ada Polisi, ada Jaksa, bahkan KPK juga. Apakah mereka yang justru tidak amanah atau apa, ini di forum ini Bapak terbuka saja. Saya ingin pemikiran yang jujur, pemikiran yang demi BPK kita bisa optimal kedepan.

Mungkin itu saja dulu sementara.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Terima kasih Bapak Didi.

Selanjutnya Bapak Amirul Tamim.

**F-PPP (Dr. H. MZ. AMIRUL TAMIM, M.Si.):**

Pimpinan, singkat saja sebenarnya pertanyaan saya tadi sama dengan Bapak Didi. Saya ingin fokus karena Bapak 32 tahun di pendidikan, auditor di pendidikan. Ada DAK Pendidikan itu di daerah saya melihat DAK pendidikan di daerah tidak efektif. Seperti pembangunan Gedung banyak Gedung-gedung yang sebenarnya masih fungsional, itu langsung dirobohkan dan dibangun yang sebenarnya ruangnya hampir sama. Tetapi di beberapa belahan daerah lain banyak sekolah yang masih belum permanen dan sebagainya masih banyak. Ini bagaimana pandangan Bapak yang menjadi Inspektur di auditor di Departemen Kementerian Pendidikan yang WTP terus tetapi prasarannya masih seperti itu.

Yang kedua, disini Menteri Bappenas menyampaikan bahwa pengangguran yang terbanyak dari hasil lulusan pendidikan itu banyak dari sekolah kejuruan. Ini apakah tidak masuk dalam audit dari inspektorat internal dari Kementerian Pendidikan. Bagaimana kalau sebentar Bapak di BPK untuk hal ini.

Terima kasih Pimpinan.

**KETUA RAPAT:**

Terima kasih Bapak Amirul Tamim.  
Selanjutnya silakan Ibu Felicitas.

**F-P. GERINDRA (Dr. FELICITAS TALLULEMBANG):**

Terima kasih Ketua.

Saya tertarik kepada makalah Bapak, dimana didalamnya arah BPK kedepan. Melihat makalah Bapak ini mohon maaf salah satu, satu hari ini saya lihat saya bangga melihatnya. Mudah-mudahan kedepan apabila Bapak diberikan kesempatan dan terpilih apa yang Bapak paparkan disini bisa diwujudkan karena disini saya sebenarnya tidak perlu bertanya lagi cuma memberikan penguatan.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Terima kasih.  
Silakan selanjutnya Bapak Sudiro.

**F-P. HANURA (Drs. SUDIRO ASNO):**

Terima kasih Bapak Ketua.

**Pimpinan dan Anggota yang saya hormati,  
Bapak Maralus yang saya hormati.**

Saya langsung saja *to the point*, pertama klarifikasi tentang makalah Bapak sepiantas. Saya mencari-cari identifikasi masalah, karena di daftar isi itu ada. Lalu disitu di halaman 3 ini saya cari-cari ternyata di halaman 7 itu, itu juga menyesatkan itu. Jadi tolong itu lebih akurat lagi.

Yang kedua, setelah saya baca identifikasi masalah ini dikaitkan dengan judul. Inikan masalah teknis penulisan dan penuangan ide, disini peran BPK bla-bla lalu tiba-tiba ditingkat dalam rangka upaya menegakkan tata kelola Pemerintahan yang baik, kok tiba-tiba tata kelola Pemerintahan, kok bukan tata kelola keuangan, karena inikan konteksnya BPK. Tetapi yang dibahas memang 3 jenis audit, itu yang pertama.

Terus saya ingin lihat kesimpulan sebagai seorang Doktor coba menulisnya sampai tidak antara yang dibahas dengan yang disimpulkan, disimpulannya itu tidak ada. Apakah 3 jenis audit yang Bapak bahas itu menegakkan *good governance* tidak, jadi tegak atau tidak tegak tidak jelas disini. Tapi tiba-tiba rekomendasi saja, jadi saya ingin klarifikasi. Jadi sebetulnya yang Bapak lakukan ini harusnya kalau di BPK itu tegas lalu kira-kira bagaimana tegak atau tidak tegak *good governance*-nya.

Terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT:**

*Wa'alaikum Salam Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Terima kasih.

Silakan Bapak Maralus Penggabean untuk merespon dari 5 pendalaman yang dilakukan oleh Anggota Komisi XI DPR RI.

**CALON ANGGOTA BPK RI (Dr. MARALUS PENGGABEAN, S.E., S.H., M.Sc.):**

Terima kasih Pimpinan Sidang.

Saya sangat bangga dengan pertanyaan-pertanyaan dari Anggota Dewan yang terhormat. Yang menurut saya luar biasa ini men-chalange saya untuk semakin meningkatkan diri ketika melihat persoalan yang disampaikan oleh Bapak dan Ibu sekalian.

Pertama-tama dari Bapak Marsiaman Saragih, bagaimana kita bisa membongkar atau mengungkap katakanlah kecurangan yang ada di BUMN, apa kira-kira yang akan anda lakukan. Inilah yang perlu kita dalami bahwa *natura*-nya laporan keuangan antara perusahaan swasta dengan BUMN atau Kementerian/Lembaga itu sebetulnya berbeda. Ketika BUMN itu ada untuk mencari profit tetapi itu untuk kemakmuran kepentingan seluruh bangsa beda dengan swasta murni, beda dengan Kementerian.

Nah, ketika laporan keuangan itu kita tidak bisa mendeteksi di mana salah saji yang material ini akan menimbulkan seolah-olah baik-baik saja. Seperti kasus Garuda kalau kita lihat, kenapa keuntungan yang 5 tahun kedepan sudah dicatat pada pembukuan hari ini, akhirnya menimbulkan seolah-olah laporannya begitu bagus. Nah, ini ada di dalam BUMN kita tidak mengungkap seperti itu karena kompetensi dan profesionalisme kita tidak bisa melihat bahwa BUMN berbeda dengan swasta. Kalau laporan keuangan di swasta itu setiap laporan keuangan itu sudah bisa orang lihat, sehingga investor berani beli sahamnya. Kalau laporan keuangan Pemerintah gunanya untuk apa sekarang? Hampir-hampir tidak ada kita pakai. Mohon maaf, ini saya bukan, inilah yang harus kita benahi bukan berarti melecehkan hasil selama ini akan tetapi ini tantangan kita bersama.

Kepada Bapak Didi Irawadi, mudah-mudahan Bapak menjadi Menteri Pendidikan, karena pertanyaan inilah yang muncul sangat substansial dan itu ditujukan kepada kami bertubi-tubi kita tidak pernah mampu menjawab Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Karena mohon maaf, setiap ganti Pimpinan ganti *policy*, ganti Menteri ganti kurikulum. Semuanya berubah total sampai hari ini yang tadinya ada sekolah unggulan, ada sekolah rintisan berstandar internasional sekarang ada zonasi siapapun boleh masuk sekolah itu yang penting dekat sama rumah. Jadi semrawut ini Bapak Didi, jadi seperti ini mudah-mudahan menjadi tanggungjawab kita bersama.

Anggaran pendidikan 20% dari APBN itu adalah sekitar 400 triliun setiap tahun. Nah, itu 70% disalurkan langsung ke daerah berupa namanya dana transfer daerah yang berupa DAK dan juga dana-dana yang untuk tunjangan profesi guru, dana BOS dan seterusnya. Yang dikelola oleh Kementerian itu hanya 30% itupun dibagi ke sekolah-sekolah kedinasan dan seterusnya di bawah Kementerian Kesehatan dan seterusnya.

Nah, ini kenapa kok tidak terlihat hasilnya karena sampai ke daerah itu Pimpinan Daerah punya kepentingan masing-masing. Kemendikbud karena otonomi daerah tidak punya kewenangan memeriksa anggaran transfer daerah yang 70% tadi. Sehingga hanya mengawasi teknis kebijakannya saja, untuk penindakan adalah pada Inspektorat Provinsi, Kabupaten dan Kota. Nah, karena rendahnya daya untuk menindak memberikan *punishment* kepada mereka Kemendikbud itu sebenarnya seperti macan ompong, hanya membuat kebijakan tetapi pelaksanaan sepenuhnya pada daerah. Ini yang menimbulkan tidak bisa terkontrol dengan baik perkembangan pembangunan sekolah yang disana.

Anggaran sudah segitu kok sekolah masih rusak, kok lantainya masih tanah, kok atapnya sudah jebol, itu banyak terjadi dimana-mana. Nah, inilah yang harusnya BPK mensupervisi karena BPK itu kan yang agung ada diatas, itu tidak pernah turun terjun sampai ke daerah, kalau pun ke daerah kan tidak mungkin biaya tinggi. Loh disana kan ada kantor perwakilan, tapi tidak sampai ke desa-desa.

Nah, inilah sebetulnya hirarki pengawasan dari eksternal BPK, BPKP, Inspektorat Jenderal, Inspektorat Kabupaten/Kota sampai pengawas penilik sekolah harus secara hirarki ada, rantai komandonya supaya menjadi yang lebih baik. Begitu Bapak Didi, mudah-mudahan ini bisa kita benahi pada masa kedepan ini.

Kemudian temuan yang tidak ditindaklanjuti. Ini kalau mau introspeksi sebetulnya ada kesalahan di pihak pemeriksa dan yang diperiksa. Yang diperiksa itu sering ngeles karena dianggap ini bukan tanggungjawab dia atau ini sudah sesuai dengan ketentuan. Tetapi di balik itu sebenarnya adalah permainan yang luar biasa, sehingga apa? temuan BPK setelah ditemukan BPK itu mereka masih bisa berkelit. Berkelitnya dimana? Nah, maklum kadang-kadang makanya saya mengambil hukum dan ekonomi itu karena supaya temuan itu menjadi kuat, legal standingnya menjadi kuat. Banyak auditor kita itu hanya pendidikan akuntansi sehingga dia hanya melihat barang bukti, padahal menurut hukum yang namanya barang bukti dan alat bukti itu berbeda, sehingga ketika di bawa kepada pengadilan kemudian lemah dan kita kalah.



Temuan BPK itu akhirnya bisa dianulir, dibatalkan karena memang tidak kuat argumennya secara hukum, legal standingnya rendah. Maka seharusnya auditor keuangan negara itu selain menguasai tentang ekonomi, tentang akuntansi juga harus mengetahui legal hukum yang kuat. Ini yang seharusnya memang ada, inilah makanya ada sekolah yang akuntansi keuangan negara yang memang perpaduan antara itu. Itu Pak Didi, yang kami sarankan ada tindak lanjut supaya semakin meningkat.

Kemudian Bapak Amirul Tamim, ini ada pertanyaan yang bagus sekali. Di daerah seperti itu Bapak, jadi kami mohon maaf Inspektorat Jenderal itu sedih ketika sampai di daerah ditolak karena dibidang ini adalah kewenangan Bupati. Inspektorat Jenderal ini silakan ngurusin yang di Jakarta saja, anda silakan ngurusin kurikulum anda sudah bagus apa belum, bikin peraturan yang bagus, soal yang menerapkan adalah kami. Akhirnya tidak banyak bisa berbuat banyak, karena Inspektorat Kabupaten Kota dibawah Kementerian Dalam Negeri. Dan mereka mempunyai mekanisme bekerja sendiri, sehingga kami tidak mampu kami merasa melarikan diri dari tanggungjawab, tetapi seandainya BPK karena BPK ini punya kekuatan yang luar biasa memberdayakan Inspektorat Jenderal, memberdayakan BPKP, memberdayakan Inspektorat Provinsi, Kabupaten Kota. Ini akan luar biasa dampaknya untuk perbaikan Republik ini. Dan mudah-mudahan ini juga bisa dalam waktu yang depan menjadi lebih bagus.

Nah, kenapa kok sekolah-sekolah yang masih bagus dirobokkan, ya ini proyek Pak. Jadi maklum dimana-mana, inilah ...(suara tidak jelas)

**F-PPP (Dr. H. MZ. AMIRUL TAMIM, M.Si.):**

Pimpinan, saya tambah sedikit.

Kan begini Pak, norma standar kriteria itu Pemerintah Pusat yang buat, kan Bapak lihat saja normanya kriteria yang Bapak susun itu diikuti atau tidak. Kalau tidak diikuti ada kewenangan Inspektorat.

**CALON ANGGOTA BPK RI (Dr. MARALUS PENGGABEAN, S.E., S.H., M.Sc.):**

Kebetulan kami kemarin baru diskusi dengan Kemendagri dengan Kemenpan, kewenangan kami hanya pada masalah kebijakan teknis tidak boleh melihat anggaran, karena anggarannya itu sudah langsung ditransfer dari Menteri Keuangan ke Bendahara Umum Daerah. Sehingga kami tidak punya kekuatan untuk melihat, membuka-buka pertanggungjawaban bendahara di daerah itu. Jadi mohon maaf, memang aturannya seperti itu sehingga macan ompong. Nah, seharusnya BPK memberikan mandate atas nama BPK ayo kamu lihat itu.

**KETUA RAPAT:**

Waktu Bapak 5 menit lagi.

**CALON ANGGOTA BPK RI (Dr. MARALUS PENGGABEAN, S.E., S.H., M.Sc.):**

Siap, terima kasih.

Ini yang paling menarik dari Bapak Sudiro, kami terima kasih masukan Bapak dan ini sebetulnya tentang identifikasi masalah, kami uraikan sepintas tadi di halaman 7. Dan mengenai tata kelola itu adalah di dalam setiap ini ada sebetulnya mengulas tidak secara eksplisit akan tetapi arahnya kesana. Jadi ad acara pengungkapan tentang tata kelola apakah itu di dalam setiap uraian atau memang secara eksplisit dalam bab tertentu. Kami mengambilnya itu menyeluruh holistic di dalam keseluruhan. Dan tata kelola Pemerintahan dan tata kelola keuangan itu tata kelola Pemerintahan bagian terbesarnya dari bagian keuangannya.

Jadi itulah maka judulnya tidak hanya dalam judul kami tidak hanya keuangan saja tapi menegakan *good governance*, pengertian dalam bank dunia. *Good governance* itu selain Pemerintahan yang baik juga tercakup disitu tata kelola keuangannya.

Demikian yang dapat kami sampaikan dan saya terima kasih masukan ini luar biasa menjadi pemicu buat saya untuk lebih meningkatkan diri dengan kompetensi ini.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Baik, terima kasih kepada saudara Dr. Maralus Penggabean, S.H., S.E., M.Sc. sebelum rapat ini kita akhiri saya persilakan Bapak untuk kampanye setengah menit.

**F-P. NASDEM (Dr. ACHMAD HATARI, S.E., M.Si.):**

Pak Marwan tunggu, belum kasih kesempatan sebelah kanan ini, harus ada perimbangan.

Pak Maralus, saya menangkap tadi pertama sepertinya pemikiran Bapak Maralus idealnya BPK dilibatkan dalam proses perencanaan anggaran. Nah, penjelasan itu sedikit kontradiktif dengan penjelasan yang baru saja Bapak sampaikan.

Sepengetahuan saya Pak, tidak ada ketentuan bahwa BPK harus dilibatkan dalam proses perencanaan anggaran, sebab peran atau fungsi distribusi dan fungsi stabilisasi itu bukan berada di BPK. Sementara BPK adalah satu-satunya lembaga yang mendapatkan legal standing untuk menghitung keruian negara. Jadi BPK kalau dilibatkan dalam proses perencanaan anggaran, kalau terjadi kerugian keuangan negara siapa yang menghitung, legal standingnya hanya di BPK. Pada posisi ini maaf saya berbeda dengan Bapak.

Terima kasih Pak.

**KETUA RAPAT:**

Direspon singkat, kemudian langsung *closing statement* Pak.

**CALON ANGGOTA BPK RI (Dr. MARALUS PENGGABEAN, S.E., S.H., M.Sc.):**

Terima kasih.

Maksud kami dilibatkan itu justru ketika memperoleh mandate dari Anggota Dewan, ketika Anggota Dewan membahas anggaran dengan Kementerian/Lembaga, BPK itu mohon diberikan tugas untuk apakah ini akuntabilitasnya sudah benar, dicek kembali dari segi pertanggungjawabannya nanti tidak menimbulkan masalah atau tidak kedepan, karena rata-rata kesalahan itu dimulai sejak perencanaan. Ketika perencanaannya tidak baik itu 50% kedepannya juga akan menjadi kurang baik. Jadi maksud kami adalah bukan pada intervensinya tetapi mendapatkan mandate dari DPR RI untuk mengecek kembali apakah ini sudah baik dari segi perencanaan.

Demikian yang bisa kami sampaikan, sehingga sebetulnya tidak mengurangi tugas atau mencampur adukkan antara menghitung kerugian negara dengan perencanaannya karena ada perbedaan prinsip dalam perencanaan dan pertanggungjawaban.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Baik Pak, silakan sampaikan saja *closing statement*.

**CALON ANGGOTA BPK RI (Dr. MARALUS PENGGABEAN, S.E., S.H., M.Sc.):**

Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada Komisi XI DPR RI yang telah memberikan kesempatan saya untuk presentasi. Saya sudah gagal 3 kali, maksudnya pertama ketika 62 dipenggal separuh saya sudah tidak masuk kualifikasi. Yang kedua, ketika diumumkan oleh Komisi XI DPR RI 28 itu sudah resmi nama saya sudah hilang. Hari berikutnya DPD mengumumkan 13 nama sudah hilang. Nah, disini saya merasa memang saya belum mampu, tetapi sebetulnya pengabdian yang ingin saya sampaikan itu yang ingin saya dedikasikan memang tidak meminta diluluskan tetapi paling tidak saya sudah menyampaikan apa yang kira-kira gagasan terbaik untuk bangsa ini dan itu melalui perjuangan dan komitmen saya, karena sudah selesai dengan diri saya sendiri. Umur saya sudah 61 tahun, jadi saya tidak ingin yang aneh-aneh di Republik ini, boleh nanti Tuhan yang akan menghukum saya jika omongan saya ini tidak ditepati. Saya benar-benar ingin menjadikan BPK ini memperoleh mandate dari rakyat yang amanah dan tentu menjaga marwahnya sebagai supreme audit institusi.

Demikian, terima kasih.

## **KETUA RAPAT:**

Demikian Rapat Dengar Pendapat Umum kita pada malam hari ini. Terima kasih kepada saudara Dr. Maralus Pengabean dan kami persilakan meninggalkan ruangan. Rapat saya skors 3 menit.

## **(RAPAT DISKORS)**

**Pimpinan dan Anggota Komisi XI DPR RI yang terhormat,  
Yang saya hormati saudara Defa Aulia Farhan, S.E., Ak., C.A., C.P.A.**

Kandidat calon Anggota BPK RI periode 2019-2024. Pada malam hari ini menghadiri Rapat Dengar Pendapat Umum dalam rangka uji kepatutan dan kelayakan. Sama dengan kandidat yang lainnya, kami memberikan waktu 45 menit untuk paparan dan pendalaman. Sekarang jam diruangan ini pukul 21.56 WIB, jadi saudara punya waktu 45 menit dari sekarang.

Saya persilakan.

**CALON ANGGOTA BPK RI (DEFA AULIA FARHAN, S.E., AK., C.A., C.P.A.):**

Terima kasih Pimpinan.

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,*  
**Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua.**

**Yang saya hormati Pimpinan Rapat Dengar Pendapat Umum Calon Anggota BPK RI periode 2019-2024,  
Yang saya hormati Anggota Komisi XI DPR RI.**

*Alhamdulillah* saya pertama-tama mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk melakukan Rapat Dengar Pendapat Umum Calon Anggota BPK RI 2019-2024. Selanjutnya saya akan memperkenalkan profil saya, nama saya Defa Aulia Farhan, jadi saya lahir di Jakarta tanggal 17 Februari 1983, saya mungkin disini calon termuda yang ada, jadi saya masih berumur 36 tahun. Kemudian saya memiliki pendidikan menamatkan S1 Akuntansi di Universitas Trilogi dahulu STEKPI namanya, kemudian menamatkan pendidikan profesi akuntan di Carl Institute. Kemudian saya juga memiliki pengalaman menjadi partner Kantor Akuntan Publik Sriyadi Ali Sugeng dan rekan dari 2013 hingga sekarang, kemudian juga staf ahli badan anggaran DPRD DKI 2015-2017. Kemudian juga menjadi dosen Universitas Trilogi 2008-2010, kemudian juga pernah menjadi senior auditor di KAP Adrianto dan rekan.

Adapun sertifikasi yang saya miliki dalam bidang auditing certificate public accountant, chartered accountant, kemudian pemeriksa keuangan negara, register negara, kemudian terkait dengan pajak A, B dan C. Kemudian pengalaman

organisasi saya menjadi Anggota IAPI 2013 sampai dengan sekarang, Anggota IAI 2013 hingga sekarang, kemudian Anggota ISAKA 2015-2015, kemudian Anggota forum akuntan jasa keuangan 2014 sampai dengan sekarang. Kemudian waktu mahasiswa menjadi Wakil Ketua Senat Mahasiswa STEKPI tahun 2004-2005. Kemudian saya juga memiliki pengalaman dalam pemeriksaan keuangan negara. Menjadi pemeriksa BPK pada tahun 2016, kemudian juga beberapa kementerian dan lembaga di Republik ini.

### **Bapak dan Ibu sekalian.**

Ini tujuan negara dan kedudukan BPK dalam tatanan kenegaraan Republik Indonesia. Tujuan negara itu ada 4, antara lain untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. Yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan keempat ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Kemudian kedudukan BPK di dalam Undang-Undang Dasar 1945, yaitu menegaskan bahwa untuk memeriksa pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara dibentuk satu badan pemeriksa keuangan yang bebas dan mandiri. Nah, hal ini juga digambarkan bahwa BPK kedudukannya sejajar dengan lembaga-lembaga negara tinggi yang lain sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, antara lain Presiden, Majelis Permusyawaratan Rakyat, DPR RI, DPD, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial. Saya

Selanjutnya ini merupakan tugas dan wewenang saat ini BPK RI yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK, yaitu BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Daerah, lembaga negara lainnya, Bank Indonesia, BUMN, BUMD, BLU, dan lembaga-lembaga Pemerintah yang mengelola keuangan negara.

Kemudian selanjutnya di Pasal 7 Ayat (1) BPK menyerahkan hasil pemeriksaan, pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara kepada DPR RI, DPD, DPRD sesuai dengan kewenangannya. Ada pun di dalam Pasal 8 untuk keperluan tindak lanjut hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, BPK menyerahkan pula hasil pemeriksaan secara tertulis kepada Presiden, Gubernur, Bupati, Walikota sesuai dengan kewenangannya. Apabila dalam pemeriksaan ditemukan unsur pidana, BPK melaporkan hal kepada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan paling lambat 1 bulan sejak diketahui unsur pidana tersebut. BPK memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat sebagaimana yang dimaksud pada Ayat (1) dan hasilnya diberitahukan kepada DPR RI, DPD, DPRD serta Pemerintah.

Selanjutnya, ini tugas dan wewenang BPK RI. Dalam menunjang tugas BPK, mempunyai wewenang sebagai berikut, antara lain;

1. Menentukan objek pemeriksaan dan merencanakan melaksanakan pemeriksaan. Menentukan waktu dan metode pemeriksaan serta menyusun dan menyajikan laporan pemeriksaan.
2. Meminta keterangan dan/atau dokumen yang wajib diberikan oleh setiap orang, unit, organisasi, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, lembaga negara lainnya, Bank Indonesia, BUMN, BLU, BUMD dan lembaga atau badan lainnya yang mengelola keuangan negara.
3. Melakukan pemeriksaan di tempat penyimpanan uang dan barang milik negara di tempat pelaksanaan kegiatan, pembukuan dan tata usaha keuangan negara serta pemeriksaan terhadap perhitungan, surat-surat, bukti-bukti rekening koran, pertanggungjawaban dan daftar lainnya yang berkaitan dan lain sebagainya.

Selanjutnya, ini model kematangan lembaga pemeriksa saat ini yang dikembangkan oleh lembaga pemeriksa, organisasi pemeriksa internasional Intosai yang antara lain, yaitu *oversight*, *insight* dan *foresight*. Nah, saat ini BPK masih terfokus kepada *oversight*, *insight* sudah dilakukan dengan adanya badan atau auditor utama investigasi dan yang *foresight* ini belum dilakukan sama sekali.

Selanjutnya, hasil dari yang saya identifikasi permasalahan yang dihadapi oleh BPK saat ini, yaitu antara lain pemenuhan pelaksanaan kewenangan BPK antara lain perlu ditingkatkan. Kemudian program pemeriksaan tidak sejalan dengan rencana pembangunan nasional dan implementasi 17 program SDG's. Pendapat BPK terhadap pengelolaan keuangan negara dan kebijakan masa depan *foresight* perlu ditingkatkan.

Peningkatan pemahaman atas tugas dan kewenangan BPK oleh pemangku kepentingan. Pemutakhiran data tindaklanjut perlu ditingkatkan, kemudian fokus pembentukan SDM berdasarkan harus terus dikembangkan. Pemenuhan quality assurance, meningkatkan kredibilitas BPK, peningkatan kompetensi SDM, integritasi sistem informasi BPK dan penggunaan IT dalam menyongsong industry 4.0 dan implementasi big data.

Keberlanjutan terhadap program rencana pembangunan 5 tahun ke depan menetapkan anggaran yang sesuai dengan program BPK dan penggunaan optimal, efisien, dan efektif. Pengembangan lingkungan dan budaya organisasi, peningkatan kepatuhan pegawai terhadap kode etik, pengembangan nasional terhadap harapan pemangku kepentingan, pemutakhiran terhadap perkembangan lembaga audit internasional.

Selanjutnya, ini visi dan misi saya Pak, dalam yang saya identifikasi permasalahan tadi, yaitu visi saya melanjutkan menjadi pendorong pengelola keuangan yang akuntable untuk mencapai tujuan negara melalui pemeriksaan keuangan yang berkualitas dan bermanfaat. Kemudian dalam program pelaksanaan kerja saya nanti jika terpilih saya memiliki 3 misi, yaitu antara lain penguatan

kelembagaan, yang kedua meningkatkan hasil pemanfaatan pemeriksaan, yang ketiga pemeriksaan yang berkualitas.

Nah, ini program kerja yang saya akan lakukan. Selanjutnya kurang lebih seperti ini, penguatan kelembagaan. BPK saat ini belum optimal dalam pengembangan lingkungan, budaya organisasi dan sumber daya manusia dalam mendukung tugas dan fungsinya. Dengan kita ketahui bahwa tugas dan fungsi BPK itu sangat luar biasa dalam satu waktu melakukan audit keuangan negara, laporan keuangan, kinerja dan tentu audit terhadap peraturan perundang-undangan serta sistem pengendalian internal. Nah, hal inilah yang menjadi titik masalah BPK saat ini.

Kemudian bagaimana penguatan kelembagaan BPK, yaitu dengan pendidikan keberlanjutan, kemudian perekrutan SDM secara mandiri, meningkatkan program kerja terkait dengan pencegahan tindak pidana korupsi internal dan eksternal. Salah satunya dengan pembinaan dan penyuluhan intensif kepada masyarakat secara umum dan khususnya lembaga-lembaga Pemerintah. Merencanakan anggaran sesuai dengan program kerja pemeriksaan dan optimalisasi anggaran, serta meningkatkan hubungan internasional dengan lembaga-lembaga audit internasional.

Selanjutnya untuk meningkatkan hasil pemanfaatan pemeriksaan, peningkatan hubungan terhadap pemangku kepentingan dan penjabaran program kerja agar sesuai dengan pemahaman dan tugas dan kewenangan BPK oleh pemangku kepentingan. Menyusun program kerja sesuai dengan rencana pembangunan nasional 5 tahun kedepan. Nah, hal ini yang menjadi isu BPK saat ini program kerjanya tidak sesuai dengan program kerja pembangunan nasional yang telah dicanangkan program Pemerintah.

Kemudian memberikan pendapat kepada Pemerintah terhadap kebijakan jangka panjang pembangunan nasional. Dengan membentuk tim khusus untuk melakukan identifikasi hal tersebut, sebagai contoh pendapat kesiapan Pemerintah dalam penerapan 7 program SDG's 5 tahun periode yang kedua nanti. Kemudian melakukan optimalisasi kinerja BUMN dan BUMD untuk bersaing dalam industry nasional dan internasional dengan program audit kinerja dan tujuan tertentu serta memberikan pendapat terkait dengan kebijakan Pemerintah Pusat dan Daerah terkait dengan arah pengembangan BUMN dan BUMD.

Yang ketiga, pemeriksaan yang berkualitas, meningkatkan terhadap kualitas kontrol pemeriksaan dengan melakukan konvergensi standar pemeriksaan internasional. Nah, BPK selalu terlambat dengan adanya standar pemeriksaan internasional yang diterbitkan oleh Intosai. Pengembangan IT yang terintegrasi berbasis cloud data base dan meningkatkan penggunaan IT dan implementasi pemeriksaan dalam menyongsong industry 4.0.

Nah, hal ini saya lakukan kenapa? Karena selama ini data base di BPK contohnya tindaklanjut atas pemeriksaan. Nah, itu tidak digabung dalam satu sistem data base. Mungkin sistem pemeriksaan mereka sudah memiliki akan tetapi untuk data base pemeriksaan itu yang tidak di-*manage* tidak baik, sehingga juga nanti pemeriksaan bisa dilakukan seandainya di Indonesia ini banyak kepulauan sehingga

kabupaten atau kota-kota yang berjauhan dengan kantor perwakilan BPK bisa dilakukan audit dengan menggunakan sistem IT. Kemudian meningkatkan hubungan internasional dengan lembaga-lembaga audit internasional.

Mungkin itu yang dapat saya sampaikan Bapak dan Ibu sekalian.

Terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT:**

Terima kasih atas paparan yang telah disampaikan oleh saudara Defa Aulia Farhan, S.E., C.P.A.

Selanjutnya pendalaman saya persilakan saudara Nur Purnamasidi dari sayab kiri.

**F-PG (H. MUHAMAD NUR PURNAMASIDI):**

Terima kasih Pimpinan.

Bapak Defa Aulia Farhan, terima kasih atas paparannya. Saya singkat saja Pak, jadi terkait dengan pencapaian tujuan pembangunan nasional tentu salah satunya adalah bagaimana kemudian seluruh proses yang terjadi itu mendapatkan penilaian yang pasti dari BPK sebagai lembaga yang memeriksa pengelolaan keuangan negara. Cuma hari ini banyak fenomena yang dinyatakan baik oleh BPK tapi kemudian dikatakan salah oleh institusi lain. Misalnya dalam hal menilai kerugian negara, seringkali apa yang sudah diperiksa, dinilai oleh BPK oleh institusi lain, misalnya ada sebuah kasus oleh BPK dinyatakan *clear* tapi kemudian misalnya Kejaksaan menggunakan BPKP untuk melakukan kembali namanya kerugian negara. Jadi ini sering terjadi, karena itu saya ingin mendapatkan jawaban dari Bapak Defa Aulia Farhan, apakah kemudian setuju kalau kemudian kita bisa nyatakan bahwa hanya BPK satu-satunya institusi yang punya kewenangan untuk menghitung kerugian negara. Kalau ini bisa dilakukan saya yakin kepastian hukum terjadi dan kemudian para pihak juga akan lebih enjoy untuk kemudian melakukan proses pembangunan, sehingga ada proses ini pasti. Berarti kalau BPK menyatakan ini tidak rugi, maka ya itu relevan. Karena sering sekali sudah dianggap tidak rugi oleh BPK, tapi kemudian oleh institusi lain bisa nyatakan kerugian negara dan itu melanggar hukum.

Saya minta tanggapan Bapak ya, terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Terima kasih Pak Pur.

Silakan selanjutnya Bapak Michael Jeno.



**F-PDIP (Ir. G. MICHAEL JENO):**

Terima kasih Pimpinan.

**Pimpinan dan rekan-rekan Anggota Komisi XI DPR RI.**

Pak Defa, ini karena anda kandidat yang paling muda jadi saya nanya yang agak terkait dengan kondisi saat ini. tadi disinggung juga inikan ada perkembangan teknologi 4.0, IT sangat massif gitu katakanlah. Disini anda tadi memberikan sedikit ilustrasi bagaimana supaya dengan perkembangan teknologi informasi BPK bisa memanfaatkan itu. mungkin coba bisa diekslore sejauhmana yang anda bayangkan, mungkin Bapak Defa juga harus membayangkan kondisi *existing* di BPK hari ini, bagaimana *resources*nya, organisasinya siap atau tidak secara *cultural*, secara *culture*, orang-orangnya siap atau tidak.

Yang kedua, terkait dengan judulnya bahwa disini Bapak Defa mengaitkan dengan SDG's. SDG's inikan ada banyak ada 17 dan kebanyakan SDG's inikan kalau *common sense* inikan banyak yang *performance*, kinerja. Sementara kita tahu bahwa BPK hari ini salah satu yang menjadi isu adalah audit kinerjanya, artinya masih lemah it terkait dengan *resources* dan segala macam. Mungkin bisa diberikan elaborasi yang lebih jauh bagaimana anda membayangkan bahwa BPK ini kemudian membantu Pemerintah katakanlah seperti itu untuk mengaitkan *performance* daripada Pemerintah dikaitkan dengan 17 sasaran di SDG's itu, karena itu banyak sekali yang kualitatif, artinya kinerja, *policy*. Itukan banyak yang energi yang bersih katakanlah seperti itu, mengurangi ketimpangan, indeks quality, disparitas, dan segala macam. Bagaimana yang anda bayangkan BPK mengambil peran disitu.

Itu saja Pimpinan.

**KETUA RAPAT:**

Terima kasih.

Silakan yang terakhir Dr. Achmad Hatari.

**F-P. NASDEMM (Dr. ACHMAD HATARI, S.E., M.Si.):**

Pak Farhan, di halaman 18 Bapak Farhan buka. Karena keterbatasan anggaran BPK kemudian BPK melakukan revisi program, ini yang salah Pak. program itu sudah ditetapkan kecuali dihilangkan atau ditiadakan, tetapi yang direvisi itu tidak ada. Revisi itu hanya revisi kegiatan di dalam satu program tapi revisi program itu tidak ada dan kalau revisi kegiatan tidak perlu memerlukan persetujuan DPR RI. ini tambahan dari saya, itu saja Bapak Farhan.

Terima kasih.

## **KETUA RAPAT:**

Silakan direspon Bapak Farhan.

## **CALON ANGGOTA BPK RI (DEFA AULIA FARHAN, S.E., AK., C.A., C.P.A.):**

Baik, terima kasih.

Saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak Purnamasidi terkait dengan BPK memberikan clean opinion, namun misalkan ada beberapa lembaga lain atau institusi lain yang melakukan pelaksanaan dari pemeriksaan kerugian negara. Terus bagaimana pendapat saya, apakah setuju BPK satu-satu institusi kerugian negara seperti apa.

Nah, jadi memang kalau dilihat dari hasil review 2019 saya lihat itu tentang *legal frame work* bahwa BPK ini mempunyai kewenangan pemeriksaan keuangan negara salah satunya investigasi. Namun, ada beberapa institusi lain yang diperbolehkan. Nah, pada dasarnya sebenarnya investigasi atau audit kerugian negara itu memang harusnya dilakukan oleh supreme auditor Pak, sehingga BPK harus penuh di dalam Undang-Undang itu melaksanakan bahwa yang melaksanakan audit keuangan negara itu adalah BPK. Kenapa? Karena kalau dilihat dari strukturnya bahwa yang dilakukan oleh BPKP itu secara Undang-Undang itu berdasarkan Peraturan Presiden atau kemudian ada Peraturan Pemerintah tentang SPIP.

Nah, hal ini tentu dilihat dari lembaganya saja kalau seandainya dilakukan oleh APIP tentu tidak independent Pak, sehingga itu yang menyebabkan bisa ada perbedaan itu. Kemudian juga BPK harusnya dia diberikan penuh atau nanti di dalam rancangan revisi Undang-Undang tentang BPK perlu ada pasal bahwa tugas untuk menghitung kerugian negara itu wajib dilakukan oleh BPK, tidak ada institusi lain, sehingga tidak ada ketidakjelasan yang selama ini terjadi. Namun, biasanya hasil yang kita ditentang atau misalkan dilakukan sebagai contoh KPK melakukan pemeriksaan keuangan negara oleh BPKP. Nah, itu kan jadi bahan perdebatan, sedangkan BPK punya pendapat sendiri tentang hal itu. Itu yang menjadi polemik dan saya setuju bahwa saya setuju hanya BPK yang dapat melakukan perhitungan kerugian negara.

Kemudian terkait dengan pertanyaan Bapak Michael Jeno, perkembangan industry 4.0 bagaimana pendapat saya atau kita bayangkan saya jika saat ini BPK terkait dengan kemampuan koordinasinya seperti apa. Saya lihat bahwa sebenarnya BPK itu memiliki kemampuan, kenapa? Karena mereka sudah punya server itu sendiri Pak, mereka sudah mengembangkan server itu tapi memang implementasinya yang belum dilaksanakan. Memang saya tahu sekarang saat ini mereka sudah punya program pemeriksaan yang digagas oleh Bapak AJP setahu saya. Nah, itu mereka punya sistem pemeriksaan laporan keuangan yang dilakukan. Artinya, sebenarnya kalau dari kesiapan manajemen SDM-nya itu mungkin bisa siap, sampai seberapa besar kesiapannya tentu akan bertahap Pak, dengan kondisi yang ada misalkan seperti itu.

Nah, bagaimana mengelaborasi itu semua. Dengan kedisiplinan tentunya juga BPK harus memiliki IT struktur yang baik, kemudian mereka harus dibiasakan menggunakan teknologi itu. Sebagai contoh, email yang dilakukan oleh BPK sendiri sebagai auditor itu banyak menggunakan email pribadi. Nah, itu yang sebenarnya juga padahal disitu ada data keuangan negara, sehingga mungkin di kementerian lain juga begitu. Nah, itu yang harus mulai *culture* itu harus diubah, harus menggunakan email yang milik BPK itu sendiri tidak digunakan email-email pribadi, karena disitu ada data-data yang bersifat rahasia.

Kemudian tentang program 17 program SDG dalam membantu Pemerintah seperti apa.

#### **F-PDIP (INDAH KURNIA):**

Ijin Pimpinan, karena ini penting bagi saya.

Informasi tersebut valid ya? karena pada saat nanti kami melakukan rapat kerja dengan BPK itu menjadi masukan bagi kami untuk menyampaikan bahwa banyak sekali auditor yang menggunakan email pribadi untuk berinteraksi dengan audity itu hal yang tidak benar itu.

#### **CALON ANGGOTA BPK RI (DEFA AULIA FARHAN, S.E., AK., C.A., C.P.A.):**

Jadi begini Ibu, saya pernah bekerja dan untuk atas nama BPK kebetulan, memang terkadang kita itu melakukan email-emailan itu memang pada saat itu masih belum menggunakan emailnya kantor. Itu yang memang terjadi dan bisa saja Cuma saya tidak tahu hasil inikan harus dilakukan IT audit kalau kita mau melihat itu kebenaran, tapi kebanyakan seperti itu. Nanti coba bisa saja dikonfirmasi apakah sebatas itu dan bagaimana membuktikan bahwa penggunaan itu sudah sepenuhnya digunakan menggunakan email official.

Bagaimana BPK berperan dalam mengelaborasi atau melakukan memberikan pendapat. Nah, di dalam program saya itu foresight atau oversight yang akan dilakukan nanti, sehingga Pemerintah bisa mencapai kesiapan dalam menerapkan periode keduanya. Nah, itu salah satunya dengan memberikan pendapat terkait dengan kinerja-kinerja Pemerintah, kesiapan untuk mencapai 17 program SDG itu. Itu yang akan saya gunakan Pak.

Kemudian tentu pembuatan *setting policy* itu yang sifatnya foresight, misalnya penggunaan energi yang ramah lingkungan. Nah, di Indonesia ini masih menggunakan yang sifatnya energi tidak terbarukan. Mungkin BPK bisa saja memberikan rekomendasi itu atau pendapat itu terkait dengan kinerja Pemerintah dalam mengembangkan energi yang sifatnya terbarukan, seperti menggunakan kita sebenarnya sumber panas bumi kita itu sangat baik. Kemudian juga kita memiliki aset laut yang sangat luar biasa seperti nanti akan ada program Jokowi mungkin Presiden nanti kedepan yang akan menjabat itu juga terkait dengan nanti ada di RPJMN mereka yang visi dan misinya menyangkut tentang hal itu. Jadi itu Pak, yang mungkin dapat kami lakukan.

Kemudian terkait dengan pernyataan Bapak Hatari, benar bahwa program itu tidak direvisi akan tetapi mungkin dikurangi tanpa persetujuan DPR RI itu tidak perlu dilakukan. Jadi saya setuju Pak, jadi bukan program itu direvisi tapi menghemat anggaran dengan cara menggunakan anggaran sisa.

**F-P. NASDEMM (Dr. ACHMAD HATARI, S.E., M.Si.):**

Pada saat kita menganut anggaran berimbang dan dinamis artinya belanja harus disesuaikan dengan pendapatan. Nah, di saat kita menganut anggaran defisit dan surplus ini pemakaian istilah revisi ini tidak ada lagi pergeseran kegiatan di dalam satu program itu yang benar. Dan kalau pergeseran kegiatan di dalam satu program tidak perlu memerlukan persetujuan DPR RI.

Jadi kalau Bapak Farhan berbicara tentang penghematan drop saja kegiatan program yang bukan menjadi leading sector, selesai. Kenapa harus memaksakan diri kalau anggarannya terbatas.

**CALON ANGGOTA BPK RI (DEFA AULIA FARHAN, S.E., AK., C.A., C.P.A.):**

Baik Pak, memang begitu Pak. Nah, ini menarik juga terkait dengan keterbatasan anggaran yang dimiliki oleh BPK dan sumber dayanya. Nah, BPK itu sebenarnya bisa melakukan audit laporan keuangan berbarengan dengan audit kinerja. Nah, ini juga bisa melakukan menghemat anggaran tadi Pak, sehingga anggaran yang dibutuhkan itu tidak sesuai dengan pendapatan tadi, sehingga berimbang antara pendapatan dengan anggaran. Nah, hal ini yang nanti akan saya lakukan juga terkait dengan optimalisasi pengembangan lingkungan budaya itu.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Baik, Bapak dan Ibu yang terhormat.

Kita sudah bersama-sama mendengarkan respon atau tanggapan dari saudara Defa Aulia Farhan, S.E., C.P.A. atas pendalaman yang dilakukan oleh Bapak Michael Jeno, kemudian Bapak Purnamasidi dan Bapak Achmad Hatari. Dan beliau adalah kandidat terakhir untuk malam ini dan besok masih akan ada beberapa kandidat yang harus kita fit and propertest.

Sebelum menutup Rapat Dengar Pendapat Umum ini, saya persilakan kepada Bapak Farhan untuk berkampanye mungkin setengah menit, *closing statement*.

**CALON ANGGOTA BPK RI (DEFA AULIA FARHAN, S.E., AK., C.A., C.P.A.):**

Terima kasih Pak.

Jadi saya hadir disini bukan tanpa sebab Pak, sebenarnya di awal memang sudah muncul itu 32 nama, kemudian diakhir-akhir minggu lalu saya diundang fit and

propertest oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Kemudian saya hadir itu, kemudian muncul rekomendasi 15. Nah, itulah yang membuat saya ya *alhamdulillah* saya diberikan kesempatan berbicara atau memberikan pendapat di depan Bapak dan Ibu sekalian. Artinya, proses ini sehingga berjalan menjadi terbuka. Yang awalnya selama ini saya tidak mengerti, tidak tahu proses perpolitikan di DPR RI karena saya bukan orang politik. Akan tetapi secara prinsip akhirnya berdasarkan Undang-Undang bahwa yang lolos administrasi itu bisa melanjutkan proses untuk Rapat Dengar Pendapat fit and propertest.

Nah, harapannya saya sebagai anak muda, sebagai mungkin wakil yang paling muda disini. Mudah-mudahan saya bisa menjadi wakil dari para yang muda ini agar BPK kedepannya semakin baik, semakin professional, semakin independent dan semakin berintegritas.

Karena itu, saya memiliki *closing statement*, korupsi itu merusak tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara Bapak dan Ibu sekalian. Oleh karena itu, dengan kemampuan dan segala daya upaya saya, saya akan ikut andil dalam melakukan pemberantasan korupsi ini dan untuk tentunya kemajuan Negara Republik Indonesia.

Demikian saya sampaikan.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

#### **KETUA RAPAT:**

**Bapak dan Ibu yang terhormat.**

Demikianlah Rapat Dengar Pendapat Umum pada malam hari ini, untuk itu rapat saya tutup, *alhamdulillahirabil'amin*.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

**(RAPAT DITUTUP PUKUL 22.25 WIB)**

**Jakarta, 23 September 2019**  
**a.n. Ketua Rapat**  
**Sekretaris Rapat**

ttd

**Drs. Urip Soedjarwono**  
**NIP. 19620521 198203 1 001**